

MUSTARI BOSRA, dkk.



MENAPAK JEJAK MENATA LANGKAH

**Sejarah Gerakan dan Biografi Ketua-ketua
Muhammadiyah Sulawesi Selatan**

 **SUARA
MUHAMMADIYAH**

MUSTARI BOSRA dkk.

MENAPAK JEJAK MENATA LANGKAH

Sejarah dan Biografi Ketua-ketua

MUHAMMADIYAH
SULAWESI SELATAN

SUARA MUHAMMADIYAH

**Menapak Jejak Menata Langkah
Sejarah dan Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah
Sulawesi Selatan**

Penulis : Mustari Bosra (Ketua Tim Penulis)
Hadisaputra
Kasri Riswadi
Zulfikar Hafidz

Editor : Mukarramah Mustari
Layout : padangatine

Desain Sampul : Roslani Husein

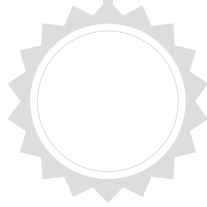
Penerbit : Suara Muhammadiyah
Jl. KHA. Dahlan 43 Yogyakarta 55122
Telp. (0274) 376955 Fax. (0274) 411306
E-mail: penerbitsm@gmail.com
www.suaramuhammadiyah.com

Hak cipta dilindung undang-undang. Dilarang mengutip,
memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau
seluruh isi tanpa izin penerbit.

Cetakan Pertama: Desember 2015

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-9477-66-1



Kata Pengantar

Alhamdulillah, syukur dan puji tim penulis persembahkan ke hadirat Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang telah dianugerahkan-Nya. Salah satu di antara nikmat-Nya yang tak terhitung itu ialah terselesaikannya konsep buku yang berjudul “Menapak Jejak Menata Langkah Sejarah dan Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan” ini.

Ide untuk meneliti dan menulis buku ini sesungguhnya telah muncul sejak tahun 2001, saat itu Ketua Tim Penulis buku ini ditunjuk menjadi Ketua Lembaga Seni Budaya Pustaka dan Dokumentasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan periode 2000-2005. Namun ketika itu, penulis masih sibuk meneliti dan menulis disertasi untuk penyelesaian studi di Program Pasca Sarjana (S.3) Universitas Indonesia, maka ide penelitian dan penulisannya tersebut akhirnya tertunda.

Setelah Ketua Tim penulis merampungkan studi S3, pada bulan November 2003, ide penulisan buku ini muncul kembali. Oleh karena itu, pada bulan Januari 2004, rencana penelitian dan penulisan buku ini diajukan dalam rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Semua peserta rapat menyetujui asal tidak menggunakan dana Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Keputusan rapat tersebut dapat dimaklumi, apalagi ketika itu, untuk membiayai biaya operasional kantor pun, PWM mengalami kesulitan. Ketua Tim Penulis saat itu baru saja ditunjuk menjadi Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menggantikan Almarhum Drs. H. Abdul Rasyid Abdullah.

Untuk mewujudkan rencana penulisan buku ini, penulis pun berusaha mengumpulkan bahan-bahan dengan jalan mewawancarai beberapa orang yang dianggap dapat memberikan informasi. Dan, untuk dua orang mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang masih hidup saat itu, yakni KH. Djamaluddin Amien, B.A. dan Drs. KH. Nasruddin Razak penulis memintanya membuat otobiografi. Dalam proses pencarian data lebih lanjut tentang riwayat hidup ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, penulis terbantu oleh beberapa catatan lepas Drs. Muhammad Yamin Data, mantan ketua Majelis Pustaka Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan periode 1995-2000. Sedangkan, penulisan sejarah kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang dituangkan

dalam bab III buku ini, terbantu oleh hasil penelitian yang telah dituangkan dalam salah satu sub bab disertasinya yang berjudul “Tuangguru, Anrongguru, dan Daengguru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942.”

Sebagian naskah yang ada dalam buku ini sempat direncanakan terbit pada tahun 2005, namun kembali mengalami sejumlah kendala. Rencana penerbitan naskah ini kembali mencuat pada pelaksanaan Workshop Penulisan Sejarah Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Parepare, bulan November 2014. Setelah workshop tersebut, dibentuklah tim penulisan Sejarah Muhammadiyah Sulsel, dimana saya diminta sebagai Ketua Tim Penulis, dengan beranggotakan tim dari Majelis Pustaka dan Informasi PW Muhammadiyah Sulsel periode 2010-2015. Naskah yang saya miliki kemudian disempurnakan dengan penelusuran arsip-arsip Muhammadiyah Sulsel, baik yang diperoleh dari Badan Arsip Provinsi Sulsel, maupun arsip yang masih tersimpan di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel. Naskah ini juga dilengkapi dengan biografi KH. Bahrudin Pagim dan Dr. H. Muhammad Alwi Uddin, yang belum sempat saya tulis sebelumnya.

Melalui pengantar ini, tim penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, khususnya Ketua Dr. H. Muhammad Alwi Uddin, yang tak kenal lelah menagih, dan bersedia memfasilitasi penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami haturkan bagi segenap Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-

Sulsel, khususnya yang sempat berpartisipasi dalam Workshop Penulisan Sejarah Muhammadiyah, tahun 2014 lalu. Buku ini adalah salah satu perwujudan tindak lanjut pertemuan tersebut. Sesudah buku ini, diharapkan seluruh PDM se-Sulsel dapat menerbitkan buku sejarahnya masing-masing, secara lebih utuh, walaupun sekilas sejumlah PDM telah mendapatkan ulasan singkat melalui buku ini. Secara teknis, buku ini juga takkan lahir tanpa dukungan sejumlah ananda crew Majalah Khittah, seperti Akhmad Dani, Muhammad Basri Lampe, dan Rahmawati Idrus. Dengan bantuan mereka, sejumlah dokumen berhasil ditemukan, sejumlah naskah juga telah dinarasikan ulang dengan sokongan anak-anak muda penghuni setia Pusat Dakwah Muhammadiyah ini.

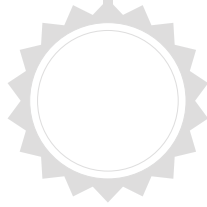
Meski demikian, buku ini masih jauh dari kesempurnaan, maka masukan dari berbagai pihak masih sangat diharapkan. Akhirnya, kepada penerbit dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ini, diucapkan terima kasih.

Makassar, Desember 2015

Wassalam

Ketua Tim Penulis

Mustari Bosra



Kata Sambutan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(١٩)

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik” Q.S. Al-Hasyr (59) ayat 18 dan 19.

Firman Allah tersebut diatas, menimbulkan pemikiran sekaligus kesadaran akan waktu, ruang, “sadar historis”, “sadar masalah”, “sadar nilai”, dan “sadar diri”. Jika kita tidak menghubungkan diri dengan masa lalu, dan seolah-olah memisahkan diri atau tidak menyadari hari ini dan hari esok, maka akan terjadi, kita tidak cukup siap dan kuat menghadapi keadaan masa kini dan tidak cukup berani menuju masa depan. Kita hanya terseret arus jalannya waktu dan terkungkung dalam jebakan matra-matra ruang.

Sejarah itu penting dan akan tetap penting, asal saja manusia sadar bahwa merekalah yang dapat membuat sejarah. Perintisan hari depan pada hakikatnya bersumber dari perenungan sejarah dan hidup bersejarah. Dengan cara ini sejarah memberikan kekuatan pada siapa saja yang menolak untuk pasrah menghadapi apa yang tak terelakkan dalam menapak suatu jalan.

Menurut Soedjatmoko, pandangan ke masa depan merupakan ciri penting manusia. Tindakannya di masa kini sekaligus dipengaruhi oleh penglihatannya ke depan, harapan dan kesadaran masa lampau. Ia menegaskan, bahwa sadar akan masa lampau, berarti kita bebas dalam kekinian dan bertanggung jawab untuk menentukan “ke-akan-an”.

Pendasaran garis kebijakan Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah tahun 1978-1981 pada Q.S. (59) Al-Hasyr ayat 18 dan 19 diatas, adalah pilihan atas dasar kesadaran historis. Kesadaran bahwa hidup dan kehidupan peseorangan maupun organisasi yang baik ia-

lah yang berdasar hasil satu penelitian/evaluasi pekerjaan masa lampau, serta pengamatan/ estimasi dalam menghadapi perkembangan masa datang dengan kemampuan melaksanakannya.

Sepanjang yang saya ketahui, sejarah Muhammadiyah Sulawesi Selatan belum banyak ditulis. Bahkan, biografi tokoh Muhammadiyah Sulsel sampai saat ini belum pernah ditulis dan diterbitkan.

Tradisi penulisan biografi memang mulai tampak semarak pada masa Orde Baru. Pada masa sebelumnya, penulisan biografi masih sangat langka. Akibatnya, banyak tokoh pemimpin yang pernah berjasa bagi bangsa dan negara terlupakan begitu saja. Jelas, Hal itu merupakan kerugian besar bagi masyarakat kita dewasa ini maupun yang akan datang.

Mengapa penulisan biografi dan otobiografi ini kurang mendapat perhatian? Paling tidak karena tiga sebab. Pertama, tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia, umumnya memang merupakan tradisi sejarah lisan. Riwayat hidup dan kisah kepahlawanan seseorang pada umumnya hanya direkam secara lisan kemudian dituturkan secara turun temurun. Kedua, adanya “budaya malu” di kalangan tokoh kalau biografinya ditulis, lebih-lebih kalau dia sendiri yang menulis otobiografinya. “*Nakana bawang taua, niangka dudu kalenta* (jangan sampai orang mengira bahwa kita terlalu mengangkat diri kita). Demikianlah kira-kira ungkapan (dalam bahasa Makassar) seorang tokoh yang enggan dan malu kalau ditulis biografinya atau menulis otobiografinya.

Sebagai hamba Allah yang *mukhlisin*, keengganan seorang pemimpin Islam untuk “menonjolkan diri” tentu dapat dimaklumi. Namun, dalam rangka pewarisan nilai-nilai kejuangan dan nilai-nilai keikhlasan itu sendiri, biografi seorang pemimpin Islam tentu sangat diperlukan.

Dalam spirit pewarisan nilai-nilai kejuangan dan nilai-nilai keikhlasan itulah sehingga penerbitan buku “Menapak Jejak Menata Langkah Sejarah Muhammadiyah dan Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulsel (1931-2015)” menjadi penting.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel memberikan apresiasi kepada Dr. KH. Mustari Bosra, MA (Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulsel) dan Hadisaputra (Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PWM Sulsel) bersama timnya (Kasri Riswadi dan Zulfikar Hafid), yang telah merampungkan penulisan buku yang telah tertunda selama dua periode.

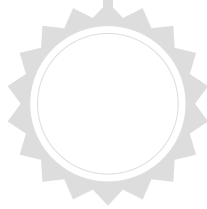
Semoga penerbitan buku ini dapat menjadi bahan refleksi bagi aktivis Muhammadiyah masa kini maupun di masa mendatang. Buku ini dapat pula dijadikan rujukan bagi para peneliti dan masyarakat luas yang tertarik mengkaji eksistensi persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, sejak berdiri hingga tahun 2015. *Jazaakumullahu Khaeral Jazaa’i*.

Makassar, Desember 2015

Wassalam

Ketua PW Muhammadiyah Sulsel

Dr. H. Muhammad Alwi Uddin, M.Ag.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Kata Sambutan PWM Sulawesi Selatan	ix
Daftar Isi	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
SULAWESI SELATAN MENJELANG KEHADIRAN MUHAMMADIYAH	11
BAB III	
KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH CELEBES SELATAN.....	23
BAB IV	
PEMBENTUKAN MUHAMMADIYAH DI DAERAH- DAERAH	37

• Muhammadiyah di Gowa	38
• Muhammadiyah di Jeneponto	48
• Muhammadiyah di Bantaeng	49
• Muhammadiyah di Bulukumba.....	52
• Muhammadiyah di Selayar	61
• Muhammadiyah di Sinjai	62
• Muhammadiyah di Bone	65
• Muhammadiyah di Maros	67
• Muhammadiyah di Pangkep	68
• Muhammadiyah di Barru	70
• Muhammadiyah di Parepare	71
• Muhammadiyah di Rappang	77
• Muhammadiyah di Pinrang	80
• Muhammadiyah di Sengkang-Wajo	84
• Muhammadiyah di Soppeng	90
• Muhammadiyah di Palopo	93
• Muhammadiyah di Tana Toraja	96
• Muhammadiyah di Enrekang	101

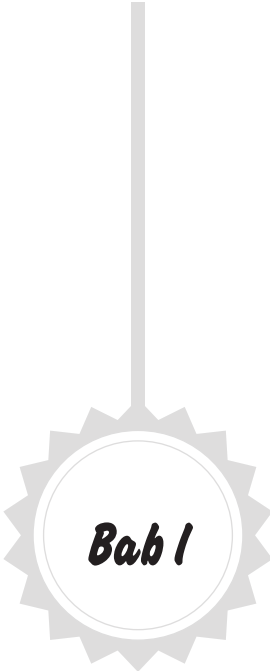
BAB V

BIOGRAFI KETUA-KETUA MUHAMMADIYAH

SULAWESI SELATAN (1931-2015).....	103
• KH. ABDULLAH (<i>Consoel Moehammadijah Celebes Selatan 1931-1938</i>)	105
• HAJI ANDI SEWANG DAENG MUNTU (<i>Consoel Moehammadijah Celebes Selatan 1938-1957</i>).....	110
• H. QURAI SY DJAILANI (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1957—1966).....	116

- H. ABDUL WAHAB RADJAB (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1966—1968)..... 122
- KH. MUHAMMAD AKIB (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1968-1971) 129
- K.H. ABDUL DJABBAR ASHIRY (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1971 – 1975)..... 132
- H. AHMAD MAKARASU AMANSYAH (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1975—1978)..... 146
- DRS. MUHAMMAD SALEH HAMDANI (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1977-1980)..... 163
- K.H. MUHAMMAD SANUSI MAGGU (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1980-1984) 170
- K.H. DJAMALUDDIN AMIEN (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 1985—2000)..... 181
- Drs. K.H. NASRUDDIN RAZAK (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 2000—2005)..... 196
- Drs. K.H. BAHARUDDIN PAGIM (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan Periode 2005-2010) 202
- Dr. H. MUHAMMAD ALWI UDDIN, M.Ag. (Ketua Muhammadiyah Sulsel 2010-2015) 214

BAB VI	
PENUTUP.....	231
Daftar Pustaka.....	235
Profil Penulis.....	241



Bab I

PENDAHULUAN

Kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan lahirnya gerakan pemurnian dan pembaruan Islam di beberapa belahan dunia, seperti Mesir, India, dan Arab Saudi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 berpengaruh terhadap kebangkitan umat Islam di Nusantara. Sejak akhir abad ke-19, di Sumatera Barat muncul suatu gerakan pemurnian dan pembaruan Islam yang dipelopori oleh, antara lain Haji Syekh Ahmad Khatib, Syekh Thahir Jalaluddin, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Abdul Karim Amrullah, dan Haji Abdullah Ahmad. Mereka dikenal sebagai Kaum Muda (Abdullah, 1971). Pada awal abad 20, di Jawa, beberapa gerakan pemurnian dan pembaruan Islam lahir, seperti

Jam'iyatul Khair, Persyarikatan Muham-madiyah, dan Persatuan Islam (Noer, 1996).

Di antara gerakan pemurnian dan pembaruan Islam yang lahir di Jawa tersebut, Persyarikatan Muhammadiyah adalah yang paling cepat tersebar dan paling banyak memperoleh pengikut di berbagai pelosok nusantara. Hanya dalam tempo lebih kurang dua puluh tahun setelah didirikan, persyarikatan ini telah membuka cabang di hampir seluruh wilayah nusantara. Di Sulawesi Selatan, Persyarikatan Muhammadiyah telah berdiri sejak tahun 1926.

Sebagai gerakan Islam modernis, kehadiran Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan sosial dan kultural umat Islam. Betapa tidak, umat Islam Sulawesi Selatan yang telah terbiasa dengan praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi dan adat-istiadat pra-Islam, tiba-tiba digugat oleh para anggota dan pimpinan Muhammadiyah yang secara sistematis melancarkan gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Mereka melarang dan mencela umat Islam yang melakukan bidah, takhayul, khurafat, dan kemusyrikan. Alasan untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran agama yang murni, yang bersumber dari Alquran dan Sunah dengan pemahaman rasional merupakan dasar gugatan Muhammadiyah tersebut.

Berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah yang di-sahkan dalam Muktamar ke-45, tahun 2005, di Malang, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, *da'wah amar ma'ruf nahi munkar*, dan tajdid, bersumber pada

Alquran dan *Al-sunnah*, berasas Islam, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta, bermaksud dan bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab I, Pasal 1, Ayat 2 dan 3, serta Bab II, Pasal 2).

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid yang diwujudkan dalam bentuk usaha, program, dan kegiatan yang meliputi penanaman keyakinan; pendalaman dan perluasan pemahaman; meningkatkan pengamalan; serta penyebarluasan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, Muhammadiyah juga memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya; memperteguh iman, mempergiat ibadah; meningkatkan semangat jihad; mempertinggi akhlak; meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, dan amal saleh lainnya; meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia. Selain itu, diusahakan pula untuk memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan; mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; serta mempergiat penelitian; memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; meningkatkan kualitas kesehatan

dan kesejahteraan masyarakat; memelihara, mengembangkan, melestarikan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan; mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri; memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan; mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk menyukseskan gerakan; mengupayakan penegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat; dan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah (Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab II, Pasal 3).

Oleh karena demikian tinggi maksud dan tujuan yang hendak dicapai dan demikian luas usaha yang telah, sedang, dan akan dijalankan, maka Muhammadiyah menata struktur organisasinya sedemikian rupa, sehingga meliputi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara partikel, susunan organisasi Muhammadiyah meliputi pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting (Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab III, Pasal 5).

Di setiap jenjang organisasi tersebut, terdapat pimpinan secara kolektif yang disebut sebagai: Pimpinan Pusat untuk Muhammadiyah tingkat pusat, yang kepemimpinannya meliputi seluruh wilayah, daerah, cabang dan ranting yang ada di Indonesia; Pimpinan

Wilayah untuk Muhammadiyah tingkat provinsi yang kepengimpinannya meliputi seluruh daerah, cabang, dan ranting yang ada dalam wilayahnya; Pimpinan Daerah untuk Muhammadiyah tingkat kabupaten dan kota yang kepengimpinannya meliputi seluruh cabang dan ranting yang ada dalam daerahnya; Pimpinan Cabang untuk Muhammadiyah tingkat cabang yang merupakan suatu kesatuan ranting yang kepengimpinannya meliputi seluruh ranting yang ada dalam cabangnya; Pimpinan Ranting untuk tingkat ranting yang kepengimpinannya meliputi seluruh anggota yang ada dalam rantingnya (Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab IV, Pasal 7—11).

Untuk membantu pimpinan persyarikatan, di semua jenjang pimpinan persyarikatan—selain ranting—dibentuk unsur pembantu pimpinan yang disebut majelis. Kecuali itu, di tingkat pusat, wilayah, dan daerah, terdapat unsur pembantu pimpinan lainnya yang disebut lembaga (Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab V, Pasal 14—17).

Secara horisontal, Muhammadiyah menata organisasinya dengan jalan membentuk organisasi otonom (ortom), yaitu: ortom khusus Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Gerakan Seni Beladiri Tapak Suci Putra Muhammadiyah (Tapak Suci), dan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (HW).

Meskipun memiliki hak otonomi yang sangat luas, ortom-ortom tersebut harus sesuai dengan asas, mak-

sud, dan tujuan Muhammadiyah; anggaran dasarnya harus disahkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah; dan tetap berada di bawah pembinaan dan bimbingan Muhammadiyah. Susunan organisasi, demikian pula jenjang kepengimpinannya, pada umumnya mengikuti susunan organisasi dan jenjang kepemimpinan Muhammadiyah, yaitu: pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting.

Dalam melaksanakan dakwah, *amar ma'ruf*, dan *nahi munkar*, Muhammadiyah mendirikan: sarana ibadah, berupa masjid dan musala; lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, berupa *bustanul athfal*, sekolah, madrasah, pesantren, akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas; sarana kesehatan, seperti balai pengobatan, apotek, rumah bersalin, rumah sakit bersalin, dan rumah sakit; lembaga sosial, seperti binaan keluarga, panti asuhan, dan panti jompo; lembaga ekonomi, seperti toko, koperasi, *baitul maal wa tamwil*, dan bank perkreditan rakyat; dan sarana-sarana serta lembaga-lembaga lainnya. Oleh Muhammadiyah, sarana-sarana dan lembaga-lembaga seperti itu disebut amal usaha.

Oleh karena Muhammadiyah, ortom-ortom, dan amal-amal usahanya merupakan satu kesatuan yang utuh, maka seluruh gerakan dakwah, *amar ma'ruf*, dan *nahi munkar* yang dilakukan pimpinan, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah, demikian pula pimpinan dan anggota ortom-ortomnya, serta pengurus amal-amal usahanya, dari pusat sampai ke ranting, di semua jenjang, di semua sektor, di semua lini, di semua tem-

pat, dan pada semua waktu, keseluruhannya mengarah kepada maksud dan tujuan, sebagaimana tersebut di depan. Untuk itu, maka Muhammadiyah, sangat memperhatikan hal yang disebutnya sebagai “tertib organisasi” dan “tertib administrasi.”

Dilihat dari segi jumlah amal usahanya, Muhammadiyah adalah organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Sekadar sebagai gambaran sepiantas, hingga tahun 2015, Muhammadiyah telah memiliki amal-amal usaha, berupa: perguruan tinggi sekitar 172 buah, terdiri atas universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi; sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah tidak kurang dari 10.000 buah, terdiri atas sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan seterusnya. Amal usaha tersebut tersebar di 33 wilayah, di lebih dari 300 daerah, dan di lebih dari 2000 cabang.

Keberhasilan Muhammadiyah menempatkan diri sebagai organisasi terbesar, sebagaimana terlukiskan itu, tentunya tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangannya yang memang sudah cukup lama. Secara keseluruhan, sejak didirikan sampai saat ini, Muhammadiyah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, meskipun di antara masa yang panjang itu terdapat juga masa-masa mandek bahkan masa surut.

Pada tahun 1912, Muhammadiyah hanya ada di daerah Yogyakarta; tahun 1919 memiliki 3 cabang; tahun 1921 berkembang menjadi 7 cabang; tahun 1922

menjadi 15 cabang yang semuanya berada di Jawa. Tahun 1927 menjadi 176 cabang dan sudah tersebar di beberapa daerah di luar Jawa; satu di antara cabang-cabang tersebut terdapat di Makassar, Celebes Selatan.

Berawal dari Cabang Makassar inilah, Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berkembang menjadi satu konsulat pada tahun 1931, kemudian menjadi daerah pada tahun 1960, dan akhirnya menjadi wilayah sejak tahun 1978 hingga saat ini.

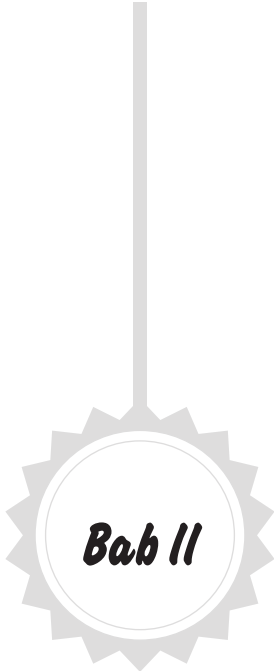
Sebagaimana halnya di tempat lain, Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, juga membina bermacam-macam amal usaha, seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Menurut data yang diperoleh dari Pimpinan Wilayah, Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Muhammadiyah Sulsel terdiri atas 28 daerah, 163 cabang, dan tidak kurang dari 500 ranting.

Perkembangan dalam bidang organisasi sebagaimana tergambar di atas, tentunya dibarengi pula dengan pengembangan aktivitas dan perluasan amal usahanya. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak saja dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak dalam bidang tajdid, tablig, dan tarjih, tetapi ia juga dikenal sebagai organisasi sosial-kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi, dan sebagainya. Barangkali, dari perspektif amal usaha dan aktivitasnya inilah sehingga Nakamura (1982: x) menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan serba wajah. Muhammadiyah tercatat sebagai organisasi keagamaan di Departemen Agama, tercatat sebagai organisasi sosial

di Departemen Sosial, dan tercatat sebagai organisasi pendidikan dan kebudayaan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Syaifullah, 1997:1—2).

Tidak banyak warga muhammadiyah yang mengetahui sejarah awal perkembangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Padahal, keberadaannya dan kebesarannya sebagaimana disaksikan sekarang tidak dapat dipisahkan dari perkembangannya pada masa lalu. Oleh karena itu, buku kecil ini ditulis dengan berusaha menjawab dua permasalahan utama. Masalah pertama ialah: bagaimana kelahiran dan perkembangan awal Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan? Masalah kedua ialah bagaimana biografi singkat para tokoh yang pernah menjadi ketua Muhammadiyah di Sulawesi Selatan?

Sebagai pembahasan sekaligus jawaban terhadap kedua pertanyaan utama tadi, maka disusunlah “Sejarah dan Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan” dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi pengantar tentang pentingnya penulisan buku ini. Bab II menggambarkan keadaan Sulawesi Selatan menjelang kehadiran Muhammadiyah, Bab III menguraikan proses kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah Celebes Selatan. Bab IV memuat proses pembentukan Muhammadiyah di daerah-daerah. Bab V mengulas Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, dan Bab VI Penutup, sebagai penyimpul atas ulasan terdahulu.



Bab II

SULAWESI SELATAN MENJELANG KEHADIRAN MUHAMMADIYAH

Untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang Sulawesi Selatan, penelusuran sejarah mesti dimulai dari masa sebelum Islam, itupun harus dikaitkan dengan kawasan lain di nusantara ini. Perlunya Sulawesi Selatan dikaitkan dengan kawasan lain karena dua alasan. Pada satu sisi dimaksudkan sebagai pembandingan, di sisi lain karena Sulawesi Selatan merupakan satu mata rantai di antara mata rantai kesatuan Nusantara.

Sebagai satu provinsi, Sulawesi Selatan baru terbentuk pada tahun 1964, tetapi sebagai satu kesatuan budaya, Sulawesi Selatan sudah terbentuk sejak berabad-abad yang lalu. Menurut Mattulada (1998: 24), penduduk Sulawesi Selatan ini, pada awalnya hanya berasal dari satu persekutuan kaum, kemudian menyebar hingga membentuk empat suku etnik, yaitu: Bugis, Toraja, Makassar dan Mandar. Dia memperkirakan bahwa persekutuan kaum yang paling awal di Sulawesi Selatan terdapat di kawasan utara Pantai Teluk Bone, di daerah yang sekarang bernama Luwu. Dari tempat itu, terjadi pemekaran jumlah warga dan masing-masing memilih jalan persebarannya. Mereka yang memilih ke utara dan barat, ke arah dataran tinggi membentuk etnik *to riaja* (orang gunung) sedangkan yang menetap di pantai menyebut diri mereka *to luwu* (orang laut). Persebaran selanjutnya ke arah timur dan selatan sepanjang pesisir Teluk Bone yang kemudian membentuk persekutuan dan menyebut diri mereka *to wugi*. Di pesisir selatan dan sepanjang pesisir barat Selat Makassar, mulai dari wilayah Onto (sekarang Bantaeng) hingga ke Siang (sekarang Pangkajene Kepulauan) dihuni kelompok *tu mangkasara*. Lebih ke utara lagi, sepanjang pantai Selat Makassar bermukim kelompok kaum yang kemudian mengembangkan diri menjadi *tu mandara*.

Suku etnik utama Sulawesi Selatan tersebut kemudian membentuk ciri-ciri kekhususan masing-masing yang dibangun melalui hasil pengalaman dalam kehidupan kelompok. Dalam perjalanan selanjutnya,

masing-masing memilih kedekatannya antara satu sama lainnya. Bugis (termasuk Luwu) dan Toraja saling mendekati dalam kehidupan sosial budaya, sehingga dengan menyebut Bugis cukup mewakili keduanya. Makassar dan Mandar saling mendekati dalam kehidupan sosial budaya sehingga dengan menyebut Makassar cukup terasa mewakili keduanya. Bugis-Makassar pada akhirnya berkembang menjadi identitas yang diterima mewakili keempat suku etnik utama tersebut (Mattulada, 1998:70). Untuk itu, penggunaan istilah Bugis-Makassar tidak hanya tertuju kepada suku etnik Bugis dan Makassar saja, tetapi meliputi keempat suku etnik yang ada di Sulawesi Selatan.

Terlepas dari benar tidaknya analisis Mattulada di atas, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa sebelum Islam datang, kerajaan besar di Sulawesi selatan ini telah dipersatukan melalui mitos *lagaligo*. Sulawesi Selatan kemudian lebih dipersatukan lagi melalui penyebaran agama Islam.

Meskipun Islam belum sepenuhnya berhasil mengubah tatanan sosial budaya masyarakat Sulawesi Selatan, namun kefanatikan mereka memeluk Islam diakui para sejarawan. Bonneff (1983:228) misalnya, telah menyatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan menganggap Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat (daerah Sunda) sebagai tempat penganut Islam yang sangat kuat.

Islam masuk ke Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17, satu waktu yang sangat terlambat dibanding dengan Sumatera, Jawa, dan Maluku. Menurut *Lontara*

Patturioloanga ri Tugowaya, Raja Gowa menerima Islam pada tahun 1605. Hal ini diperkuat oleh *Lontara Sukkuna Wajo* yang menjelaskan bahwa ketika Datoq Ri Bandang, bersama Datoq Ri Patimang, dan Datoq Ri Tiro datang ke Gowa pada tahun 1603. Mereka belum berhasil meng-Islam-kan Raja Gowa. Ketika itu, Raja Gowa menyarankan kepada mereka untuk terlebih dahulu pergi ke Luwu, sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Atas saran dari Raja Gowa itulah, mereka bertiga pergi ke Luwu. Di sana, pada tahun 1603 mereka berhasil meng-Islam-kan Raja Luwu La Pattiware Daeng Parabbung. Dua tahun setelah Raja Luwu menerima Islam, Dato ri Bandang kembali ke Gowa bermak-sud meng-Islam-kan Raja Gowa. Akan tetapi, karena Raja Gowa masih sangat muda, Datoq ri Bandang dianjurkan lebih dahulu mengajak Raja Tallo. Setelah Raja Tallo mengiyakan, maka Raja Gowa bersama dengan Raja Tallo pun secara bersama-sama menerima Islam.

Berbeda dengan Raja Luwu yang menerima Islam tidak secara demonstratif; tidak secara radikal mengubah kerajaan menjadi kerajaan Islam; dan tidak memaksakan agama Islam kepada rakyatnya; Raja Gowa yang masih muda dan berjiwa pemuda itu menerima Islam secara demonstratif, dan atas persetujuan *Bate Salapanga*, Raja Gowa mengubah kerajaannya menjadi kerajaan Islam dan “memaksa” rakyatnya memeluk Islam, sehingga tidak seorang pun rakyatnya yang tidak mengaku muslim.

Persoalan kemudian timbul karena Raja Gowa bukan hanya bermaksud meng-Islam-kan rakyat yang diperintahnya secara langsung, melainkan juga rakyat raja-raja dari kerajaan yang sudah takluk kepadanya seperti kerajaan-kerajaan di Binamu, Bantaeng dan Sinjai, kerajaan-kerajaan di Maros, Pangkajene dan Barru, dan kerajaan-kerajaan yang berada dalam pengaruhnya seperti Bone, Wajo, Soppeng, Sidenreng, dan lain-lain.

Setelah kerajaan Gowa menerima Islam, atas alasan bahwa ada perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di kawasan Sulawesi Selatan bahwa “siapa yang lebih dahulu menerima kebajikan, maka ia wajib menyebarkan kebajikan itu kepada kerajaan lainnya,” maka Gowa kemudian mendakwakan dan bahkan “memaksakan” pula agama Islam kepada raja dan rakyat di tanah Bugis. Dengan menggunakan perjanjian tersebut sebagai perisai, diperangilah Soppeng pada tahun 1609; Wajo pada tahun 1610; dan akhirnya Bone pada tahun 1611.

Berbeda dari kerajaan-kerajaan Bugis, kerajaan-kerajaan Mandar sejak sebelum Islam sudah takluk ke Gowa. Oleh karena itu, islamisasi di daerah itu tidak berlangsung dengan kekerasan. Bersamaan atau segera setelah kerajaan-kerajaan Bugis diperangi, Gowa pun berusaha meng-Islam-kan kerajaan-kerajaan Mandar secara damai melalui mengirim mubalig-mubalig ke sana.

Sejak saat itu (awal abad ke-17), dapatlah dikatakan bahwa Islam telah merata diterima oleh seluruh penduduk Sulawesi Selatan, sebab yang belum ber-

hasil di-Islam-kan hanyalah penduduk yang berdiam di daerah yang jauh ke pedalaman, seperti di daerah pegunungan Tanah Toraja dan Mamasa. Terabaikannya daerah-daerah tersebut mungkin disebabkan oleh faktor alamiah dan faktor politis. Secara alamiah, daerah-daerah tersebut sangat sulit dijangkau dan secara politis, kerajaan Gowa sebagai pemimpin islamisasi merasa tidak terlalu berkepentingan, karena di daerah-daerah tersebut tidak ada kesatuan politik berupa kerajaan besar yang berpengaruh.

Di kemudian hari, sejak akhir abad ke-19, daerah-daerah yang belum sempat di-Islam-kan itu justru menjadi sasaran kristenisasi oleh para Zending Katolik dan Misionaris Protestan yang membonceng dan menumpang pengaruh serta mendapatkan berbagai macam fasilitas dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Di Sulawesi Selatan, Belanda yang diwakili VOC telah bercokol dan menguasai beberapa daerah sejak ditanda-tanganinya Perjanjian Bungaya pada tahun 1667 yang menjadi pertanda berakhirnya Perang Makassar, yakni perang antara Sultan Hasanuddin di satu pihak dengan Arung Palakka bersama Spelman di pihak lain. Sejak saat itu, proses penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan yang semakin hari semakin mantap dimulai. Hingga pada akhirnya, melalui Perang Pasifikasi, seluruh Sulawesi Selatan ditaklukkan dan diperintah secara langsung. Dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Gowa yang waktu itu dirajai oleh Makulau Karaeng Lembang Parang dan Bone yang waktu itu dirajai oleh La Pawawoi Karaeng Sigeri dibubarkan

setelah keduanya kalah dalam Perang Pasifikasi yang berlangsung pada akhir tahun 1905 dan awal tahun 1906.

Setelah Perang Pasifik selesai, maka disatukanlah seluruh Sulawesi Selatan ke dalam ‘satu’ pemerintahan, ‘satu’ wilayah, Hindia Belanda, yang kelak menjadi provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar penguasaannya terhadap daerah-daerah yang baru ditaklukkan itu dapat berjalan efektif, maka Pemerintah Hindia Belanda segera menata ulang pembagian wilayah administrasi pemerintahannya dengan berpatokan kepada sistem birokrasi modern.

Sulawesi Selatan yang termasuk dalam wilayah pemerintahan *Gouvernour van Celebes en Onderhoorigheden* yang dibentuk pada tahun 1903 oleh *Gouvernour General van Nederland Hindie*, pada Tahun 1908 dibagi ke dalam enam *afdeelingen*, yaitu *Afdeeling Makassar*, *Afdeeling Bonthain*, *Afdeeling Bone*, *Afdeeling Pare-Pare*, *Afdeeling Mandar*, dan *Afdeeling Luwu*. *Afdeeling* lain yang berada di bawah kekuasaan *Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden* adalah Buton dan Laiwu. Saat ini, keduanya berada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Tiap-tiap *afdeling* dibagi lagi ke dalam beberapa *onderafdelingen*. Di bawah *onderafdeling* dibentuk distrik dan dibawah distrik dibentuk sub distrik dan kampung. Untuk mengepalai suatu *afdeeling* dan *onderafdeeling*, pemerintah Hindia Belanda mengangkat seorang pejabat bangsa Belanda, yaitu sebagai *assistent-resident* dan *controleur*. *Controleur* inilah

yang disebut oleh orang Makassar *Tuang Petoro*. Sedangkan untuk mengepalai suatu distrik, pemerintah mengangkat seorang pejabat pribumi dengan jabatan sebagai *regent* atau menggunakan nama-nama tradisional seperti: *gallarrang*, *karaeng*, *lo'mo*, *punggawa*, dan sebagainya. Untuk mengepalai sebuah sub distrik atau kampung, pemerintah mengangkat seorang kepala sub distrik atau kepala kampung yang berasal dari kalangan bangsawan rendahan di kampungnya masing-masing.

Di dalam wilayah *afdeling* itu, Pemerintah Belanda masih juga mengakui adanya beberapa *selfbestuurgebied*, negeri yang berpemerintahan sendiri, yang dipimpin oleh rajanya masing-masing dengan tetap memakai nama-nama tradisional seperti: *somba*, *arung*, *payung*, *karaeng*, dan sebagainya.

Berdasarkan arsip pemerintah Celebes Selatan tahun 1938, daerah-daerah yang termasuk *selfbestuurgebied* adalah Gowa (setelah direhabilitasi pada tahun 1936), Bone (setelah direhabilitasi pada tahun 1930), Wajo, Soppeng, Mallusetasi, Suppa, Sawitto, Batulappa, Kassa, Sidenreng, Rappang, Maiwa, Enrekang, Maluwa, Bontobatu, Alla, Barru, Soppeng Riaja, Tanete, Majene, Pambauang, Cenrana, Balangnipa, Binuang, Mamuju, Tappalang dan Luwu. Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam *Rechtstreeksbestuurgebied* adalah: Makassar, Wajo, Ujungtanah, Mariso, dan Galesong (berada dalam wilayah *Onderafdeeling* Makassar); Marusu, Turikale, Simbang, Lau, Bontoa, Tanralili, Bira, Moncongloe, Sudiang, Biring-

kanaya, Camba, Cenrana, Laiya, Gantarang Matinggi, Wanua Waru, dan Mallawa (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Maros); Pangkajene, Balocci, Labbakkang, Ma'rang, Segeri, Bungoro, Mandalle, (berada dalam wilayah *Onderafdeeling* Pangkajene); Binamu, Tarang, Arungkeke, Bangkala, dan laikang (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Jeneponto); Takalar, Topejawa, Lengkesa, Pappa, Lakatong, Tompotana, Kalukurang, Bauluang, Satanga, Sanrobone, Polombangkeng (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Takalar); Bantaeng (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Bantaeng); Gantarang, Bulukumba, Bulukumbatoa, Ujunglooe, Kindang, Kajang, Lange-lange, Tanaberu, Lemo-lemo, Bira, Ara, Tiro, Batang, Bontotanga, dan Hero (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Bulukumba); Oest Bulobulo, Lamatti, Tondong, West Bulobulo, Manipi, dan Manimpahoi (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Sinjai); Bontobangung, Tanete, Batangmata, Onto, Buki, Bonea, Benteng, Ballabulo, Laiyolo, Barang-barang, Tombolongang, Jampea, Kajuadi, Bonerate, Kalao, Kalaoa, dan Rajuni (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Seleier).

Penataan administrasi pemerintahan dan modernisasi sistem politik itu, diikuti pula dengan penataan dan modernisasi di bidang-bidang lainnya, seperti, hukum, ekonomi, dan pendidikan.

Berbicara tentang sejarah perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan, tidak boleh dilepaskan dari B. F. Matthes, seorang Sarjana Sastra, Pakar Bahasa Bugis dan Makassar. Dia tiba di Makassar pada tahun

1875. Sebagai sarjana sastra, dia bekerja sebagai pejabat mengumpul dan penelaah kesusastraan Bugis-Makassar. Untuk melaksanakan kegiatannya itu, dia mendirikan sebuah yayasan. Melalui yayasannya ini pulalah, pada tahun 1878, Matthes mendirikan sekolah yang kemudian dikenal sebagai *Kweeks school*. Sekolah yang didirikan dan dibina Matthes inilah yang merupakan sekolah pertama di Sulawesi Selatan.

Hampir bersamaan dengan kedatangan Matthes, berdatang pulalah beberapa orang zending dan misi yang bertugas menyebarkan agama Kristen dan Katolik, terutama di daerah-daerah yang belum berhasil di-Islamkan. Sejak saat itu, timbullah persolan baru menyangkut hubungan Islam dan Nasrani. Dengan alasan mengkristenkan orang yang belum bera-gama, para Zending Katolik dan Misionaris Protestan, juga menjadikan umat Islam sebagai sasaran kristenisasi. Menghadapi kenyataan seperti itu, umat Islam tidak berdiam diri. Di bawah kepeloporan Muhammadiyah, umat Islam tampil pula melakukan gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang diarahkan terutama meng-Islamkan kembali umat Islam, dalam arti mengarahkan agar umat Islam melaksanakan ajaran agama secara *kaffah* (menyeluruh) dan benar sesuai tuntunan alquran dan sunah. Hal ini dilakukan karena umat Islam ketika itu—meskipun telah menganut agama Islam lebih kurang tiga ratus tahun—masih tetap mencampuradukkan antara ajaran Islam dengan ajaran animisme dan dinamisme, adat-istiadat, dan tradisi-tradisi sebelum Islam lainnya.

Secara umum, keadaan umat Islam ketika itu dapat dikatakan masih bergelimang dalam kemusyrikan dan kejahilan yang diselimuti takhyul, bidah, dan *khu-rafat*. Kehidupan umat Islam pada umumnya masih dikendalikan oleh *pangaddakang/pangadereng* yang berbasis dan bertumpu pada hal yang disebut sebagai *gaukang* dan *kalompoang*.

Dalam bidang pendidikan, umat Islam sama sekali belum memiliki lembaga pendidikan modern yang ditandai dengan sistem klasikal, ada kurikulum, dan ada proses pembelajaran yang teratur. Lembaga pendidikan tradisional yang ada hanyalah lembaga pendidikan *mangaji tudang* untuk mempelajari alquran, yang biasanya diawali dengan *allepu-allepu* (belajar abjad bahasa alquran), diteruskan dengan *angngijja* (belajar mengeja), *ammaca lambusu* (tadarus), *assara baca* (tajwid), *abbarasanji* (belajar Kitab Barzanji), dan *assarapa* (belajar dasar-dasar Bahasa Arab).

Transformasi ilmu pengetahuan keagamaan lainnya, seperti belajar tahara, belajar salat, belajar *paraele* (kewarisan), dan sebagainya lebih banyak dilakukan melalui keluarga atau melalui guru tarekat atau melalui *Daengta Kalia*, *Daeng Imang*, dan, petugas *parewa sara* lainnya.

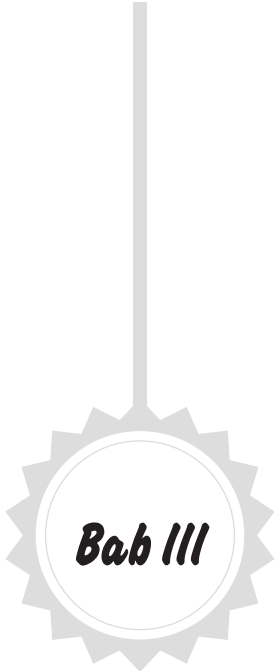
Di Sulawesi Selatan, sejak awal masuknya Islam hingga berakhirnya zaman penjajahan bahkan hingga awal tahun 1950-an, lembaga yang mengurus masalah-masalah keagamaan yang disebut *syara'* tetap dipertahankan dan berfungsi. Lembaga tersebut terintegrasi

ke dalam pranata sosial yang disebut *pangadakkang/pangadereng*.

Sebelum kerajaan Gowa dikonversi menjadi kerajaan Islam dalam struktur kekuasaannya terdapat suatu lembaga yang mengurus masalah-masalah yang terkait dengan kepercayaan dan upacara-upacara ritual keagamaan. Lembaga itu dipimpin oleh seorang yang digelar dengan *Daengta Alakaya*. Lembaga inilah yang dikonversi menjadi lembaga *Sara'* ketika kerajaan itu dikonversi menjadi kerajaan Islam.

Lembaga *sara'* tersebut dipimpin oleh seorang yang bergelar *Daengta Kaliya*. Dalam menjalankan tugasnya, *Daengta Kaliya* dibantu oleh beberapa orang pejabat sebagai bawahan-nya, yang disebut *Parewa Sara'* yaitu: *imang, katte, bidala*, dan *doja*.

Lembaga keagamaan sebagaimana terdapat di kerajaan Gowa tersebut, terdapat juga di kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan.



Bab III

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH CELEBES SELATAN

Pembicaraan kehadiran Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, tidak boleh tidak, harus dimulai dari kedatangan Mansur Al-Yamany di Makassar pada sekitar tahun 1923. Ketika itu, Al-Yamany dikenal sebagai seorang pedagang batik. Dia membuka toko di *Passarstraat* (sekarang, jalan Nusantara) Makassar.

Al-Yamany dilahirkan di Sumenap Madura, pada sekitar tahun 1894. Ayahnya adalah seorang Madura keturunan Arab. Di Sumenap, Al-Yamany kecil belajar agama kepada ayahnya sendiri dan kepada beberapa

orang kiai, di samping belajar di sekolah pemerintah. Sebelum hijrah ke Makassar, Al-Yamany muda menetap di Surabaya. Ketika Muhammadiyah Cabang Surabaya terbentuk, dia menjadi salah seorang anggotanya. Sebagai anggota Muhammadiyah, dia aktif belajar kepada Kiai Haji Mas Mansyur, Voorsitter Muhammadiyah Cabang Surabaya.

Berbekal ilmu agama dan ke-Muhammadiyah-an yang diperolehnya itu, maka sejak masih di Surabaya, Al-Yamany sudah menjadi Mubalig Muhammadiyah. Setelah hijrah ke Makassar, dia meneruskan kegiatan dakwahnya, di samping profesinya sebagai pedagang. Untuk melaksanakan aktivitas dakwahnya di Makassar, Al-Yamany menjalin hubungan dengan para pengurus dan anggota organisasi keagamaan lokal di Makassar, Shirathal Mustaqiim, yang pada umumnya juga pedagang. Berhubung dalam banyak hal, paham agama Al-Yamany sama dengan paham agama para pengurus Shirathal Mustaqiim, maka keikutsertaannya dalam diskusi-diskusi keagamaan yang dilaksanakan Shirathal Mustaqiim adalah ibarat kata pepatah ‘bertemu ruas dengan buku.’ Dalam diskusi-diskusi itulah, Al-Yamany memperkenalkan Persyarikatan Muhammadiyah kepada para pengurus dan anggota Shirathal Mustaqiim.

Setelah lebih kurang tiga tahun, Al-Yamany memperkenalkan Muhammadiyah kepada para pengurus dan anggota Shirathal Mustaqiim, sampailah pada suatu titik klimaks, yaitu ketika beberapa orang pengurus dan anggota Shirathal Mustaqiim berkehendak untuk

melebur organisasinya ke dalam Persyarikatan Muhammadiyah dengan jalan memben-tuk cabang Muhammadiyah di Makassar. Keinginan itu tentu disambut baik oleh Al-Yamany. Oleh karena itu, Al-Yamany menyampaikan berita gembira tersebut kepada *Hoofdbestuur* Muhammadiyah di Yogyakarta. Penyampaian Al-yamani itu dengan sendirinya disambut baik juga oleh *hoofdbestuur*.

Atas restu *Hoofdbestuur* Muhammadiyah yang disampaikan melalui Al-Yamany, pada malam tanggal 15 Ramadan 1344 H, bertepatan dengan tanggal 27 April 1926, diadakanlah rapat pembentukan Muhammadiyah, bertempat di rumah Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro yang terletak di *pasarstraat* (sekarang, Jalan Nusantara) Makassar. Rapat yang diprakarsai oleh Mansyur Al-Yamany, Haji Yusuf Daeng Mattiro, dan Haji Abdullah itu dihadiri oleh tidak kurang dari lima belas orang calon anggota Muhammadiyah. Di antara mereka yang hadir itu terdapat beberapa orang pengurus Shirathal Mustaqiim dan jemaah Masjid Kampung Buton yang selama ini dibina oleh K. H. Abdullah.

Setelah bebarapa orang peserta rapat mengemukakan pendapatnya, disepakatilah pendirian Muhammadiyah Gro-up Makassar dan pembentukan *bestuur*-nya. Menurut Rajab (1998), Perkumpulan Shirathal Mustaqiimlah yang dilebur menjadi Muhammadiyah Group Makassar. Tetapi barangkali tidak demikian adanya. Meskipun ada di antara pengurusnya yang terpilih menjadi *Bestuur* Muhammadiyah, Perkumpulan Shirathal Mustaqiim tidak dilebur menjadi Muham-

madiyah. Terbukti di kemudian hari, Perkumpulan Shirathal Mustaqiim masih tetap eksis dan berkembang ke beberapa daerah di luar Makassar.

Adapun yang terpilih sebagai *Bestuur* Muhammadiyah Group Makassar Periode Pertama, ialah:

Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, sebagai *Voorsitter*

Haji Abdullah, sebagai *Vice Voorsitter*

Muhammad Said Daeng Sikki, sebagai *Secretaris*

Haji Yahya, sebagai *Penningmeester*

Mansur Al-Yamany, sebagai *Commissaris*

Muhammad Tahir Cambang, sebagai *Commissaris*

Haji Ahmad, sebagai *Commissaris*

Abdul Karim Daeng Tunru, sebagai *Commissaris*

Haji Muhammad Yunus Saleh, sebagai *Commissaris*

Daeng Minggu, sebagai *Commissaris*

Hal lain yang juga menjadi keputusan rapat, ialah Muhammadiyah Group Makassar yang baru terbentuk itu akan mengutus Mansur Al-Yamany ke Yogyakarta untuk melaporkan kepada *Hoofdbestuur* Muhammadiyah tentang telah terbentuknya Muhammadiyah di Makassar dan memohon kepada *Hoofd Bestur* agar segera datang meresmikan dan memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan lebih lanjut.

Berselang lebih kurang satu bulan setelah terbentuknya, Muhammadiyah Group Makassar, bertolaklah Mansur Al-Yamani ke Yogyakarta. Sambil berbelanja untuk keperluan tokonya, dia pun segera menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya, yakni melapor

dan memohon kedatangan *Hoofdbestuur* Muhammadiyah ke Makassar. Kesibukannya sebagai pedagang, menyebabkan Al-Yamany tidak bisa ber-lama-lama tinggal di Yogyakarta menunggu *Hoofdbestuur* yang berjanji akan ke Makassar selepas Iduladha. Dia segera kembali ke Makassar melalui Surabaya. Satu minggu selepas Iduladha, *Hoofdbestuur* Muhammadiyah memenuhi janjinya. *Hoofdbestuur* mengutus Haji Muhammad Yunus Anis, *Secretaris Hoofdbestuur*, ke Makassar. Kedatangannya tentu disambut dengan gembira oleh bestuur dan para anggota dan simpatisan Muhammadiyah Group Makassar. Begitu hebat sambutan pengurus Muhammadiyah Group Makassar, Haji Muhammad Yunus Anis disewakan penginapan khusus di Jalan Buru. Selama lebih kurang dua minggu, penginapan yang ditempati Haji Muhammad Yunus Anis selalu ramai oleh pengurus yang datang berkonsultasi atau datang menjemput untuk memberi pengajian dan memulangkannya.

Kegiatan utama Haji Muhammad Yunus Anis di Makassar adalah meresmikan berdirinya Group Muhammadiyah Makassar dan melantik *bestuurnya*. Sebagai rangkaian acara pelantikan Muhammad Yunus Anis berfoto bersama dengan para *Bestuur* Group Muhammadiyah Makassar.

Dalam foto dokumentasi yang tersimpan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut, Haji Muhammad Yunus Anis dipotret bersama dengan para *Bestuur* Muhammadiyah Group Makassar. Ketika foto tersebut penulis perlihatkan kepada Ibu Sitti Rabiah,

aktivis Aisyiyah periode awal yang juga anak angkat K. H. Abdullah beberapa tahun yang lalu, dia hanya dapat mengidentifikasi Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, Haji Abdullah, Mansur Al-Yamani, Haji Yahya, Haji Muhammad Tahir Cambang, Haji Muhammad Saleh, dan Haji Muhammad Yunus Anis sendiri.

Berdasarkan tanggal yang tertera di dalam foto tersebut dapatlah dipastikan bahwa peresmian Muhammadiyah Group Makassar dan pelantikan *bestuur*-nya berlangsung pada tanggal 21 Zulhijjah 1344 H, bertepatan dengan 2 Juli 1926 (penentuan tanggal miladiyahnya dilakukan berdasarkan perhitungan *Al-manak Algemen* tahun 1926, yang terdapat di Arsip Nasional Jakarta). Peresmian dilakukan dalam suatu *open bare veergadering* (pertemuan umum Terbuka) bertempat di salah satu gedung Bioskop G. Wienland di Jalan Komedian (sekarang Jalan Bontolempangan) yang terdapat di kota Makassar ketika itu (Wawancara dengan Ibu Sitti Rabiah, Oktober 2001).

Segera setelah selesai peresmiannya, Muhammadiyah Cabang Makassar memulai aktivitasnya. Kegiatan pertama yang dilakukan muhammadiyah Cabang Makassar adalah menyelenggarakan *vergadering* (rapat umum) yang oleh orang Makassar pada waktu itu disebut sebagai *parahadele*. Dalam *vergadering* itulah dibicarakan berbagai hal mengenai pengembangan organisasi Muhammadiyah dan masalah-masalah yang berkaitan dengan ajaran agama Islam yang dikenal dengan istilah “tablig”, yang oleh orang Makassar disebut *tabale*. Memanfaatkan keberadaan Yunus Anis

di Makassar yang lebih kurang sepuluh hari lamanya itu, dialah yang selalu diundang untuk bertabligh dalam *vergadering-vergadering* yang diadakan Muhammadiyah pada hari-hari pertama kegiatannya.

Melalui perantaraan Haji Muhammad Yunus Anis yang akan segera kembali ke Yogyakarta karena tugasnya di Makassar telah selesai, *Bestuur* Muhammadiyah Cabang Makassar menitipkan harapan, supaya *Hoofdbestuur* dapat segera mengirim tenaga guru ke Makassar untuk membina sekolah yang segera akan didirikan. Beberapa bulan kemudian datanglah dua orang guru, utusan dari *Hoofdbestuur* Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu: Raden Hilman dan Sangadi Kusumo.

Untuk memanfaatkan tenaga kedua orang guru tersebut, pada bulan 1928, *Bestuur* Muhammadiyah Cabang Makassar membuka sebuah sekolah setingkat sekolah dasar sekarang, yaitu *Honlandsche Inlandsche School med de Al-Quran* (HIS). Sekolah tersebut dipimpin oleh Yahya bin Abdul Rahman Bayasut, seorang keturunan Arab yang pernah mengajar lama di sekolah Pemerintah Hindia Belanda. Dalam melaksanakan tugas sebagai guru, dia dibantu Raden Hilman dan Sangadi Kusumo.

Masih pada tahun 1928, Muhammadiyah Cabang Makassar membuka satu sekolah lagi, yaitu *Munir School* semacam madrasah ibtidaiyah sekarang. Berbeda dari HIS yang pengajarannya dititikberatkan pada ilmu pengetahuan umum dan Bahasa Belanda dengan sedikit tambahan pelajaran agama. *Munir School* menekankan pada pelajaran agama dengan sedikit tam-

bahan pengetahuan umum. Sementara itu, digalakkan pula pemberantasan buta huruf di kalangan anggota Muhammadiyah, baik laki-laki, maupun perempuan. Untuk itu, maka dibuka pulalah sebuah sekolah (kursus) yang disebut “*Menyesal School*.”

Di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, Muhammadiyah Cabang Makassar berkembang dengan pesat. Tetapi, setelah berjalan lebih kurang satu tahun sesudah diresmikan, Muhammadiyah Cabang Makassar mengalami cobaan yang sangat besar. Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, *Voorsitter* Muhammadiyah Group Makassar diisukan telah menghamili seorang gadis yang tinggal di rumahnya. Apakah isu itu benar atau salah tidak diketahui secara pasti. Tetapi, Haji Yusuf Daeng Mattiro rupanya tidak dapat mengelakkan diri dari isu itu, bahkan isterinya sendiri meminta cerai sesaat setelah isu itu tersebar luas.

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro memimpin Muhammadiyah Group Makassar. Keterangan yang diperoleh melalui sumber lisan (Wawancara dengan Hajjah Rabbiah, Oktober 2001) hanya menjelaskan bahwa Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro berhenti sebagai *Voorsitter* Muhammadiyah Group Makassar, segera setelah dia tertimpa musibah fitnah bahwa dia menghamili seorang gadis yang tinggal di rumahnya.

Menjelang dan pada saat menjabat sebagai *Voor-sitter* Muhammadiyah Group Makassar, Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro dikenal sebagai seorang *pa-*

bantilang (pedagang grosir yang menampung barang kemudian dijual kepada pedagang kecil). Ia juga dikenal sebagai orang yang taat beragama dan sangat memperhatikan masalah dakwah.

Muhammad Yusuf Daeng Mattiro lahir di Selayar sekitar tahun 1895. Ayahnya adalah seorang pedagang kopra. Sebagai anak pedagang, dia hidup berkecukupan. Oleh karena itu, selain mengikuti pendidikan tradisional mengaji Alquran dan dasar-dasar ajaran agama Islam, diapun berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah Pemerintah Hindia Belanda.

Setelah menanjak dewasa, Muhammad Yusuf Daeng Mattiro merantau ke Makassar. Dengan bekal ijazah sekolah rakyat yang ia bawa dari Selayar, dia diterima bekerja di salah satu perusahaan ekspedisi di Pelabuhan Makassar. Sambil bekerja, Muhammad Yusuf Daeng Mattiro juga membangun usaha dagang, yang di kemudian hari mengantarkannya menjadi *pa-bantilang* sukses dan berkemampuan untuk menunai-kan ibadah haji.

Sebagai seorang perantau yang sukses, Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro menjadi tumpuan harapan keluarganya di Selayar. Sehubungan dengan itulah, maka salah seorang kerabat Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro mengirim anak gadisnya ke Makassar untuk tinggal di rumahnya. Harapan kerabat Daeng Mattiro, tentu saja dalam rangka meringankan beban hidupnya yang serba kekurangan, sekaligus membantu isteri Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro mengurus anak-anak dan mengerjakan pekerjaan

rumah tangganya sehari-hari.

Entah siapa yang menzinahi anak gadis yang tinggal di rumah Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro sehingga hamil itu, tidak diketahui secara pasti. Satu hal yang jelas ialah bahwa isteri Daeng Mattiro dan masyarakat umum menuduh Daeng Mattiro sebagai pelakunya. Meskipun tuduhan terhadap Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro itu tidak pernah terbukti kebenarannya, namun dampaknya terhadap persyarikatan Muhammadiyah sangat besar. Masyarakat yang sejak awal menentang kehadiran Muhammadiyah, tentu saja semakin mengolok dan mencemooh para anggota dan para pimpinan Muhammadiyah.

Menyadari diri sebagai tertuduh dalam kasus yang sangat memalukan dan mencemarkan nama persyarikatan itu, maka atas desakan dari para anggota dan para pimpinan Muhammadiyah, Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro mengundurkan diri dari jabatannya sebagai *Voorsitter* Muhammadiyah Grup Makassar.

Menurut Hajja Sitti Rabiah (wawancara Oktober 2001), setelah Muhammad Yusuf Daeng Mattiro mengundurkan diri dari jabatannya sebagai *Voorsitter* Muhammadiyah Group Makassar, dia tidak pernah lagi mengikuti kegiatan apa pun di Muhammadiyah. Tetapi, informasi yang diperoleh lebih lanjut, Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro rupanya masih tetap memberikan bantuannya kepada Muhammadiyah. Menurut Laporan Panitia Pelaksana Kongres Muhammadiyah ke 21 tahun 1932, Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro

adalah salah seorang di antara lima orang dermawan, yang mobilnya disumbangkan untuk mengangkut para peserta kongres (Suara Aisiyah, 1932).

Menyusul pengunduran diri Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, para *Bestuur* Muhammadiyah Makassar lainnya menyepakati memilih Kiai Haji Abdullah sebagai *Voorsitter* Muhammadiyah Group Makassar.

Di tangan Kiai Haji Abdullahlah, Muhammadiyah Group Makassar ditingkatkan statusnya menjadi cabang yang mengkoordinir group-group yang telah ada di Celebes Selatan hingga akhirnya menjadi konsoelat pada tahun 1931, setelah beberapa group yang tersebar di beberapa daerah ditingkatkan statusnya menjadi cabang.

Ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh suatu groep untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi cabang. *Pertama*, telah membentuk dan membina sekurang-kurangnya tiga groep. *Kedua*, telah memiliki amal usaha nyata berupa sekolah, masjid, dan panti asuhan. Untuk itu, maka berbarengan dengan peningkatan jumlah cabang dan groep, berkembang pula amal usaha Muhammadiyah dalam bentuk sekolah, masjid, dan panti asuhan. Dengan demikian, turut sertalah Muhammadiyah mewarnai jalannya pendidikan Sulawesi Selatan, sebagai salah satu alternatif di luar sekolah pemerintah dan sekolah Kristen dan Katolik.

Menyusul pembukaan madrasah di daerah-daerah sebagaimana telah dikemukakan, langkah selanjutnya

jutnya yang ditempuh oleh Muhammadiyah Cabang Makassar ialah mendatangkan ulama-ulama muda dari Jawa dan Sumatera yang akan menjadi guru sekaligus memimpin madrasah atau sekolah yang didirikannya. Tugas pokok para ulama muda itu adalah mengajar dan berdakwah.

Memasuki akhir tahun 1931, Muhammadiyah Cabang Makassar diperkuat oleh seorang ulama muda yang datang dari Sumatra Barat, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Dia dikirim oleh *Hoofdbestuur* Muhammadiyah atas permintaan *Bestuur* Muhammadiyah Cabang Makassar. Kecuali sebagai guru dan mubalig, dia juga diharapkan mempersiapkan penyelenggara Kongres Muhammadiyah ke- 21 pada pada bulan Juni 1932, di Makassar.

Menurut *Hoofdbestuur* Muhammadiyah, sebagai mana tertuang dalam “buah kongres,” Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar dinilai sukses. Redaktur surat kabar ‘Tentara Islam’, demikian pula ‘Suara Muhammadiyah’, melaporkan bahwa Kongres Muhammadiyah yang ditempatkan di Makassar sangat menarik perhatian dan minat masyarakat Makassar. Setiap hari tidak kurang dari 5000 orang yang menonton dari luar arena kongres. Hal ini menandakan bahwa perhatian masyarakat sangat besar. Menurut ‘Tentara Islam’, masyarakat berduyung-duyung untuk menyaksikan kegiatan yang disebut kongres, ada juga masyarakat yang ingin menyaksikan dari dekat kegiatan Muhammadiyah yang sesungguhnya, sebab sebelumnya, mereka hanya mengetahui bahwa Muhammadiyah

adalah suatu gerakan yang membawa praktik agama baru, menentang adat istiadat negeri, menentang bidah, takhayul, dan khurafat.

Kongres Makassar ternyata berdampak besar terhadap perkembangan Muhammadiyah di Celebes Selatan. Setahun setelah kongres, anggota Muhammadiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari hanya dua cabang dan lima belas groep sebelum kongres, satu tahun sesudah kongres, meningkat menjadi empat cabang dan 39 groep. Demikian pula sekolah dan masjid mengalami perkembangan yang sangat pesat.

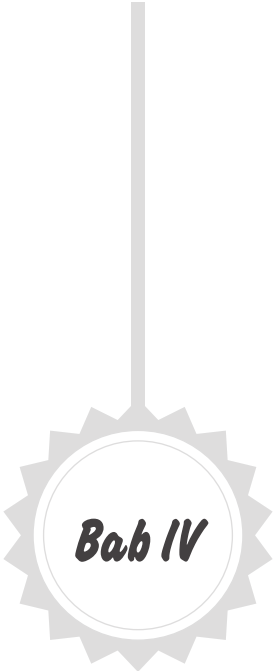
Segera setelah kongres, Muhammadiyah cabang Makassar membuka Madrasah Muallimin di Jalan Muhammadiyah. Untuk memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan Hamka di Makassar, dialah yang diangkat sebagai kepala sekolah. Setelah pembukaan Muallimin Muhammadiyah di Makassar, satu tahun kemudian Muhammadiyah Cabang Majene juga membuka Madrasah Tsanawiyah. Berbarengan dengan itu, di beberapa daerah, group-group baru juga dibuka, yang kemudian disusul dengan pendirian amal-amal usaha.

Selain itu, digalakkan pula kegiatan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, baik berupa tablig maupun debat dengan para ulama tradisional yang menentang Muhammadiyah. Masalah yang diperdebatkan biasanya berkisar pada masalah-masalah keagamaan yang dinilai bidah, seperti salat tarwih dua puluh rakaat, kunut subuh terus-menerus, baca talkin di kuburan, dan lain-lain. Perdebatan dan pertentangan lainnya, terjadi

antara Muhammadiyah dengan pejabat *parewa sara'* ketika Muhammadiyah mendirikan masjid dan hendak melaksanakan salat jumat. Menurut adat, dalam satu kampung hanya boleh ada satu masjid dan yang menjadi penyelenggara ibadah di dalam masjid adalah pejabat *parewa sara'*, khotbahnya pun harus dalam bahasa Arab. Sedangkan, bagi Muhammadiyah, siapa saja dapat menjadi imam, khatib, dan memimpin penyelenggaraan ibadah lainnya. Khotbah dapat disampaikan dalam bahasa Melayu atau bahasa daerah yang dimengerti oleh jemaah.

Demikianlah, tantangan demi tantangan di hadapi oleh Muhammadiyah. Namun, Muhammadiyah tetap saja berkembang dengan pesatnya. Anggota dan amal usahanya terus menerus saja bertambah.

Menurut laporan Konsul Muhammadiyah Celebes Selatan yang disampaikan pada Konferensi Muhammadiyah Celebes Selatan ke-16 tahun 1941 di Sengkang, Muhammadiyah di Celebes Selatan telah memiliki 6 buah cabang, 76 groep, anggota resmi 7000 rang, simpatisan atau pengikut 30000 orang, massjid/musalah 41 buah, sekolah diniyah 52 buah, sekolah HIS 4 buah, guru 79 orang, dan murid 5000 orang (Muntu, 1942).



Bab IV

PEMBENTUKAN MUHAMMADIYAH DI DAERAH-DAERAH

Muhammadiyah Cabang Makassar dibawah kepemimpinan KH. Abdullah memang nampak nyata dalam mengembangkan gerakannya. Infrastruktur organisasi semakin lengkap, tablig-tablig pun semakin digencarkan. Demikian pula penempatan kader melalui kelompok-kelompok pengajian semakin digiatkan. Peserta pengajian Muhammadiyah semakin bertambah, baik yang dari Makassar sendiri maupun yang berasal dari daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Ketentuan organisasi yang memberikan kesempatan kepada

anggota Muhammadiyah yang telah cukup berjumlah 15 orang untuk membuat group Muhammadiyah di daerah masing-masing, semakin menambah jumlah kelompok-kelompok Muhammadiyah bahkan sampai ke daerah-daerah lain di luar Makassar. Hingga tahun 1968 hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan telah terambah oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah di Gowa ¹

Perkembangan Muhammadiyah di Gowa juga bersamaan dengan perkembangannya di daerah-daerah lain di Sulawesi selatan. Radjab (1999:44) mengemukakan bahwa Abu Bakar Daeng Bombong salah seorang anggota Muhammadiyah Group Mariso yang tinggal di Pa'baeng-baeng dengan pekerjaannya sebagai tukang jahit dan aktif mengikuti pengajian di Mariso, memelopori berdirinya Muhammadiyah Group Jongaya pada tahun 1928.

Sebagai kader pergerakan Muhammadiyah yang ditempa langsung di Group Mariso Cabang Makassar, Abubakar Daeng Bombong berupaya untuk mengadakan pembinaan di daerah tempat tinggalnya di Pa'baeng-baeng yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Ranting Jongaya. Dia kemudian menjadikan Mushalla yang dibangunnya sendiri sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan atau pun

1 Bagian ini diresumekan dari buku “Mentari Bersinar di Gowa (Menelusuri Jejak Kehadiran Muhammadiyah di Gowa tahun 1928-1968)”, Mattayang (2014).

pengajian-pengajian. Di tempat itulah para peserta pengajian bersepakat untuk membentuk group Jongaya dengan komposisi pengurus, Abubakar Daeng Bombong sebagai *Voorzitter*, Abd. Razak Daeng Ngerang sebagai *secretaris*, dibantu oleh Abd. Razak Daeng Mile, Daeng Sikota, Ismail, dan Sarapa Daeng Tarru (Radjab, 1999:44).

Dengan terbentuknya Group Muhammadiyah Jongaya sebagai ranting pertama di Gowa di bawah pembinaan Muhammadiyah Cabang Makassar, maka mulailah secara organisatoris, Muhammadiyah masuk di daerah Gowa, untuk selanjutnya pengurus group Jongaya. Dengan kegiatan yang semakin giat, anggota-anggotanya pun semakin bertambah mengikuti pengajian. Untuk menyampaikan materi pengajian selain disampaikan oleh pengurus secara bergantian juga biasanya diundang pengurus-pengurus Cabang Makassar di antaranya dengan mengundang KH. Abdulah sebagai pemateri.

Dalam perkembangan selanjutnya mengingat peserta pengajian yang semakin bertambah, karena diikuti pula oleh orang-orang di luar kampung Jongaya, maka tempat tersebut dirasakan tidak lagi memadai, maka diusahakanlah tempat lain, sebidang tanah milik Abdul Razak Daeng Ngerang. Di atas tanah tersebut dibangun Mushalla, kemudian dibangun pula tempat pendidikan yang lebih modern dibandingkan dengan sekolah Islam milik kaum bangsawan sebelumnya yang bernama “Islahuddin”, yang dikelola secara tradisional, sekolah Muhammadiyah Group Jongaya tersebut

untuk selanjutnya dikenal bernama Muallimin Muhammadiyah Jongaya dengan pola pendidikan khas Muhammadiyah yang *multiscience* yaitu mengajarkan beberapa cabang ilmu pengetahuan baik agama maupun pengetahuan umum (Radjab, 1999:45).

Mushallah dan tempat pendidikan tersebut sangat berperan dalam menanamkan paham Muhammadiyah di masyarakat karena baik peserta pengajian di Mushalla maupun siswa-siswa pada sekolah tersebut selain orang Jongaya juga diikuti pula oleh orang-orang luar Jongaya dalam daerah Gowa. Hal tersebut cukup konstruktif dalam mengembangkan organisasi Muhammadiyah di daerah Gowa.

Untuk melihat peran dan pengaruh Muhammadiyah di daerah Gowa setidaknya dapat tergambarkan dalam 3 (tiga) aspek kehidupan sosial, yaitu aspek keagamaan, aspek pendidikan, dan aspek sosial politik.

Aspek Keagamaan. Seperti halnya perjuangan Muhammadiyah di daerah lain, baik dalam lingkup Sulawesi Selatan maupun tingkat nasional, maka Muhammadiyah di Gowa pun dalam aspek keagamaan berupaya memberantas syirik, Tahayul, Bid'ah, dan Khurafat. Muhammadiyah di Gowa juga berupaya mengadakan pelurusan terhadap pelaksanaan hukum islam atau syariat islam baik dalam ibadah maupun muamalat. Di samping itu berupaya menggairahkan umat islam di Gowa untuk beramal dan beribadah melalui tabligh-tabligh atau pun pengajian-pengajian yang dilakukan oleh para muballigh Muhammadiyah gowa. Tentunya hal tersebut menjadi orientasi perjuangan Muham-

madiyah di Gowa karena melihat kondisi dan keadaan masyarakat Gowa ketika itu dengan berbagai macam “penyakit agama”.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa sebelum kehadiran Muhammadiyah di daerah Gowa, maka kondisi keberislaman masyarakat sangat memperhatikan. Di mana-mana terjadi penghambaan terhadap kepercayaan lama yang sudah membudaya, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan aqidah islamiah karena akan merumuskan manusia kedalam syirik.

Demikian halnya ibadah dengan pengaburan syariat misalnya shalat 2 hari raya masih dilaksanakan di masjid dan tidak dilaksanakan di tanah lapang. (Daeng Lurang dalam Mattayang, 2011: 113). Hal lain adalah dalam pelaksanaan shalat jum’at, dimana khatib membacakan khotbahnya dengan memakai bahasa Arab, padahal menurut syariatnya khotbah harus didengar dan dipahami oleh jamaah, sehingga ketika khatib berkhotbah dengan bahasa Arab, bagi Muhammadiyah bagaimana mungkin jamaah Gowa yang hanya tahu bahasa Indonesia atau pun Makassar bisa mengetahui materi khotbah. Demikian pula dalam persoalan Azan di hari Jum’at sebelum kehadiran pengaruh Muhammadiyah, shalat biasanya dilaksanakan dua kali adzan. Dan berbagai bentuk-bentuk aktivitas lain yang oleh paham Muhammadiyah dianggap sebagai suatu yang syirik, thayyul, bid’ah dan khurafat (Daeng Lurang dalam Mattayang, 2011: 114).

Melihat hal demikian itu, para anggota Muhammadiyah di Gowa mengambil langkah dan tindakan konkrit, sesuatu yang dianggap syirik dikalangan masyarakat diperangnya melalui dakwah *Binafsihi* yaitu dakwah melalui diri sendiri dan keluarga. Langkah konkritnya selanjutnya misalnya anggota-anggota Muhammadiyah yang selesai mengikuti pengajian mengenai kemusyrikan setelah pulang di rumah, masing-masing menghancurkan Saukang, Boe-Boe, Anja-Anja, Dzimati ataupun lainnya yang terdapat pada rumah mereka (Daeng Tola dalam Mattayang, 2011:114).

Setelah itu baru mereka memerangi tempat dan benda-benda kemusyrikan lain yang ada di daerahnya. Di sini para muballigh Muhammadiyah melakukan dakwah dengan dua cara yaitu dengan menghancurkan dan memusnahkan dalam bentuk fisik dari tempat dan benda-benda yang dianggap biang kemusyrikan dan dengan mengubah cara pandang masyarakat yang mengadakan penghambaan terhadap hal-hal yang berbau syirik, melalui tabligh atau pun pengajian-pengajian.

Sementara kebiasaan khatib jum'at dalam berkhotbah memakai bahasa Arab, para muballigh Muhammadiyah mengubah kebiasaan lama tersebut dengan berkhotbah dengan memakai bahasa Indonesia atau bahasa Makassar. Hal ini dilakukan bukan hanya ketika berkhotbah di Masjid Muhammadiyah saja tetapi pada masjid manapun. Meski awal dirasa asing dengan khotbah demikian, namun kemudian masyarakat sudah mulai memahami mengenai perbaikan khotbah

dengan bahasa sendiri, dan semakin banyaklah jamaah pada masjid-masjid Muhammadiyah ketika hari jum'at dibandingkan dengan masjid yang lain, dan perkembangan selanjutnya hampir seluruh masjid di Gowa dalam khotbahnya memakai bahasa Indonesia atau pun bahasa Makassar, yang dimana Muhammadiyah sebagai perintisnya.

Peranan lain muhammadiyah di daerah Gowa, mulai dari awal keberadaannya sekitar tahun 1928 hingga tahun 1966 di daerah Gowa telah berdiri 10 buah masjid Muhammadiyah yang sebagian besar tetap bertahan hingga saat ini walaupun telah direnovasi gedung maupun namanya, masjid-masjid itu adalah Masjid Muhammadiyah di Pandang-Pandang Sungguminasa, Masjid Muhammadiyah di Limbung, Masjid Muhammadiyah di Panciro Lempangang, Masjid Muhammadiyah di amba Jawaya Allu, Masjid Muhammadiyah di Datarang-Tombolo Pao, Masjid Muhammadiyah di Barembeng, Masjid Muhammadiyah di kuboddong-Bonto Nompoo, Masjid Muhammadiyah di Lembang bu'ne-Malakaji, Masjid Muhammadiyah di Ritaya-Bori Matangkasa, Masjid Muhammadiyah di Tompobalang-Moncobalang. Masjid-masjid tersebut di atas lebih awal didirikan oleh anggota Muhammadiyah sebelum Muhammadiyah di tempat masing-masing berdiri sebagai ranting atau cabang.

Aspek Pendidikan. Di Gowa, Muhammadiyah turut memerankan diri sebagai organisasi dakwah yang sangat memperhatikan pendidikan modern yang memadukan antara ilmu agama islam dan ilmu umum. Dalam

perkembangannya, sekolah-sekolah Muhammadiyah di Gowa mulai didirikan dan berkembang setelah masa kemerdekaan. Pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah merupakan pengembangan dari pola perjuangan Muhammadiyah di Kabupaten Gowa.

Pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut, tentunya hal yang sangat berharga bagi masyarakat Gowa, mengingat pada saat itu sekolah-sekolah pemerintah jumlahnya masih kurang, bahkan banyak daerah-daerah dalam wilayah Gowa yang belum mendirikan sekolah, sehingga warga yang menginginkan bersekolah atau pun melanjutkan sekolah harus keluar dari wilayahnya.

Disamping itu sekolah-sekolah agama pada saat itu amat kurang dan bahkan bisa dikatakan tidak ada. Sekolah pemerintah ketika itu kurang mengajarkan pelajaran Agama Islam sehingga keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah Gowa memiliki peranan dan pengaruh yang cukup besar. Demikian juga respon masyarakat terhadap sekolah sekolah Muhammadiyah tersebut amatlah besar pula (Daeng Lala' dalam Mattayang, 2011: 122).

Aspek Politik. Keberadaan Muhammadiyah di daerah Gowa sama halnya yang dialami di daerah daerah lain dalam perkembangannya, aspek politik turut berpengaruh apalagi ketika itu Indonesia termasuk Gowa masih diduduki oleh penjajah. Jauh sebelum Muhammadiyah datang hingga Muhammadiyah masuk sekitar tahun 1928, daerah Gowa dalam situasi politik yang tidak stabil, disatu sisi Belanda mengadakan penjaja-

han dan disisi lain masyarakat gowa dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga di daerah Gowa Muhammadiyah dengan sendirinya harus bersentuhan langsung dengan situasi dan kondisi politik di daerah tersebut.

Disinilah Muhammadiyah Gowa melalui anggota-anggotanya memainkan peranan yang cukup besar. Tidak saja fisik tapi lebih pada perjuangan Muhammadiyah dalam melawan imperialisme di Gowa melalui pola-pola tajdidnya, Muhammadiyah di Gowa turut berpartisipasi dalam melawan eksploitasi besar-besaran kaum imperialis dan berupaya mengeluarkan rakyat Gowa dari kungkungan hukum dan aturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu.

Sebagai Contoh, metode dakwah Muhammadiyah melalui ceramah dengan bahasa Indonesia atau pun Makassar memunculkan sikap nasionalisme terhadap rakyat Gowa. Dimana ketika itu pemerintah Belanda dengan hukum dan aturannya melarang bagi siapa pun memunculkan simbol-simbol nasionalisme, sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa Nasional dan Muhammadiyah dengan cukup mendemonstratif melakukannya, demikian juga dengan bahasa Makassar.

Melalui pengajian-pengajian dan tabligh Muhammadiyah, juga melahirkan jiwa-jiwa yang cinta islam dan menentang segala bentuk kemusyrikan dan kekafiran, dan akhirnya akan menganggap bahwa takut kepada belanda adal ciri kemusyrikan, sehingga dengan sendirinya akan memunculkan keberanian bagi rakyat untuk melawan kolonial belanda dan menganggap

bahwa setiap perjuangan adalah jihad dan ibadah kepada Allah swt. Sampai dengan kedatangan tentara jepang ditahun 1942, ketika kegiatan-kegiatan Muhammadiyah dan organisasi lainnya di Gowa divakumkan, pengajian Muhammadiyah walaupun tidak secara demonstratif tetap berlangsung di rumah-rumah warga Muhammadiyah, walau pun adakalanya digagalkan oleh tentara jepang (Daeng Nangka dalam Mattayang, 2011: 127).

Setelah bangsa Indonesia merdeka ditahun 1945, di mana berita tentang proklamsasi kemerdekaan baru diketahui secara terbatas di daerah Sulawesi Selatan sekitar bulan september 1945. Muhammadiyah mulai diaktifkan kembali demikian juga muhammadiyah di Gowa, setelah sekitar tiga tahun vakum, kegiatan-kegiatannya mulai digiatkan (Radjab 1999:85).

Namun kepergian tentara jepang, dan datangnya angin kemerdekaan di tahu 1945 belumlah membuat masyarakat Gowa dan organisasi Muhammadiyah di daerah ini bernafas lega, pada tanggal 23 september 1945 pasukan sekutu terdiri dari tentara *Australia* ditambah dengan tentara *Gurkha (Inggris)* mendarat di kota Makassar (Radjab 1999:87) yang mendapat tugas untuk melucuti senjata tentara jepang dan membentuk pemerintah sipil di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan *NICA (Nederlandsch Indie Civil Administration)*.

Menyadari bahwa kedatangan NICA sebenarnya adalah untuk kembali menjajah di Sulawesi Selatan, terlebih sikap mereka yang sangat terkesan arogan layaknya seorang penjajah, Maka di daerah Gowa para

tokoh Muhammadiyah mulai bangkit mengumandangkan semangat jihad melawan NICA, mereka berupaya menghimpun golongan pemuda atau pun dan golongan lain dan membentuk laskar perjuangan.

Diantara laskar perjuangan yang didirikan dan dipimpin oleh orang Muhammadiyah adalah Kelaskaran “berjuang untuk kemerdekaan dan agama” disingkat “BUKA” didirikan dan dipimpin oleh Nuhung Daeng Bani dan Abdul wahab Rajab, masing-masing merupakan ketua dan sekretaris Muhammadiyah group Bone-Limbung. Kelaskaran rakyat Pallangga, disingkat KERAP didirikan dan dikomandoi oleh Baso Tappa, merupakan pengurus Muhammadiyah ranting Boka (Limbung).

Semangat juang yang demikian besar semakin membuat NICA kelap mata dan beringas, bahkan mendatangkan pasukan istimewa yang diberi gelar “*Special troepen*” pasukan ini dipimpin oleh *Kapten Reimon Pierre Weaterling* (Radjab 1999:98), ditangan *Westeling* inilah pasukan NICA semakin gencar mengadakan penyerangan-penyerangan serta pembantaian. Di mana-mana rakyat baik yang mengadakan perlawanan maupun yang tidak dibantai, bahkan adakalanya mereka dikumpul pada satu tempat kemudian ditembak dan dikubur pada lubang yang mereka gali sendiri.

Semakin kuat dan besarnya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Gowa semakin beringas pula Pasukan *Westering* memusnahkannya, tak terhitung secara pasti berapa warga Muhammadiyah yang gugur dalam gejolak tersebut.

Muhammadiyah di Jeneponto ²

Kabupaten Jeneponto yang terletak sekitar 100 kilo meter dari kota Makassar, menjadi salah satu kabupaten yang dengan cepat disinggapi Muhammadiyah. Kehadiran Muhammadiyah di Jeneponto pertama kali dirintis oleh Sinowa Daeng Lalang pada tahun 1929. Sinowa Daeng Lalang sebelumnya adalah anggota Muhammadiyah Cabang Makassar.

Berawal sebagai peserta pengajian dan kemudian menjadi anggota Muhammadiyah Cabang Makassar, dia semakin paham dengan gerakan Muhammadiyah. Sinowa Daeng Lalang dengan keyakinannya terhadap Muhammadiyah juga mulai mengenalkan Muhammadiyah pada keluarga dan para sahabatnya. Atas usahanya untuk mengembangkan paham dan keyakinannya itulah, pada tahun 1933 Muhammadiyah Ranting Jeneponto berhasil dibentuknya. Sebagai pengurus pertama waktu itu adalah Sinowa Daeng Lalang sendiri, dan ditemani oleh Abdul Kadir Supu, Daeng Supu, Abdul Razak Sako dan Daeng Kulle.

Setelah terbentuk, Muhammadiyah dibawah kepemimpinan Sinowa Daeng Lalang mendirikan Amal usaha melalui lembaga pendidikan disamping juga tetap aktif melakukan kegiatan-kegiatan tabligh.

Pada tahun 1933, Muhammadiyah Ranting Jeneponto akhirnya berhasil mendirikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Sebagai langkah pe-

2 Diolah dari Radjab (1999:54), dan Darmawijaya (2012:198-199)

mantapaan akan apa yang ia rintis itu, Muhammadiyah Ranting Jeneponto juga mendatangkan Hasyim, seorang guru dan Jawa sebagai Pembina lembaga pendidikan yang didirikannya.

Pada tahun itu juga, Muhammadiyah Ranting Jeneponto dengan segala usahanya berhasil pula memelopori berdirinya Ranting Muhammadiyah di Poko'bulo dan Ranting Muhammadiyah Tanetea.

Perkembangan Muhammadiyah di Jeneponto tidak terlalu mendapatkan tantangan yang keras dari masyarakat, hal itu dikarenakan keberadaan Muhammadiyah di Butta Turatea itu didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan mempunyai kharisma di dalam masyarakatnya, tokoh-tokoh itu seperti Haji Mattewakang Daeng Raja, Lanto Daeng Pasewang dan Haji Patoppoi Daeng Sutte.

Muhammadiyah di Bantaeng³

Muhammadiyah masuk di Bantaeng pada tahun 1927, yang dibawa oleh Daeng Paris Osman, Tanawali dan Mahmud Usman. Mereka mengenal Muhammadiyah, ketika mereka datang ke Makassar untuk berbelanja barang dagangan. Di Makassar mereka bertemu dengan anggota dan pengurus Muhammadiyah Cabang Makassar. Setelah mengenal Muhammadiyah, mereka pun tertarik dengan paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. dari situlah dengan ketertarikan dan keyakinan mereka pun beru-

3 Diolah dari Darmawijaya (2012:180-182) dan Putra (2007:11).

saha merintis organisasi Muhammadiyah di Bantaeng.

Daeng Paris dan kawan-kawan berhasil mendirikan Muhammadiyah Ranting Bantaeng ditahun 1927 dengan Daeng Paris sendiri sebagai ketua pertamanya. Hingga dalam perkembangannya, Muhammadiyah di Bantaeng dengan kegiatan-kegiatan tablignya terus mengalami kemajuan. Apalagi Muhammadiyah Ranting Bantaeng mendatangkan tokoh-tokoh Muhammadiyah Cabang Makassar sebagai muballig, sehingga hal ini mengundang antusias dari masyarakat setempat.

Pada tahun 1939, Muhammadiyah Cabang Bantaeng berhasil mendirikan Madrasah Wustha Muallimin dan Neutrale Hollandische School (NHS). Pembinaanya adalah Sayid Madjidi yang didatangkan dari Jawa dan dibantu oleh Abdul Rasyid Fakihi. Selain itu, Muhammadiyah Cabang Bantaeng juga berhasil mengembangkan organisasinya dengan mendirikan Muhammadiyah Ranting Pasorogi dan Muhammadiyah Ranting Batulabbu.

Kehadiran Muhammadiyah di Butta Toa ini akhirnya disambut baik oleh warga Bantaeng. Bahkan Raja Bantaeng kala itu, Pawilowi, menerima organisasi ini dan memberikan dukungan pada berbagai kegiatannya. Salah satu alasan diterimanya Muhammadiyah karena gerakan ini diaggap membawa nalar baru “pendidikan modern” yang beraroma “barat” namun tetap “Islami”, hal inilah yang membuat Muhammadiyah berkembang dengan cepat. Para penganjur Muhammadiyah awal berasal dari Jawa dan Sumatera, lebih

mementingkan aspek sosial dibanding aspek keagamaan. Apalagi masa itu, masyarakat mayoritas beragama Islam. Perubahan dalam bidang keagamaan, hanya penambahan jumlah khatib untuk shalat Jumat (Putra, 2007:11).

Sebelum kedatangan Muhammadiyah, shalat Jumat di seluruh Bantaeng memang hanya diadakan di masjid kerajaan, masjid pertama di Bantaeng. Hal ini mungkin disebabkan tidak adanya orang Islam yang dianggap mampu menjadi khatib pada pelaksanaan shalat Jumat, kecuali khatib kerajaan, yang memperoleh jabatannya, hanya berdasarkan keturunan. Kehadiran Muhammadiyah di Bantaeng, membuat hadirnya khatib-khatib baru di masjid-masjid selain masjid kerajaan. Implikasinya, menghilangkan “monopoli” ajaran Islam. Pemahaman Islam sudah lebih bervariasi sesuai dengan kemampuan khatib-khatib dari Muhammadiyah untuk memberikan tafsiran baru terhadap berbagai doktrin Islam.

Akhirnya kehadiran Muhammadiyah di Bantaeng membawa “Nalar Baru” bagi masyarakat Bantaeng, yakni dari segi pentingnya pengetahuan modern yang disandingkan dengan pengetahuan agama, maupun pentingnya kaderisasi ulama dan pengembangan pemahaman Islam.

Muhammadiyah di Bulukumba⁴

Setelah Muhammadiyah berkembang di Makassar, gerakan ini kemudian menyebar hingga menyambangi Labakkang-Pangkep, dan seterusnya sampai ke Kajang dan Gantarang Bulukumba. Saat Muhammadiyah pertama kali hadir di Bulukumba, Kehidupan masyarakat Bulukumba memang tidak bernuansa religi. Ketika itu, Bulukumba yang masih berstatus sebagai wilayah distrik-distrik bentukan Belanda, syariat Islam belum dijalankan secara utuh dan masih bercampur dengan faham-faham agama dan kepercayaan masyarakat yang tradisional.

Muhammadiyah baik sebagai faham maupun sebagai organisasi masuk di Bulukumba dari dua arah. Dari selatan yakni Kajang dipelopori Karaeng Aco Dg Pagising atau Yahya Daeng Pagising pada tahun 1926, yang bersumber dari KH Abdullah saat berada di Labakkang. Sedangkan dari utara melalui Gantarang dipelopori oleh Muh Noor dan Haji Muh Kasim tahun 1932, yang juga sumbernya dari KH Abdullah saat setelah menjadi konsul Muhammadiyah pertama di Makassar.

Dalam perkembangannya, paham Muhammadiyah di kedua tempat itu terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan beragama di kedua tempat tersebut. Faham Muhammadiyah berkembang sesuai

4 Bagian ini diresumekan dari draf Buku “Mutiar dari Selatan”, dibuat oleh tim penulis Sejarah Muhammadiyah Bulukumba, diketuai oleh Drs. Syamsul Baqir.

kondisi masing-masing wilayah. Muhammadiyah dikembangkan Karaeng Aco Dg Pagising di Kajang dan Muh Noor di Gantarang, berjalan dengan gerakan dan caranya masing-masing tanpa ada hubungan komunikasi dan koordinasi satu dengan lainnya. Kala itu, Bulukumba memang belum terbentuk sebagai kabupaten.

Walaupun belum ada koordinasi dan hubungan komunikasi, kedua kelompok Muhammadiyah ini terus berjalan dan menjadi suatu kekuatan dalam pengembangan ajaran Islam menuju pemurnian syariat di wilayahnya masing-masing. Masyarakat Islam kala itu yang masih dipengaruhi oleh kepercayaan dan keyakinan yang dianutnya sebelum memeluk agama Islam oleh kedua kelompok ini terus melakukan kegiatan tablig, pengajian sesuai visi dan misi masing-masing untuk mengembangkan ajaran Islam dalam komunitasnya melalui paham Muhammadiyah.

Gerakan Muhammadiyah yang diprakarsai Karaeng Aco Dg Pagising dimulai dari Kassi Kajang tahun 1926. Ia memulai kegiatannya bersama masyarakat dari sebuah bangunan sederhana sebagai pusat kegiatan peribadatan (surau) di Kassi, pusat peribadatan itu dibangun secara gotong royong.

Selain membangun Surau, anggota pengajian wanita yang kemudian disebut kelompok Aisyiyah juga membangun sebuah sekolah di Kassi sebagai tempat pembinaan anak-anak kala itu. Sekolah ini kemudian tertatih-tatih karena saat pemerintahan Belanda, kegiatan pendidikan ini selalu dicurigai sebagai gerakan yang menantang pemerintah. Begitupun ketika

pendudukan Jepang para pembinanya tidak diberi peluang untuk mengembangkan pendidikan terhadap anak-anak.

Ketika itu, Karaeng Aco melihat dan mencermati kondisi serta kebutuhan masyarakat akan pembinaan agama. Masyarakat Kajang khususnya di Kassi, butuh pencerahan dan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan syariat Islam sesuai sunnah Rasulullah dan meninggalkan ritual-ritual yang sudah menjadi tradisi masyarakat sebelum Islam masuk. Disamping itu, dalam gerakan ini juga, dikembangkan paham bahwa kedudukan ummat manusia sama derajatnya di hadapan Allah, sehingga penjajahan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena itu, Islam harus membebaskan diri dari tekanan dan penjajahan.

Kembali ke cikal bakal hadirnya Muhammadiyah, Karaeng Aco dengan semangat menyebarkan syariat Islam pada mulanya membentuk kelompok pengajian yang dimulai dari Surau yang dibangun secara gotong royong dengan Masyarakat. Kelompok pengajian yang belum memiliki nama ini, terus berjalan. Namun, perkembangannya terhambat karena dianggap sebagai kelompok yang tidak resmi, tidak memiliki izin atau pengakuan Pemerintah Belanda.

Melihat kondisi ini, Karaeng Aco bersama kelompoknya terus memperkuat kelompok tablignya dengan menghiraukan aturan Belanda sambil mencari organisasi yang bisa menjadi naungan bagi kelompok pengajiannya. Terdengarlah, kalau di Labbakang ada sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah se-

dang berkembang. Hal itu didengarnya dari sejumlah pelaut yang berlabuh di Pelabuhan Kassi, Karaeng Aco pun berangkat ke Labbakang untuk mencari tahu organisasi tersebut.

Sambil mencari informasi pasti akan hal tersebut, Karaeng Aco memastikan apa yang harus dilakukan. Setelah informasinya lengkap, persiapannya pun sudah matang, ia kemudian berangkat ke Labakkang dan bertemu dengan KH Abdullah.

Tidak sulit baginya untuk mendapatkan Muhammadiyah di Labbakkang. Sebab, KH Abdullah sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama ketika itu sedang giat mengembangkan dan memperkenalkan Muhammadiyah di kalangan masyarakat Labbakkang.

Setelah ia berada di Labbbakkang dan menemui KH Abdullah serta menyampaikan maksudnya untuk belajar tentang paham dan organisasi Muhammadiyah. Setelah mengetahui Muhammadiyah dan memahami visi misinya dalam pemurnian Islam, iapun kembali ke Kassi Kajang dan mengembangkan paham serta organisasi tersebut.

Bersama dengan teman-temannya, seperti Musu, Bekkong, Bolong Dg Mattola dan beberapa orang lainnya, ia semakin gencar melakukan tablig dan pengajian sehingga tak berselang lama, paham dan organisasi Muhammadiyah di Kassi pun kian berkembang. Kegiatan Tablig dan pengajian mulai berjalan dan menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat.

Mendengar hal itu, pemerintah Belanda kemudian membujuk Karaeng Aco untuk mendukungnya dalam

menjalankan roda pemerintahan. Kr Aco pun ditawarkan dan diangkat menjadi Kepala Distrik Kajang. Belanda melakukan hal ini untuk membendung dan menghalangi kegiatan pengajian yang dilakukan Kr Aco karena pengajian yang dilakukan itu semakin besar dan meluas ke pelosok kampung. Sebagai tokoh dan bangsawan Kajang, Karaeng Aco awalnya menerima jabatan itu sebagai Kepala Distrik. Namun, kemudian ia letakkan dan menolak untuk melanjutkan karena ia dilarang untuk mengembangkan Muhammadiyah dan harus memilih salah satunya.

Karaeng Aco akhirnya meletakkan jabatan sebagai Kepala Distrik setelah dua tahun ia jabat dan memilih tetap mengembangkan Muhammadiyah dan memimpin jamaah dalam mengembangkan ajaran Islam melalui paham dan gerakan Muhammadiyah.

Setelah meletakkan jabatannya, gerakan Karaeng Aco pun terus dipantau oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan, kegiatan yang dilakukan di Kassi terus ditekan dengan berbagai larangan khususnya larangan untuk berkumpul dan melakukan Tablig serta pengajian dari rumah ke rumah. Karena mendapat tekanan dari Belanda, sementara Tablig dan pengajian harus berjalan di satu sisi, akhirnya pada tahun 1928, Karaeng Aco Hijrah ke Laikang bersama teman-temannya untuk melanjutkan gerakannya.

Di Laikang, Karaeng Aco kemudian menyusun strategi pengembangan Muhammadiyah. Ia melakukan pengajian, membangun Masjid dan memberikan semangat kepada masyarakat akan pentingnya menjalankan

Syariat Agama dengan baik. Disamping menyemangati masyarakat untuk berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Untuk menyemangati masyarakat, maka diperlukan adanya tempat berkumpul dan tempat untuk beribadah. Iapun memutuskan untuk membangun sebuah masjid sebagai pusat kegiatan. Dengan semangat kebersamaan didukung dengan kekuatan iman yang matang, Karaeng Aco bersama Jama Dg Sitakka, Massang Dg Patombong dan Hayang serta teman-teman dan masyarakat mulai mengumpulkan bahan bangunan berupa balok dan papan. Tak lama kemudian, Masjid berukuran 10 x 10 meter yang diberi nama Nurul Jihad pun berdiri dan menjadi tempat peribadatan dan pusat kegiatan Muhammadiyah setelah meninggalkan Kassi di Kajang.

Masjid ini pun pertama kalinya digunakan untuk shalat jumat pada tahun 1928, dihadiri oleh Haji Abdul Malik Karim Abdullah (Hamka) dan menunaikan shalat jumat bersama. Buya Hamka ketika itu, datang ke Laikang untuk bertabligh atas undangan Karaeng Aco.

Dari Masjid Nurul Jihad inilah, Karaeng Aco mengembangkan Muhammadiyah Group Kajang dan terus melakukan kegiatan pengajian membina masyarakat sampai wafatnya pada tahun 1957.

Berbeda dengan kehadiran Muhammadiyah di Kajang, masuknya Muhammadiyah di Gantarang, diawali dengan peristiwa dilarangnya sebuah lembaga da'wah dan pendidikan yang dikenal dengan nama PERKUMPULAN SADAR untuk melakukan kegiatan oleh Pe-

merintahan colonial Belanda. Karena itu, dua orang tokoh pendiri PERKUMPULAN SADAR, yakni Muhammad Noor dan Haji Muhammad Kasim, mencoba untuk mencari organisasi yang dapat menaungi kegiatannya.

Awalnya pada Tahun 1930, masyarakat Gantarang membentuk suatu organisasi muslim yang diberi nama PERKUMPULAN SADAR, dipimpin Muh Noor dan kawan-kawan. Organisasi ini bergerak pada bidang pendidikan dengan melakukan gerakan pemberantasan buta huruf. Untuk program pemberantasan buta huruf tersebut, perkumpulan Sadar mendirikan taman bacaan. Selain itu, juga dilakukan pemberantasan buta agama dengan memberikan pelajaran kepada anggota dan masyarakat tentang shalat, Jawahir, adab kesopanan, tabligh dan sejumlah kegiatan sosial lainnya.

Kegiatan yang dilakukan Perkumuplan Sadar dipusatkan di Masjid Ponre (Masjid Attaqwa Muhammadiyah, sekarang). Masjid Attaqwa adalah salah satu masjid terbilang tua di Bulukumba karena dibangun tahun 1930-an, setelah masjid Jihad di Laikang yang didirikan tahun 1928. Kegiatan pemberantasan buta aksara dan agama yang dilakukan Perkumpulan Sadar, awalnya hanya diikuti oleh orang-orang tua laki-laki dan perempuan.

Dalam melakukan kegiatan pendidikan pemberantasan buta aksara dan buta agama, Perkumpulan Sadar ini menggunakan buku penuntun dari Persatuan Islam Bandung.

Kegiatan pendidikan tersebut terus berjalan dan berkembang, tidak hanya orang tua tapi juga anak-

anak muda pun sudah mulai tertarik bergabung, sehingga tak berapa lama peserta pendidikan semakin ramai dan sudah tidak memungkinkan hanya dilakukan di Masjid yang terbatas.

Dengan dasar pemikiran itulah, para pimpinan dan pengurus Perkumpulan Sadar, berniat untuk mendirikan sebuah sekolah. Namun usaha ini tidak dapat berjalan lancar karena pemerintah Belanda tidak memberikan izin pendirian sebuah sekolah apabila tidak bernaung pada salah satu organisasi yang telah mendapat pengakuan Pemerintah Belanda. Hambatan ini tidak membuat semangat para pengurus Perkumpulan Sadar berhenti. Mereka tetap berusaha untuk mencari jalan keluar mengatasi buta aksara dan agama sebagai upaya mengangkat derajat bangsanya dari keterbelakangan.

Muh Noor dan Haji Muh Kasim akhirnya berangkat ke Makassar dengan tujuan mencari sebuah organisasi yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Belanda. Setibanya di Makassar, Muh Noor dan Haji Muh Kasim, menemui Haji Abdullah (Konsul Muhammadiyah I). Mereka, kemudian mengutarakan masalah yang dihadapinya dalam mengembangkan gerakannya. Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang, akhirnya terjalin kesepakatan nama Muhammadiyah dapat digunakan untuk menaungi kegiatan yang dilakukan Perkumpulan Sadar. Selain itu, disepakati pula untuk mengubah nama Perkumpulan Sadar menjadi Muhammadiyah.

Merekapun kembali ke Bulukumba dan membawa Muhammadiyah sebagai organisasi yang menaungi kegiatan organisasinya. Setibanya di Bulukumba, Muhammad Noor kemudian melakukan musyawarah dengan para pengurus Perkumplan Sadar dan disepakati nama Perkumpulan Sadar berubah menjadi Muhammadiyah. Dengan perubahan inilah, maka pada Februari 1932, diresmikanlah Muhammadiyah Gantarang oleh Pimpinan Muhammadiyah Cabang Makassar oleh Haji Mansyur Al Yamani.

Peresmian dan Pelantikan pengurusnya dihadiri oleh Konsul Muhammadiyah I, Haji Abdullah, Sekretaris Muhammadiyah Cabang Makassar, Kamaruddin Daeng Marala, dan Bendahara Cabang Muhammadiyah Makassar Daeng Manja.

Adapun pengurus Muhammadiyah pertama yang dilantik itu, sebagai penasehat Haji Muhammad Ali Barani Daeng Paewa. Ia seorang hartawan dan dermawan di Gantarang ketika itu. Pelindung I, Haji Andi Sultan Petta Raja (Karaeng Gantarang) dan Haji Kantoro (Kadhi Gantarang). Anggota Komisaris I, Mangngaweang Daeng Nassa, komisaris II, Taddang, Komisaris III, Ambe Lalo Dg Matteredu, Komisaris IV, Ismail, dan Komisaris V, Haji Jaji Daeng Pawinru. Ketua I, H Muh Kasim, Ketua II, H Muhammad Saleh bin H Kantoro. Panitera I, Muhammad Noor, Panitera II, Abdullah (seorang guru SR di Sapiri), dan bendahara H Salehe juga seorang guru SR di Sapiri.

Muhammadiyah Daerah Bulukumba resmi terbentuk pada 8 November 1981 dengan surat keputus-

an Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulukumba No A-2/05/1402 H bertepatan dengan 8 November 1981. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel No A/1/056/1402. 9- XII-1981 dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat No T.172/D-21/1981 tanggal 25 Safar 1402 H bertepatan tanggal 22 Desember 1981. Sejak itulah Muhammadiyah Daerah Bulukumba resmi berdiri sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulukumba, dan berkembang sampai sekarang.

Muhammadiyah di Selayar ⁵

Muhammadiyah di Selayar resmi hadir pada tahun 1930 dengan dibentuknya Muhammadiyah Ranting Selayar. Sebelumnya, kehadiran Muhammadiyah di Kabupaten daerah Selayar dirintis oleh dua orang Haji yakni Haji Hayyong dan Haji Ganiun, dua tokoh Islam kota Benteng, yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebagai orang Selayar yang memiliki hubungan dengan pengurus Muhammadiyah Cabang Makassar. Ia membawa paham Muhammadiyah ke daerahnya tersebut dan berkembang kemudian dengan dibentuknya Ranting pada tahun 1930 itu. Selain itu, Muhammadiyah juga dapat dengan cepat berkembang di Selayar dikarenakan peran penting orang-orang Selayar yang tinggal di Makassar, apa yang mereka peroleh di Makassar itu kemudian diajarkan juga kepada masyarakat Selayar disaat pulang ke kampung

5 Diolah dari Darmawijaya (2012:185-186).

halaman, terutama dikalangan keluarganya sendiri.

Muhammadiyah ranting Selayar pasca didirikannya, memulai kegiatannya dengan aktif membuat tablig-tablig yang dalam perkembangannya cukup menggembirakan. Respon masyarakat Selayar memang cukup antusias sehingga setahun berselang tepatnya pada tahun 1931, Muhammadiyah Ranting Selayar telah berhasil merintis Ranting-Ranting baru. Ranting-ranting baru itu diantaranya adalah Ranting Buki, Ranting Polebungi, Ranting Onto Sapo, Ranting Bontobangun, Ranting Odaiya, dan Ranting Laiyolo.

Setelah kehadiran ranting-ranting tersebut, Muhammadiyah semakin berkembang, bahkan Muhammadiyah mampu menarik perhatian dari tokoh-tokoh Islam lainnya. Misalnya, pada tahun 1933, Muhammad Daeng Boko bersama dengan teman-temannya adalah pimpinan Partai Sarekat Islam (PSI) Selayar yang telah meleburkan organisasi PSI Selayar ke dalam Muhammadiyah Cabang Selayar.

Muhammadiyah di Sinjai ⁶

Perihal awal masuk Muhammadiyah di Sinjai terdapat dua versi. Versi pertama menyebutkan bahwa Muhammadiyah Cabang Balangnipa sebagai cabang pertama Muhammadiyah di Sinjai berdiri pada tahun 1932 dengan pengurusnya, H. Muh. Sanusi dan kawan-kawan. Data ini diperoleh berdasarkan tulisan dari Ha-

6 Diolah dari Radjab (1999:52), Darmawijaya (2012:197-198) dan Harum (2006).

rum (2006). Versi kedua menyebutkan bahwa Muhammadiyah pertama kali masuk di Sinjai pada tahun 1928 ditandai dengan berdirinya Pimpinan Ranting Sinjai. Versi ini berdasarkan ulasan Radjab (1999: 52).

Muhammadiyah Sinjai tidak dapat dilepaskan dari peran Ahmad Marzuki sebagai pendiri Pimpinan Ranting Sinjai. Ahmad Marzuki dibantu oleh Muhammad Sanusi, Andi Bintang, dan La Bunna (Andi Muawiyah Ramly dalam Darmawijaya, 2012: 197,. Organisasi otonom (ortom) yang pertama kali didirikan di Sinjai adalah Hizbul Wathan (HW) yang dipimpin oleh Ibnu Daeng Magassing. Setelah itu, pada tahun 1930, 'Aisyiyah Sinjai pun terbentuk di bawah kepemimpinan Ibu Indar (Radjab, 1999: 52).

Salah satu wujud keberadaan Muhammadiyah di Sinjai adalah ketika H. Muhammad Abduh, Sekretaris Cabang Muhammadiyah Balangnipa, bersama dengan Ust. Marzuki Hasan dan kawan-kawan, mensponsori pembangunan Gedung Sekolah/ Madrasah Muhammadiyah pada tahun 1935 (Harum, 2006). Data ini kembali kontradiksi dengan data yang disampaikan oleh Radjab. Gedung yang berwujud Madrasah Ibtidaiyah ini berdiri pada tahun 1930. Selanjutnya, pada tahun 1933, Madrasah Muallimin berdiri di bawah pembinaan Abdul Rasyid Faqih (Radjab, 1999:52).

Terlepas dari kontradiksi tersebut, sampai sekarang, gedung tersebut (Gedung Tua Kampus I Balangnipa) masih dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan. Gedung tersebut dibangun dengan semangat tinggi, meski jumlah pengurus dan anggota Muham-

madiyah saat itu masih terbatas. Gedung yang digunakan sebagai madrasah ini cukup banyak melahirkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, di antaranya K.H. Jamaluddin Amin, Mantan Ketua Muhammadiyah Sulsel.

Terkait awal masuknya Muhammadiyah di Sinjai disebutkan bahwa sebelum masuknya Muhammadiyah, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) yang dipimpin oleh H. Muhammad Said (Ayah dari Muh. Syarikat atau Muh. Syurkati Said) sudah terlebih dahulu berdiri. Hingga, kedatangan Muhammadiyah akhirnya membuat para pengurus PSII Sinjai membagi diri, ada yang menjadi pengurus PSII, ada juga yang menjadi pengurus Muhammadiyah (Harum, 2006).

Kehadiran PSII dan Muhammadiyah di Sinjai (Balangnipa) membawa pengaruh atas kesadaran berbangsa masyarakat Sinjai melalui pendidikan kepanduan Hizbul Wathan (HW) dan Sarekat Islam *Afdeeling* Pandu (SIAP). Hal ini membuat angkatan muda yang dikader di gerakan kepanduan tumbuh dan berkembang mengikuti irama perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Kesadaran politik kebangsaan pun semakin kuat setelah masuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang juga dipegang oleh tokoh-tokoh pemuda dari PSII dan Muhammadiyah.

Di Sinjai ini, PSII dan PNI mengobarkan perjuangan di bidang politik, sedangkan Muhammadiyah mengobarkan kesadaran beragama melalui pembinaan tablig. Salah satu wujud pembinaan tablig tersebut yaitu dengan melatih para pemuda untuk ber-

tablig, mahir berpidato, dan mendakwahkan agama Islam. Inilah yang kemudian berkembang sehingga masyarakat Sinjai dikenal dengan masyarakat religius. Terlebih dengan munculnya tokoh-tokoh agama yang cukup disengani seperti K.H. Muh. Thahir (Mantan Kepala Urusan Agama Swatanra Bonthain yang meliputi Kewedanan Bulukumba, Selayar, dan Sinjai. Kiai Thahir juga merupakan Mantan *Kadhi* Lamatti). Selain itu, hadir juga K. H. Muh. Hasan (Mantan *Kadhi* Bulu-bulo, yang juga merupakan ayah dari K.H. Marzuki Hasan).

Muhammadiyah di Bone ⁷

Dalam sejarah Islamisasi di Sulawesi Selatan, Bone merupakan kerajaan terakhir yang masuk Islam. Islam masuk di Bone pada tahun 1611, setelah diperangi oleh Kesultanan Makassar. Dalam perkembangannya, di Bone pernah berkuasa seorang raja yang bernama La Maddaremeng. Sebagai Raja Bone, La Maddaremeng berusaha menerapkan syariat Islam di Bone, namun La Maddaremeng tidak berhasil dalam kebijakannya karena mendapat penolakan dari bangsawan Bone, termasuk ibunya sendiri. Kaum bangsawan, termasuk ibunya lebih suka melestarikan adat-istiadat, dari pada mendukung gerakan penerapan syariat Islam yang dicanangkan oleh La Maddaremeng. Hal ini menandakan betapa kuatnya adat-istiadat dalam kehidupan masyarakat Bone dan keadaan seperti ini ber-

⁷ Diolah dari Radjab (1999:55), dan Darmawijaya (2012:199-202)

jalan terus hingga lahirnya gerakan modernisme Islam pada awal abad ke-20.

Di awal abad ke-20, di Bone hanya ada organisasi Persatuan Arab Indonesia (PAI), dan organisasi ini saja yang mendapatkan izin dari Raja Bone, sedangkan organisasi-organisasi lainnya tidak memperoleh izin untuk berdiri di wilayah Bone.

Sikap Raja Bone yang tidak mengizinkan organisasi-organisasi Islam berdiri di wilayah kekuasaannya didasari atas ketakutan akan adanya pencerahan yang bisa merusak tatanan adat-istiadat Bone yang telah diwarisi secara turun temurun. Hal ini bisa dilihat dari sikap Raja Bone yang menolak PAI Cabang Bone untuk mengadakan *algemeene vergadering*. Setelah dikritik, akhirnya Raja Bone memberikan izin kepada PAI untuk mengadakan *algemeene vergadering*, apabila PAI mau menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Raja Bone. Salah satu syaratnya adalah *algemeene vergadering* tersebut tidak boleh menyinggung masalah adat-istiadat negeri.

Apa yang menjadi sejarah tentang perkembangan Islam di Bone, secara umum juga sama halnya dengan yang dialami Muhammadiyah selanjutnya. Muhammadiyah di Bone berulang kali mengajukan surat permohonan izin bagi berdirinya organisasi Muhammadiyah di daerah tersebut, tetapi Raja Bone selaku kepala pemerintahan *selfbestuur* juga tidak memberikan izin. Raja Bone menjelaskan bahwa ia tidak menolak kehadiran organisasi-organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah, sejauh organisasi-organisasi Islam tersebut

tidak bermaksud menyingkirkan adat-istiadat serta kebiasaan masyarakat yang telah wariskan secara turun-temurun, tapi jika organisasi-organisasi tersebut tidak mau menghargai adat, justru ingin menyingkirkannya, maka tidak ada tempatnya di daerah Bone.

Muhammadiyah di Maros ⁸

Muhammadiyah di Maros resmi hadir pada tahun 1929 dengan didirikannya Ranting Maros dengan dipelopori oleh Haji Ba Alwi dan Daeng Rahim. Meski secara resmi hadir di tahun itu, tapi sebelumnya Muhammadiyah memang telah ada di Maros melalui kader-kader pengajian atau Tablig Muhammadiyah Makassar yang berasal dari daerah Maros tersebut.

Sebelum membentuk Muhammadiyah di Maros, Haji Ba Alwi dan Daeng Rahim memang telah giat mengikuti tabligh-tabligh yang diadakan di kota Makassar dan sekaligus juga menjadi pengurus di Muhammadiyah Cabang Makassar.

Akan tetapi dalam perkembangannya, Haji Ba Alwi dan Daeng Rahim, juga merasa perlu untuk menghadirkan Muhammadiyah di Maros. Sehingga atas dasar itulah Ranting Maros berhasil didirikan tepatnya di tahun 1929. Adapun susunan pengurus generasi pertama Ranting Maros waktu itu adalah Haji Ba Alwi, Daeng Rahim, Ali Usman, Haji Ambo Masse dan Haji Sikkiri.

8 Diolah dari Darmawijaya (2012: 188)

Setelah terbentuk itulah, pengurus Muhammadiyah Ranting Maros mulai memasifkan gerakannya dengan berupaya menyampaikan dakwahnya sampai di daerah Camba. Selain itu, mereka juga membuka amal usaha dalam bidang pendidikan.

Muhammadiyah di Pangkep ⁹

Muhammadiyah masuk di Kabupaten Pangkep pada tahun 1927 dibawah oleh Haji Andi Sewang Dg Muntu. Seorang bangsawan yang berpengaruh di wilayah Pangkajene Kepulauan pada waktu itu.

Lahir di Kampung Baruwa, Takalar pada tahun 1905, ia hijrah ke Labbakang, Pangkajene Kepulauan dalam usia enam tahun mengikuti orang tuanya yang pindah. Di Labbakang inilah, ia menyelesaikan pendidikan formalnya hingga *volkschool*. Setelah tamat, ia melanjutkan sekolah di *Vervolgschool* di Pangkajene. Setelah itu, ia merantau ke Sumatera Barat mengikuti orang tuanya yang dibuang ke Sumatera Barat oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena dituduh terlibat dalam suatu usaha pemberontakan menentang penjajahan Belanda.

Di Sumatera Barat, Daeng Muntu melanjutkan pendidikannya di Sumatera Thawalib hingga tingkat Tsanawiyah. Dan melalui belajar di tempat tersebutlah, Daeng Muntu mengenal gerakan pembaharuan Islam hingga pada tahun 1927, ia pulang ke Labbakang setelah pendidikannya selesai.

9 Diolah dari Darmawijaya (2012:186-188)

Setiba di Labbakkang, Daeng Muntu dipertemukan dengan Muhammadiyah, sehingga dari sinilah sebagai orang yang telah mengenal gerakan pembaharuan maka ia dengan mudah menerima paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Ia pun mulai berinisiatif untuk turut mengembangkan faham dan gerakan itu dengan mengajak teman-temannya untuk memelopori berdirinya organisasi Muhammadiyah di Labbakkang.

Keinginan Andi Sewang Daeng Muntu untuk mendirikan sebuah organisasi akhirnya menjadi kenyataan pada tanggal 9 Oktober 1927, melalui suatu pertemuan umum, Muhammadiyah Ranting Labbakkang diresmikan dan Haji Andi Sewang Daeng Muntu langsung dipercayakan sebagai Ketua pertama. Dalam kepengurusan awal Muhammadiyah Ranting Labbakkang ini Andi Sewang Dg Muntu didampingi dan banyak diisi oleh para haji. Selain Haji Andi Sewang Daeng Muntu sendiri, ada Haji Muhammad Daeng Nojeng, Haji Mas-yhud, dan Haji Baso Daeng Bombong. Selain itu duduk pula seorang keturunan Arab, yaitu Sayid Hamid.

Sebagai langkah awal setelah berdiri, Muhammadiyah Ranting Labbakkang mengadakan tabligh dengan mendatangkan muballigh dari Makassar serta mendirikan Amal Usaha Madrasah Diniyah. Untuk memperkuat sekolah yang didirikan itu, hingga tahun 1934, Muhammadiyah Ranting Labbakkang telah mendatangkan empat guru dari Jawa.

Selain itu, Haji Andi Sewang Daeng Muntu bersama pemuka-pemuka umat Islam di Pangkajene, seperti

Haji Muhadi, Haji Abdul Hamid dan Haji Parumpa juga berhasil membentuk Muhammadiyah Ranting Pangkajene, Muhammadiyah Ranting Bonto-bonto, Muhammadiyah Ranting Sigeri, dan Muhammadiyah Ranting Ujungloe. Akhirnya Ranting-ranting inilah yang menjadi penguatan bagi Muhammadiyah dalam melebarkan kiprahnya dan berkembang selanjutnya hingga Muhammadiyah Pangkep berdiri sebagai Pimpinan Daerah yang menaungi ranting-ranting dan cabang yang telah ada.

Muhammadiyah di Barru ¹⁰

Kehadiran Muhammadiyah di Barru dibawa oleh dua orang pedagang yang bernama Haji Asaf dan Haji Yahya. Mereka adalah pedagang yang berasal dari Barru sendiri yang menjadi anggota Muhammadiyah Cabang Makassar.

Karena aktivitas dagang, kota Makassar dan Kabupaten Barru bagi kedua pedagang tersebut tentu menjadi dua daerah yang silih berganti didatanginya, membeli barang di Makassar dan memperdagangkannya di Barru telah menjadi aktivitasnya. Maka setiap ke kota Makassar itulah, mereka selalu meluangkan waktu untuk datang mendengarkan tabligh di masjid Ta'mir. Merasa bahwa apa yang diperolehnya dipengajian itu perlu disebarluaskan, Haji Asaf dan Haji Yahya berkeinginan untuk merintis pula dakwah Muhammadiyah di daerah Barru.

10 Diolah dari Darmawijaya (2012:189).

Setiap pulang dari kota Makassar, mereka mulai mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat Barru, dan dengan segala usahanya akhirnya pada tahun 1930, mereka berhasil membentuk Muhammadiyah Ranting Kampung Barru. Hadirnya Ranting Kampung Barru inilah menjadi cikal bakal berkembangnya Muhammadiyah di Barru, hingga berdiri pula Ranting Tanete, Ranting Ele dan Ranting Raila.

Di Barru, gerakan Muhammadiyah memang tidak sama berkembangnya dengan di daerah lain, Muhammadiyah kurang mendapat simpati dari masyarakat. Jumlah anggotanya pun relatif kecil. Walaupun demikian, mereka tetap bersemangat dalam menyebarkan dakwah Muhammadiyah dengan aktif mengadakan tablig-tablig serta mendirikan mushalla.

Muhammadiyah di Parepare ¹¹

Muhammadiyah pertama kali masuk di Parepare pada tahun 1935. Hal ini bersumber dari pernyataan K.H. M. Sanusi Maggu, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) Parepare/ Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) Sulawesi Selatan Periode 1978—1985. Akan tetapi, di lain pihak, ada juga yang menyatakan bahwa masuknya Muhammadiyah untuk pertama kali ke Bandar Madani ialah pada tahun 1933. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa Muhammadiyah

11 Diresumekan dari draf buku Sejarah Muhammadiyah di Parepare (2015), disusun oleh Drs.H.Sawaty Lambe, Drs. Hisbulah, dan Drs. Muh. Yamin Yusuf.

telah masuk jauh sebelumnya yakni pada tahun 1928.

Awalnya, Muhammadiyah Parepare merupakan pimpinan ranting dari Pimpinan Cabang Rappang. Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pelopor pendiriannya antara lain, M. Nur, seorang guru HIS dari Makassar yang bertugas di Parepare; Ahmad Bakoko, seorang pedagang pemilik toko “Indonesia” asal Pinrang; Abdul Gani, Pengusaha “MPS”; dan Tadi, Kepala Bagian *Landrente* Parepare.

Sesuai dengan watak Muhammadiyah yang selalu menghadirkan karya nyata, Muhammadiyah periode ini antara lain telah mendirikan madrasah ibtidaiyah, *Standarschool*, dan *Schakelschool*, serta membentuk dan mendirikan ranting Muhammadiyah di Jampoe. Data ini berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Kantor Muhammadiyah Daerah Parepare.

Keadaan dan perkembangan keanggotaan Muhammadiyah di Parepare pada waktu itu pun cukup menggembirakan. Menurut buku daftar anggota (*stamboek*) yang ditemukan, sampai dengan masuknya Jepang ke daerah ini, anggota Muhammadiyah telah berjumlah 135 orang. Sayangnya, analisis terhadap perkembangan keanggotaan Muhammadiyah, okupasi, daerah asal, jenis pekerjaan, dan pendidikannya secara menyeluruh tidak dapat dilakukan karena tidak lengkapnya buku daftar anggota tersebut.

Berdasarkan data-data dan catatan yang terdapat di dalam buku *stamboek* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya, anggota Muhammadiyah masa itu terdiri dari pendatang luar daerah Pare-

pare. Akan tetapi, menurut struktur pemerintahan di zaman itu, daerah tersebut masih termasuk ke dalam daerah administratif *Afdeling* Parepare. Data dalam *stamboek* tersebut juga menunjukkan, dari 24 orang anggota Muhammadiyah, 12 orang berprofesi sebagai pedagang (*handelaar*), 9 orang adalah pegawai dan guru (5 pegawai dan 4 guru), dan pekerjaan lain-lain sebanyak 3 orang.

Sayangnya, jelang kedatangan Jepang di Sulawesi Selatan pada tahun 1942, usaha-usaha dan amal yang dibina oleh Muhammadiyah mulai tersendat-sendat. Saat-saat seperti ini pun dimanfaatkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengorganisasi dan menyiapkan pemuda-pemuda daerah untuk menjadi tenaga pertahanan menghadapi Jepang. Oleh karena itu, pemuda-pemuda tersebut dididik dengan kemiliteran menghadapi serangan Jepang. Begitu pun dengan guru sekolah Muhammadiyah, tokoh-tokoh, serta pemuka-pemuka, dan anggota Muhammadiyah. Keadaan ini menyebabkan banyak orang tua murid bersama anaknya menyingkir ke luar daerah Parepare, bahkan ke daerah pedalaman, sementara, Ketua Muhammadiyah Parepare saat itu, M. Nur, dimutasikan ke Makassar dan diangkat sebagai *school-opziner*. Sayangnya, pimpinan yang lain tidak mampu mengatasi situasi ini. Kekosongan dalam pimpinan Muhammadiyah Parepare pun tidak terelakkan. Dengan demikian, terhentilah semua kegiatan formal organisasi, meski pembinaan jiwa kemuhammadiyah secara kekeluargaan dan informal tetap dipelihara dan dilaksanakan.

Warga Muhammadiyah yang bersimpati dengan Jepang berusaha melepaskan diri dari ikatan kemiliteran yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda. Pada saat Jepang mendarat di bumi Indonesia, Muhammadiyah ikut mempercepat proses kejatuhan kekuasaan Belanda ke tangan Jepang. Pada masa itu, masyarakat memang menganggap bahwa Jepang merupakan sekutu Indonesia untuk dapat melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Anggapan itu timbul dengan adanya siasat yang digalakkan oleh Jepang bahwa Jepang adalah “saudara tua” dari matahari terbit dengan semboyan “Asia Timur Raya”. Sikap Muhammadiyah ini kontradiksi dengan sikap PSII, PNI, dan Parindra sebagai partai politik di daerah ini yang justru bekerja sama dengan pemerintahan penjajahan Belanda.

Siasat lain yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati pribumi saat itu adalah pendirian organisasi keagamaan yang bernama *Jami'atul Islamiyah*. Banyak warga dan guru-guru Muhammadiyah, terutama tokoh-tokohnya yang berpengaruh dimanfaatkan oleh Jepang di dalam organisasi ini, kecuali beberapa tokoh, seperti K.H. M. Sanusi Mg., Abbas Daeng Mallawo, Ahmad Makaraus, dan beberapa lainnya. Tokoh-tokoh ini senantiasa menghidupkan jiwa Muhammadiyah dengan menjelajahi seluruh pelosok Sulawesi Selatan. K.H. M. Sanusi Mg bertugas menjelajahi bagian utara, sementara Abbas Daeng Mallawo serta Ahmad Makaraus bertugas di bagian selatan Sulawesi Selatan. Tokoh-tokoh ini memberikan pemahaman kepada anggota Muhammadiyah agar tetap dalam keyakinan

mereka. Paham-paham Al-Islam dan Kemuhammadiyah harus terus dipelihara.

Hubungan Muhammadiyah Pare-pare dengan pimpinan pusat di Jogjakarta selama pendudukan Jepang juga terputus sama sekali. Hal ini karena kegiatan lahir keorganisasian pada saat itu yang sama sekali tidak ada. Pemerintah Jepang saat itu memang melarang aktivitas Muhammadiyah. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh struktur pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia, yang menjadikan Indonesia timur berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang. Pembagaian kekuasaan ini membuat hubungan antara Indonesia Timur terlepas dengan kekuasaan Jepang yang ada di Jawa dan Sumatera serta pulau-pulau bagian dalam barat lainnya yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang yang berkedudukan di Singapura.

Di masa penjajahan Jepang, semua organisasi Islam, selain Jam'iatul Islamiyah, kegiatannya memang diambil alih oleh Jepang, termasuk harta dan kekayaan milik Muhammadiyah Parepare dan organisasi lainnya. Tanah dan sekolah Muhammadiyah Parepare yang terletak di Lontange di daerah Cappa Ujung yang strategis diambil Jepang untuk dijadikan pusat kegiatan Angkatan Laut Jepang dan gudang peralatan persenjataan. Daerah yang sekarang bernama Cappa Ujung dan Jalan Lasinrang dibongkar dan dikosongkan. Penghuninya dipindahkan ke daerah yang sekarang bernama "Ujung Baru". Pada tempat yang telah dikosongkan inilah dibangun pusat Angkatan Laut dan

gudang peralatan Jepang

Pada saat detik-detik pertama proklamasi kemerdekaan diperdengarkan, Muhammadiyah menentukan sikap yaitu menyambut gembira dan mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan tersebut. Muhammadiyah akan berjuang dan membela Negara Republik Indonesia yang baru lahir tersebut oleh karena perjuangan kemerdekaan itu adalah juga perjuangan Muhammadiyah. Sikap ini diambil dalam suatu rapat—semacam konferensi “kilat”—yang diadakan di Makassar dengan spontan. Sikap ini merupakan sikap aktif di saat organisasi lain dan partai-partai hanya berdiam diri atas berita yang didengar dari radio terkait proklamasi kemerdekaan ini.

Keputusan konferensi “kilat” ini dijadikan sebagai modal untuk mempersiapkan kembali usaha-usaha Muhammadiyah di seluruh daerah yang dahulu pernah ada Muhammadiyah di Sulawesi Selatan ini. Keluarga dan pemuda Muhammadiyah dikumpulkan kembali untuk menghidupkan lagi Muhammadiyah. Hingga kelengkapan alat perjuangan terutama di bidang politik Muhammadiyah daerah ini, akhirnya, memelopori berdirinya partai politik Masyumi di daerah ini. Hal ini dianggap perlu dalam rangka perjuangan politik, oleh karena Muhammadiyah sendiri sejak semula telah berprinsip tidak akan menggarap masalah-masalah politik praktis.

Muhammadiyah Parepare dibangun kembali sekitar tahun 1949 akhir atau awal 1950. Pembangunan kembali itu berdasarkan instruksi dari Pimpinan

Muhammadiyah di Makassar. Pembangunan kembali Muhammadiyah di Parepare adalah atas inisiatif dari H. Mahmud Rahim (meninggal tahun 1955), seorang pedagang asal Belawa (Wajo) setelah bermusyawarah dengan beberapa temannya antara lain Said Amir Al Katiri, H. Ahmad Badar, Bustam (seorang penilik sekolah), dan lain-lain,

Dalam rangka pembangunan kembali ini yang pertama sekali diusahakan ialah mengambil kembali tanah Muhammadiyah yang terletak di Lontang'e. Akan tetapi, rupanya karena perubahan situasi, tanah tersebut telah diambil oleh pewakaf semula. Atas kenyataan ini, H. Mahmud Rahim sebagai Ketua Muhammadiyah Parepare, meminta sebidang tanah sebagai pengganti tanah wakaf Muhammadiyah yang telah diambil kembali oleh pewakaf semula itu kepada Kepala Daerah Parepare. Oleh Kepala Daerah, permintaan Muhammadiyah ini dipenuhi. Muhammadiyah diberi tanah lokasi yang bernama Ujung Lare. Di atas tanah itu, sekarang berdiri gedung SMP Muhammadiyah dan sejak berdirinya fakultas yang diasuh oleh Muhammadiyah Parepare juga menempati gedung itu.

Muhammadiyah di Rappang¹²

Kehadiran Muhammadiyah di Rappang dirintis oleh Haji Ibrahim, seorang ulama yang sangat disegani di daerah tersebut. Ia pernah menuntut ilmu selama beberapa tahun di Makkah. Sekembali dari Makkah, ia

12 Diolah dari Darmawijaya (2012:173-175).

diangkat menjadi guru bagi anak-anak bangsawan, sehingga dari pekerjaannya sebagai guru bagi anak-anak bangsawan itu, ia mendapat gelar kehormatan sebagai Gurunna Andi, nama yang dikemudian hari lebih populer dari pada nama aslinya.

Dala suatu kesempatan, Haji Ibrahim dipertemukan dengan seorang pedagang kaya yang bemama Haji Zaini. Dari pertemuan itulah, Haji Zaini belajar pada Haji Ibrahim yang kemudian dalam perkembangannya membuatnya tertarik dengan paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah.

Sebagai pedagang, Haji Zaini memiliki hubungan dagang yang luas dengan beberapa daerah di luar Rappang, di antaranya Enrekang, Pinrang, Mandar dan Tator, bahkan jaringan dagang Haji Zaini sampai di Singapura. Dalam kesehariannya, Haji Zaini terkenal sebagai seorang pedagang yang dermawan dan ulet dalam usaha dagangnya. Ia pernah memberangkatkan 30 orang yang terdiri dari keluarga dan para sahabatnya untuk menunaikan ibadah haji. Semua biayanya ditanggung sendiri oleh Haji Zaini. Dalam menjalankan usaha dagangnya, ia dibantu oleh Haji Ismail Ambo Mariana, yang juga dikenal sebagai seorang muslim yang dermawan.

Pada tahun 1928, Haji Ibrahim dan Haji Zaini mendirikan Muhammadiyah Ranting Rappang. Istri Haji Zaini yang dibantu oleh anak-anaknya dan anak-anak Haji Ismail juga turut mendirikan Aisyiyah. Mereka mengawali kegiatannya dengan mengadakan tabligh. Kemudian mendirikan sekolah Ibtidaiyah serta Tsanawiyah.

Sementara untuk tenaga guru, pengurus mendatangkannya langsung dari Jawa dan Sumatera, mereka adalah Abdul Rauf dari Jawa serta Gazali Syahlan dan Syamsuddin Razak Nasution dari Sumatera. Guru-guru lainnya adalah Ali Mathar, Haji Ibrahim dan Haji Abdul Mannan, ketiganya adalah putra Rappang sendiri. Semua biaya pendidikan, termasuk gaji guru ditanggung oleh Haji Zaini. Bahkan untuk keperluan itu, Haji Zaini telah menyisihkan 40 hektar tanah dan sawahnya serta 12 petak rumah sewanya.

Pada tahun 1929, status Muhammadiyah Ranting Rappang berubah menjadi Muhammadiyah Cabang Rappang. Dari situlah, Pengurus Muhammadiyah Cabang Rappang semakin meluaskan wilayah geraknya. Dalam upaya ini, Haji Zaini sendiri yang langsung turun ke lapangan dalam menyiarkan paham Islam Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat Rappang dan sekitarnya. Karena sulitnya sarana transportasi, Haji Zaini tidak segan-segan menggunakan kuda sebagai kendaraannya, bahkan ia pun rela mendatangi daerah yang ingin dikunjunginya dengan berjalan kaki.

Hasil kerja keras yang dilakukan oleh Haji Zaini membuahkan hasil. Masih di tahun 1929, Haji Zaini berhasil mendirikan Muhammadiyah Ranting Parepare, dibawah pimpinan Haji Bakoko, yang juga berprofesi sebagai pedagang. Ia juga berhasil mendirikan Muhammadiyah Ranting Mandar dan Muhammadiyah Ranting Wonomuiyo. Muhammadiyah Ranting Mandar dipimpin oleh Haji Abdul Rahim dan Haji Harun, keduanya adalah ulama asli orang Mandar. Pada tahun 1930, pe-

ngurus Muhammadiyah Cabang Rappang berhasil pula membentuk Muhammadiyah Ranting Pinrang, yang dipimpin oleh Ambo Saleng dan Wak Daude. Pada tahun yang sama, berdiri pula Muhammadiyah Ranting Jampue, yang dipimpin oleh Haji Haruna, seorang hartawan dan bangsawan di daerah pesisir.

Muhammadiyah di Pinrang¹³

Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Pinrang mulai masuk dan berkembang pada tahun 1928 yaitu kurang lebih dua tahun setelah masuknya Muhammadiyah di Makassar. Perihal masuknya Muhammadiyah di Bumi Lasinrang ini terdapat dua versi pendapat, versi pertama berpendapat bahwa masuknya Muhammadiyah pertama melalui pesisir pantai bagian selatan Pinrang yaitu Desa Jampue yang diperkenalkan oleh *Muhammad Suud Rais*, seorang guru dan pemain bola dari Jawa. Muhammad Suud Rais di samping mengajar sepak bola, juga memperkenalkan Muhammadiyah yang pada akhirnya masyarakat mulai tertarik pada gerakan Muhammadiyah ini, hingga pada tahun 1928 dilaksanakan kongres pertama pendirian Muhammadiyah di Jampue.

Ada pun pengurus/pendiri pada awal masuknya Muhammadiyah di Jampue sebanyak 9 orang, yaitu *Abd Rahim, H.P. Haruna, Abd Hafid, H. Abbas, H. Abu,*

13 Diresumekan dari draf Buku “Matahari Bersinar di Bumi Lasinrang”, ditulis oleh Tim Penulisan Sejarah Muhammadiyah Pinrang.

P. Jabi, H. Saleha, Wa' Kanja, dan satu orang lagi yang dilupa oleh informan. Mereka inilah yang memulai membangun dan mengembangkan Muhammadiyah di Jampue.¹⁴ Selanjutnya, pengembangan Muhammadiyah di daerah ini dibantu oleh guru-guru dari Jawa dan Sumatera. Hal ini sesuai dengan keadaan garis pantai yang sangat mudah di jangkau melalui transportasi laut pada saat itu, sehingga berkembang dan terbentuklah group (ranting) yang jauh dari Rappang,

Versi ke dua berpendapat bahwa Muhammadiyah mulai masuk pertama kali di Pinrang bagian utara, tepatnya di Bungi dengan alasan bahwa kedatangan Muhammadiyah dibawa langsung oleh masyarakat Rappang pada waktu itu. Ini terbukti dengan banyaknya warga dan keturunan masyarakat Rappang yang berdomisili di Desa Bungi, Lembang. Dugaan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa orang-orang Rappang inilah yang lebih dahulu menerima Muhammadiyah di Rappang, sebelum masyarakat Pinrang.

Dari kedua versi masuknya Muhammadiyah di Kabupaten Pinrang dapat diinterpretasi sebagai berikut :

1. Muhammadiyah masuk di Jampue pada tahun 1928 dibawah oleh warga atau kader Muhammadiyah dari Jawa dan membentuk lembaga Muhammadiyah secara resmi, berupa Pengurus Muhammadiyah atau Grup Muhammadiyah Jampue.

14 Abd Hamid Rahim (Ambo Hamka Umur ± 100 Thn) warga Muhammadiyah Jampue, Tim (Drs. Zubair Zaenal) telah melakukan wawancara untuk kedua kali pada tanggal 1 Maret 2015 di rumah (kediaman) Ambo Hamka di Jalan Langnga Ir. 1 Pinrang.

2. Muhammadiyah masuk di Desa Bungi oleh warga dan simpatisan Muhammadiyah dari Rappang, namun tidak membentuk lembaga berupa kepengurusan atau Group Muhammadiyah,

Kehadiran persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Pinrang cukup memberi warna dan pengaruh di tengah-tengah masyarakat yang cenderung tradisional-konservatif dan fanatik terhadap tokoh agama (ulama). Menurut data dan dokumen yang ada, setelah masuknya Persyarikatan Muhammadiyah di Bumi Lasinrang melalui Jampue, kemudian dikembangkan oleh *Sayyid Husain* dari Takkalasi Barru di Kota Pinrang,¹⁵ maka berdirilah Muhammadiyah di Kota Pinrang. Hal ini merupakan usaha atau kerja keras yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah pada saat itu. Di antara tokoh-tokoh tersebut antara lain *H. Abdul Fattah, Wa'Daudu, Ahmad, Abu (Dari Jampue), Jamain, La Kadang, Karto, La Tamping, dan H.Abd Samad*. Tokoh-tokoh ini didukung oleh tokoh masyarakat yang bernama Haji Nure dan pejabat setempat bernama H. A. Calo.

Usaha, komunikasi dan kerja keras yang dilakukan ternyata tidak mudah menuai hasil. Usaha ini bahkan mendapat hambatan dan tantangan dari seorang pen-

¹⁵ Tulisan tangan Wa'Daudu yang kemudian dimasukkan dalam Dokumen Pidato Milad Muhammadiyah ke 82 Tgl 30 Zulhijjah 1412 H/1 Juli 1992 M. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pinrang Periode 1990/1995, oleh Drs. H. Abd Hamid Matong, Sekretaris Drs M Rusydi Rauf. Dan dokumen Majelis Pustaka PDM Pinrang, Ketua Muhiddin Chalid, BA tgl 17 Ramadan 1414.H/ 28 Februari 1994.M.

ghulu Syara' (Kadhi) pada saat itu yang bernama *Haji Abdul Majid*. Akan tetapi, hambatan dan tantangan tersebut tidak dapat mengurungkan usaha dan kerja keras yang dilakukan para tokoh-tokoh Muhammadiyah pada saat itu. Hal ini terbukti bahwa persyarikatan Muhammadiyah tetap terbentuk pada tahun 1929 dengan nama Muhammadiyah Grup Pinrang.¹⁶

Muhammadiyah Group Pinrang Periode I, tahun 1929 – 1932. Pada periode ini, Muhammadiyah Pinrang masih merupakan ranting yang pada masa itu menggunakan istilah grup. Jadi, Muhammadiyah Grup Pinrang merupakan bagian dari cabang Rappang. Pelopornya terdiri dari Sayid Husain (penasihat), H. Abdul Fattah (Ketua I), Wa'Daudu (Ketua II), Ahmad Ambo Saleng (Penulis I), H. Abu (Penulis II), Jamain (Bendahara), dan pembantu-pembantu yang terdiri dari; Lakadang, Karto, Latamping, dan H. Abd Samad. Peresmian dan pengesahan Muhammadiyah Grup Pinrang beserta pengurusnya dilakukan oleh wakil PP Muhammadiyah, Bapak H.M. Yunus Anis pada Tahun 1929. Amal Usaha muhammadiyah yang berdiri pada periode ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM). Madrasah ini berdiri pada tahun 1930 dan dalam perkembangannya, madrasah ini berubah menjadi SD Muhammadiyah I.

16 Muhammadiyah Group Pinrang (Ranting Pinrang, Jampue, dan Bungi)

Muhammadiyah di Sengkang-Wajo ¹⁷

Kehadiran Muhammadiyah di Sengkang berawal dari sebuah pertemuan dalam bentuk pengajian yang dilakukan secara kultural. Waktu itu sekitar tahun 1927, melalui suatu kelompok bernama Kongsu Tujuh di Sengkang. Kongsu Tujuh itu beranggotakan guru dan pedagang, mereka diantaranya Abd. Latif Cenning, Abd. Muttalib, Haebah (guru HIS), dan Yohannes asal NTB (guru HIS).

Kongsu Tujuh ini sering mengadakan pertemuan di Toko Ambo Kemme yang dilaksanakan setiap hari Jumat dengan dipelopori oleh H. Makka. Toko itu sendiri bernama Toko Melati, dan Ambo Kemme sang pemilik toko adalah seorang pedagang dan perantau. Ia kadang merantau sampai di Makassar.

Melalui Ambo Kemme itulah pengajian sering diisi oleh Masyur Al Yamany (seorang keturunan Arab) yang juga Tokoh Muhammadiyah di Ujung Pandang. Mansyur Al Yamany datang ke Sengkang atas undangan Abd. Latif Cenning, seorang pedagang di Sengkang yang juga merupakan langganannya.

Selain Mansyur Al Yamani pengajian kadang pula diisi oleh K.H. Abdullah dan R. Himam (orang Jawa). Sehingga dari usaha pengajian itulah kemudian diperoleh faham Muhammadiyah yang selanjutnya menjadi

17 Diresumekan dari Buku “*Sesudah Makassar Kemudian Sengkang (Satu Fakta Berdirinya Muhammadiyah Sengkang)*”, ditulis oleh Abd. Rahim Toge, 1988. Diterbitkan oleh Majelis Pustaka PWM Sulsel.

pendorong timbulnya hasrat untuk mendirikan organisasinya di kemudian hari.

Sejarah berdirinya Muhammadiyah Sengkang erat hubungannya dengan pemerintah Wajo. Pada waktu itu pemerintah Wajo terdiri dari Selfbestuur dan Pemerintah Beanda.

Selfbetuur (pemerintah otonom) dipimpin oleh seorang raja bergelar Arung Matowa. Pada waktu itu Arung Matowa Wajo bernama Andi Oddang. Seorang Arung Matowa dibantu beberapa anggota adat dan beberapa Arung Lili. Sesungguhnya jiwa agama yang bersarang di dada para pemerintah otonom sangat tebal. Tetapi beraliran *Ahlusunna Wal Jamaah* menurut Mashab Syafiiyyah.

Pemerintah Belanda dipimpin oleh seorang Contoreleuur berkedudukan di Bone. Pemerintah penjajah Belanda ini adalah penguasa yang harus di taati oleh pemerintah otonom yang dipimpin oleh seorang raja yang didewakan.

Baik pemerintah otonom maupun pemerintah penjajah mempunyai sikap keras terhadap Nasionalisme agama. Oleh Mansyur Al Yamany, K.H. Abdullah dan R. Himan ketiganya adalah tokoh agama Islam yang tahu persis pentingnya kebebasan bagi seorang hamba, maka tidak disangsikan lagi bahwa isi dakwanya di Toko Ambo Kemme kepada anggota Kongsi Tujuh akan bernada Nasionalisme Agama.

Hal inipun akhirnya terdengar oleh Contoreleuur, dan Ambo Kemme mendapat panggilan untuk menghadap pada Contoreleuur, tetapi karena Ambo

Kemme dianggap sudah uzur dan diyakini tidak akan memiliki pengaruh besar, Contorleuur meminta kedua anaknya, Abd. Latif dan Abd.Mutalib yang datang untuk menghadap. Dari kedua anak Ambo Kemme inilah, Contorleuur mulai merasa was-was dengan gerakan mereka. Contorleuur mengambil siasat, kedua pemuda itu dijanji jabatan akan diangkat menjadi Arung Loa dan Tancung (Tanah Sitola) agar keduanya tidak melanjutkan gerakan nasional dan gerakan agamanya. Tetapi kedua pemuda itu tidak terpengaruh oleh janji itu. Pemerintah pun dengan segala kaki tangannya tidak berhenti mengikuti langkah-langkah kedua pemuda itu bersama dengan kawan-kawannya.

Bukan saja Pemerintah yang senantiasa mengamati anggota Kongsi Tujuh. Tetapi juga oknum lain, baik ia penganut satu aliran Islam yang bukan Muhammadiyah, maupun ia sebagai pengusaha lain dari Ambo Kemme. Rupanya ini kemudian menjadi kendala bagi tiga tokoh Muhammadiyah Makassar dalam berdakwah di Sengkang.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa Abd.Latif dan Abd.Mutalib sempat dijanji jabatan yang kemudian mereka menolaknya. Hal itu memperbesar kecurigaan pihak Pemerintah. Tetapi anggota Kongsi Tujuh tetap pada istiqomahnya yaitu Islam akan tegak melalui Muhammadiyah. Mereka pun mengambil langkah dengan melakukan pendekatan silaturahmi baik kepada Pemerintah, dan kelompok muslim lainnya.

Kehadiran tiga tokoh Muhammadiyah dari Makassar (Cabang Makassar) yakni Mansyur Al Yamany, K.H.

Abdullah, dan Raden Himam adalah pengaruh besar dalam membuminya ajaran Islam menurut paham Muhammadiyah di Sengkang. Selain dengan kepeloporan H. Makka (Kadhi Wajo) yang merupakan seorang Ulama yang juga banyak menanamkan faham Islam di rumah Ambo kemme melalui pengajiannya tiap hari Jum'at kepada anggota Kongsi Tujuh. Termasuk juga dengan jasa Ambo Kemme sebagai seorang pedagang besar di Sengkang yang dengan ikhlas menyediakan tokonya untuk tempat pertemuan dan pengajian.

Muhammadiyah berdiri di Sengkang tidaklah dengan waktu yang singkat, ia hadir terlebih dahulu secara kultural dan butuh waktu bertahun-tahun untuk merintisnya sebagai sebuah organisasi bernama Muhammadiyah. Toko Ambo Kemme tentu menjadi bukti tempat penggarapan muslim Sengkang untuk ditempah mental, iman dan keyakinannya agar mereka faham dan cinta agama Islam menurut ajaran Muhammadiyah. Sepanjang usaha dan perjuangan mereka, ejekan dan cercaan bahkan telah menjadi hal yang lumrah dilemparkan oleh berbagai pihak kepada mereka.

Dengan segala usaha, kesabaran dan perjuangan yang tanpa henti, dan dengan dana, daya serta ilmunya secara ikhlas memantapkan Islam menurut ajaran Muhammadiyah, maka datanglah rahmat Allah SWT. Muhammadiyah grup Sengkang dapat didirikan pada tahun 1927.

Muslim Sengkang akhirnya telah hadir Muhammadiyah. Dengan kehadiran ini, menjadikan Muhammadiyah juga dapat dengan cepat mengalami perkem-

bangun. Satu tahun pasca resmi didirikan di Sengkang, ia telah dapat membangun sekolah pertama tepatnya pada 16 Juli 1928. Bukan itu saja, pada tahun itu juga diadakan kursus tablig tanpa guru. Kemudian berlanjut pada November 1928, diadakan penjualan buku keluaran Taman Pustaka Muhammadiyah di pasar malam Sengkang. Muhammadiyah semakin berkembang, bahkan dengan pengaruhnya pada tahun itu pula melalui kepeloporan Muhammadiyah, sholat Id untuk pertama kalinya juga telah diadakan di lapangan.

Tahun 1929 pengurus HW pun memberi bantuan kepada bagian pendidikan Muhammadiyah. Tanggal 21 Januari 1929 Muhammadiyah Sengkang telah mengirim utusan ke Kongres ke 18 di Solo. Utusan-utusnya ialah Abd. Latif, Dg. Mattata, dan M. Yahya. Pada 25 Pebruari 1929 Muhammadiyah telah mengangkat pengurus zakat fitrah sehingga pada 11 Maret 1929 telah dapat dikumpulkan zakat dari 446 orang wajib zakat.

Karena perkembangan yang signifikan itu, Konferensi Daerah I Muhammadiyah Sulsel diterima oleh Muhammadiyah Sengkang pada 20 Mei 1929. Sesuai dengan kondisi dan situasinya konferensi itu telah dapat mengumpulkan umat secara besar-besaran dan mengagumkan. Tidak heran kalau sudah konferensi itu anggota Muhammadiyah di Sengkang semakin bertambah pesat. Hingga pada bulan pebruari 1930 mulailah diadakan sholat tarwih sendiri oleh Muhammadiyah Sengkang yang dihadiri rata-rata 15 orang.

Satu hal yang sangat menarik ialah pada tanggal

15 pebruari 1930 diadakan permusyawaratan oleh Muhammadiyah dan semua bagiannya. La Bandolo dari PSI, Saiyyid Safie dari Pengurus Pendiri Mesjid Sengkang, H. Asad dan beberapa orang ternama turut serta dalam hajatan tersebut.

Sejak April 1930 sampai dengan 15 Juli 1930 Muhammadiyah Sengkang mengusahakan berdirinya sebuah sekolah dan lantai dua dari gedung sekolah itu dijadikan mushollah. Tanah tempat berdirinya berukuran 50 x 50 m diberikan oleh Arummatowa (Andi Oddang) terletak di kampung Ladduppa Sengkang. Perhitungan anggaran pembangunan sekolah itu Rp 5.000.00 (pada waktu itu harga beras dua setengah sen = satu rupiah, seratus sen).

Grup Belawa telah mendapat kiriman guru dari Jawa pada 17 Maret 1931 walaupun sekolahnya telah beku. Tetapi kemudian besar kembali. Tanggal 23 1931 telah tiba pengganti Sanyono guru Voksschool Batu-batu dari Yokyakarta.

Akhir-akhir tahun ini yaitu 25 November 1931 Con-torleuur Van Wajo meminta lapor bulanan sekolah Muhammadiyah Sengkang. Dan ini suatu pertanda Pemerintah Belanda pun telah mengadakan perhatian kepada usaha Muhammadiyah Sengkang.

Dalam tempo lima tahun saja muhammadiyah sudah memperlihatkan perubahan banyak di Kota Sengkang dan luarnya. Sekolah, Ranting Muhammadiyah, bagian Aisiyyah, Pandu HizbunWathan, kegitan Tablig, sholat Id, tarwih, zakat, qur'ban, dan sebagainya adalah amalan Muhammadiyah yang jelas dapat dilihat.

Muhammadiyah di Soppeng¹⁸

Sekitar tahun 1927, tujuh orang pengusaha di Sengkang membentuk satu kelompok yang diberi nama “Kongsi Tujuh”. Kongsi Tujuh inilah yang mengadakan pengajian setiap hari Jumat bertempat di rumah Ambo Kemme. Ustaznya ialah H. Makka, kadhi Wajo. Salah seorang anggota Kongsi Tujuh ialah Abd. Latif Cenning. Abd. Latif Cenning ialah yang sering mendatangkan tokoh Muhammadiyah seperti Mansyur Al Yamani dari Ujung Pandang. Mansyur Al Yamani mempunyai hubungan dagang dengan Abd. Latif Cenning. Selain dari itu sering datang pula KH. Abdullah dan Raden Himan. Keduanya tokoh Muhammadiyah dari Makassar.

Tiga tokoh Muhammadiyah di atas inilah yang berhasil mengajak beberapa orang Sengkang sehingga dapat mereka membentuk Grup Muhammadiyah Sengkang. Grup inilah kemudian yang mengembangkan sayapnya, ke Soppeng, Sidenreng Rappang, Palopo, dan Siwa. Di Soppeng berhasil didirikan grup Batu-batu, grup Watan Soppeng, grup Lajjoa, grup Tajjucu, dan Tot tong.

Di Batu-batu, seorang pengusaha bernama La Saenong (Ayah La Unta) mempunyai banyak keluarga di Sengkang. Salah seorang keluarganya juga aktif pada

18 Diresumekan dari Buku “Muhammadiyah: Organisasi Dakwah yang Pertama di Soppeng” (1989), ditulis oleh Drs. H. Abd. Rahim Toge, dengan editor Drs. Muhammad Yamin Data. Penerbit: Majelis Pustaka PWM Sulsel 1985-1990.

pengajian Kongsi Tujuh. Dari pengetahuannya tentang Muhammadiyah yang didapatnya di Sengkang itulah, La Saenong yang berpengaruh di Desa Limpo Majang, Batu-batu, berusaha mendirikan Muhammadiyah di tempat itu. Pada tahun 1930, ia telah dapat mendirikan Muhammadiyah grup Batu-batu.

Berdirinya Muhammadiyah grup Batu-batu, ditandai dengan berdirinya sekolah Muhammadiyah disitu. Salah seorang guru sekolah yaitu Sanyoto. Pada 1 Januari 1931 Muhammadiyah batu-batu telah mengelola sekolahnya sendiri. Dan pada 23 Maret 1931 Sanyoto guru *Volkschool* Batu-batu telah diganti oleh seorang guru yang lain dari Yogyakarta. Diantara muridnya ialah H. Abd. Malik, dan Sinring Ahmad.

Proses berdirinya Muhammadiyah di Watan Soppeng tak jauh berbeda dengan grup Batu-batu. Di Soppeng terkenal Andi Juranga, seorang bangsawan Sengkang yang mempunyai darah Soppeng, ia merupakan seorang muballig Muhammadiyah di Sengkang. Disamping itu, La Saenong dari Batu-batu, yang juga merupakan salah seorang aparat Datu Soppeng senantiasa berusaha pula untuk mendirikan Muhammadiyah di Watang Soppeng.

Usaha tersebut mendapat sambutan baik dari La Dapi dan kawan-kawannya. Dengan demikian maka diadakanlah satu Tabligh Akbar bertempat di Watang Soppeng pada tahun 1933, yang juga merupakan awal berdirinya Muhammadiyah grup Watang Soppeng. Grup ini diresmikan oleh K.H Abdullah Konsul Muhammadiyah dari Makassar. Selain La Dapi, nama-nama lain

yang turut menjadi perintis berdirinya Muhammadiyah di Watang Soppeng, antara lain; La Hati Uwwa Subaedah, H. Reso, Ambo Pipa, La Budu, La Haming, Lambere, H. Salama, H. Sitti Ama, Lantana, H. Kampe, H. Saebe. Tokoh-tokoh inilah sekaligus menjadi muballig Muhammadiyah diwaktu itu. Pada tahun 1934, berdirilah sekolah Muhammadiyah bertempat di rumah Uwak Subaedah, yang berlokasi di sebelah barat kuburan Jerae, sekarang telah dipugar oleh pemerintah.

Sementara itu, di Lajjoa Muhammadiyah pun telah terbentuk. Sebenarnya paham Muhammadiyah telah memasuki Lajjoa pada tahun 1933, dibawa oleh seorang Arab bernama S. Husain. Ia datang dari Tanete Barru memberi pengajian di Lajjoa. Terlihatlah di dalam pengajian itu nama-nama seperti La Emang, H. Jafar, Tibyah, H. Ahmad Dg. Mabbabali, H. Nawung (H. Abd. Latif). Orang-orang inilah berusaha mendirikan Muhammadiyah Lajjoa. Maka diresmikanlah Muhammadiyah grup Lajjoa bersama dengan Muhammadiyah grup Watan Soppeng di Pasar Watang Soppeng oleh K. H. Abdullah pada tahun 1933. Sesudah itu silih berganti menjadi ketua H. Ahmad dengan H. Nawung. Satu hal yang mesti dicatat, ialah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang tergabung di dalam Kelaskaran GAPIS, adalah putra Muhammadiyah Lajjoa, antara lain M. Idris selaku Komandan kelaskaran, yang sebelumnya adalah anggota Pandu Wizbul Wathan.

Grup Muhammadiyah juga mulai terbentuk di Tajuncu, sekitar tahun 1937. Pengurusnya antara lain; Andi Palle (Ketua), La Majja (Sekretaris), Ambo Barli-

an (Bendahara). Mesjid Tajuncu yang letaknya sebelah utara masjid raya Tajuncu sekarang, dibikinlah oleh Muhammadiyah. Pada tahun 1939, telah diberi tugas mengajar di sekolah Muhammadiyah Tajuncu. Kepala sekolah waktu itu ialah Muh. Amin Latif.

Pada tahun 1939, Umar Hasan dan kawan-kawannya mendirikan grup Tottong Turungeng Lappa E. Mula-mula Umar Hasan bersama dengan Lebba membuka sekolah Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Tamatan sekolah itulah yang dimasukkan kedalam sekolah pertama Muhammadiyah. Lama pendidikannya tiga tahun. Izin mendirikan sekolah diperoleh dari Residen Selebes, enam bulan setelah permohonan diajukan. Setelah pemerintah Jepang berkuasa sekolah itu ditutup. La Huseng seorang pengurus Muhammadiyah Batu-batu diangkat menjadi ketua pada grup Tottong. Ia beristri di Turungeng Lappa E. Ambo Lebba Wakil Kepala Kampung Turungeng Lappa E menjadi Wakil Ketua, La Mallarangeng sekretaris, dan La baere anggota. Menurut Umar Hasan, murid-murid SD Muhammadiyah Tottong sempat dibawa ke Sengkang pada Konferensi Muhammadiyah ke-16 Sengkang pada tahun 1941.

Muhammadiyah di Palopo ¹⁹

Andi Djuranga, *Vice Vorsitter* Muhammadiyah Ranting Sengkang adalah orang yang berjasa dalam mengenalkan Muhammadiyah di daerah Palopo dan

19 Diolah dari Darmawijaya (2012:182-185).

sekitarnya. Andi Djuranga sendiri adalah seorang bangsawan Luwu yang bermukim di Sengkang.

Sebagai aktivis Muhammadiyah yang aktif sebelumnya di Sengkang, Andi Djuranga memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam ala Muhammadiyah di tanah leluhurnya. Dengan tekad kuat itulah ia mulai mengembangkan Muhammadiyah, dengan dibantu oleh sahabatnya yang bernama Abu. Dalam perkembangannya paham Muhammadiyah dengan cepat mendapatkan simpati di Palopo khususnya dari kalangan para pedagang, termasuk juga beberapa pedagang keturunan Arab yang ada di Palopo pada waktu itu.

Adapun para pedagang yang bergabung itu adalah La Tang, Sayyid Muhammad serta Sayyid Mahmud, dan melalui kepeloporan ketiga pedagang itu pula, akhirnya pada tahun 1928, mereka berhasil mendirikan Muhammadiyah Ranting Palopo dan menjadikan La Tang sebagai ketuanya.

Dalam kepengurusan tersebut sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa aktivis generasi awal di Palopo ini turut pula beberapa orang keturunan Arab. Mereka adalah Sayyid Mahmud, Sayyid Abdullah, Sayyid Muhammad. Disamping itu, kepengurusan Muhammadiyah Ranting Palopo diperkuat pula oleh beberapa orang bangsawan, seperti Andi Taha dan Andi harun.

Setelah secara resmi berdiri, Muhammadiyah Ranting Palopo terus aktif dalam melebarkan dakwah dan gerakannya, hingga memasuki tahun kedua mereka

berhasil melengkapi organisasinya dengan membentuk bagian Aisyiyah dan Hisbul Wathan, Siti Fatimah adalah ketua petama Aisyiyah. Sementara Hisbul Wathan dipimpin oleh Muhsen dan dibantu oleh Sulaeman, Umar, Landau, Umar Abdullah dan Andi Kasim.

Muhammadiyah Ranting Palopo memulai kegiatannya dengan tablig pada setiap malam jumat. Usaha lainnya adalah mendirikan sekolah dengan cara bergotong royong. Setiap anggota Muhammadiyah dan Aisyiyah waktu itu diminta untuk memberikan sumbangan sekurang-kurangnya satu lembar seng, dan setiap Pemuda Muhammadiyah, termasuk calon murid diminta menyumbang lima buah batu-bata. Pada tahun 1929, Muhammadiyah Ranting Palopo berubah status menjadi Muhammadiyah Cabang Palopo.

Pengurus Muhammadiyah Cabang Palopo, yang sebagian besarnya adalah para pedagang terus berupaya mengembangkan Muhammadiyah di daerah Palopo dan sekitarnya dengan berbagai usaha. Hingga berkat usaha dan kerja keras itulah kemudian membuah hasil, mereka berhasil membentuk Ranting-ranting baru Muhammadiyah, diataranya Ranting Cappaosolo, Ranting Malili, Ranting Kolaka, Ranting Larompong, dan Ranting Masamba. Diantara Ranting-ranting yang ada ini, Muhammadiyah Ranting Cappasolo merupakan ranting yang paling menonjol, ranting ini boleh dikata mapan secara keuangan. Ranting Cappasolo memiliki perahu dagang sendiri yang digunakan untuk mengangkut barang dagangan yang berupa hasil hutan.

Pada tahun 1930, Muhammadiyah Cabang Palopo juga telah dapat membuka sekolah dengan menggunakan gedung yang dibangun secara gotong-royong. Sekolah yang didirikan itu dibina oleh Muhsin, seorang Ustad yang didatangkan langsung dari Yogyakarta. Muhsin dibantu oleh Mahmud dan Muhammad Nur, keduanya adalah guru *Hollands Inlansce School* (HIS) milik pemerintah. Kemudian dalam waktu yang tidak lama, guru bertambah lagi, tepatnya ketika Muhammadiyah Cabang Palopo kembali mendatangkan dua guru bantu yang baru, yaitu Muhammad Bakri dan Muaz Ali. Selain mengajar, guru-guru ini juga berperan besar dalam membina para pemuda.

Pada tahun 1931, Muhammadiyah Cabang Palopo kembali menambah kelengkapan organisasinya dengan membentuk Pemuda Muhammadiyah Cabang Palopo. Selain itu, gerakan Muhammadiyah Cabang Palopo juga semakin meluas sampai di daerah Tanah Toraja, yaitu Makale dan Rante Pao. Oleh Sayid Mahmud sebagai tokoh Muhammadiyah Cabang Palopo yang berjasa dalam mengembangkan Muhammadiyah hingga sampai di daerah Tana Toraja itu.

Muhammadiyah di Tana Toraja ²⁰

Muhammadiyah masuk di Tana Toraja dibawah oleh S. Machmud, seorang pedagang dan guru keturunan Arab yang juga merupakan anggota Muhammad-

20 Diolah dari buku “H.M. Yunus Kadir Membangun Muhammadiyah”, Idwar Anwar (2009).

iyah Cabang Palopo. Muhammadiyah di Palopo pada waktu itu memang sementara dalam perkembangannya yang pesat dalam membua ranting-ranting baru, dan Tana Toraja adalah salah satu daerah yang menjadi sasaran gerakannya dengan membentuk Muhammadiyah Groep Makale dan Rantepao.

S. Machmud datang ke Tana Toraja sekitar tahun 1935, bersama Abdul Gani (Wa'na/Wa'ganing) memang dengan niatan untuk mengembangkan Muhammadiyah. Tidak berselang lama setelah kedatangan keduanya, Muhammadiyah pun terbentuk di Tana Toraja pada tahun itu pula. Adapun generasi pertama yang menjadi pelopor terbentuk dan berdirinya Muhammadiyah di Tana Toraja adalah S. Machmud (Guru Mude) sebagai ketua. Dia dibantu oleh Abd. Gani (Wa'Ganing), Balendeng Makkawaru, Paibing Makkawaru, Ladia, Musa, Muhammad, Makkalu, H. Landicing, Mattaiyya (M. Thaiyyeb), Canno', H. Dara', Ambo Nandi, Ismail (Samaila), dan Andi Achmad.

Pada mulanya, organisasi Muhammadiyah Groep Makale ini masih didominasi oleh para pedagang yang berasal dari luar Tana Toraja. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya masyarakat Tana Toraja yang memeluk agama Islam (minoritas). Di samping itu, pengaruh paham Aluk Todolo dan agama Kristen ketika itu juga masih sangat kuat, sehingga penyebaran paham Muhammadiyah juga masih mengalami kendala.

Kendati demikian, semangat dari pada anggota Muhammadiyah Groep Makale tidaklah surut dalam mengembangkan Muhammadiyah dan menyebarkan

paham kebebasan dari penjajah. Hal inilah yang menjadikan Muhammadiyah cepat tersosialisasi di Tana Toraja dan semakin membangkitkan semangat rakyat rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah.

Pada masa penjajahan Belanda, tidak terkecuali di Tana Toraja, pendidikan merupakan hal yang sangat sulit didapatkan oleh masyarakat kelas bawah. Selain itu, dominasi paham penjajahan juga semakin menggunkung pemikiran rakyat, sehingga tidak sedikit pun muncul pemikiran untuk merdeka.

Karena itulah, keberadaan Muhammadiyah di Tana Toraja terus berusaha membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan, utamanya melalui pendidikan. Untuk memenuhi maksud tersebut, Muhammadiyah kemudian untuk mengiatkan pembinaan keagamaan dan pendidikan melalui kegiatan pengajian-pengajian. Bahkan sekitar setahun setelah berdirinya, Muhammadiyah pun mampu mendirikan Madrasah di Rantepao pada tahun 1936 dan pada tahun 1937 dipindahkan di Makale.

Melalui pengajian-pengajian dan sekolah inilah, paham Muhammadiyah dan kemerdekaan dan diajarkan kepada para siswa. Bukan hanya itu, berbagai kegiatan pun dilakukan untuk membangun persatuan dikalangan masyarakat diharapkan nantinya mampu membangun kekuatan untuk melakukan perlawanan.

Pada tahun 1942, Belanda diusir dari Indonesia oleh Jepang, sehingga penjajahan diambil alih oleh Jepang, hal ini juga secara otomatis membuat banyak perubahan, tidak terkecuali pada sistem pendidikan yang

dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda. Meski tidak terlalu signifikan, namun sedikit memberi ruang bagi sistem pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah.

Tahun 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Dari kemerdekaan ini ruang Muhammadiyah di Tana Toraja menjadi semakin terbuka, sesuatu yang cukup berharga ditorehkan, bukan hanya bagi kepentingan umat Islam, namun juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Kendati Tana Toraja merupakan daerah yang mayoritas penduduknya menganut paham Aluk Tudolo dan agama Kristen, namun keberadaan Muhammadiyah telah mampu menunjukkan jati diri dan komitmen perjuangannya, utamanya dalam bidang pengembangan pendidikan.

Dalam membangun komitmen tersebut, semangat Muhammadiyah di Tana Toraja tak pernah surut. Pada masa revolusi kemerdekaan misalnya, Muhammadiyah memaksakan diri untuk kembali membuka sekolah-sekolah Muhammadiyah yang di tutup oleh Jepang dan Belanda. Oleh Wa' Ganing dan Made Ali, SMP Muhammadiyah di buka kembali pada tahun 1948. Berturut-turut di buka program PGA 4 tahun (1956). Selama setahun beberapa sekolah Muhammadiyah selama setahun beberapa sekolah muhammadiyah ditutup akibat peristiwa 1958 (konflik agama). Pada tahun 1959, SMP Muhammadiyah di buka kembali bersama program PGA 4 tahun (1960). Pada tahun 1970, Muhammadiyah membuka program PGA 6 tahun. Dan di tahun 1979-1984 di buka pula SMA Muhammadiyah

(SMA ini, sejak 1984 dipindahkan ke To'kaluku berhasil bertahan hingga tahun 1997).

Meski begitu sulit bertahan hingga kini, namun Sekolah-sekolah yang dibangun oleh Muhammadiyah tersebut telah menggoreskan tinta emas pada perjalanan sejarah pendidikan di Tana Toraja. Cukup banyak orang-orang sukses bahkan hingga tingkat nasional, yang pernah menuntut ilmu di sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut diantaranya, Prof. Dr. Beddu Amang, Prof. Dr. Badrun Sakariah, Prof. Nasri dan Prof. Noor Nasri Noor.

Mencermati kondisi riil tersebut, Muhammadiyah Tana Toraja tidaklah tinggal diam. Berbagai usaha pembenahan terus dilakukan untuk kembali membangun komitmen, khususnya dalam hal pendidikan. Karenanya Muhammadiyah Tana Toraja tetap berusaha mendirikan kembali beberapa sekolah diantaranya 8 buah Taman Kanak-kanak, 3 buah SMP, 1 Aliyah dan 1 Pondok Pesantren.

Demikian pula dengan Sekretariat semakin lama dirasakan semakin tidak kondusif. Karenanya, setelah beberapa tahun Muhammadiyah Tana Toraja Berkantor di Mesjid Raya Makale, hingga ditahun 1980, setelah Mesjid Raya Makale terbakar, Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah pun dipindahkan ke Jalan Musa.

Di sekretariat yang merupakan bangunan peninggalan Belanda ini segala aktivitas Muhammadiyah digerakkan. Hingga dalam masa kepemimpinan Haji Muhammad Yunus Kadir (2000-2005 dan 2005-2010), sekretariat ini mengalami perkembangan yang signifikan dan sekarang bahkan menjadi Gedung Dakwah

Muhammadiyah cukup megah.

Muhammadiyah di Enrekang²¹

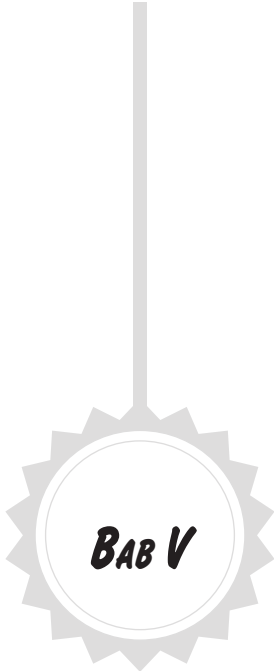
Kehadiran Muhammadiyah di daerah Enrekang dirintis oleh Muhammadiyah Cabang Rappang tepatnya ditahun 1933. Muhammadiyah Cabang Rappang yang sedang massifnya melebarkan sayapnya berhasil membentuk Muhammadiyah Ranting Enrekang.

Haji Ibrahim, Haji Ismail Ambo Sakki dan Ibrahim adalah tiga pedagang yang berjasa dalam proses pembentukan Muhammadiyah Ranting Enrekang itu. Haji Ismail Ambo Sakki sendiri adalah penghulu Enrekang, tapi setelah bergabung dengan Muhammadiyah, ia dipecat dari jabatannya sebagai kadi.

Muhammadiyah Ranting Enrekang memulai kiprah dakwah dan gerakannya dengan mengadakan tabligh-tabligh serta mendirikan amal usaha melalui lembaga pendidikan. Muhammadiyah Enrekang mendirikan sekolah Muallimin, dengan guru pembinanya adalah M. Arifin yang didatangkan dari Batusangkar, Sumatera Barat, ia dibantu oleh guru-guru yang berasal dari daerah Enrekang sendiri.

Selain itu, Muhammadiyah Ranting Enrekang juga berusaha memperluas kiprahnya dengan membantu pendirian Ranting-Ranting baru di wilayah Enrekang, diantara yang berhasil dirintis itu ialah Ranting Bantu Lamba tahun 1934 dan Muhammadiyah Ranting Kalosi tahun 1935.

21 Diolah dari Darmawijaya (2012: 189-190).



BAB V

BIOGRAFI KETUA-KETUA MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN (1931-2015)

Dalam bab IV ini akan dikemukakan biografi singkat 13 orang yang pernah menjabat Konsoel dan Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Namun, sebelumnya, perlu dijelaskan beberapa hal sebagai pengantar bab ini.

Sepanjang sejarah Muhammadiyah, numenklatur pimpinan setingkat pimpinan wilayah telah dua kali mengalami perubahan. Untuk pertama kalinya pada

tahun 1930 atau 1931, Muhammadiyah menggunakan istilah *konsoelat*, kemudian berubah menjadi daerah, dan terakhir berubah menjadi wilayah. Selama menjadi wilayah pun sudah pernah mengalami perubahan. Pada awalnya wilayah disebut Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) dan terakhir sesudah Mukhtar Muhammadiyah di Solo, istilah PMW berubah menjadi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM).

Istilah *consoel*/konsoel dalam Persyarikatan Muhammadiyah digunakan untuk menyebut pimpinan yang secara struktur organisasi berada di bawah pimpinan pusat atau sama dengan pimpinan wilayah yang berada di provinsi sekarang. Konsoel merupakan perwakilan pimpinan pusat (*hoofdbestuur*) Muhammadiyah untuk mengoordinasikan cabang-cabang dan group-group yang ada dalam wilayahnya. Istilah konsoel digunakan dalam Muhammadiyah hingga tahun 1954. Dengan demikian, di Sulawesi Selatan, Pimpinan Muhammadiyah yang terakhir disebut konsoel adalah H. Andi Sewang Daeng Muntu.

Sesudah kemerdekaan RI, Muhammadiyah mengubah nomenklatur konsul menjadi daerah yang wilayahnya sama dengan konsul. Sehubungan dengan itu, maka di Sulawesi Selatan yang ketika itu masih meliputi Sulawesi Tenggara, juga mengalami perubahan. Adapun pimpinan Muhammadiyah yang menggunakan nomenklatur pimpinan daerah adalah H. Quraisi Djailani dan H. Abdul Wahab Rajab. Sedangkan, pimpinan Muhammadiyah yang menggunakan nomenklatur pimpinan wilayah adalah KH. Muhammad Akib, KH.

Abdul Djabbar Ashiry, H. Ahmad Makkarasusu Amansjah, Drs. Muhammad Saleh Hamdani, KH. Muhammad Sanusi Maggu, KH. Djamaluddin Amien, B.A., Drs. KH. Nasruddin Razak, Drs. KH. Baharuddin Pagim, dan Dr. KH. Muhammad Alwi Uddin, M.Ag.

KH. ABDULLAH (*Consoel Moehammadijah Celebes Selatan 1931-1938*)

Abdullah lahir di Maros pada sekitar tahun 1895, ayahnya bernama Abdur Rahman dan Ibunya bernama Halimah. Kepada putranya Abdullah, Abdur Rahman menaruh harapan agar anaknya kelak dapat menjadi ulama. Oleh karena itu, Abdullah kecil diajari mengaji oleh ayahnya sendiri. Setelah bacaan Alquran dan pengetahuan dasar-dasar agamanya dirasa cukup, Abdullah remaja dikirim oleh orang tuanya belajar ke Petta Kalie di Maros.

Berbekal pengetahuan agama yang diperolehnya dari Petta Kalie Maros, Abdullah berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus untuk tinggal belajar memperdalam bahasa Arab dan ilmu agama. Di Mekah, Abdullah menetap lebih kurang sepuluh tahun. Di sana, dia belajar kepada berbagai guru. Konon, di sana dia pernah bertemu dengan Darwis yang kemudian berubah nama menjadi Ahmad Dahlan.

Setelah beberapa tahun tinggal di Mekah, Haji Abdullah kawin dengan Hajjah Fatimah yang juga berasal dari Maros. Hajjah Fatima datang ke Mekah bersama ayahnya untuk menunaikan ibadah haji. Sebagai



KH. ABDULLAH
Consoel Moehammadijah Celebes Selatan 1931-1938

seorang pedagang kaya yang sangat prihatin terhadap perkembangan Islam di daerahnya, ayah Hajjah Fatimah mendorong dan membantu Haji Abdullah agar tetap tinggal di Mekah memperdalam pengetahuan agama hingga kelak dapat menjadi ulama dan kembali ke kampung halamannya. Harapan dan cita-cita mertuanya itulah yang membuat Haji Abdullah betah tinggal di Mekah selama lebih kurang sepuluh tahun.

Setelah bekal ilmu pengetahuan agamanya dirasakan telah memadai, pulanglah Haji Abdullah bersama isterinya ke kampung halamannya di Maros. Sekembalinya ke Maros, mertua yang sangat menyayanginya itu pun mendorongnya hijrah ke Makassar. Haji Abdullah pun membelikan rumah oleh mertuanya di Kampung Butung, dekat Masjid Kampung Butung.

Bersama isteri tercintanya, Haji Abdullah tinggal di rumah tersebut hingga akhir hayatnya. Di rumahnya itulah, Haji Abdullah mengajarkan agama Islam kepada masyarakat sehingga masyarakat pun memberinya gelar sebagai kiai. K.H. Abdullah dikabarkan aktif bersalat jamaah di masjid dan sangat rajin bersilaturahmi dengan sahabat-sahabatnya yang ada di sekitar Kampung Butung, Kampung Melayu, dan Kampung Wajo. Keaktifan Kiai Haji Abdullah mengajar, berjamaah, dan bersilaturahmi itulah sehingga dia banyak berkenalan dengan orang-orang yang telah menerima paham Muhammadiyah melalui hubungan dagang dengan orang-orang dari Jawa (Yogyakarta, Surabaya, Pekalongan, dan lain-lain).

Di antara orang yang telah menerima bahkan telah menjadi anggota Muhammadiyah yang menjadi sahabatnya ialah Mansyur Al-Yamani. Atas inisiatif Mansyur Al Yamanilah sehingga diadakan pertemuan di rumah Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, pada malam tanggal 15 Ramadan. Pertemuan tersebut melahirkan Muhammadiyah Group Makassar yang K.H. Abdullah menjadi salah seorang *bestuur*-nya, dengan posisi *Vice Vorsitter*.

Lebih kurang satu tahun kemudian, K.H. Abdullah malah menjadi *Voorsitter* Muhammadiyah Group Makassar. Dalam masa kepemimpinannya lah Muhammadiyah Group Makassar ditingkatkan statusnya menjadi Cabang. Dalam statusnya sebagai *Vorsitter* Muhammadiyah Cabang, K.H. Abdullah sekaligus menjadi *Coordinator* Group-group yang terbentuk di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, yaitu: Labbakkang, Pangkajene, Maros, Sengkang, Limbung, Bantaeng, Belawa, Majene, Balangnipa, Mandar, Rappang, Pinrang, Palopo, kajang, Soppeng Riaja, Takkalasi, Lampoko, Ele Tanete, Tabba, Batu-batu (Soppeng), Campalagian, dan lain-lain.

Sejak terbentuknya Cabang pada tahun 1927, secara berturut-turut diadakanlah Konferensi Muhammadiyah. Pertama di Makassar tahun 1928; yang kedua di Sengkang pada tahun 1929; ketiga di Majene tahun 1930; keempat Bantaeng tahun 1930; kelima di Labbakkang tahun 1931; dan keenam di Palopo tahun 1932. Pada konferensi ke-6 inilah K.H. Abdullah terpilih menjadi konsul Muhammadiyah Celebes Selatan

yang pertama.

Menurut keputusan konferensi, K.H. Abdullah didampingi oleh Mansyur Al-Yamani selaku *vice voor-sitter* (wakil konsul) , H. Nurdin Dg Magassing selaku *secretaris*, Daeng Manja selaku *penning meester* (bendahara), Andi Sewang Daeng Muntu, Saloko Daeng Malewa, Syahadat Daeng Situju, Ali Seilalla, dan Hajjah Daeng Rampu, sebagai *commissaris* (pembantu umum).

K.H. Abdullah memegang jabatan konsoel dari konferensi ke-7 hingga konferensi ke-13, setelah Haji Andi Sewang Daeng Muntu terpilih menggantikan K.H. Abdullah pada konferensi ke-13 di Selayar, tahun 1938. Meskipun ia tidak terpilih lagi sebagai konsul, K.H. Abdullah dengan kebesaran jiwanya tetap menjadi *commissaris* konsul hingga akhir hayatnya.

K.H. Abdullah meninggal dunia bertepatan dengan serangan bom oleh serdadu sekutu terhadap kapal-kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan pada tanggal 24 April 1944 pukul 12.00 menjelang salat Zuhur.

Beberapa pesan K.H. Abdullah yang sering disampaikan dalam bahasa Bugis, dituturkan kembali oleh Drs. Muhammad Yamin Data, yaitu “*Aja muallejjai tauwe mu enre, tanrerei padammu rupa tau nawatakko menreq*” (Janganlah engkau injak orang untuk kau naik, junjunglah orang agar engkau ditarik naik). “*Ngini piarai bere jamaqna risempoangngi dalleqna pole ri Puangnge*” (Barang siapa yang memelihara salat jemaahnya, Allah memudahkan rezekinya).

HAJI ANDI SEWANG DAENG MUNTU (Consoel Moehammadiyah Celebes Selatan 1938-1957)

Andi Sewang Daeng Muntu lahir di Kampung Baru-wa, Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, pada tahun 1903. Dalam usia sekitar 6 tahun, dia mengikuti orang tuanya pindah ke Labbakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Di Labbakkang, Daeng Muntu menyelesaikan pendidikan formalnya hingga *volksschool*. Lalu dia meneruskan pendidikan ke *vervolgsschool* di Pangkajene. Setelah tamat, Daeng Muntu terpaksa merantau ke Sumatera Barat mengikuti orang tuanya yang dibuang oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pembuangan itu karena orang tuanya dituduh terlibat dalam usaha pemberontakan menentang penjajahan Belanda.

Di Sumatera Barat, Ia melanjutkan pendidikan di Sumatra Thawalib hingga tamat tingkat Tsanawiyah. Di Minangkabau, Daeng Muntu terpengaruh oleh gerakan pembaruan Islam. Namun, tidak diketahui apakah dia telah menjadi anggota Muhammadiyah sebelum pulang ke Labbakkang, ataukah dia bergabung ke dalam Muhammadiyah setelah kembali dari Minangkabau.

Sekembalinya dari Minangkabau pada awal tahun 1927, ide-ide pembaruan H.A. Sewang Dg. Muntu, demikian pula rencananya membuka sekolah, dan keinginannya mendirikan Muhammadiyah Groep Labbakkang sudah sering disampaikan kepada teman-temannya. Dalam artikelnya yang termuat dalam “Al-



HAJI ANDI SEWANG DAENG MUNTU
Consoel Moehammadijah Celebes Selatan 1938-1957

manak Muhammadiyah 1454, Hal. 170”, Daeng Muntu menyatakan bahwa pada permulaan tahun 1927, dia kerap bersoal jawab dengan sahabatnya Machmud terkait kemajuan gerakan Islam di tanah Jawa dan Makassar. Lebih lanjut, dia menyatakan:

“Akhirnya, dalam pada masa itulah penulis mendapat kemufakatan dengan saudara tersebut (Machmud, ed.) akan mendirikan sebuah sekolah Igama, lebih-lebih pula setelah kami mendapat teman dua tiga orang, termasuk almarhum S.H. Hamid. Akan tetapi, kami mufakatilah akan mendirikan perkumpulannya lebih dahulu. Kemudiannya, setelah kami mengadakan *vergadering* berkali-kali, keraslah permintaan saudara Machmud supaya perkumpulan yang didirikan itu ialah Muhammadiyah.”

Pada tanggal 9 Oktober 1927, perjuangan Daeng Muntu untuk mendirikan perkumpulan menjadi kenyataan. Dalam suatu *algemeene vergadering*, Muhammadiyah Groep Labbakkang diresmikan, dengan susunan *bestuur* sebagai berikut: Sewang Daeng Muntu sebagai *voorsitter*, Muhammad Daeng Nojeng sebagai *vice voorsitter*, Machmud Daeng Mammase sebagai *secretaris*, Haji Masyhud sebagai *penningmeester*, Baso Daeng Bombong sebagai *commissaris*, Sayid Haji Hamid sebagai *commisaris*, dan Abdurrahman Daeng Sila sebagai *commissaris*.

Berbekal pengalaman yang sebagian ia peroleh di Minangkabau, dalam waktu yang sangat singkat, Daeng Muntu berhasil mengembangkan Muhammadiyah

Labbakkang. Pada tahun 1928, Muhammadiyah Labbakkang telah berhasil membuka sebuah sekolah. Sejak didirikan hingga tahun 1934, Muhammadiyah Labbakkang telah berhasil mendatangkan empat orang guru dari Jawa (Muntu, 1354: 173).

Di bawah kepemimpinan Dang Muntu, Muhammadiyah Labbakkang berhasil pula mendorong dan memfasilitasi terbentuknya groep-groep Muhammadiyah dalam wilayah *onderafdeeling* Pangkajene lainnya, seperti Groep Pangkajene, Bonto-bonto, Groep Sigeri, dan Ujungloe. Melihat keberhasilan dan potensi yang dimiliki Daeng Muntu, Haji Abdullah selaku *Voorsitter* Muhammadiyah Cabang Makassar (hingga 1932), maupun selaku *Consul Hoofdbestuur* Muhammadiyah Celebes Selatan (mulai tahun 1931) berulang kali mengajaknya pindah ke Makassar, dengan harapan supaya Daeng Muntu dapat mendampingi dirinya. Tetapi, karena alasan pengembangan Muhammadiyah Groep Labbakkang khususnya dan Pangkajene Kepulauan pada umumnya, demikian pula usaha tambak dan pertaniannya yang tidak bisa ia tinggalkan, Daeng Muntu selalu menolak ajakan Haji Abdullah.

Harapan Haji Abdullah pada akhirnya terpenuhi juga. Dalam Konferensi Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang ke-13 di Selayar, tanggal 1—4 Januari 1938, Daeng Muntu terpilih menjadi *Consul Hoofdbestuur* Muhammadiyah Celebes Selatan. Pada saat itulah, Daeng Muntu terpaksa pindah ke Makassar. Tetapi, kali ini, ia tidak lagi mendampingi Haji Abdullah, malahan sebaliknya. K.H. Abdullahlah sebagai *commissaris*-nya.

Haji Andi Sewang Daeng Muntu sebagai *consoel*.

Daeng Muntu berperawakan besar dan berkulit sawo matang kehitam-hitaman. Darah bangsawan Makassar, perpaduan Gowa, Galesong, dan Labakkang mengalir dalam dirinya. Dia terkenal sebagai seorang orator, jago mimbar, dan singa podium yang menguasai bahasa Indonesia, bahasa Makassar, dan bahasa Bugis. Penguasaan atas ketiga bahasa tersebut sama mantapnya, bahkan ia sedikit memahami bahasa Minang.

Dia terkenal sangat rajin membaca dan menulis. Dengan penguasaan Bahasa Indonesia yang mantap, ditambah dengan bakat dan jiwa seni yang memadai, membuat Dg. Muntu mampu menuangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Dia termasuk salah seorang kader yang tulisannya sering dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah. Daeng Muntu pernah menulis buku profil dan sejarah singkat perkembangan Muhammadiyah Celebes Selatan pada tahun 1941 dengan judul “Langkah dan Oesaha Kita.” Dia, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai sastrawan. Dengan menggunakan nama samaran yang merupakan singkatan namanya, HASDA, dia berhasil menulis dua buah novel, yaitu: “*Dari Makassar ke Sawah Lunto*” dan “*Si Cincin Stempel*.”

Pada zaman pendudukan Jepang, Ahmad Sewang Daeng Muntu diangkat menjadi Penasihat Pemerintah Kai-Gun (Angkatan Laut) Jepang di kota Makassar yang waktu itu disebut *San-Yo*. Selain itu, dia juga diangkat menjadi Anggota *Syukai-Gin*, semacam dewan perwa-

kilan rakyat saat itu.

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, dan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Daeng Muntu turut aktif berjuang memertahankan kemerdekaan. Pada era berkuasanya Republik Indonesia Serikat (RIS), dia adalah salah seorang di antara beberapa orang Anggota Parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) yang pro-republik dan berjuang agar Indonesia mendapatkan pengakuan dan kemerdekaan penuh dari Belanda, serta kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika Partai Masyumi dibentuk di Sulawesi Selatan pada awal tahun 1950, Daeng Muntu adalah salah seorang dari beberapa orang pengurus inti Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan. Pada Pemilu 1955, Masyumi mengantar Daeng Muntu duduk sebagai Anggota Parlemen Republik Indonesia. Dia menjadi anggota parlemen hingga lembaga tinggi negara itu dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960.

Selain kegiatan memimpin Muhammadiyah dan menjalankan tugas sebagai Anggota Parlemen Republik Indonesia, Daeng Muntu juga menumpahkan perhatian di bidang pendidikan. Bersama-sama dengan pemuka-pemuka Islam lainnya, dia mendirikan Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Daeng Muntu meninggal dunia di Labakkang pada tanggal 10 Mei 1968, dalam usia 65 tahun. Dia meninggalkan seorang isteri bernama Andi Hudaya Daeng Ngugi dan tiga orang anak, yaitu: Andi Patiri Daeng Matu, Andi Basse Daeng Bannang, dan dr. H. Andi

Sofyan Hasdam, Sp.S. Anaknya yang disebut terakhir pernah pula mengikuti jejak bapaknya sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dan pernah menjabat sebagai Walikota Bontang.

H. QURAI SY DJAILANI (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1957—1966)

Haji Quraisy Djailani dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 22 Februari 1920. Ia berperawakan agak tinggi dengan kulit hitam manis. Ia merupakan satu-satunya anak laki-laki dari enam orang bersaudara. Ia merupakan anak dari pasangan Djailani dan Hj. Indo Ugi. Quraisy Djailani menikah dengan Hajjah Sitti Maemunah. Dari pernikahannya itu, mereka dikarunial empat orang putera dan dua orang puteri.

Haji Quraisy Djailani menempuh pendidikan *Vervolgsschool* di Bantaeng dan tamat tahun 1933. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang *Diniyah School* Muhammadiyah Bantaeng sampai kelas tiga. Setelah itu, ia ikut Sekolah Wal-Fajri di Yogyakarta dan tamat tahun 1942. Ia juga sempat mengikuti kursus Bahasa Inggris di Wal-Fajri selama satu tahun. Pendidikan Pegawai Staf Kementerian Penerangan di Jakarta ia selesaikan pada tahun 1953.

Sekembalinya dari Yogyakarta tahun 1942, ia diangkat menjadi guru bantu pada Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Bantaeng selama tiga tahun. Ia juga sempat menjadi Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bantaeng merangkap Ketua



H. QURAI SY DJAILANI
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1957—1966)

Bagian Pengajaran dan pembantu Majelis Tablig selama empat tahun (sampai tahun 1949).

Haji Quraisy Djailani terpilih menjadi Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara pada Konferensi Muhammadiyah Sulsel ke 20, di Rappang, tahun 1957. Ketika itu, usianya baru 37 tahun. Ia menggantikan Haji Andi Sewang Daeng Muntu. Dia menjadi Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara selama dua periode hingga akhir hayatnya tahun 1966.

Pada bagian akhir kepemimpinannya di Persyarikatan Muhammadiyah, bangsa Indonesia berada dalam keadaan yang serba tidak menentu. Presiden Republik Indonesia Soekarno memberi peluang terlalu besar kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk berkuasa. Akibatnya, pada tanggal 30 September 1965, terjadi percobaan kudeta yang didalangi PKI.

Akibat dari kudeta yang gagal itu, gejolak sosial yang memaksa para pemuda dan segenap komponen bangsa yang anti komunis turun ke jalan berdemonstrasi meminta PKI dibubarkan. Gerakan ini dipelopori oleh pelajar yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pelejar-pelajar Indonesia (KAPPI) dan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Di kemudian hari, para pelaku gerakan yang akhirnya meruntuhkan orde lama dan melahirkan orde baru ini dikenal dengan nama Angkatan 66.

Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang dipimpin Haji Quraisy Djailani tentu tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai salah satu komponen

bangsa yang selalu tampil sebagai pelopor. Oleh karena itu, dengan segera, setelah terbentuk di tingkat pusat, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) pun segera dibentuk di tingkat wilayah.

Dalam catatan Radjab (1999: 133), pengurus KOKAM Sulsel angkatan pertama terdiri dari: Abdul Qadir Sarro (Ketua/Komandan), M. Ja'far Tinri (Wakil Ketua/Komandan Operasi), M. Anas Ponreng (Sekretaris), Drs. Med. M. Nur Daeng Riolo (Anggota Urusan Intelijen), Andi Muhammad Amin (Anggota Urusan Logistik), Haji Muhammad Idrus (Anggota Urusan Penerangan), Marwan Aidid (Anggota Urusan Pembinaan), Roslimah Wahid, BA (Anggota Urusan Yon Wanita), Ina Syamsuddin (Anggota Pembantu Umum).

Sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah, Haji Quraisy Djailani adalah koordinator sekaligus penanggung jawab tertinggi KOKAM. Dalam kapasitas inilah, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan pertemuan dengan banyak pihak. Ia juga intensif melakukan koordinasi dengan sesama pimpinan Muhammadiyah, maupun ortom, dengan melakukan kunjungan ke daerah-daerah, baik yang dilakukan sendiri, maupun mendampingi pejabat. Bahkan, Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel Solihin GP merasa tidak *afdal* berkunjung ke daerah kalau tidak tidak didampingi oleh Haji Quraisy Djailani. Dalam penumpasan PKI, hubungan mesra ABRI dan Muhammadiyah tergambar melalui pernyataan Panglima Kodam Hasanuddin, Kolonel Solihin (Radjab, 1999:138—

139): “pintu rumah saya terbuka siang dan malam bagi pengurus-pengurus Muhammadiyah. Dan kalau memerlukan di kantor, datang saja, tak usah mendaftarkan diri pada piket. Beritahukan saja bahwa anda dari Muhammadiyah”. Kemesraan ini juga tergambar dalam salah satu poin keputusan Musker I AMM Sulselra tahun 1966, dengan mengangkat Kolonel Solihin sebagai warga kehormatan AMM.

Dalam rangkaian kunjungan Quraisy Djailani ke daerah-daerah, ia pernah menunjukkan betapa tinggi perhatian dan baktinya kepada Ibunya. Setiap hendak keluar kota, ia selalu meminta izin kepada sang Ibu. Suatu waktu, ia lupa meminta izin. Ia baru teringat setelah perjalanannya ke daerah sudah jauh meninggalkan Makassar. Dia terpaksa kembali ke rumah orang tuanya untuk pamit dan meminta izin. Menurut Quraisy, rasa hormatnya yang demikian besar kepada sang Ibu merupakan pantulan dari rasa hormat yang ia peroleh dari semua kalangan. Oleh karena itu, maka semestinya, makin tinggi kedudukan seseorang, makin tinggi pula rasa hormat kepada kedua orang tuanya.

Menurut Ahamad Malik Sya’ban dalam wawancara dilakukan oleh penulis, salah satu dari keistimewaan kepemimpinan Quraisy Djailani adalah kemampuannya mempertautkan berbagai keinginan untuk diramu ke dalam sebuah adonan dengan sebuah hasil yang nyaman untuk semua. Dia juga dikenal sabar dan tabah menghadapi situasi segenting apa pun juga.

Ada satu kisah tentang sosok Quraisy yang menarik. Suatu ketika, dia pernah dimarahi oleh Walikota

Makassar, Haji Muhammad Daeng Patompo. Ketika itu, Generasi Muda Islam (GEMUIS) dideklarasikan pendiriannya di Makassar dan Haji Muhammad Daeng Patompo adalah salah seorang deklaratornya. Oleh karena berbagai macam pertimbangan, Muhammadiyah tidak turut serta di dalamnya, bahkan dukungan pun ia tidak berikan.

Ketika Haji Muhammad Daeng Patompo mengetahui itu, Patompo tidak kuasa menahan diri dan pada malam harinya. Dia datang ke rumah Haji Quraisy Djailani di Jalan Manggis Nomor 5. Mulai datang sampai pulang, Haji Muhammad Daeng Patompo mengomel dan terus marah. Sementara itu, Haji Quraisy Djailani hanya terdiam, tidak satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Menurut Quraisy Djailani, melayani kemarahan sama saja dengan menggali lubang pertengakaran, dan hal itu harus dihindari. Boleh jadi, karena sikap Haji Quraisy Djailani yang memilih diam pada saat itu, sehingga keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Haji Muhammad Daeng Patompo datang lagi ke rumahnya. Akan tetapi, kali ini, Patompo datang tidak lagi untuk mengomel dan marah-marah, melainkan untuk meminta maaf atas ulahnya semalam.

Setelah masa-masa kritis dalam kepemimpinannya terlewatkan dengan dibubarkannya PKI pada tanggal 10 Maret 1966, Haji Quraisy Djailani jatuh sakit. Boleh jadi, disebabkan oleh kelelahan dan kurang istirahat selama empat bulan terakhir, sehingga kesehatannya tidak dapat dipulihkan kembali. Dia akhirnya meninggal dunia pada malam tanggal 19 Maret 1966

dalam usia 46 tahun.

Selain berkiprah di Muhammadiyah, Quraisy Jalani juga pernah bekerja pada perusahaan NV Budi, tahun 1945—1951. Di sana, ia bekerja sebagai *Boukhouder* pada cabang perusahaan tersebut di Bantaeng. Kemudian, ia dipindahkan ke Selayar menjadi pimpinan dari perusahaan itu selama satu tahun. Kemudian ia dipindahkan ke Makassar sebagai tata usaha menangani urusan ekspor-impor.

Pada tahun 1951, ia beralih menjadi pegawai negeri pada Departemen Agama Republik Indonesia. Mula-mula, ia diangkat sebagai Propagandis Pada Kantor Penerangan Agama Provinsi Sulawesi sampai November 1952. Lalu, ia dipindahkan ke Jawatan Penerangan Agama Departemen Agama RI di Jakarta, sampai November tahun 1953. Ia ditempatkan kembali pada Kantor Penerangan Agama sebagai Propagandis Kelas I sampai Juli 1956. Selanjutnya, jabatan Kepala Kantor Penerangan Agama Provinsi Sulawesi Selatan ia jabat hingga akhir hayatnya.

H. ABDUL WAHAB RADJAB (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1966—1968)

Haji Abdul Wahab Radjab dilahirkan di Dusun Balla Tabbua, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada tahun 1928. Ia adalah anak kedua dari tujuh orang bersaudara. Orang tuanya memberi nama Abdul Wahab Rajab, karena lahir pada tanggal 27 Radjab, sama dengan tanggal terjadinya peristiwa



H. ABDUL WAHAB RADJAB
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1966—1968

Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.

Wahab Rajab menempuh pendidikan dasar di *Vervolgsschool* (Vvs) Limbung dan tamat pada tahun 1939. Tamat dari Vvs, dia melanjutkan pendidikan ke Madrasah Wustha Muhammadiyah di Jongaya, Kabupaten Gowa (sekarang masuk wilayah Kota Makassar). Setelah lebih kurang dua tahun belajar di Madrasah itu, Jepang mendarat dan mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda. Jepang kemudian memberlakukan kebijakan “menutup semua sekolah formal.” Kebijakan inilah yang menyebabkan Madrasah Wustha Muhammadiyah, tempatnya belajar terpaksa ditutup. Semua muridnya berhenti dan kembali ke kampung masing-masing, termasuk Wahab Rajab.

Setelah Pemerintah Jepang membuka Sekolah Jam’iyah Islamiyah di Watampone, Wahab Rajab meneruskan pendidikan di sana pada tahun 1944—1945. Namun, ia juga tidak tamat, karena setelah Jepang kalah dari sekutu, sekolah ini pun bubar. Tahun 1948, ia kembali melanjutkan pendidikan di sekolah Guru Islam Menengah Atas di Makassar. Lagi-lagi, sekolah ini pun bubar pada tahun 1949, sebelum Wahab Rajab memperoleh surat tamat.

Pada tahun 1950—1952, Wahab Rajab kuliah di Universitas Muslim Indonesia, namun tidak selesai. Kali ini, penyebabnya bukan karena tempat belajarnya dibubarkan atau membubarkan diri, akan tetapi, karena ia telah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan. Untuk menambah ilmu, ia mengikuti kursus-kursus, seperti: kursus bahasa Belanda, kursus bahasa

Inggris, kursus wartawan, dan kursus politik.

Berbekal pendidikan formal yang dimiliki, Wahab Rajab menerjunkan diri ke masyarakat. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, dan Negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Wahab Rajab tampil membe-la dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Awalnya, ia bergabung menjadi anggota Kelaskaran Pemuda-pemuda Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Watampone, Bone, pada tahun 1945.

Setelah kembali ke kampung halamannya di Limbung, Gowa, Wahab Rajab melanjutkan perjuangan menentang penjajah dengan bergabung ke dalam Kelaskaran BUKA-Limbung yang dipimpin oleh Sultan Daeng Mile. Dalam kelaskaran itu, ia duduk sebagai kepala staf. Setelah LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi) terbentuk, BUKA-Limbung adalah salah satu anggota dari kelaskaran tersebut. Dalam perjuangan melawan penjajah inilah, Wahab Rajab ditangkap dan dipenjara oleh Belanda selama lebih kurang tujuh bulan (Februari—Agustus 1947).

Setelah lepas dari penjara, perjuangan menentang penjajah sudah mulai reda. Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) pun terbentuk. Pasca itu, Wahab Rajab menerjunkan diri dalam organisasi keagamaan, yakni Persyarikatan Muhammadiyah. Awalnya, ia menjadi Sekretaris Muhammadiyah Groep Bone, Limbung (1949—1951), selanjutnya sebagai Sekretaris Pimpinan

Muhammadiyah Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, merangkap Ketua Majelis Dakwah (1961—1964). Tahun 1964—1966, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sulselra merangkap Ketua Majelis Tablig. Wahab Rajab ditunjuk sebagai Pejabat Ketua Pimpinan Daerah Sulselra pada tahun 1966—1968. Selanjutnya, Sekretaris Majelis Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1968—1971. Ketua Majelis Hikmah PW Muhammadiyah Sulsel tahun 1971—1977; Anggota PW Muhammadiyah Sulsel tahun 1982—1985; Anggota PW Muhammadiyah Sulsel merangkap Ketua Majelis Tablig tahun 1985—1990; dan Penasihat PW Muhammadiyah Sulsel tahun 1990—1995.

Selain sebagai pengurus, Wahab Rajab juga terlibat aktif dalam pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah. Pada tahun 1948—1949, ia menjadi guru pada Madrasah Ibtidaiyah Jongaya. Tahun 1949—1950, sebagai Kepala Sekolah Menengah Islam Muhammadiyah Cabang Limbung. Sejak tahun 1950, pengabdian Wahab Rajab di bidang pendidikan terputus karena terjun ke bidang lain. Tetapi, tahun 1982, ia kembali lagi ke dunia pendidikan dengan menjadi dosen tetap yayasan pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Tahun itu pula, ia diangkat menjadi Pembantu Rektor IV hingga tahun 1985. Selain sebagai dosen tetap yayasan dan Pembantu Rektor IV Unismuh, ia juga pernah menjadi anggota pada Badan Koordinasi Perguruan-Perguruan Tinggi Islam Swasta Indonesia bagian Timur.

Wahab Rajab juga berpengalaman sebagai birokrat pemerintahan. Ia pernah menjadi Pegawai Departemen Agama RI pada Kantor Pendidikan Agama Propinsi Sulawesi dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Umum pada tahun 1953—1955. Di lapangan ekonomi dan bisnis, Wahab Rajab pernah menjadi menjadi Staf Direksi dan Pemegang Kuasa N.V. Bank Pembangunan Sulawesi di Makassar selama lebih kurang lima tahun (1960—1965). Ia juga pernah menjadi Direktur Apotek Rumah Bersalin St. Khadijah I yang didirikan oleh Muhammadiyah Cabang Makassar.

Dalam bidang politik, Wahab Rajab memiliki pengalaman yang cukup lengkap. Ia pernah menjadi legislator di semua tingkatan legislatif, mulai dari kota, provinsi, sampai ke tingkat pusat. Ketika Partai Masyumi dibentuk di Makassar tahun 1950, Wahab Rajab adalah Sekretaris Cabang Makassar. Tahun 1951, ia menjadi Sekretaris Partai Masyumi Wilayah Sulawesi Selatan hingga tahun 1960.

Ketika Muhammadiyah memprakarsai pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada tahun 1968, Wahab Rajab sedang menjabat sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sulawesi Selatan merangkap Sekretaris Majelis Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia pun diberi amanah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Parmusi Sulawesi Selatan. Tatkala Parmusi berfusi dengan partai Islam lainnya menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ia masih diberi kepercayaan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah partai hasil fusi tersebut.

Wahab Rajab duduk sebagai Anggota DPRD Kotapraja Makassar mewakili Partai Masyumi tahun 1955—1960. Pada saat bersamaan, ia juga merupakan Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Makassar. Jika menggunakan sudut pandang kekinian, hal itu adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan mustahil, mengingat pemisahan eksekutif dan legislatif sangat jelas aturannya.

Tahun 1968—1971, Wahab Rajab diutus oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi anggota DPR-GR RI dan dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi X. Saat itu, Muhammadiyah disebut sebagai ormaspol, sehingga berhak memiliki utusan di DPR-GR. Pada Pemilu 1971, ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Parmusi. Disitu, ia dipercaya sebagai Ketua Komisi D yang membidangi agama, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pada Pemilu 1977, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR/MPR-RI.

Setelah masa baktinya berakhir di DPR/MPR RI tahun 1982, Wahab Rajab kembali ke Makassar. Masa inilah yang ia gunakan untuk menulis buku. Dua bukunya telah diterbitkan, yaitu: *“Iman Dasar Hidup Sejahtera”* dan *“Lintasan Perkembangan dan Sumbangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.”*

Abdul Wahab Rajab meninggal dunia pada tahun 2004. Ia meninggalkan dua orang isteri dan 13 orang anak.

KH. MUHAMMAD AKIB (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1968-1971)

K.H. Muhammad Akib dilahirkan di kota Parepare pada bulan Januari 1910. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Parepare, dia melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Al-Irsyad di Batavia (Jakarta) dan selesai pada tahun 1930.

Sekembali dari Jakarta, ia mengabdikan diri di Muhammadiyah dan ditugaskan mengajar di Perguruan Muhammadiyah Groep Takkalasi, Barru. Dua tahun kemudian, dia dipindahkan mengajar ke Madrasah Muhammadiyah Bulukumba hingga tahun 1935. Dari Bulukumba, dia ditarik ke Makassar menjadi guru di Muallimin Muhammadiyah Makassar. Oleh karena kemampuannya yang sangat menonjol ditambah dengan daya tarik pribadinya, sejak tahun 1936, dia terpilih menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Makassar. Dua tahun kemudian, tepatnya pada Konferensi Muhammadiyah di Sengkang pada tahun 1938, dia pun terpilih menjadi salah seorang *Commisaris* Konsoelat Muhammadiyah Celebes Selatan, mendampingi Haji Andi Sewang Daeng Muntu. Sejak saat itu, hingga tahun 1954, namanya selalu tercantum sebagai Anggota Konsul Muhammadiyah.

Pada tahun 1951, Kementerian Agama menugaskan kepada H. Muhammad Akib membentuk Kantor Urusan Pendidikan Agama Propensi Sulawesi dan sekaligus mengangkatnya sebagai kepala kantor. Satu tahun kemudian, dia dipindahtugaskan menjadi Kepala



KH. MUHAMMAD AKIB
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1968-1971

Kantor Urusan Penerangan Agama Provinsi Sulawesi.

Pada Pemilu tahun 1955, Partai Masyumi menca-
lonkan Haji Muhammad Akib. Ia pun terpilih sebagai
Anggota Parlemen Republik Indonesia. Dia mengabdikan
sebagai anggota parlemen sampai lembaga tersebut
dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.
Selepas menjadi anggota parlemen dengan hak pen-
siun, dia menetap di Jakarta. Selama di Jakarta dia
tetap aktif di Muhammadiyah sebagai pengurus salah
satu majelis di Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sekembali ke Makassar, H. Muhammad Akib me-
neruskan pengabdianannya kepada bangsa dan negara
sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Hasanud-
din hingga akhir hayatnya.

Pada Konferensi PD Muhammadiyah Sulsel ke-28,
di Makassar pada tahun 1968, H. Muhammad Akib ter-
pilih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Sulawesi Selatan dan Tenggara periode 1968—1971.
Dia dibantu oleh tiga orang wakil ketua, yaitu Ahmad
Makkarasus Amansyah, Drs. Abdul Watif Masri, dan
Drs. A. Tadjuddin Baso Rum; tiga orang sekretaris yaitu
Drs. Idrus Nurdin, Drs. Najamuddin, dan Muhammad
Anwar; dua orang bendahara, yakni Drs. A. Muhiddin
dan H. Salama Tambo; dan tiga belas orang anggota se-
bagai ketua majelis dan pembantu, yaitu: K. H. Abdul
Djabbar Ashiry (Ketua Majelis Tarjih), K. H. Marsuki
Hasan (Ketua Majelis Tablig), H. Makmur Ali (Ketua
Majelis Hikmah), M. Saleh Daeng Mattinri (Ketua Ma-
jelis PKU), H. Muhammadong (Ketua Majelis P dan K),
Abdul Qadir Sarro (Ketua Majelis Angkatan Muda),

Drs. M. Saleh Hamadani (Ketua Majelis Ekonomi), Siti Ramlah Azis (Ketua 'Aisyiyah), Abdul Wahab Rajab (Pembantu), Abdul Rahman Jamal (Pembantu), Drs. Fachruddin Ambo Enre (Pembantu), Drs. Med. Nur Daeng Riolo (Pembantu), dan Palinrungi (Pembantu).

Selain aktif di Muhammadiyah, K. H. Muhammad Akib juga aktif menangani masalah-masalah keagamaan secara umum. Bersama-sama dengan Mukhtar Lutfi, dia aktif memprakarsai pendirian Masjid Raya Makassar. Sepanjang hidupnya, dia selalu menjadi pengurus Yayasan Masjid Raya, bahkan pernah menjadi ketuanya.

Kemampuan retorika dan gaya bahasanya yang memukau, membuat semua orang senang mendengarkan khotbah-khotbah dan ceramah-ceramahnya. Semua orang yang pernah bergaul dengannya pasti mengakui ketinggian pribadi dan kedalaman ilmunya. Namun demikian, dia selalu berperenampilan sederhana. Tidak pernah tampak cemberut karena marah atau bersedih. Hal yang selalu tampak dibibirnya hanyalah senyum.

K.H. ABDUL DJABBAR ASHIRY (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1971 – 1975)

K.H. Abdul Djabbar Ashiry Thalib, dikenal waktu kecil dengan nama Andu Lolo yang berarti Pemuda Harapan. Ia dilahirkan di Rappang, pada tanggal 27 Agustus 1916. Ayahnya H Muhammad Ashiry dengan gelar Araie Rilautang Salo yang berarti orang Arab di



K.H. ABDUL DJABBAR ASHIRY
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1971 – 1975

Laotang Salo. Gelar ini diberikan karena ia lama menetap di Makkah untuk menuntut ilmu-ilmu agama, sehingga saat pulang ia selalu memakai bahasa Arab kepada keluarganya maupun kepada muridnya.

Sedangkan ibunya adalah Hj. Halijah yang waktu kecil disapa Ajarei atau Siti Hajar. Nama panggilan ini diberikan orang tuanya dengan harapan Hj. Halijah mampu menjadi sosok wanita yang kuat mental dan dapat melahirkan keturunan yang saleh. Djabbar Ashiry adalah anak sulung dari pasangan ini. Saudara-saudaranya yang lain adalah H. Abd. Rahman Ashiry, Hj. Aisyaton Ashiry, Hj. Syamsiah Ashiry, dan Hj. Hasanah Ashiry.

Jabbar Ashiry memperoleh pendidikan pertama dari ayahnya, melalui pelajaran Al Qur'an dengan huruf-huruf makhraj yang betul. Tahun 1928-1933, ia memulai pendidikan formalnya pada madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Rappang, dengan guru-guru dari Sumatera bernama Abdul Jalil dan Abdul Rauf. Tahun 1937-1940 Jabbar Ashiry dikirim oleh orang tuanya ke Siwa, Sengkang untuk belajar di Madrasah Muhammadiyah, serta nyantri kepada Almarhum Husain Thaha (Mantan Kepala Depag Kota Makassar tahun 1970-an). Tahun 1947, Jabbar Ashiry berangkat ke Mekah, selain untuk menunaikan ibadah haji, juga untuk belajar. Sebelum kembali ke tanah air, Jabbar membeli sejumlah buku. Dari buku-buku itulah dia belajar dengan tekun memperdalam dan meningkatkan kemampuannya di bidang pengetahuan agama, sebagai bekal membimbing umat.

Selama hidupnya KH. Abd. Djabbar Ashiry menikah tiga kali. Istri pertamanya bernama Amirah Binti Musa, dari perkawinan ini, ia tidak dianugerahi anak. Istri keduanya, Hj. Salmiah Binti Haji Taju memberinya keturunan 9 orang anak, yaitu; Hj. Surianti Abd. Djabbar, A.Md, Dra. Hj. Khaeriah Abd. Djabbar (istri dari H. Abd. Jalil Thahir), Mardiah Abd. Djabbar, Drs. Muhajir Abd. Djabbar, Drs. Mujahid Abd. Djabbar, LC, M.Ag, H. Mursid Abd. Djabbar, Mutawakkil Abd. Djabbar, H. Munawar Abd. Djabbar. Setelah Hajjah Salmiah meninggal dunia, K.H. Abdul Djabbar Ashiry menikah lagi dengan Hajjah Marhamah Binti K.H. Hasyim Hasan, dikaruniai tiga orang anak, yaitu H. Ibnu Hasyim Abd. Djabbar, A.Md, Ibnu Katsir Abd. Djabbar (Almarhum), dan Abdul Rahman Abd. Djabbar (Almarhum).

Setelah berkeluarga, Abdul Djabbar Ashiry tetap melanjutkan cita-citanya untuk memperbanyak amal jariyah. Salah satunya dengan mengembangkan pendidikan yang berbasis Islam. Akan tetapi bukan hanya lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islam yang ditekuni oleh Djabbar Ashiry, tapi beliau juga aktif memberi ceramah-ceramah (menjadi mubalig) di Masjid-masjid. Bahkan beliau sempat menjadi Imam tetap di Masjid Raya sewaktu menetap di Jalan Bandang. Ia juga sempat menjadi Pimpinan Majelis Tarjih bersama Marzuki Hasan, pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqamah, Maccopa, Maros.

Setelah pindah ke jalan Majid Raya, ia sempat mendirikan masjid yang bernama Mawaddatullah, di Jalan Sembilan. Efeknya, masyarakat sekitar mulai ra-

jin shalat berjamaah di masjid tersebut. Setiap selesai shalat 5 waktu, Djabbar Ashiry selalu memberikan Kul-tum (Kuliah Tujuh Menit). Hal ini menambah daya tarik masyarakat datang berjamaah ke masjid Mawaddatul-lah. Banyak mahasiswa yang datang dari jauh, bahkan tinggal di masjid itu secara gratis hanya untuk berguru kepada Djabbar Ashiry. Djabbar Ashiry sempat menunjuk salah satu dari jamaah yang sering datang salat berjamaah di masjid tersebut sebagai pengganti beliau saat wafat.

Bersama dengan uztads Gazali Thalib, Bustaman Tamrin, H. Hasanuddin, H. Fachruddin dan H. Wail Mansyur, KH. Abd. Djabbar Ashiry membuka Madrasah Muallimin Muhammadiyah Rappang. Sekolah tersebut menggunakan gedung Sekolah Diniyah Muhammadiyah Cabang Rappang, yang terletak di sebelah utara Masjid Taqwa Muhammadiyah. Muallimin Muhammadiyah Rappang menerima murid baru pada tahun pelajaran 1950-1951.

Perkembangan sekolah ini cukup pesat, gedung Madrasah Diniyah tidak mampu lagi menampung siswa-siswi Muallimin yang bertambah banyak. Sebagian besar siswa tersebut berasal dari Pangkajene, Enrekang, Pinrang, dan Polmas. Untuk mengatasinya, Jabbar Ashiry dan teman-temannya membeli satu lokasi tanah kosong di sebelah selatan lapangan sepak bola Rappang. Di atas tanah itulah, dibangun gedung Madrasah Muallimin Muhammadiyah Cabang Rappang, dan mulai digunakan pada tahun ajaran 1951-1952.

Pada tahun pelajaran 1953, Djabbar Ashiry terpaksa meninggalkan Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang didirikannya karena hijrah ke Makassar. Di Makassar, ia mengontrak rumah di jalan Kubis, belakang pasar Kalimbu. Setelah rumah kontrakannya disana berakhir, ia pindah ke jalan Bandang, samping Masjid Raya Makassar. Di tempat inilah ia membuka pendidikan mubalig Muhammadiyah. Selain itu, ia juga aktif mengajar dan memberi pengajian di Masjid Raya, sekaligus menjadi salah seorang imam rawatibnya. Ketika itu, yang menjadi Ketua Panitia Masjid Raya Makassar adalah Kiai Haji Husaini Thaha.

Kiprah di Muhammadiyah

Djabbar Ashiry pernah menjadi Ketua Pimpinan Muhammadiyah Ranting Lautang Salo Rappang. Ia juga pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Bontoala Makassar, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar. Djabbar Ashiry menjadi Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan periode 1971-1975. Setelah itu, meski terkesan “turun pangkat”, ia masih menerima amanah sebagai Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan Tenggara periode 1975-1980. Menurut, Drs. Muhammad Yamin Data, Kiai Haji Abdul Djabbar Ashiry pernah berpesan, *“Kalau engkau menerima suatu jabatan pastikan engkau ikhlas, jujur, dan berani berbuat.”*

Pada tahun 1963, ketika Ketua Muhammadiyah Sulsel dijabat oleh Haji Quraisy Djailani, Pimpinan Mu-

hammadiyah Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara memutuskan membina Pendidikan Kader Ulama. Rencana semula Pendidikan Kader Ulama tersebut ditempatkan di Cabang Bantaeng dan Cabang Rappang. Panitia yang ditunjuk, yaitu Abdul Djabbar Ashiry sebagai Ketua, Haji Muhammad Arsyad Daud sebagai Sekretaris, Kiai Haji Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ngilau, Haji Abdul Malik Ibrahim, dan Haji Muhammad Nawawi Yazid, masing-masing sebagai anggota. Namun, kendala kekurangan guru pembina dan dana, program tersebut akhirnya dipindahkan ke Makassar, dan ditempatkan di Perguruan Muhammadiyah Cabang Bontoala, di samping Masjid Raya Makassar.

Setelah berjalan beberapa tahun, Pendidikan Kader Ulama direncanakan dipindahkan ke lokasi baru, di Gombara-Bulurokeng, yang merupakan tanah hibah dari Bupati Maros kala itu. Namun, masalah dana dan pembina kembali menjadi kendala. Alhasil, pendidikan Kader Ulama tersebut tidak jadi dipindahkan sampai akhirnya terhenti dengan sendirinya, setelah menamatkan 27 orang ulama muda Muhammadiyah. Penyebab terhentinya pendidikan kader ulama tersebut adalah terjadinya apa yang dikenal dengan peristiwa “Penggajian Lotto”. Lotto adalah nama salah satu bentuk perjudian di masa Walikota Makassar, Muhammad Daeng Patompo, pertengahan tahun 1960-an.

Sebagian peserta Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah yang berjumlah 27 orang, terlibat dan menjadi pelopor pengganyangan Lotto pada tahun

1968. Tindakan tersebut dianggap tindakan kriminal, mereka pun diburu dan ditangkap. Ada yang berhasil dijebloskan ke dalam penjara, ada pula sempat meloloskan diri ke luar daerah.

Salah seorang yang berhasil melarikan diri adalah Mukhsin Kahar. Ia lari ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di sana, ia mengganti nama menjadi Abdullah Said. Sebagai mubalig yang memiliki pengetahuan agama yang luas, dia disenangi masyarakat dan diterima pemerintah. Di Balikpapan, Abdullah Said berhasil mendirikan Pondok Pesantren Hidayatullah di atas tanah perbukitan yang gersang. Keberhasilannya menghidupkan lokasi Pesantren tersebut, mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto. Setelah pesantren Hidayatullah berhasil membuka cabang di beberapa daerah, Mukhsin Kahar alias Abdullah Said mendirikan organisasi sosial keagamaan yang diberi nama Hidayatullah.

Meski ada pula peserta Pendidikan Kader Ulama yang tidak ikut dalam pengganyangan Lotto, namun mereka tak lagi melanjutkan pendidikannya. Akhirnya, tamatlah riwayat Pendidikan Kader Ulama yang didirikan, dipimpin, dan dibina oleh KH. Abdul Djabbar Ashiry.

Para Pembina lainnya, yakni: DR. S. Majidi, Kiai Haji Marzuki Hasan dan Kiai Haji Fathul Muin Daeng Maggading yang secara bersama-sama dengan Kiai Haji Abdul Djabbar Ashiry disebut “Imam Empat”, masing-masing membina pengajian atau pesantren di tempatnya. Dr. S. Majidi membina pengajian di rumah-

nya, dengan nama pangajian “Orang Baik-Baik”. Pada tahun 1970-an, atas permintaan dari kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Dr. S. Majidi membuka lagi pengajian di Jalan Bandang, Samping Masjid Raya, yang pernah ditempati Pendidikan Kader Ulama yang sudah mati. Di sinilah Dr. KH. Mustari Bosra (Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulsel 2010-2015), menjadi murid Dr. S. Majidi selama lebih kurang 4 tahun, sejak tahun 1975 hingga tahun 1978.

Pembina lainnya, Kiai Haji Fathul Muin Daeng Ma’gading, kembali fokus membina pengajiannya di Ta’mirul Masjid. Pengajiannya berlangsung hingga ia meninggal dunia pada tahun 1985. Murid-murid angkatan terakhir yang dibinanya sebelum wafat, itulah yang menjadi cikal bakal pendiri Wahdah Islamiyah. Menjelang Mukhtamar Muhammadiyah ke-38 di Solo, Kiai Haji Fathul Muin Daeng Ma’gading memper-maklumkan kepada murid-murid dan masyarakat secara umum bahwa jika dalam mukhtamarnya, Muhammadiyah menerima asas tunggal yang diharuskan oleh pemerintah Orde Baru, maka dirinya keluar dari Persyarikatan Muhammadiyah. Beberapa hari sebelum pemberangkatan ke Mukhtamar, Kiai Haji Fathul Muin Daeng Ma’gading wafat. Mukhtamar Muhammadiyah pun memutuskan menerima Pancasila sebagai azas organisasinya. Setelah Fathul Muin wafat, dan Muhammadiyah berubah azas, murid-murid Fathul Muin Daeng Ma’gading mendirikan Yayasan Fathul Muin. Yayasan tersebut kegiatannya sama dengan Muhammadiyah, melakukan dakwah amar ma’ruf nahi mung-

kar, dan membina amal usaha. Yayasan inilah yang di-konversi menjadi oranisasi sosial keagamaan Wahdah Islamiyah pada tahun 1998.

Tidak jauh beda dengan kolega “Imam Empat” lainnya, KH. Marzuki Hasan mendirikan pesantren “Darul Istiqamah” Maccopa Maros. Pesantren yang didirikannya itu juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lokasi pesantrennya di Maccopa terus diperluas, dan saat ini sudah menjadi perkampungan yang dihuni oleh ribuan santri dan warga. Cabang-cabang pesantren ini pun telah pula berdiri di beberapa daerah, bahkan sampai di luar Sulawesi Selatan.

Konflik Pesantren

Lokasi yang yang sedianya ditempati Pendidikan Kader Ulama, di Gombara-Bulurokeng, akhirnya ditempati pondok pesantren yang juga berorientasi sebagai tempat pendidikan kader ulama Muhammadiyah. Setelah bekerja keras dengan penuh kesungguhan, KH. Abdul Djabbar Ashiry, bersama KH. Fathul Muin Daeng Ma’gading, DR. S. Madjidi, dan KH. Marzuki Hasan akhirnya berhasil mendirikan pondok pesantren yang diberi nama “Darul Arqam Gombara” pada tahun 1971.

Santri angkatan pertama Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara hanya berjumlah sepuluh orang, semuanya putera. Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1980-an, pondok pesantren tersebut pernah membina lebih dari seribu orang santri putra dan putri.

Dalam kapasitas sebagai Direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara inilah, ia mendapat undangan dari Jama'ah Tabligh untuk menghadiri pertemuan di Pakistan. Setelah kembali, ia mulai menjalankan misi dakwah Jama'ah Tabligh, dengan jalan *Khuruj*, yaitu meninggalkan pesantren untuk berda'wah dan bermalam di masjid-masjid.

Ketika *khuruj* ke Takalar bersama dengan tamu Jamaah Tabligh dari Pakistan sekitar tahun 1985, Mustari Bosra, yang waktu itu merupakan Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Daerah Takalar, sempat dimintai pertolongan oleh Kapolres dan Kapten Munir dari Kodim Takalar untuk mengamati gerakan tamu dari Pakistan yang berpakaian Arab tersebut. Mustari dianggap mu-balig yang punya kecakapan berbahasa Arab. Setelah sampai di Masjid Palleko, tempat tamu itu menginap, Mustari tercengang karena yang membawa tamu itu adalah KH. Abdul Djabbar Ashiry. Dalam pertemuan itu, malah Mustari Bosra diminta oleh KH. Djabbar Ashiry untuk mengalihbahasakan ceramah tamu Pakistan tersebut yang disampaikan dalam Bahasa Arab. Kiai Djabbar Ashiry akrab dengan Mustari, karena Mustari pernah tinggal di rumahnya selama satu bulan penuh. Kala itu, Mustari belajar intensif Bahasa Arab kepada Ustaz Abdul Khalik Rabasan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, pada bulan Ramadan tahun 1976.

Sekembali dari Masjid Palleko, Mustari Bosra menyampaikan kepada Kapolres dan Kapten Munir bahwa tamu yang datang tersebut tidak usah dicurigai.

Mereka adalah turis sekaligus mubalig, yang mungkin karena kekurangan dana sehingga mereka memilih menginap di Masjid. Menurut Mustari, selama menerjemahkan ceramah tamu asing tersebut, tidak ada satu pun ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi yang membawa tamu itu adalah mantan Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara, yang sedang menjabat sebagai Direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Berkat penjelasan Mustari, akhiirnya Kapres dan Kapten Munir dapat memahami, sehingga KH. Djabbar Ashiry dan tamunya tidak diusir dari Takalar.

Belakangan, Mustari Bosra mendapatkan kabar bahwa KH. Djabbar Ashiri dipecat oleh Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dari jabatannya selaku direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Pemecatan tersebut merupakan tuntutan dari keterlibatannya di Jama'ah Tabligh. Pimpinan Muhammadiyah Wilayah waktu itu memintanya menentukan sikap, tetap di Muhammadiyah dan meninggalkan Jama'ah Tabligh, atau memilih Jamaah Tabligh dan keluar dari Muhammadiyah.

Setelah dipecat dari jabatannya selaku Direktur, timbullah konflik di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Sebagian guru dan sebagian santri memihak kepada Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan, dan sebagian lainnya memihak kepada KH. Abdul Djabbar Ashiry. Konflik internal tak dapat dielakkan. Perseteruan terjadi di antara

kedua belah pihak, yang klimaksnya menelan korban jiwa dari santri yang memihak kepada Pimpinan Muhammadiyah Wilayah. Salah seorang dari dua orang santri yang meninggal adalah anak Ustaz Abdul Khalik Rabasang.

Menghindari korban jiwa yang lebih banyak, kedua belah pihak saling mengalah. KH. Abdul Djabbar Ashiry menerima pemecatannya, dan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara juga merelakan sebagian tanah dan bangunan yang diklaim oleh KH. Djabbar Ashiry dan pendukungnya untuk ditempati Pondok Pesantren Darul Aman Gombara. Selain pemisahan lokasi pesantren, perpecahan juga mengakibatkan terbaginya pembina, dan santri. Sebagian tetap berada di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara dibawah binaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Sebagian lainnya tergabung ke dalam Pondok Pesantren Darul Aman Gombara, milik Yayasan Buk'atun Mubarakah yang dipimpin oleh KH. Abdul Djabbar Ashiry bersama Abdul Jalil Thahir.

Setelah dipecat dari jabatannya sebagai Direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, terhentilah segala aktivitas KH. Djabbar Ashiry di Muhammadiyah, setelah berkiprah dan menghabiskan sebagian besar hidupnya mengurus Muhammadiyah dan amal usahanya.

Keteladanan dan Akhir Hayatnya

Salah satu strategi dakwah KH. Djabbar Ashiry adalah “berdakwah dengan pena”. Buku yang ditulisnya berjudul “Penuntun Hidup Bahagia”, yang diterbitkan pada 26 Rabiul Awal 1408 H/18 November 1987 M. Dalam buku tersebut, Djabbar Ashiry menjelaskan tentang pedoman dalam menjalani kehidupan. Tema-tema yang diulasnya antara lain; bagaimana merawat anak mulai dari bayi sampai remaja, kiat menghadapi anak yang sudah dewasa, bagaimana memilih jodoh, tanggungjawab sumi/istri, cara menghadapi orang yang sakaratul maut, dan hal-hal lainnya yang harus diperhatikan dalam mengarungi kehidupan dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Topik-topik yang ditulis KH. Djabbar Ashiry tersebut, merupakan topik yang sering diulasnya pada saat ceramah maupun khutbah (Syamsiah dan Ernaningsih, 2007:64-65).

Sebagai ulama, KH. Djabbar Ashiry dikenal sebagai ulama zuhud, sehingga mendorong banyak orang meneladani kepribadiannya. Menurut Syamsiah dan Ernaningsih (2007:64-65), keteladanan yang dapat diikuti dari Djabbar Ashiry antara lain; keikhlasan dalam mengerjakan sesuatu, ketekunannya dalam menjalankan syariat, kesederhanaan dalam berpakaian, bersifat ramah terhadap siapa saja, senantiasa berprasangka baik, materi-materi ceramahnya menyentuh hati jamaah, tidak tergoda dengan jabatan, dan mampu diterima di seluruh lapisan masyarakat meski berbeda organisasi dan mazhab. Djabbar Ashiry juga tidak pernah

meninggalkan amalan beriktikaf setiap sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.

KH. Djabbar Ashiry meninggal dunia pada tanggal 13 April 1990, setelah dirawat selama 13 hari di Rumah Sakit Islam Faisal. Ia dimakamkan di "Pekuburan Baqi" yang lokasinya masih tersambung dan merupakan bagian dari lokasi Pondok Pesantren Darul Aman Gombara. Walikota Makassar Patompo sempat hadir melepas jenazahnya.

H. AHMAD MAKARASU AMANSYAH (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1975—1978)

Nama lengkapnya adalah Haji Ahmad Makarasu Amansyah Daeng Ngilau. Dia dilahirkan di Kampung Kalappo, Distrik Topejawa, *Onder Afdeling* Takalar pada tanggal 3 Januari 1903. Ayahnya bernama Amansyah Daeng Ngewa, seorang bangsawan lokal, keturunan Lo'mo (Kepala Distrik) Topejawa. Ibunya bernama Tien Ayu Hamidah Daeng Tongi yang berdarah campuran Makassar dan Madura. Daeng Ngilau adalah anak tertua dari sembilan orang bersaudara (dua orang seayah dan seibu serta tujuh orang seayah).

Kakek Daeng Ngilau dari pihak ibunya yang juga bernama Daeng Ngilau pernah dibuang ke Sumenep oleh penjajah Belanda karena kasus pembunuhan. Setelah masa hukuman pembuangannya selesai dijalani, Daeng Ngilau (kakek Ahmad Makkarasusu) menikahi Tien Maemunah, anak dari Raden Mas Kouto di Sumenap, Madura. Kemudian diboyongnya ke Topejawa.



H. AHMAD MAKARUSU AMANSYAH
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1975—1978

Dari Tien Maemunah itulah lahir ibu kandung Ahmad Makkarausu Daeng Ngilau.

Sebagai tuntutan keadaan yang selalu berpindah-pindah tugas, Haji Ahmad Makkarausu Amansyah menikah lima kali. Untuk yang pertama kalinya, dia menikah dengan Dewi Daeng Sugi. Dari pernikahannya dengan isteri pertamanya, dia dikarunia sembilan orang anak, masing-masing bernama Zaenab Basse Kandari Daeng Bau, Zubaedah Basse Mare Daeng Pati, Muhammad Anwar, Kaima Basse Jipang Daeng Patta, Muhammad Akbar, Muhammad Adam, Muhammad Ayub, Zohrah Basse Parang, dan Muhammad Aslan.

Selanjutnya, Ahmad Makkarausu Amansyah menikah lagi dengan Rahmatiah Dang Ngai. Dari isteri keduanya ini, dia dikaruniai dua orang anak, yaitu: Abdur Razak Amansyah dan Abdur Rahman Amansyah.

Pernikahannya yang ketiga dengan Siti Sumirah. Pernikahannya yang ketiga berlangsung di Yogyakarta. Ketika itu Ahmad Makkarausu Amansyah berada di Yogyakarta berjuang mempertahankan kemerdekaan RI. Dia menikahi seorang gadis bernama Sitti Samirah. Dari pernikahannya ini, lahirlah putra-putri yang bernama Bambang Sumiro dan Ummi Astuti.

Ketika ditugaskan ke Bukittinggi, sebagai Ketua Mahkamah Syariah Sumatra, Haji Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ngilau menikah lagi untuk yang keempat kalinya dengan Yuliani Islami. Dari pernikahannya itu, mereka dikarunia lagi dua orang anak, yaitu: Muhammad Zain dan Zubaedah.

Pernikahannya yang kelima terjadi ketika dia diculik oleh gerombolan DI/TII dan ditempatkan di Malakaji. Di sana dia menikahi seorang perempuan, tetapi tidak dikarunia anak.

Haji Makarausu Amansyah Daeng Ngilau menempuh pendidikan formalnya di *Vervolgschool* (VvS) Takalar. Setamat dari VvS Takalar, dia melanjutkan pendidikannya ke *Normal School* di Makassar. Berbekal ijazah *Normal School*, Amansyah terangkat menjadi guru negeri dan ditempatkan di Bontoala. Ketika itulah, Amnansyah berkenalan dengan Muhammadiyah dan sekaligus menjadi *bestuur* Muhammadiyah Groep Bontoala. Dari Bontoala, Amansyah dipindahkan ke Bau-bau, dari Bau-bau dimutasi ke Kendari dan dari kendari dipindah ke Mare. Setelah Jepang dia kembali ke Makassar.

Di setiap daerah yang di tempati bertugas Makarausu Amansyah Daeng Ngilau selalu berusaha mengembangkan dakwah Muhammadiyah dan mempepori pembentukan Groep Muhammadiyah. Setelah beberapa tahun bertugas di Mare sebagai kepala sekolah, dia berhasil mendirikan Muhammadiyah Groep Mare. Sebelum kemerdekaan, bahkan hingga tahun 1960-an, Mare adalah satu-satunya daerah dalam wilayah *onderafdeeling* (Kabupaten) Bone yang ada Muhammadiyahnya.

Haji Makarausu Amansyah Daeng Ngilau terpilih menjadi ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara menggantikan Kiyai Haji Abdul Djabbar Ashi-

ry pada tahun 1974. Dan, dia tetap menjadi ketua Muhammadiyah sampai wafat pada tahun 1977.

Memimpin Muhammadiyah Sulsel

Dari laporan pertanggungjawaban PMW Sulselra Periode 1974—1978, periode kepemimpinan Ahmad Makkarausu Amansyah, secara umum dilaporkan bahwa kader Muhammadiyah mengalami penurunan antusias untuk bersyarikat. Akan tetapi, setelah Mukhtar ke-40 di Surabaya, terpaan angin cobaan tersebut cukup mereda dan awan tebal masalah-masalah yang selama ini dianggap menaungi persyarikatan ini menjauh. Namun, warga yang sudah terlanjur meninggalkan Muhammadiyah tidak kunjung kembali, begitupula yang sedang beristirahat tak kunjung mendekat.

Pengaruh iklim politik saat itu menjadi salah satu penyebab niat untuk bersyarikat menurun. Hampir dapat dikatakan semua organisasi mengalami hal serupa akibat dari cengkeraman orde baru, kebebasan berkumpul dan bersyarikat menjadi hal yang tabu saat itu. Apalagi masa kurun waktu 1970-an, saat iklim politik memanas menjelang pemilu tahun 1977.

Keaktifan pimpinan atau anggota Muhammadiyah dalam membina dan mengembangkan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) sebagai salah satu peserta pemilu 1977 menjadi salah satu penyebab hal tersebut. Hingga tiba suatu kesimpulan sesaat terhadap Muhammadiyah yang menganggap persyarikatan ini tidak dapat dipisahkan dari sebuah partai politik.

Hal tersebut menimbulkan ketakutan tersendiri oleh warga Muhammadiyah untuk menyatakan diri secara terang-terangan sebagai anggota. Tidak hanya anggota yang berstatus pegawai negeri sipil, pedagang, petani, nelayan, dan segenap warga pun takut mengakui keanggotaannya. Bahkan, menyebut nama Muhammadiyah saja mereka enggan.

Situasi tersebut menimbulkan hal yang mencekamkan hati, sehingga saat itu muncul kutipan oleh kalangan warga Muhammadiyah sendiri “Seingat saya, sepanjang umur Muhammadiyah, baru kali ini mengalami tantangan yang sungguh sungguh mengerikan. Betapa tidak, karena sesama warga Muhammadiyah kita saling curiga-mencurigai.”

Keadaan tersebut menjadi faktor yang melumpuhkan organisasi persyarikatan, terutama di daerah, cabang dan ranting. Hal ini menyebabkan data pengesahan pimpinan daerah sampai saat itu belum juga selesai seluruhnya. Persentase pengesahan pimpinan cabang dan pengesahan kembali cabang-cabang dan ranting sebagai realisasi dari pelimpahan wewenang pimpinan pusat yang sekalipun sudah sejak tahun 1975 digalakkan, belum selesai pada akhir periode tahun 1978. Hingga kepengurusan tersebut selesai baru mencapai 40 % yang sudah disahkan yang memaksa untuk bekerja keras pada periode berikutnya guna merampungkan hal tersebut.

Menghadapi masalah masalah tersebut, pengurus memutuskan untuk mengambil beberapa langkah seperti membina hubungan lebih dekat dengan peme-

rintah. Keakraban dalam hal ini ialah saling pengertian, paham-memahami sehingga terjalinlah hubungan yang baik antara Muhammadiyah dengan pemerintahan. Keakraban dengan pemerintah ini diputuskan pada Sidang Tanwir tahun 1973 yang dihelat di Yogyakarta sebagai program yang harus diprioritaskan. Sikap konfrontatif masa itu dianggap sebagai hal yang kurang perlu mengingat kondisi represif orde baru. Namun, tidak berarti Muhammadiyah menutup mata dan bungkam seribu bahasa terhadap keadaan dan gejala masyarakat terutama terhadap kemaksiatan yang terjadi dalam masyarakat. Dapat dipahami hal demikian mengingat Muhammadiyah memiliki banyak hal yang perlu dipertimbangkan jika sampai terjadi pelarangan terhadap aktivitas memajukan umat.

Mengapa muncul keputusan menjalin keakraban ini? Sebab kritikan apalagi mencaci maki bukanlah cara yang bijaksana oleh Muhammadiyah dan dianggap tidak akan dapat menyelesaikan persoalan. Pendekatan pribadi dengan pejabat lebih dipilih untuk dapat menyelesaikan persoalan. Dalam rangka menjalin keakraban dengan pemerintah ini, maka Pengurus Muhamadiyah khususnya di wilayah Sulselra kala itu menempuh langkah-langkah dengan mengadakan beberapa pertemuan seperti silaturahmi dengan Gubernur Sulsel H Achmad Lamo dalam rangka hari iduladha 1396 H, silaturahmi dengan Panglima Kodam XIV/HN Brigjen TNI Sukma E di rumah jabatannya pada tanggal 25 desember 1975, serta Panglima Kodam yang baru Brigjen TNI Kusnadi pada tanggal 6 Oktober 1977, dan

dilanjutkan dengan ramah-tamah dengan keluarga besar Muhammadiyah yang berdomisili di Kota Makassar kala itu.

Selain itu, pengurus Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ahmad Makkarauzu mengadakan kunjungan kepada Gubernur Sul-sel H Andi Oddang pada tanggal 29 Juli dalam rangka pengenalan dengan pejabat baru. Sekaligus dalam pertemuan tersebut disampaikan rencana penyelenggaraan Musyawarah Wilayah ke-32 PMW Sulselra dan pembincangan beberapa persoalan, antara lain persoalan pengusiran yang menimpa Warga Muhammadiyah di Wajo menjelang Pemilu 1977. Terakhir, Ahmad Makkarauzu dan pengurusnya mengadakan kunjungan konsultasi dengan Kadapol Sulselra Brigjen Polisi R.A Makmoer Suryajane-gara pada tanggal 15 agustus 1978 untuk meminta perizinan dalam penyelenggaraan Musywil ke-32.

Dalam setiap kesempatan mengadakan konsultasi dengan pejabat tersebut, pengurus senantiasa menjelaskan kepada mereka bahwa Muhammadiyah ini adalah suatu gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan sesuatu partai politik apapun juga. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan anggapan selama ini bahwa Muhammadiyah identik dengan partai politik.

Tidak hanya menjalin keakraban dengan pemerintah,. Pengurus wilayah juga kala itu mengadakan konsolidasi organisasi, mengingat masih banyaknya kalangan warga yang tidak menghayati dengan baik keputusan Tanwir Muhammadiyah tentang larangan

persyarikatan dibawa ke ranah perpolitikan. Banyaknya pengurus yang terlibat pada aksi politik menimbulkan ekses yang menjurus kepada renggangnya rasa ukhuwah di kalangan warga.

Seusai pemilu tahun 1977 dengan tujuan utama untuk menyembuhkan luka akibat pemilu dan untuk menciptakan terbinanya kembali ukhuwah islamiyah di kalangan warga persyarikatan, diadakanlah musyawarah kerja tingkat wilayah tanggal 23 s/d 25 desember. Dalam keputusan musyawarah kerja tercantum bahwa *bertaqarrug ilallah*, membina ukhuwah islamiyah dan menetapkan Kabupaten Bulukumba sebagai lokasi Musywil ke-32.

Salah satu hal yang menjadi penting dalam membina ukhuwah islamiyah ini adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat pembangunan gedung PMW Sulselra yang akhirnya menjadi polemik di Suara Muhammadiyah bahkan telah menjurus kepada persoalan pribadi antara ketua panitia pembangunan (Alm.) A Pawellangi dengan beberapa pribadi di kalangan PMW periode 1971-1974 antara lain HA (Alm) Makkarusu. Permasalahan tersebut akhirnya dapat terselesaikan dengan baik sebelum keduanya berpulang ke rahmatullah

Dalam periode kepengurusan ini juga coba dirintis pendirian MPW Sulawesi Tenggara, namun pemisahan wilayah dari Sulsel ke Sultra ibarat jauh panggang dari api. Hampir tidak ada usaha serius kecuali usaha pembinaan lewat cabang Pomalaa yang sempat dihubungi sekertaris wilayah yang ia telah berusaha mengumpul-

kan dana untuk pembangunan kantor PMW Sulselra. Harapan pendirian PMW Sulra terus ditumbuhkan dengan harapan akan diselesaikan oleh kepengurusan berikutnya.

Sementara itu, pembangunan kantor PMW dengan konstruksi permanent dan persiapan yang telah dimulai sejak periode 1971—1974 sampai dengan berakhirnya periode tersebut telah berhasil dibangun 70% untuk tahap pertama. Yakni bagian belakang dan depan lantai dua sedang bagian tengah berlantai satu. sehingga pada akhir periode ini kantor tersebut sudah banyak kemajuan pembangunan tahap pertama sudah dapat dikatakan selesai dan sudah dimanfaatkan bersama dengan majelis-majelis dan ortom-ortom dan sesekali aulanya dimanfaatkan untuk pertemuan-pertemuan. Baik yang dilaksanakan oleh persyarikatan ataupun oleh masyarakat sekitarnya.

Begitupula lantai dua bagian belakang sudah sering digunakan sebagai tempat menginap terutama oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah dari daerah yang datang berkuliah di Makassar yang kala itu masih bernama Ujung Pandang.

Tak semua program kepengurusan PMW 1970—1974 ini kerja berjalan mulus. Beberapa hal menjadi perhatian ketika program kerja tidak berjalan maksimal. Beberapa hal yang tidak terlaksana dengan baik tersebut adalah:

Pembentukan jamaah tauladan

Pembentukan jamaah tauladan yang merupakan amanat dari muswil ke 31 di Parepare. Diharapkan dengan pembentukan jamaah ini semakin memotivasi warga persyarikatan untuk membentuk jamaah yang saling menyeru pada kebaikan. Jamaah ini pada akhir kepengurusan ini nyatanya masih sedikit yang terbentuk di kota Ujung Pandang.

Pemurnian amal usaha persyarikatan

Pemurnian ini kedengarannya sangat sederhana namun kenyataannya berkata lain, terjadi beberapa kasus yang menyebabkan hancurnya keakraban di antara pengurus amal usaha atau anggota. Seperti contoh kasus cabang Mamajang di Kota Ujung Pandang. Karena sikap tidak ingin diambil alih pimpinan cabang sebelumnya enggan memberikan jabatannya kepada pimpinan yang terpilih dengan alasan-alasan yang kurang dapat diterima.

Kasus ini disebabkan oleh saudara Syarifuddin bersama anggotanya. Hingga pada akhirnya PMW mengambil keputusan dengan menskorsing tiga orang anggota yakni Syarifuddin, Abubakar Dg Nai, dan Mapamassing BA.

Beberapa bulan kemudian setelah keputusan tersebut daranglah surat dari Pimpinan Pusat menanyakan perkembangan dan kemungkinan untuk direhabilitir. Sesungguhnya jika masalah pemurnian amal usaha menjadi hal yang cukup menyita perhatian

pengurus periode tersebut, terbukti dengan pelaporan yang mengatakan bahwa periode ini PMW hanya terbatas pada berusaha menyelesaikan beberapa kasus apalagi jika usaha ini ditinjau dari segi materil dan idiologis maka akan semakin ruwet keadaannya dan memaksa menghabiskan waktu untuk itu.

Peningkatan mutu anggota dan pimpinan persyarikatan

Beberapa kegiatan dibentuk pengurus untuk meningkatkan mutu anggota persyarikatan. Beberapa hal dilakukan seperti melaksanakan pengajian berkala selama dua kali sebulan yang dihadiri oleh segenap pimpinan dan anggota-anggota yang berdomisili di Ujung Pandang. Yang secara teknis dilaksanakan oleh Majelis Tabligh Wilayah.

Melaksanakan seminar tarjih dalam rangka persiapan untuk menghadiri seminar tarjih nasional yang dilaksanakan di Klaten pada bulan Mei 1978. Seminar tarjih tersebut dilaksanakan pada tanggal 21-23 April 1978 di Tamirul Masa'jid Ujung Pandang.

Dengan dibantu oleh PMD kodya Ujung Pandang dan PMC Makassar seminar tersebut dimoderatori oleh ketua Majelis Tarjih Wilayah KH Sanusi Manggu. Sedang materi diisi oleh Dra. A Rasdianah, Dr S Madjidi, Drs Amir Said, Drs Suhudi Ismail. Sementara yang member penafsiran adalah KH. A Marthan, KH Abduh Pabbaja, KH Junaid Sulaeman, dan H.M. Quraish Syihab, M.A. Akan tetapi, berhubung suatu dan lain hal

sehingga mereka urung hadir pada acara.

Peningkatan mutu juga dilakukan untuk kaum muda Muhammadiyah. Usaha ini dilakukan dengan pembinaan melalui organisasi otonom. Seperti menyediakan fasilitas kantor dan alat-alatnya sebagai pusat kegiatan sehari-hari di kantor PMW. Menyediakan alat olahraga seperti tenis meja, aula untuk latihan putera-puteri Muhammadiyah “Tapak Suci”, mengikut sertakan berulang kali pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan persyarikatan semisal melaksanakan Milad atau hari besar islam lainnya. Mengaktifkan mereka pada pengajian rutin Majelis Tabligh, membentuk badan konsultasi angkatan muda Muhammadiyah dan aktif membimbing pelaksanaan muktamar IPM yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Agustus 1975 di Ujung Pandang.

Selain itu, adapula pembinaan lewat pesantren yang dilakukan di Darul Arqam Gombara, Ujung Pandang. Untuk kelancaran pesantren ditempuh beberapa hal seperti membentuk badan Pembina pesantren, yang diberi amanat untuk mengusahakan dana baik rutin maupun pembangunan. Menetapkan pimpinan dan mengangkat guru-guru untuk melaksanakan teknis edukasi dan pendidikannya, menetapkan Mapendapwil selaku pembimbing dalam bidang ketertiban administrasi dan edukasi. Selain itu atas inisiatif pada orangtua siswa mereka membentuk ikatan wali murid Muhammadiyah (Ikwam) yang merupakan salah satu usaha untuk menunjang kelancaran pendidikan pesantren tersebut.

Adapun program peningkatan warga yang lain adalah pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera. Program ini sudah ada sejak muktamar ke- 38 di Ujung Pandang yang segenap lapisan persyarikatan harus melaksanakannya. Program ini mendapatkan bantuan dari sebuah lembaga donor luar yakni *The Path Finder Fund*. Dengan jaminan moril dari H Kusnadi untuk mendapatkan bantuan berupa proyek pendidikan kependudukan yang disingkat PKLP.

Berdasarkan penilaian PP kala itu PMW Sulselra sudah dianggap mampu melaksanakan proyek tersebut. Maka ditetapkanlah wilayah Sulselra sebagai salah satu dari beberapa wilayah di luar Pulau Jawa sebagai tempat pelaksanaan PKLP.

Mengawali realisasi proyek tersebut maka oleh PP Majelis PKU melaksanakan penataran keluarga sejahtera pada pertengahan tahun 1975 di Jakarta, yang diikuti antara lain oleh K.H Abd Jabbar Asyiri, KH Fathul Muin Dg Maggading dan Drs Zainuddin Sialla. Selanjutnya untuk pelaksanaan teknis ditunjuk Drs Zainuddin Sialla selaku ketua proyek dan Muh Alwy Uddin BA selaku sekretaris dan H Bakri Wahid BA selaku penasehat akademis.

Proyek PKLP untuk wilayah Sulselra dimulai pada bulan September 1976. Materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut tidak menggunakan metode monolitik akan tetapi dengan metode integratif yang berarti tidak diajarkan materi pendidikan kependudukan secara langsung akan tetapi diintegrasikan melalui mata pelajaran yang biasa diajarkan di dalam fo-

rum pengajian tersebut seperti pelajaran hadist tafsir akhlak dan lain-lain.

Hingga sampai pada evaluasi oleh PP unit Perencanaan Keluarga Sejahtera Muhammadiyah (UPKSM) terhadap pelaksanaan PKLP tersebut maka proyek ini masih diperpanjang untuk angkatan ke II yang dimulai pada bulan September 1977 sampai agustus 1978. Anggaran untuk kegiatan ini baik untuk angkatan 1 maupun 2 telah dipertanggung jawabkan langsung kepada PP UPKSM di Jakarta sesuai dengan pos-pos pengeluaran yang memang sudah ditetapkan oleh pusat. Adapun penggunaan keuangan yang karena kelebihan dana di alihkan kepada pos anggaran lain.

Tak hanya program kerja yang dijalankan. Masalah masalah yang timbul juga turut menjadi perhatian pada PMW periode ini. Ada beberapa persoalan-persoalan yang harus diselesaikan khususnya yang terjadi di daerah seperti:

Terusirnya beberapa warga Muhammadiyah di kota Sengkang menjelang pemilu tahun 1977 oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat mereka diungsikan ke Kota Ujung Pandang dan ditampung oleh warga Muhammadiyah lain. Dengan diberi bantuan materi dan non materi. Selain itu PMW telah mengapproach PM PPP agar mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Juga PMW meminta kepada PP Muhammadiyah agar ikut aktif mengusahakan penyelesaian di tingkat pusat.

Kemudian langkah yang diambil PMW adalah mengutus Drs Saleh Hamdani yang pada waktu itu

sebagai PMW berangkat ke Sengkang untuk mengusahakan penyelesaian secara damai namun belum diperoleh hasil yang memuaskan khususnya bagi rekan-rekan yang bersangkutan,

Juga dalam kesempatan berkunjung kepada Gubernur kala itu untuk mempertanyakan penyelesaian masalah tersebut. Dan gubernur mengatakan telah menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur keluarga.

Adapula penerimaan wakaf diserahkan bantuan tanah kosong seluas 50 Ha oleh Hasan Lakallu tahun 1976 dengan status hak guna usaha yang tertletak di Polmas. Akan tetapi sayang sekali karena tanah tersebut surat-suratnya belum diserahkan secara lengkap sebab penyelesaiannya yang membutuhkan dana cukup banyak.

Yayasan pendidikan islam anggeraja kabupaten Enrekang yang dipimpin oleh Bukhari Razak BA selaku ketua dan Abd Gaffar santa BA selaku sekretaris pada awal desember 1976 menyerahkan gedung sekolah semi permanen yang terletak di tanah seluas 1950 Meter persegi. Sekolah tersebut sebelumnya digunakan untuk PGA Islam akan tetapi oleh karena perkembangan sekolah tersebut tidak menggembirakan maka atas persetujuan pengurus yayasan menyerahkannya kepada Muhammadiyah.

Selain itu adapula perkembangan menggembirakan dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Adalah fakultas Ilmu Pendidikan kelas dari Enrekang yang telah berhasil mencetak lebih dari 60 orang sarjana muda

Negara sekalipun hanya dipimpin dari Ujung Pandang yaitu oleh Drs Zainuddin Sialla selaku dekan dan kepada perguruan tinggi inilah diserahkan gedung tersebut untuk dimanfaatkan sebagai tempat kuliah.

Sehingga hingga akhir laporan ini ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu dalam masalah internal persyarikatan yakni; (1) Ranting dan cabang yang kebanyakannya hanya tinggal nama saja; (2) Belum terlaksananya jamaah dan dakwah jamaah pada ranting-ranting; (3) Pembaharuan surat keputusan ranting dan cabang sesuai instruksi PP masih sangat seret jalannya; (4) Belum mantapnya kesadaran berorganisasi dan belum kokohnya istiwamah warga; (5) Dana persyarikatan memprihatnkan; (6) Masih sangat kurang kesadaran komunikasi, laporan, dokumentasi dan catatan persyarikatan.

Sementara masalah eksternal ialah; (1) adanya anggapan sementara pihak bahwa Muhammadiyah identik dengan partai politik tertentu; (2) Masih adanya anggapan bahwa anggota Korpri tidak boleh menjadi anggota Muhammadiyah; (3) Munculnya wadah-wadah baru yang lapangan ruang geraknya sama dengan ruang gerak atau lapangan usaha Muhammadiyah.

Menjawab permasalahan di atas maka Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dibawah kepemimpinan KH. Ahmad Makkarasus, mengeluarkan sejumlah argumentasi pembelaan diri, seperti; (1) Terbitnya surat edaran Menteri Agama bahwa dakwah tidak lagi memerlukan izin; (2) Pernyataan Kaskomkamtib Jenderal Yoga Sugama dalam Mukta-

mar ke-40 bahwa pegawai negeri tidak dilarang menjadi anggota Muhammadiyah; (3) Penjelasan Menteri Dalam Negeri Jenderal Amir Mahmud kepada PP Muhammadiyah bahwa pegawai negeri/Korpri tidak dilarang menjadi anggota Muhammadiyah.

DRS. MUHAMMAD SALEH HAMDANI (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1977-1980)

Nama lengkapnya adalah Muhammad saleh Hamdani Daeng Nassa. Dia lahir di Salaka Polombangkeng, Takalar pada tanggal 17 Mei 1934, putera dari Haji Binu Daeng Tarra dan Hajjah Lu'mu Daeng Ngugi. Haji Binu Daeng tarra adalah anggota Muhammadiyah Group Palleko-Takalar yang dipimpin oleh Makkaraeng Daeng Manjarungi. Pada tanggal 12 Mei 1967 Muhammad Saleh Hamdani menikah dengan Hj. Rahmatiah Dg Parang dikaruniai lima orang anak yaitu St. Sarah Saleh Hamdani, Muhammad Iqbal Saleh Hamdani (Diploma STAN), Muhammad Imran Saleh Hamdani (Dokter Unhas), Muhammad Irfan Saleh Hamdani (Sarjana Teknik ITB), dan Zakiah Saleh Hamdani (Sarjana Teknik ITB). Drs. Muhammad Saleh Hamdani meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1980.

Saleh Hamdani menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di Salaka Takalar pada tahun 1950. Setamatnya di sekolah dasar, dia hijrah ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan. Di Makassar, dia menempuh pendidikan di dua tempat. Pada pagi hari, dia belajar di Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) dan pada waktu

sore, dia belajar di Madrasah Wustha Muallimin Muhammadiyah Jongaya. Dia tamat dari kedua lembaga pendidikan tersebut pada tahun 1953.

Setelah menyelesaikan studinya di jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama, Saleh Hamdani meneruskan pendidikannya di Sekolah Menengah Ekenomi Atas (SMEA). Sementara belajar di SMEA, dia mengikuti Ujian Guru Agama dan berhasil memperoleh Ijazah Guru Agama Islam pada tahun 1954. Dia tamat SMEA pada tahun 1956.

Berbekal Ijazah SMEA, Saleh Hamdani diterima kuliah di Jurusan Ekonomi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar. Dia memperoleh gelar Sarjana Muda pada tahun 1961 dan memperoleh gelar sarjana lengkap pada tahun 1965.

Berbekal ijazah Guru Agama Islam, Saleh Hamdani diterima menjadi guru di sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun Gunungsari dan di Muallimin Muhammadiyah Jongaya pada tahun 1954. Sambil mengajar di dua tempat, dia pun belajar di SMEA sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Setelah tamat SMEA pada tahun 1956, Saleh Hamdani meninggalkan lapangan pekerjaannya di dunia pendidikan yang mungkin dianggapnya kurang menjanjikan. Dia terangkat menjadi pegawai Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Dia bekerja sambil kuliah.

Menjelang selesai sarjana lengkapnya di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Saleh Hamdani, B.A. meninggalkan lagi lapangan pekerjaannya sebagai pe-

gawai bank dan kembali lagi ke dunia pendidikan. Dia diangkat menjadi Kepala Sekolah Kursus Pegawai Administrasi (KPA) pada tahun 1965.

Pada tahun 1973. Drs. Muhammad Saleh Hamdani, diangkat menjadi Direktur Akademi Administrasi Niaga (AAN). Jabatan itu dipegangnya sampai akademi tersebut diintegrasikan ke dalam Universitas Hasanuddin pada tahun 1977. Sejak tahun 1977, dia menjadi Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin sampai wafatnya pada tanggal 17 Oktober 1980.

Kiprah di Muhammadiyah

Keterlibatannya dalam Muhammadiyah dawali dengan menjadi anggota di Cabang Mamajang pada tahun 1962 dengan nomor baku 171.163. Setelah beberapa saat menjadi anggota biasa, dia pun terpilih menjadi Pimpinan Muhammadiyah Cabang Mamajang, meskipun bukan Ketua. Selanjutnya, dia menjadi Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sulawesi Selatan mulai tahun 1965 sampai tahun 1975.

Pada masa kepemimpinan Haji Ahmad Makkarusu Amansyah, Drs. Muhammad Saleh Hamdani adalah Wakil ketua I Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) Sulawesi Selatan dan Tenggara. Setelah Haji Ahmad Makkarusu Daeng Ngilau meninggal dunia, dialah yang menjadi ketua melanjutkan periode yang masih tersisa. Pada musyawarah Wilayah Muhammadiyah di Bulukumba tahun 1978, dia terpilih menjadi Ketua Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan

Tenggara. Tugas itu diembannya sampai dia meninggal dunia tahun 1980.

Sewaktu menjabat Ketua PMW Sulselra, Muhammad Saleh Hamdani didampingi oleh KH. M. Sanusi Maggu sebagai Wakil Ketua I, H. Djamaluddin Amien sebagai Wakil Ketua II, dan Drs. A. Tadjuddin Baso Rum sebagai Wakil Ketua III, Drs. Zainuddin Sialla' sebagai Sekretaris, Abd. Rasyid Abdullah, B.A. sebagai Wakil Sekretaris I, Drs. M. Room Narsam sebagai Wakil Sekretaris II, dan H. A. Salama Tambo sebagai Bendahara.

H. Saleh Hamdani juga didampingi oleh dr. Andi Lawang, Drs. Nasruddin Razak, dr. H. M. N. Anwar, S.K.M., H. A. Qadir Sarro, dan Salahuddin Mahmud sebagai anggota pimpinan hingga Saleh Hamdani mangkat.

Di masa kepemimpinan Saleh Hamdani ini, penelitian terhadap penerimaan anggota Muhammadiyah sesuai persyaratan pimpinan pusat diupayakan seefektif mungkin. Calon anggota yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota diperhatikan itikad baik dan kemampuannya memenuhi kewajiban terhadap persyarikatan. Klasifikasi keanggotaan tersebut adalah simpatisan, calon anggota, dan anggota inti. Saat itu, pengurusan kartu anggota tidak secepat sekarang ini. Kartu anggota atau persetujuan keanggotaan oleh pimpinan pusat membujutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, PMW harus meneliti amalan nyata calon anggota tersebut untuk diklasifikasikan sesuai dengan petunjuk pimpinan pusat.

Pembinaan potensi dan pendirian cabang dan ran-

ting juga dilakukan dalam kepemimpinan Saleh Hamdani ini. Begitu juga dengan penertiban registrasi anggota dan intensifikasi registrasi, sehingga membuat tenaga khusus untuk menangani hal ini di setiap tingkatan persyarikatan diperlukan. Untuk itu, PMW Sulselra membuat petunjuk pelaksanaan registrasi dan herregistrasi untuk cabang dan ranting, serta petunjuk pembentukan cabang dan ranting sesuai AD/ART. Selain itu, intensifikasi pengajian dan kursus kemuhammadiyah juga dilaksanakan untuk pembinaan anggota sehingga dapat dijadikan sebagai anggota inti.

Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) juga dilakukan dengan pengenalan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), pemosisian AMM dalam kepengurusan amal usaha, serta intensifikasi pengajian bersama pimpinan persyarikatan dan pembinaan forum-forum pengaderan. Forum pengaderan AMM ini juga diarahkan untuk persiapan dan pembentukan anggota pimpinan yang bermutu dan berdisiplin.

Selain itu, salah satu tindakan yang dilakukan di periode kepemimpinan Saleh Hamdani ini adalah pengajuan nama-nama guru swasta Sekolah Muhammadiyah kepada Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan (Pemprop. Sulsel) untuk diangkat menjadi guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah guru swasta yang diusulkan oleh PMW Sulselra periode ini sebanyak 701 orang. Usulan tersebut disambut baik oleh Pemprop Sulsel dengan diteruskannya usulan tersebut kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

(BAKN) di Jakarta. Sayangnya, usulan tersebut ditolak oleh BAKN karena nama-nama yang diusulkan dinilai tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Dalam kepemimpinan Saleh Hamdani, Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Tenggara (PMW Sultra) juga resmi memisahkan diri dari PMW Sulsel. Berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 12/PP/V/1980 tertanggal 13 Rajab 1400/ 28 Mei 1980, PMW Sulselra telah terbagi menjadi PMW Sulsel dan PMW Sulra. Meskipun, PMW Sulawesi Tenggara ini baru menjalankan kepengurusannya pada 1 Muharram 1401 dipimpin oleh H. Muhammad Amin.

PMW Sulselra di bawah kepemimpinan Muhammad Saleh Hamdani ini juga pernah mengirimkan pernyataan sikap atas produksi film dan reklame yang menyimpang dari Ketetapan MPR RI No IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam surat yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, PMW Sulsera menyatakan bahwa film dan reklame yang mempunyai daya tarik pembentukan sikap pada diri individu, sudah banyak menyimpang karena telah dikuasai oleh kepentingan komersial semata. Hal ini dapat menghancurkan sendi-sendi kepribadian bangsa. Hancurnya nilai-nilai budaya bangsa, melunturnya pengembangan kreativitas generasi muda, dan pelecehan terhadap martabat kaum wanita demi keuntungan komersial dalam produksi dan pengedaran film.

Hal yang lebih meresahkan adalah reklame di depan bioskop, iklan di majalah dan koran-koran harian yang terbit sepengetahuan pemerintah. Di media-media ini telah terpampang iklan-iklan film yang dianggap dapat langsung memengaruhi masyarakat, terlebih generasi muda ke tingkat menggoda sikap naluri biologis melalui gambar-gambarnya.

Atas persoalan ini, PMW Sulselra di bawah kepemimpinan Saleh Hamdani meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah positif dan bimbingan yang memadai sehingga semua produksi film dapat sesuai dengan GBHN dan membina manusia Indonesia seutuhnya meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. PMW Sulsel juga meminta kriteria penilaian yang sesuai dengan GBHN dan nilai moral juga harus disusun oleh Badan Sensor Film Indonesia, termasuk pengaktifan Badan Sensor Film Daerah. Melalui pengaktifan Badan Sensor Film Daerah ini, kepekaan sosial budaya, adat-istiadat, dan agama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dapat menjadi landasan penilaian film yang diedarkan sebagai konsumsi umum.

Selain itu, PMW Sulselra juga meminta pemerintah mengharuskan semua pengusaha bioskop, penerbit majalah, koran harian dan sejenisnya untuk menaati TAP MPR terkait GBHN dalam pemasangan atau pembuatan reklame dan iklan. Hal ini dilakukan agar para pengusaha juga memiliki rasa tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia yang turut terlibat dalam proses

pembangunan dan pembinaan kepribadian bangsa, khususnya kepribadian generasi muda.

K.H. MUHAMMAD SANUSI MAGGU (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1980-1984)

K. H. Muhammad Sanusi Maggu lahir pada tahun 1913 di Desa Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dari pasangan suami isteri La Maggu dan I Canname. Kedua orang tuanya memberinya nama Sanusi dan setelah belajar kepada Kiai Haji Ibrahim di Rappang, Sang Kiai melengkapi namanya menjadi Muhammad Sanusi Maggu. Dia adalah anak kedua dari empat orang bersaudara, yaitu: Patinang, Muhammad Sanusi Maggu, Kocci alias Maryam, dan Saenabe.

Sanusi kecil belajar mengaji Alquran, mulai dari *allepu-lepu* hingga *maccara baca* di rumah di rumah Haji Guru (Imam Desa Lise). Setelah tamat, dia pindah ke Rappang Kecamatan Panca Rijang mengaji pondok di bawah bimbingan K.H. Ibrahim (*gurunna Andi*) ayah dari K.H. Malik Ibrahim selama 12 tahun. Bacaan alquran Sanusi Maggu sering dipuji oleh gurunya karena kecepatannya memahami pelajaran yang diberikan kepadanya dan kebagusan bacaanya.

Setelah menyelesaikan proses pendidikan, Muhammad Sanusi Maggu kembali ke Lise. Di Lise, dia mulai tampil mendakwahkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan di Rappang. Tetapi, tidak berapa lama di Lise, Muhammad Sanusi Maggu



K.H. MUHAMMAD SANUSI MAGGU
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1980-1984

hijrah ke Pare-pare dan bergabung dalam organisasi Muhammadiyah Cabang Pare-pare.

Ketika Muhammad Sanusi Maggu menetap di Pare-pare inilah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) datang ke Makassar. Mendengar bahwa di Makassar ada seorang ulama dari Minangkabau, Muhammad Sanusi Maggu pun hijrah ke Makassar dengan maksud berguru kepada Hamka. Maksud dan keinginannya pun tercapai, setelah Muhammad Sanusi Maggu diterima belajar Madrasah Muallimin yang waktu itu lebih dikenal dengan nama *Tabligh School* yang dipimpin Hamka.

Seperti disebutkan di depan bahwa Hamka datang ke Makassar atas penugasan dari *Hoofdstuur* Muhammadiyah. Maka, sehubungan dengan berakhirnya tugasnya, HAMKA pun kembali ke Sumatra Barat pada tahun 1935. Ketika itulah Muhammad Sanusi Maggu ikut bersama HAMKA ke Padang Panjang untuk melanjutkan pelajarannya pada “*kulliatul muballighin*”.

Muhammad Sanusi Maggu kembali ke Sulawesi Selatan pada tahun 1938, setelah menyelesaikan pendidikan. Tidak lama kemudian, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekkah dan tinggal mengaji Al-Islam selama dua kali musim haji. Setelah kembali dari tanah suci, barulah dia dinikahkan dengan Hj. Kaddase. Tetapi, karena tidak dikaruniai anak, maka dia menikah lagi dengan Hj. Bakkennung dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Dra. Hj. St. Ramlah Sanusi dan Ir. Fahmi Sanusi.

Setelah berkeluarga dan menetap di Pare-pare sebagai mubaligh, masyarakat pun memberinya gelar

‘kiai’ atau dalam bahasa Bugis *anre’gurutta*. Sejak saat itu, gelar ‘kiai’ melekat di depan namanya.

Walaupun beliau menetap di Pare-pare, daerah operasional dakwahnya meliputi wilayah *Aja Tappareng* dan sekitarnya, yaitu Sidenreng, Rappang, Sawito, Mallusetasi, Pare-pare, Soppeng Riaja, Majene, dan Wajo.

Jabatan-jabatan dalam Muhammadiyah dan amal usaha yang pernah diemban oleh Kiai Haji Muhammad Sanusi Maggu, ialah Kepala SMP Muhammadiyah Sengkang, Kepala SMA Muhammadiyah Pare-pare, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Pare-pare, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1980—1984.

Adapun aktivitas dan jabatan yang pernah diembanya di luar Muhammadiyah antara lain, adalah sebagai pejuang perintis kemerdekaan bersama Andi Abdullah Bau Massepe, Andi Makkasau, dan La Nakka. Dia juga pernah menjadi anggota DPRD Pare-pare mewakili Muhammadiyah selama beberapa bulan karena dia mengundurkan diri sebelum masa tugasnya berakhir. Alasan pengunduran dirinya adalah karena dia merasakan bahwa dunia politik bukanlah dunianya. Dia juga pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Kota Parepare.

Memimpin Muhammadiyah Sulsel

Kepemimpinan periode Sanusi Maggu adalah periode lanjutan dari kepemimpinan Saleh Hamdani yang

mangkat pada tahun 1980. Awalnya, Sanusi Maggu hanya diamanahkan sebagai pelaksana tugas ketua karena jabatan Wakil Ketua I yang saat itu ia emban, namun karena musywil untuk laporan pertanggungjawaban periode 1978—1981 tidak dilaksanakan, maka ia pun diamanahkan untuk melanjutkan periode 1981-1983.

Sanusi Maggu resmi berkhidmat sebagai Ketua PMW Sulsel lanjutan pada 17 Maret 1981 dengan dasar Surat Ketetapan PMW Sulsel Nomor A-2/051/1401. Ia merupakan ketua pertama PMW Sulsel pasca mandirinya PMW Sulawesi Tenggara. Periode kepemimpinan K. H. Sanusi Maggu ini idealnya memang telah berakhir pada tahun 1983, namun, karena kondisi politik pada saat itu, musywil baru bisa dilaksanakan pada tahun 1986 di Palopo. Musywil Palopo ini mengevaluasi kepengurusan periode 1978—1985.

Personalia kepengurusan di periode Sanusi Maggu tidak terdapat banyak perubahan dari periode Saleh Hamdani. Hanya Drs. A. Tadjuddin Baso Rum yang semula menjabat sebagai Wakil Ketua III naik posisi menjadi Wakil Ketua II, sementara H. A. Qadir Sarro yang semula anggota pimpinan, naik posisi menjadi Wakil Ketua III. Drs. H.M. Marzuki juga ditarik masuk untuk mengisi posisi anggota pimpinan yang ditinggalkan H. A. Qadir Sarro (susunan personalia pengurus PMW, majelis, lembaga, badan, dan biro terlampir).

Majelis yang terbentuk di masa kepemimpinan Sanusi Maggu adalah Pimpinan Muhammadiyah Majelis Tarjih, Pimpinan Muhammadiyah Majelis Tabligh,

Pimpinan Muhammadiyah Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (P. P. & K), Pimpinan Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Pimpinan Muhammadiyah Majelis Ekonomi, dan Pimpinan Muhammadiyah Majelis Penyelamat Kesengsaraan Umat (PKU). Konsolidasi organisasi, pemantapan kepemimpinan, penertiban administrasi di seluruh tingkatan pimpinan masih menjadi fokus utama kepengurusan ini. Kerja-kerja persyarikatan yang dilakukan berprinsip pada kerja sama atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikhlaskan tenaga, pikiran, dan dana yang dapat dipersembahkan dalam rangka terwujudnya tujuan atau cita-cita persyarikatan, serta berkhuznudzan (berperisangka baik) antar unsur pimpinan dalam menangani kewajiban yang diamanatkan kepadanya.

Untuk konsolidasi pimpinan dan organisasi, tidak hanya agenda rapat rutin pimpinan yang dilaksanakan. Pengajian rutin bulanan pimpinan oleh Majelis Tablig PMW dilaksanakan pada tiap malam jumat pekan pertama dan ketiga. Pengajian ini dihadiri oleh unsur pimpinan, majelis, dan ortom. Sementara itu, untuk konsolidasi dengan daerah, kunjungan kerja ke beberapa daerah dan cabang pun intensif dilakukan 3—5 kali di tiap-tiap daerah. Alhasil, angka 136 pimpinan cabang dapat dicapai pada periode dan menyisakan satu daerah yang belum berdiri pimpinan daerah muhammadiyah saat itu, yaitu daerah Majene. Pertemuan antara majelis, biro, lembaga, badan dan ortom tingkat wilayah juga diadakan satu kali dalam satu bulan setiap

selasa pagi pekan pertama untuk konsolidasi dan pemantapan kepemimpinan lingkup PMW.

Meski konsolidasi pimpinan telah dilaksanakan dan efek dari konsolidasi organisasi ini telah terasa di tataran pimpinan tingkat daerah, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah masih kurangnya kader Muhammadiyah yang bersedia menjadi unsur pimpinan di tingkat cabang. Hal ini masih merupakan imbas dari ketegangan iklim politik Pemerintah Orde Baru dan Muhammadiyah. Sebagian kader atau simpatisan Muhammadiyah masih trauma dengan sentimen yang pernah diterimanya pada masa pemilu tahun 1977. Termasuk karena larangan anggota KORPRI untuk berorganisasi di organisasi lain.

Sebenarnya juga, jumlah pimpinan cabang yang berada di bawah naungan PMW Sulsel adalah 172 cabang. Akan tetapi, 36 cabang dianggap masih belum berhasil dibina kembali melalui konsolidasi organisasi yang dilakukan. Di cabang-cabang ini, kader Muhammadiyah masih ada, hanya saja dengan jumlah yang semakin menipis dan tidak seorang pun yang bersedia untuk menjadi pimpinan.

Meski krisis kader pimpinan tersebut meresahkan PMW Sulsel, penertiban sistem administrasi sebagai salah satu fokus kerja tidak turut terhalang. Periode ini memberlakukan Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) dan penerbitan Pedoman Pengelolaan Organisasi Terpadu dengan Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) pada 4 Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD), yaitu PMD Ujung Pandang, PMD Pare-pare,

PMD Pinrang, dan PMD Bantaeng sebagai suatu inovasi. Pedoman Pengelolaan Terpadu dengan SAMSAT ini diputuskan oleh PMW Sulsel pada 17 Rajab 1404 bertepatan 19 April 1984. Pedoman ini berlaku mulai tanggal 1 Rajab 1404/ 2 April 1984.

SAMSAT yang tersebar di empat daerah ini mengatur tentang kepaduan kerja antara pimpinan, majelis, staf amal usaha, dan staf sekretariat pimpinan tiap tingkatan. Pelaksanaan administrasi diatur harus terpusat pada sekretariat yang terkoordinasi, sementara kegiatan-kegiatan administrasi yang dimaksud adalah pembentukan ortom, amal usaha, pengelolaan personalia yang meliputi pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan atau kepengurusan di tiap tingkatan, pengelolaan permusyawaratan berupa perencanaan, penyelenggaraan, dan penyusunan keputusan permusyawaratan. Selain itu, pengelolaan prasarana seperti pemilikan bukti hak milik, penataan dan penggunaan lokasi hak milik persyarikatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, termasuk tata kelola administrasi keuangan.

Untuk kesekretariatan PMW Sulsel, sekretariat terletak di atas tanah seluas 13 x 30 M di Jalan Gunung Lompobattang Nomor 149. Sementara itu, daftar inventaris yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban PMW Sulsel Periode 1978—1985 menyebutkan bahwa pimpinan wilayah saat itu hanya memiliki dua kendaraan bermotor, yaitu satu buah mobil Jeep Toyota Hartop dan satu buah motor bebek Yamaha .

Terkait pengadaan mobil dinas ini, dalam Laporan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) PMW Sulsel tahun 1981 disebutkan bahwa Mobil jenis jip hartop keluaran Toyota ini dibeli pada tanggal 19 Rajab 1401/ 23 Mei 1981, dan sebagian harganya dibayarkan oleh Drs. H.M. Jusuf Kalla, Dirut NV. Hadji Kalla *Trading Coy* saat itu sebagai sumbangan. Mobil ini diberi nama *Al-Buraq* karena mulai beroperasi pada 27 Rajab 1401/ 2 Juni 1981. Sementara itu, menurut kisah Alwi Uddin (Sekretaris Majelis Tabligh PMW Sulsel saat itu), mobil ini, selain karena memang dibutuhkan untuk mempermudah akses kerja organisasi, memang dibeli sebagai unjuk gigi Muhammadiyah Sulsel bahwa untuk mendapatkan mobil operasional bisa dilakukan meski tanpa mengharap bantuan dari pemerintah yang saat itu mengeluarkan kebijakan pembagian satu mobil untuk setiap ormas. Hingga mobil ini pun tiba di sekretariat PMW Sulsel, yang pertama kali digunakan bertepatan pada 1 Muharram 14301 H. Inilah alasan mobil tersebut dinamakan *alboursaq*.

Wujud ketertiban administrasi PMW periode Sanusi Maggu yang lainnya adalah data potensi dan data pertambahan anggota Muhammadiyah yang rinci. Data ini dapat ditemukan dalam Laporan Akhir PMW Sulsel Periode 1978—1985. Untuk data potensi Muhammadiyah dipaparkan data pimpinan daerah beserta pimpinan cabang yang dinaungi, lengkap dengan nomor SK-pendirian dan jumlah anggota laki-laki dan perempuan di setiap Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Untuk

pertambahan jumlah anggota laki-laki mencapai angka 2413 orang, sementara untuk pertambahan anggota perempuan mencapai 766 orang dalam periode 1978—1985.

Laporan angka pertambahan anggota dan potensi cabang-ranting ini merupakan sesuatu hal yang tidak mustahil karena pada masa itu, domain tanggung jawab pimpinan Muhammadiyah wilayah memang adalah cabang dan ranting. Pimpinan daerah dan pimpinan wilayah berada dalam domain pimpinan Pusat (wawancara Alwi Uddin).

Tidak hanya itu, laporan infak anggota, infak tiap pimpinan cabang, simpatisan persyarikatan, dan dermawan juga merupakan wujud dari penertiban administrasi ini. Begitu pun dengan lampiran kas persyarikatan. Infak inilah sumber keuangan PMW Sulsel yang diperoleh dari iuran anggota pimpinan cabang.

Akan tetapi, seperti yang telah dimafhumi, bahwa masalah memang bisa saja akan selalu ada dalam kehidupan, termasuk dalam kepengurusan persyarikatan. Keuangan PMW, terkhusus pembayaran infak oleh pimpinan cabang juga banyak sekali kendala. Walaupun begitu, alhamdulillah, persyarikatan masih tetap berkisah dalam dakwah sosioereligiusnya.

Di bawah kepemimpinan Sanusi Maggu, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) juga diberikan ruang untuk duduk di struktur majelis PMW. Perhatian kepada AMM oleh periode ini juga dapat dilihat dari pengupayaan dihadapkannya kembali Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Sulawesi Selatan. Baitul

Arqam Muhammadiyah pun wajib diikuti oleh seluruh kader, meski sebelumnya kader tersebut sudah kader dalam ortom.

Periode kepemimpinan Sanusi Maggu juga berhasil mendirikan empat pondok pesantren, yaitu Pesantren Muhammadiyah Salutabang tingkat Madrasah Ibtidayah di Larompong, Luwu, Pesantren Muhammadiyah Balebo tingkat Madrasah Tsanawiyah di Masamba, Luwu (sekarang Luwu Utara), Pesantren Muhammadiyah Marannu tingkat Madrasah Tsanawiyah di Mattiro Bulu, Pinrang, dan Pesantren Muhammadiyah Mattekko tingkat Madrasah Ibtidayah di Tinggi Moncong, Gowa. Selain itu, pada tahun 1984, Panitia Pendiri Pesantren Muhammadiyah Cerowali, Tanasitolu, Wajo baru saja dibentuk. Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan pembangunan pesantren yang rencananya akan setingkat madrasah tsanawiyah.

Laporan majelis juga menyebutkan, periode ini telah melakukan penerbitan diktat silabus ceramah dan khutbah ramadan sebanyak lima kali. Pengiriman mubalig ke daerah pada bulan ramadhan, hari besar islam, dan pengiriman khusus ke perusahaan negara dan swasta seperti, PT Inco, Aneka Tambang Pomala, dan PT Freeport Indonesia Incorporate di Papua.

Forum diskusi secara periodik antar mubalig, penerbitan mubalig juga dilakukan antara lain di Ujung Pandang, Pare-pare, Maros, Bulukumba, Palopo, Polmas, Kolaka, dan Toraja. Kesemua agenda ini merupakan program kerja Majelis Tablig periode ini.

Untuk majelis pembina kesejahteraan umat

(PKU), kegiatan yang dilakukan adalah pendidikan medis, pembinaan fakultas perawat, pembinaan 10 rumah bersalin, 8 panti asuhan, dan 3 balai pengobatan.

K.H. DJAMALUDDIN AMIEN (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 1985—2000)¹

K.H. Djamaluddin Amien lahir di Tekolampe, di sebuah desa yang terletak di bagian selatan Kota Balangnipa, Sinjai. Lahir dari pasangan suami-isteri Muhammad Amin dan St. Sukaenah pada tahun 1930. Nama Djamaluddin diberikan oleh neneknya, seorang Imam Masjid Tekolampe. Dia beruntung karena hidup dengan ayah dan ibu yang taat beribadah. Ayahnya senantiasa adzan di setiap waktu salat magrib dan subuh, ibunya pun sering membaca wirid sementara memangku putra tunggalnya itu. Inilah yang sangat berpengaruh dalam pembentukan iman seorang Djamaluddin Amien. Selain itu, setiap malam jumat, Kiai Djamal selalu menghadiri acara *barazanji* di masjid, oleh karena banyaknya kue-kue sumbangan masyarakat untuk acara itu. Kebiasaan inilah yang tentunya menambah perasaan ke-Islam-annya.

Ketika berumur lima tahun lebih, ia dimasukkan pada sekolah dasar yang ada di desanya. Ini karena desakannya sendiri kepada orang tuanya, padahal, saat

1 Bagian ini diambil dari Otobiografi yang ditulis sendiri oleh KH. Djamaluddin Amien, disertai dengan penambahan sejumlah informasi yang didapatkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan periode 1985-1990.



K.H. DJAMALUDDIN AMIEN
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 1985—2000

itu ia belum cukup umur. Tiga tahun kemudian, ia pindah ke Vvs (sekolah lanjutan di Balangnipa, ± 2 km dari desanya). Setiap hari Djamaluddin berjalan kaki ke sekolahnya ini sampai ia tamat pada tahun 1942.

Pada tahun yang sama, Jepang mendarat di Indonesia dan berkuasa di Balangnipa. Djamaluddin tidak dapat lagi melanjutkan sekolahnya. Ia bekerja di sawah membantu ayahnya dan memelihara kuda yang digunakan ayahnya berdagang beras dan gula merah di Palattae, Kabupaten Bone, ± 30 km dari Balangnipa. Suatu kali, Djamaluddin pernah ikut ayahnya berdagang ke Palattae ini.

Ketika Djamaluddin menginjak dewasa, ia jatuh cinta pada seorang gadis di desanya. Ketika itu, K.H. Husain yang baru pindah dari Bone membuka Madrasah di desa Teko-lampe. Anak-anak di desa itu ramai-ramai masuk di madrasah itu, termasuk gadis pujaan Djamaluddin. Mengetahui gadis itu mendaftar ke sekolah tersebut, Djamaluddin pun ikut mendaftar. Di madrasah itu, Djamaluddin belajar ilmu *sharaf* dengan cara menghafal di luar kepala seperti menghafal surah al-fatihah.

Rupanya, Djamaluddin mendapat hidayah dari Allah. Ia tertarik dengan bahasa Arab dan lanjut belajar *nahwu* pada Ustaz Marzuki Hasan, seorang ulama muda di Balangnipa yang dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah. Tamat mempelajari *jurumiah*, ia lanjut mempelajari *Mutammimah*, selanjutnya *qatrunnada*. Djamaluddin tambah tertarik mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Ia ikut belajar tafsir dengan kitab *Tafsir*

Jalalain di pagi hari dan fikh dengan kitab *Fathul Mu'in* di sore hari pada K.H. Muhammad Thahir, seorang ulama besar di Balangnipa yang dikenal sebagai Kali Balangnipa.

Djamaluddin mengenal Muhammadiyah lewat Hizbul Wathan yang ia sering lihat berbaris, bernyanyi, dan meniup peluit di lapangan depan rumahnya. Ia juga pernah membantu Muhammadiyah mengantarkan zakat fitri untuk fakir miskin di desanya. Setiap bulan Ramadan, ia salat tarawih di sekolah Muhammadiyah dengan imam dan penceramah tunggal yakni Ustaz Marzuki Hasan.

Pada awal tahun 1948, Ali AT datang di Balangnipa dari Makassar mengajak anak-anak remaja bergabung dalam HW. Djamaluddin pun bergabung, walaupun susah mendapat baju seragam, apalagi sepatu. Saat itulah, dia resmi masuk dalam lingkungan Muhammadiyah. Ibunya gembira atas hal tersebut.

Pada tahun itu juga, saat bulan Ramadan, Abdullah Sabda pulang ke Balangnipa sebagai pelajar Muallimin Muhammadiyah Bantaeng. Pada saat itulah, Djamaluddin memutuskan untuk melanjutkan pelajarannya di Muallimin Muhammadiyah Bantaeng karena diajak oleh Abdullah Sabda. Sayangnya, Djamaluddin mengalami kesulitan biaya. Ayahnya yang hanya seorang petani biasa tidak mampu membiayainya. Tetapi, karena ia memiliki kemauan keras, ia lalu menghubungi ibu Ros, ibunda Prof. Dr. Kahar Mustari, sepupu Djamaluddin yang ketika itu berada di Bantaeng. Walhasil, Djamaluddin diterima di kelas II Muallimin. Di Mualli-

min, ia bertemu para kader persyarikatan dari seluruh penjuru Sulawesi Selatan, antara lain, Aminullah Lewa dari La'bakkang, Abidin Senreng dari Enrekang, Andi Rosdianah dari Bulukumba dan Andi Lolo Tonang dari Tiro Bulukumba. Ketika itu, belum ada organisasi pelajar nasional seperti IPM dan sebagainya. Oleh Karena itu, dibentuklah organisasi lokal bernama PPM (Pemuda Pelajar Muhammadiyah).

Citra Muallimin cukup baik dengan siswa-siswanya yang berkualitas. Mereka sudah menjadi mubalig, baik tulisan maupun lisan yang disenangi oleh masyarakat. Di samping itu, dengan seni bambunya yang digemari oleh masyarakat dan olahraga sepak bolanya yang disegani baik sesama pelajar maupun kesebelasan masyarakat menjadikan Muallimin Muhammadiyah tambah populer.

Di Muallimin, Djamaluddin bertemu Ustaz Madjidi, Abdul Rasyid Faqi, dan Badaruddin Ali. Atas bimbingan Ustaz Madjidilah ia memahami Islam dan lebih memahami bahasa Arab, sementara, untuk semangat patriotik, Djamaluddin belajar kepada Ustaz Abdul Rasyid Faqi, Pemimpin Pemuda Penerjang Penjajah di Bantaeng yang selalu dengan gagah berani menghadapi tentara Belanda ketika menggeledah rumahnya. Untuk nilai-nilai akhlak mulia, Djamaluddin belajar kepada Ustaz Badaruddin.

Tahun 1950, Muallimin Muhammadiyah pindah ke Bulukumba karena gedung sekolahnya ditempati oleh tentara (TNI). Hanya sebagian pelajar dan guru yang pindah, yaitu Ustaz Madjidi, pelajar kelas 5, dan pela-

jar kelas 6, sementara, selebihnya tetap di Bantaeng. Mereka belajar di Bulukumba selama dua tahun. Pada tahun 1952, ketika diadakan acara penamatan, murid-murid yang ditamatkan memohon agar pelajarannya ditambah 1 tahun lagi. Akan tetapi, Muhammadiyah cabang Bulukumba tidak menyetujui. Ustaz Majdidi sebagai kepala sekolah melepas mereka tanpa ijazah.

Beberapa dari mereka yang ditamatkan itu, termasuk Djamaluddin, tinggal berbakti di Muallimin Bulukumba. Akhir tahun 1952, dia ditawarkan oleh Muhammadiyah cabang Bantaeng untuk mengajar di Muallimin, sekolah yang ia tinggalkan dahulu dengan uang 200 rupiah sebagai uang perjalanan. Djamaluddin akhirnya pergi ke Bantaeng atas persetujuan gurunya Ustaz Madjidi di awal tahun 1953. Pesan gurunya, “Engkau harus bersikap orang tua karena engkau akan menghadapi remaja, sementara engkau masih muda.”

Paling tidak, setiap bulan, Djamaluddin menemui gurunya di Bulukumba untuk belajar dan menanyakan masalah-masalah yang perlu pemecahan. Begitulah yang berjalan bertahun-tahun, sampai Ustaz Madjidi pun pindah ke Makassar. Djamaluddin kembali bertemu gurunya itu ketika ia pindah ke Makassar pada tahun 1962.

Sebagai guru dalam persyarikatan, tentu Djamaluddin aktif dalam Muhammadiyah. Dari ketua ranting, ketua cabang, sampai menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantaeng. Sampai tahun 1962, ketika pindah ke Makassar, Djamaluddin masih ketua PDM Bantaeng. Selain itu, ia juga menjabat Ke-

tua Pemuda Muhammadiyah dan ketua GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) Kabupaten Bantaeng.

Pada pemilihan umum pertama, tahun 1955, Djamaluddin selaku ketua GPII bersama MASYUMI melakukan kampanye, hingga akhirnya 90 % kursi DPR Bantaeng dimenangkan oleh MASYUMI. Djamaluddin ditawarkan satu kursi, namun karena dia lebih memilih mengajar, maka tawaran itu ditolak.

Sebelum Djamaluddin tiba di Bantaeng, Samir Imam Batua, Kepala sekolah Muallimin telah meninggalkan Bantaeng karena terangkat sebagai pegawai penerangan agama di Makassar. Tanpa ada penugasan, Djamaluddin bertindak sebagai kepala sekolah dan memimpin Muallimin sesuai dengan kemampuannya. Muallimin pun meningkat setapak demi setapak.

Hingga pada tahun 1954, Djamaluddin menikah dengan St. Chamsiah, gadis teman sekolah dan rekan gurunya di Muallimin Muhammadiyah Bantaeng. Ia dikaruniai 10 orang anak yaitu St. Djalaliah, St. Shaliati, Abd. Hadi, Sitti Muthiah, Ashabul Kahfi, Samhi Muawan, Siti Munira (meninggal ketika masih umur 3 bulan), Siti Mujizatullah, Siti Mutmainnah, dan Siti Afievah.

Pada tahun 1985, istri tercintanya meninggal dunia. Pada tahun 1990 dengan anjuran semua anaknya dan dengan pilihan mereka semua, ia menikah dengan Siti Rabihah Binti Muhammad Siddik, sepupunya sendiri. Mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu Ahmad Harakam dan Muktashim Billah.

Semua anak Djamaluddin Amien dipersiapkan jadi pemimpin. Untuk tu, mereka disekolahkan di Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah Yokyakarta. Kecuali Ahmad Harakam dan Muktashim Billah, mereka disekolahkan di SMP Unismuh Makassar. Semuanya menjadi aktivis Muhammadiyah, Aisyiyah, dan Hisbul Wathan. Ashabul Kahfi sempat menjadi Sekertaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Samhi Muawan kini menjadi Wakil Rektor III Unismuh Makassar, dan Abd. Hadi sempat menjadi sebagai Ketua Jurusan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ketiga putra Djamaluddin Amien ini juga menjadi aktivis Partai Amanah Nasional. Sementara, Ahmad Harakan selepas kuliah dari Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, kini menjadi dosen di Unismuh Makassar, dan adiknya hingga kini masih sementara kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir.

Tahun 1962, Djamaluddin pindah mengajar ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun di Makassar atas permintaan kepala sekolah, Djamaris dan wakilnya Ustaz Muhammad Gazali. Djamaluddin memenuhi permintaan itu dengan pertimbangan bahwa ia dapat juga belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar.

Walaupun Djamaluddin telah menyelesaikan semua mata kuliah di tingkat doktoral, ia tidak dapat menyelesaikan studi, karena skripsi yang tidak sempat diselesaikan. Dengan pertimbangan bahwa ia hanya mencari ilmu, tidak mencari titel, maka sampai ia wafat, dia tidak mengantongi ijazah sarjana lengkap.

Begitu ia pindah ke Makassar, ia menggabungkan diri pada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Makassar yang ketika itu diketahui oleh K.H. Abdul Djabbar Ashiry. Tahun 1970, Djamaluddin menjadi Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pada Musyawarah Wilayah Muhammadiyah tahun 1985 di Palopo, ia terpilih menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Sebelum terpilih menjadi ketua, Djamaluddin ditugasi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar atas persetujuan Senat Universitas Muhammadiyah Makassar yang ketika itu diketahui oleh Drs. Lantana Fakhri. Ketika itulah, terjadi konflik berat antara Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang diketuai oleh K.H. Sanusi Maggu.

Dengan pertolongan Allah dan dengan bantuan serta kerjasama antara kedua pihak yang bertikai, Djamaluddin dapat menciptakan damai di antara keduanya dan dengan kerjasama dalam suasana ukhuwah Islamiyah, Universitas Muhammadiyah Makassar dapat maju sedikit demi sedikit dan pindah dari kampus lama yang terletak di Jalan Ranggong ke kampus baru di Jalan Tala' Salapang. Suatu hal yang patut disyukuri, alhamdulillah.

Sebelum di-SK-kan sebagai ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan periode 1985—1990, ia lebih dahulu dipanggil oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diminta memilih salah satu diantara

dua jabatan tersebut. Djamaluddin pun memilih menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Walau demikian, ia tetap ditugasi selama tiga bulan sebagai rektor untuk menyelesaikan beberapa masalah dan mempersiapkan rektor baru. Namun, setiap Djamaluddin merencanakan penggantian dirinya sebagai rektor, Pimpinan Pusat Muhammadiyah selalu menjawab “jalan saja dulu”. Demikian selanjutnya, hingga dalam kenyataannya, Djamaluddin merangkap dua jabatan itu sampai tiga periode yaitu 1985—2000. Ia harus mengakhiri kepemimpinannya, karena adanya peraturan di Muhammadiyah bahwa ketua hanya diperbolehkan dua periode berturut-turut. Selanjutnya, dia diangkat oleh P.P Muhammadiyah menjadi ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Unismuh Makassar.

Hal lain yang ada baiknya juga ditulis bahwa pada Muswil Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan yang pertama ia terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulawesi Selatan periode 2000—2005. Setelah terpilih pengurus PAN Sul-Sel yang baru, ia pun berhenti dari semua aktivitas politik.

Kiai Djamaluddin Amien meninggal dunia pada tanggal 16 November 2014 dan dimakamkan di kampung halamannya, di Beloparang, Bantaeng. Sebelum dimakamkan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melepas jenazah Djamaluddin Amien di Masjid Kampus Unismuh, Jl Sultan Alauddin, Makassar, tempat ia pernah menjadi rektor dan ketua BPH.

Kiprah dan Dinamika Kepemimpinan

Di masa kepemimpinan Djamaluddin Amien sebagai Ketua PWM Sulsel, khususnya pada periode pertama kepemimpinannya, ia banyak mendorong untuk memelihara kesadaran dan kegairahan serta kemantapan bersyarikat, menegakkan amanah dan keikhlasan bermuhammadiyah. Peningkatan kualitas pimpinan dan anggota senantiasa menjadi perhatian PWM Sulsel dan inti program saat itu.

Bagi Djamaluddin, maju mundurnya perkembangan dan jalannya persyarikatan Muhammadiyah, termasuk amal usaha atau proyek, sangat ditentukan oleh faktor kualitas pimpinan dan anggota. Meski harus diakui, pengaruh perkembangan situasi global di tanah air dan kondisi Sulawesi Selatan, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika persyarikatan pun turut berpengaruh.

Selain itu, peningkatan kualitas pimpinan anggota juga sangat diperlukan sebagai upaya mengantisipasi perkembangan eksternal dan internal berupa permasalahan-permasalahan pokok yang berkembang menjadi tantangan gerak persyarikatan. Memang, pada saat itu, beragam persoalan muncul ke permukaan. Di antara persoalan-persoalan itu ialah semakin berkembangnya kelompok organisasi atau aliran-aliran baru, khususnya di bidang keagamaan yang langsung memengaruhi kehidupan kerohanian atau paham agama warga Muhammadiyah. Bahkan, hal ini menyebabkan adanya tokoh anggota pimpinan yang menyebarkan

ke aliran tertentu meninggalkan Muhammadiyah dan bahkan memusuhinya.

Masyarakat juga semakin cenderung memasuki organisasi profesional yang memungkinkan untuk dapat melakukan mobilitas vertikal dalam persaingan memasuki supra struktur sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini membuat Muhammadiyah meninjau kebijakan perangkapan jabatan pimpinan persyarikatan dengan organisasi lain. Muhammadiyah pun mempertegas lagi persyaratan dan ketentuan yang mengatur pelaksanaannya.

Puncaknya, ketegasan itu perlu dan harus dilakukan. Wujudnya, antara lain, terjadinya berbagai macam konflik internal, terutama di berbagai amal usaha yang merusak cita dan citra Muhammadiyah. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak jelasnya batas-batas kewenangan antar lembaga, terutama yang terkait dengan amal usaha. Masalah-masalah yang timbul, antara lain, penyusunan komposisi dan personalia pimpinan yang sejak semula terjadi kesenjangan, sebab pembagian kerja beberapa personil terpilih tidak terlaksana sebagaimana semestinya. Kemudian, kamelut Unismuh yang pada periode sebelumnya belum tuntas menjadi beban yang cukup berat, sehingga PP Muhammadiyah terpaksa mengangkat Djamaluddin Amien sebagai Ketua PWM Sulsel merangkap sebagai Rektor Unismuh Makassar, sehingga jadilah Djamaluddin Amien sebagai Ketua Muhammadiyah pertama yang sekaligus menjadi rektor di perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM).

Sementara itu, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam di Gombara yang sejak bertahun-tahun sebelumnya juga sudah sering menimbulkan kasus, akhirnya mencapai klimaks. Pembangkangan terhadap ketentuan-ketentuan persyarikatan yang berlaku masih terjadi. Padahal, baru beberapa saat saja musywil ke 33 selesai. Salah satu permasalahannya adalah keterlibatan pimpinan pesantren tersebut kepada “Gerakan *Jamaah Tabligh*”.

Atas hal itulah, kemudian PWM di bawah kepemimpinan Djamaluddin Amien memberikan ketegasan yang berujung pada pemberhentian kepada pimpinan pesantren, dalam hal ini K.H. Djabbar Asyirie yang notabenenya juga merupakan penasihat PWM Sulsel pada waktu itu. Sebelum diberhentikan, PWM berusaha secara maksimal untuk melakukan pendekatan. Akan tetapi, titik temu tidak juga ditemui. Hingga akhirnya, PWM mengambil langkah dengan meminta pendapat dan pertimbangan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Permintaan itupun disetujui oleh PP Muhammadiyah dengan pertimbangan secara seksama, menegakkan disiplin, cita dan citra persyarikatan, hingga diterbitkanlah surat pemberhentian K.H. Djabbar Asyirie sebagai Penasihat PWM Sulsel Periode 1985–1990 yang juga menandai diberhentikannya sebagai pimpinan pondok. Surat pemberhentian itu ditandatangani langsung oleh ketua Djamaluddin Amien sebagai Ketua dan Zainuddin Sialla sebagai Sekretaris PWM Sulsel tertanggal 6 November 1989 atau 7 Rabiul Akhir 1410.

Persoalan di tingkat wilayah juga diikuti oleh persoalan di daerah, salah satunya adalah permasalahan persyarikatan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Luwu. Permasalahan ini bermula dari kasus Saudara Mansur, S.H., yang pada waktu itu sebagai Ketua Majelis Tablig PDM Luwu dan merupakan salah seorang guru Muhammadiyah. Mansur terbukti menganut dan mengembangkan paham yang mirip dengan paham Lingkar Sunnah. Buntut permasalahan ini adalah pengunduran diri H. M. Nawawi dari jabatannya selaku Ketua PDM Luwu periode 1985—1990.

Salah satu hal yang berkembang secara umum di lingkungan persyarikatan pada era kepemimpinan Djamaluddin Amien juga adalah adanya asumsi bahwa masyarakat lebih suka memasukkan anaknya di sekolah umum (SMTP, SMTA). Hal ini menyebabkan hampir semua madrasah Muhammadiyah diputuskan untuk memakai nama ganda, misalnya Mts.M/SMPM, MAM/SMAM. Hal ini, pada akhirnya, akan menghilangkan esensi dan eksistensi madrasah sebagai akibat kurang memahami surat keputusan bersama tiga menteri.

Membangun Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan

Di masa kepemimpinan Djamaluddin Amien, salah satu peristiwa penting yang patut dicatat juga adalah untuk pertama kalinya Sekretariat Pusat Dakwah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, di Jalan Perintis Kemerdekaan ditempati, setelah sebelumnya ber Kantor di Jalan Gunung Lompobattang Nomor 201.

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 38 Tamalanrea Makassar merupakan tanah wakaf seluas 1,8 Ha dari alm. Mr. H. Mustamin Dg. Matutu, S.H. yang menyerahkan kepada Muhammadiyah Sulsel untuk kepentingan umat dan pengembangan dakwah Islam. Penyerahan ini disertai catatan dari pewakaf bahwa tanah itu harus segera ada bangunannya. Setelah menerima tanah wakaf tersebut, dengan catatan yang diberikan pewakaf, Djamaluddin Amien bersama pimpinan Muhammadiyah yang lain segera memulai pembangunan gedung. Dalam pembangunan ini, Ia sendiri yang menjadi ketua pembangunan. Berkat usaha yang gigih, serta bantuan dari berbagai pihak, khususnya amal usaha Muhammadiyah sendiri, pembangunan pun dapat dimulai.

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh H. Mansyur Sultan pada tanggal 19 Jumadil Awal 1416 H atau 14 Oktober 1995 M. Gedung tersebut seluas 15 x 50 m berlantai tiga dengan model arsitektur rumah adat Minang Kabau Sumatera Barat. Model ini diambil karena pesan dari pewakafnya sebagai bentuk mengenang jasa para ulama dari Minang yang membawa ajaran Islam ke Sulawesi Selatan.

Pembangunan gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan berlangsung lebih dari 15 tahun. Memang terasa lama, tapi bagi pimpinan Muhammadiyah ada perasaan senang tersendiri, karena sumber dana untuk pembangunan gedung ini adalah

murni usaha-usaha yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan melalui panitia pembangunan.

**Drs. K.H. NASRUDDIN RAZAK (Ketua
Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 2000—2005)²**

Nasruddin Razak dilahirkan di Rappang, (sekarang berada dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang) Sulawesi Selatan, tanggal 6 Maret 1938. Ayahnya bernama Abdul Razak, seorang petani/pedagang (wafat tahun 1986). Ibu bernama Hj. Fatimah, seorang guru Aisyiah dan guru mengaji Al-Qur'an (wafat tahun 2005). Kakeknya (ayah dari ibu) bernama K.H. Ibrahim, seorang alim ulama yang lama bermukim dan belajar di Mekkah. Dua mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yakni K.H. Abdul Djabbar Ashiry dan K.H. Muhammad Sanusi Maggu adalah mantan santrinya. Pada kakek K.H. Ibrahim itulah Nasruddin kecil mulai mengaji, belajar dasar-dasar Islam dan bahasa Arab. Karena kharisma K.H. Ibrahimlah sehingga Persyarikatan Muhammadiyah dan Madrasah Muhammadiyah dapat berkembang di Sidrap. Untuk penghormatan baginya, di Kota Rappang, Pemerintah Daerah Sidrap mengabadikan namanya pada sebuah jalan, yakni Jalan K.H. Ibrahim.

2 Bagian ini diambil dari Otobiografi yang ditulis sendiri oleh KH. Nasruddin Razak, diedit hanya untuk penyesuaian Bahasa dengan biografi lainnya.



Drs. K.H. NASRUDDIN RAZAK
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 2000—2005

Nasruddin Razak memulai pendidikannya di tempat kelahirannya (Rappang), di Sekolah Rakyat Negeri (SR) 6 Tahun, waktu pagi dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Tahun waktu sore hari, tamat tahun 1952. Selama itu ia aktif di kepanduan H.W. (Hizbul Wathan).

Pendidikannya kemudian dilanjutkan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah (5 tahun). Selanjutnya mengikuti ujian Negara pada Sekolah Guru Bantu Negeri (SGB) di Pangkajene Sidrap dan memperoleh ijazah SGB Negeri tahun 1957.

Pada tahun 1957 itu ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Muallimin Ulya Muhammadiyah 3 tahun, di kampus perguruan Muhammadiyah, jalan Muhammadiyah Makassar. Di Muallimin Ulya inilah ia menerima ilmu terutama dari guru-guru yang menjadi idolanya : Ustadz S. Madjidi, K.H. Makmur Ali, K.H. Abd. Malik Ibrahim, M. Noor DP, dan H.M. Halim Yahya.

Dua tahun terakhir di Muallimin Ulya, dia terpilih menjadi ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Dia mengambil ujian persamaan Pendidikan Guru Agama Atas Negeri (PGAA) dan amat mujur karena menjadi juara I, tamat tahun 1960.

Pada tahun 1960, dia melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta. Pada seleksi ujian masuk kedua, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) “Sunan Kalijaga,” ia cukup beruntung karena dari 200 peserta, ia termasuk salah seorang dari 12 orang peserta yang dinyatakan lulus. Ia memilih Fakultas Ushuluddin dan lulus Bakaloriat dalam Ushuluddin tahun 1963. Selama kuliah di Yogya-

karta, Nasruddin adalah seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bahkan ia pernah menjabat sebagai Ketua HMI Cabang Yogyakarta. Pada masa inilah, ia banyak berinteraksi dengan Nurcholish Majid atau akrab disapa Cak Nur (Mantan Ketua Umum PB HMI). Bahkan, setiap berkunjung ke Yogya, Cak Nur sering menginap di kamar kos Nasruddin. Cak Nur senang berkunjung kesana, karena Nasruddin memiliki koleksi buku yang cukup banyak. Setiap datang, Cak Nur sering begadang membaca buku-buku tersebut.

Pada tahun 1966, ia menyelesaikan studi pada Doktoral Lengkap Fakultas Ushuluddin di Jurusan Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai seorang yang mendapat biaya ikatan dinas dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ia segera ditempatkan di Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang sebagai Dosen Pendidikan Agama Islam. Ia mengajar di UNDIP dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1976. Selama di Semarang ia diamanati menjadi Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Jawa Tengah.

Kemudian, ia pindah ke Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar mulai tahun 1976-2003, tahun pensiun sebagai PNS. Di UNHAS juga selalu mendapat jabatan struktural, berturut-turut : Sekretaris Lembaga Studium Generale (1979-1982), Ketua Bagian Studium Generale FIISBUD (1982-1986), Ketua Jurusan MKDU (1990-1996), Kepala UPT MKU (1998-2003) dan Anggota Senat Universitas sampai pensiun PNS dengan pangkat Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) tahun 2003.

Sebagai Akademisi, ia aktif menjadi kolumnis di berbagai media cetak, melakukan berbagai penelitian ilmiah dan menulis buku-buku. Berbagai karya tulisnya : Islamologi (Diktat th. 1969-1971), Dienul Islam, sudah dicetak ulang 20 kali, Ibadah Shalat Menurut Sunnah Rasul, sudah 10-an kali cetak ulang, kedua-nya diterbitkan PT. Alma'arif Bandung, Ibadah Puasa (PT. Alma'arif Bandung), Metodologi Dakwah (PT. Toha Putra Semarang), Pemikiran Politik Islam (Diktat th. 1985-2005). Dan lebih 10 judul Brosur dari berbagai judul diterbitkan oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun 1991, ia mendapat tugas dari Universitas Hasanuddin melakukan studi tentang Sistem Pendidikan Tinggi pada 6 Universiti di Malaysia. Tahu 1997, mendapat penghargaan Satyalencana Kar-ya Satya 30 Tahun dari Pemerintah. Ia telah tiga kali menunaikan ibadah haji sambil melakukan tugas selaku Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIH), tahun: 1989, 1993 dan tahun 2003.

Di Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, ia adalah salah seorang Ketua dari 7 orang Ketua (2000-2005). Selain itu, ia adalah Wakil Ketua Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan (2001-2005).

Di Persyarikatan Muhammadiyah, di tingkat Wilayah, berturut-turut: Ketua Majelis Tabligh selama 2 periode(1977-1985); Ketua Majelis Pendidikan dan Kebudayaan satu periode (1985-1990); Wakil Ketua Pimpinan Wilayah selama dua periode (1990-2000). Ia kemudian menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muham-

madiyah Sulawesi Selatan periode 2000-2005.

Sejak pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil, ia menjadi Dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ia juga menjadi Dosen Luar Biasa di Akademi Perawat (AKPER) Muhammadiyah Makassar dan di UNHAS sendiri. Di STISIP Muhammadiyah Sidrap, ia adalah dosen Mata Kuliah Pemikiran Politik Islam.

Menurut Nasruddin Razak, guru, dunia pendidikan, dunia tabligh adalah habitatnya. Selama tahun 1981-2001, dua kali sebulan mengisi ceramah subuh di RRI Nusantara IV Ujung Pandang. Hampir setiap Jum'at, ia menjadi khatib di berbagai masjid. Di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, ia terjadwal pada setiap Selasa Magrib-Isya memberi pengajian rutin.

Melalui kerjasama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Pemerintah Inggris, ia terpilih bersama 10 ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bengkulu, Maluku Utara, Kaltim, NTB, NTT, dan Sul-Sel), berkunjung di Britania Raya (Inggris). Tujuan kunjungan itu, untuk membangun silaturahmi dengan masyarakat Muslim, mempelajari kehidupan multi cultural, interfaith dan Sistem Pendidikan Studi Islam di 2 perguruan tinggi : The Centre for Study of Islam, University of Birmingham dan The Centre for Islamic Studies, Oxford University.

Adalah British Council yang berjasa memfasilitasi kerjasama ini, merupakan program berkelanjutan. Untuk membangun satu dunia yang damai yang dinamis, madani ditengah peradaban global.

Drs. K.H. BAHARUDDIN PAGIM (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan Periode 2005-2010)

Kiai Haji Baharuddin Pagim lahir di Belawa, Wajo, 31 Agustus 1940. Ia mengenyam pendidikan formal pertama kali di SD Muhammadiyah Cabang Belawa selama 6 tahun, dan tamat pada tahun 1956. Setelah itu, ia hijrah ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan menengah di MTS Muallimin Cabang Makassar dari tahun 1956—1959, kemudian lanjut lagi di Muallimin Uliyah dan tamat pada tahun 1961. Setamat dari sekolah tersebut, Bahar tidak langsung melanjutkan kuliah, melainkan menunaikan pengabdianya sebagai alumni Muallimin dengan tugas mengajar di Muallimin Tane, Kabupaten Barru selama 3 tahun.

Sekembali dari tugas mengajar, tepatnya di tahun 1963, Baharuddin melanjutkan pendidikannya di Universitas Muslim Indonesia (UMI), integrasi IAIN Fakultas Tarbiyah. Sementara melanjutkan pendidikan, di tahun 1964, ia menikah dengan Siti Marhaban Ahmad. Dari pernikahan inilah, ia dikaruniai sebelas orang anak. Dua tahun setelah itu, gelar Sarjana Muda pun berhasil diraihinya, tepatnya pada tahun 1966. Selepas itu, ia kembali pada aktivitas mengajarnya di Muallimin, kemudian pindah ke Muallimat pada tahun 1971, sampai ia terangkat sebagai pegawai negeri di Departemen Agama Kota Makassar pada 1974. Melalui Depag, ia ditugaskan mengajar di Darul Arqam Gombara bersama tiga kader Muhammadiyah lainnya, yakni Salmiah Jabbar, Muchtar Waka, dan Muh Dahlan Yusuf.



Drs. K.H. BAHARUDDIN PAGIM
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan Periode 2005-2010

Di saat mengajar di Gombara itulah, sambil megajar, ia melanjutkan kembali kuliahnya di IAIN dan memperoleh gelar Doktorandus pada tahun 1977.

Di tahun 1977 juga, Bahar ditarik kembali ke Muallimat atas permintaan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulsel untuk menjadi direktur. Hal ini karena direktur pada waktu itu, Musyawarah Musa, melanjutkan pendidikan ke Surabaya. Ia menjadi direktur di Muallimat selama dua periode, berakhir pada tahun 1984 karena di tahun tersebut, bersamaan ia diminta kembali ke Kantor Departemen Agama Makassar untuk selanjutnya dialihutugaskan ke Kanwil Agama Sulsel. Sementara, posisinya di Muallimat digantikan oleh Abdullah Renre.

Di Kanwil Depag, Bahar ditempatkan sebagai Kepala Seksi Lembaga Dakwah dan Penerangan Agama, kemudian sebagai Kepala Seksi Peringatan Hari Besar Umat Islam (PHBI) dan MTQ. Beberapa tahun di kanwil, permintaan untuk kembali ke Muallimat datang kembali untuk Baharuddin. Kali ini, permintaan datang langsung dari Direktur Muallimat waktu itu, Abdullah Renre, karena Abdullah Renre akan melanjutkan studi S2 di IAIN sehingga mengharuskannya meninggalkan Muallimat. Hal ini sebenarnya tidak disetujui oleh kanwil, akan tetapi karena permintaan dan dorongan kuat dari pihak Muallimat, maka akhirnya kanwil mengizinkan, dengan catatan, ia diharuskan membuat perjanjian dengan kanwil, Abdullah Renre, serta dirinya sendiri. Secara resmi, ia kembali untuk yang kedua kalinya sebagai direktur di Muallimat pada tahun 1994. Di masa itu pula, selain sebagai direktur, ia sekaligus

menduduki posisi sebagai Kepala Sekolah Aliyah Muallimat sampai pensiun di tahun 2000.

Selain itu, aktivitas lain yang ditekuni Bahar ialah menjadi Dosen Al-Islam Kemuhammadiyah di Unismuh dan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah, seperti STKIP Muhammadiyah Bone dan Sengkang sebagai dosen luar biasa. Aktivitas ini ia lakukan setelah ia meraih gelar sarjana di tahun 1977. Di kampus, selain mengajar, ia juga pernah diamanahkan sebagai Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi Unismuh selama dua periode, dari tahun 1994—1998.

Baharuddin diangkat sebagai dosen persyarikatan di Unismuh Makassar di tahun 1998, dua tahun sebelum dirinya pensiun sebagai pegawai negeri sipil. Setelah pensiun itulah, ia akhirnya total mengajar di Unismuh dan ditempatkan di Fakultas Agama Islam.

Tahun 2010, atas permintaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel dan atas persetujuan Badan Pembina Harian (BPH) Unismuh, Bahar diminta untuk menjadi Direktur di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara periode 2010—2015.

Di Muhammadiyah, Baharuddin pertama kali menjadi pimpinan saat menjadi Ketua Ranting Marro Cabang Ujung Tanah pada tahun 1976—1981. Setelah itu, ia memimpin Cabang Muhammadiyah Ujung Tanah tahun 1981—1985. Selanjutnya, ia diamanahkan sebagai Ketua Majelis Tarjih PDM Kota Makassar tahun 1985--1990. Ia kemudian menjadi Ketua PDM Kota Makassar 1990--1995, Anggota Majelis Tarjih PWM Sulsel 1995—2000, dan Ketua Majelis Tarjih PWM 2000-2005.

Baharuddin Pagim terpilih menjadi Ketua PWM Sulsel periode 2005—2010 melalui Musywil ke 37 di Parepare. Saat ini, ia diamanahkan sebagai Wakil Ketua PWM Sulsel 2010—2015.

Aktivitasnya di luar Muhammadiyah sebagai Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulsel tahun 2010—2015, serta pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel sebagai salah satu Ketua Bidang pada tahun 2010—2015.

Sebagai alumni Muallimin, aktivitas mubalig adalah hal yang tentu tidak terlepas dari diri Baharuddin Pagim. Tugas mubalig baginya adalah identitas yang melekat dalam dirinya. Sejak masih belajar di Muallimin, ia memang telah banyak menjalani aktivitas tersebut. Dengan bekal sebagai lepasan Muallimin yang *mondok* selama enam tahun, ditambah ketekunannya untuk belajar pada para ulama, baik di dalam lingkungan Muallimin, maupun di luar, menjadikan Baharuddin Pagim matang dalam hal paham keagamaan.

Secara pemikiran, Baharuddin Pagim banyak terpengaruh oleh pemikiran keagamaan yang ia kaji dari K.H. Makmur Ali. Bahar belajar kepada Kiai Makmur tentang perjuangan Islam dan kepada K.H. Djabbar Asyirie ia belajar terkait ulama Zuhud. Hal ini membuat gambaran dari kedua tokoh tersebut sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya. Selain itu, ia juga banyak belajar dari K.H. Bilalu melalui pengajian *Dur-ratumasihin* atau mutiara-mutiara nasihat, serta K.H. Mustari melalui kajian *Tafsir Jalalain*.

Dari banyak belajar kepada ulama-ulama itu, bekal paham agama Baharuddin semakin matang, sehingga dari hal itu pula peran mubalighnya semakin mantap. Hal ini akhirnya membuat ia mulai banyak mengisi pengajian sebagai ulama yang sangat menjunjung tinggi pada kemurnian agama sesuai dengan Alquran dan Hadis.

Dalam setiap pengajiannya, dia banyak menekankan bahwa Islam harus dipahami dari sumber aslinya, yaitu Alquran dan Sunah. Menurut Kiai Bahar, fanatik itu hanya kepada Alquran dan Hadis, dan menolak untuk fanatik terhadap satu ulama saja, termasuk itu ulama Muhammadiyah sekalipun. “Dulu pernah suatu waktu, saat Dr. S. Madjidi banyak berpengaruh terhadap pemikiran orang-orang Muhammadiyah di Sulsel. Saya merasa, hal itu mesti dikoreksi. Bagaimanapun, kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap beliau.” (dalam Wawancara, Jumat, 3/11/2015).

Selain itu, ia juga banyak berpesan untuk belajar agama kepada semua ulama tidak dibeda-bedakan. Intinya, berprinsip pada Quran dan Hadis, tidak berdasar pada pendapat pribadi. Ia menganut *Ijma jama’i*, bukan pendapat pribadi. Hal lain dari Baharuddin, sekalipun terkadang menemukan perbedaan bersama teman-temannya di Muhammadiyah, akan tetapi, selalu disikapinya dengan bijak. Menurutnya, sikap ini adalah keyakinan dan prinsip setiap orang.

Sosok Bersahaja yang Amanah

Baharuddin dikenal sebagai pimpinan yang sangat menjunjung tinggi amanah. Usia bahkan tidak menjadi halangan baginya untuk tetap beraktivitas di lingkungan persyarikatan. Di saat dalam kondisi fisik yang semakin menurun, ia tetap aktif menghadiri setiap acara-acara, baik sebagai peserta, mau pun sebagai penceramah. Dalam menjalankan kesibukannya, Baharuddin kerap hanya ditemani motor tua. Setelah tak dapat lagi mengendarai kendaraan sendiri, ia difasilitasi oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel sebuah mobil Toyota Kijang beserta supir untuk menunjang aktivitas-aktivitasnya.

Kebersahajaan inilah yang membuat ia disukai banyak orang, baik rekan-rekannya sesama warga Persyarikatan Muhammadiyah, maupun orang-orang yang mengenalnya. Di Masjid Hisbul Wathan dekat rumahnya, Baharuddin juga merupakan Ketua pengurus masjid. Di lingkungan tempat tinggalnya, Baharuddin juga dikenal sebagai orang yang ramah. Warga sekitar rumahnya mengaku tidak pernah melihat Ustaz Bahar terlibat konflik dengan tetangga sekitar.

Baharuddin mengaku menempati rumah di suatu gang sempit, di Jalan Satando, sejak tahun 1959. Rumah dengan luas 8x5 meter persegi. Di rumah inilah, Baharuddin bersama istrinya, Hj Sitti Marhaba membesarkan sepuluh anak-anaknya. Ia pernah ingin pindah dari rumah itu, tapi dilarang oleh banyak warga. Mereka meminta Baharuddin untuk tetap tinggal di sana. Ia bagi warga setempat dianggap sebagai teladan.

Kiprah Kepemimpinan di Muhammadiyah

Baharuddin Pagim ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan masa jabatan 2005–2010 melalui Musyawarah Wilayah ke-37 di Kota Parepare pada tanggal 10–12 Syawal 1426 H / 12–14 November 2010 M. Dalam memimpin, Baharuddin adalah tipikal pemimpin yang sangat mengedepankan model kepemimpinan kolektif kolegial. Ia pun sering mengaku tidak terlalu banyak berpikir. Muhammadiyah Sulsel di bawah kepemimpinannya hanya mengontrol kinerja dua belas unsur pimpinan lainnya. Hal ini tentu saja menjadi dorongan bagi pimpinan yang lain untuk memaksimalkan potensi dalam berkontribusi terhadap kepemimpinan masa itu.

Kepemimpinan Baharuddin Pagim berjalan normal dan dinamis. Hal itu ditunjang dengan personalia Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang diisi oleh kader-kader terbaik Muhammadiyah masa itu. Para personalia ini adalah pimpinan yang juga memiliki posisi dan jabatan di birokrasi pemerintahan maupun di kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal ini diakui Baharuddin menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya. Keterbatasan waktu yang dimiliki untuk mengurus organisasi menjadi hambatan.

Akan tetapi, dengan kondisi tersebut, tidak berarti ia juga tidak berkinerja. Secara teknis, ia mungkin tidaklah terlalu menonjolkan diri. Akan tetapi, di periode ini peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam sangat dirasakan aktivitasnya dalam

memberikan tawaran dan solusi-solusi konkrit terhadap kondisi sosial masyarakat dan kehidupan beragama, khususnya di Sulawesi Selatan.

Proaktif Kunjungan “Ke Bawah”

Keberadaan para pengurus Muhammadiyah di tingkat daerah dan cabang, tidak boleh mengalami kemandekan. Hal inilah yang adalah yang juga menjadi perhatian besar di kepemimpinan Baharuddin Pagim. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di masa itu berupaya mengadakan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Para pimpinan daerah dan cabang tentu menyambut positif kunjungan seperti ini. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan secara teratur dianggap menjadi motivasi kepada pimpinan cabang dan pimpinan daerah dalam mengemban amanah persyarikatan.

Dalam setiap kunjungan ke daerah, ia selalu mendapat sambutan positif dan antusiasme dari pimpinan dan warga Muhammadiyah. Kunjungan PWM biasanya dirangkaikan dengan satu rangkaian kegiatan yang menghadirkan audiens dari kalangan warga Muhammadiyah, di samping ada pula pertemuan khusus dengan pimpinan Muhammadiyah setempat. Mereka mengemukakan kondisi yang dialami dan berdiskusi guna mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.

Mendirikan Sekolah Kader Ulama dan Mubaligh

Kesadaran bahwa seiring dengan perkembangan zaman, pimpinan persyarikatan di berbagai level kepe-

mimpinan sudah mulai merasakan adanya krisis kader ulama dan mubalig. Di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), keberadaan kader mubalig yang sungguh-sungguh mengasah dirinya sebagai calon ulama atau mubalig dianggap sudah langka ditemukan. Sistem pengaderan yang dirancang AMM saat itu cenderung memperkuat indikasi yang dimaksud. Sementara, lembaga perguruan Muhammadiyah yang seharusnya juga sebagai lembaga pengaderan calon-calon ulama dan mubalig Muhammadiyah pun tidak lagi berbuat maksimal untuk mengantisipasi masalah ini.

Di beberapa amal usaha Muhammadiyah, seperti masjid dan perguruan, kader mubalig yang memiliki pengetahuan yang kuat terhadap paham agama yang dipedomani Muhammadiyah sudah mulai sulit ditemukan. Justru, sekarang banyak nonkader yang mendominasi pengelolaan amal usaha masjid dan perguruan tersebut. Bagi PWM, jika hal itu tidak diantisipasi, maka cepat atau lambat bisa menyebabkan terputusnya hubungan antara persyarikatan dengan amal usaha.

Untuk mengantisipasi kelangkaan kader ulama dan mubalig Muhammadiyah ini, PWM di masa kepemimpinan Baharuddin Pagim terus berupaya dengan berbagai cara. Cara pertama, meningkatkan pembinaan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar dan pesantren lainnya yang ada di daerah-daerah. Kedua, membuka Program Pendidikan Ulama Muhammadiyah bekerjasama dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Ketiga, mengirim kader-kader Muhammadiyah dari

berbagai daerah untuk mengikuti Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dan Pondok Hajjah Nurriyah Sabron Universitas Muhammadiyah Surakarta Jawa Tengah.

Belakangan, upaya tersebut menampakkan hasil, walaupun masih terbatas dan belum begitu terasa. Meskipun kecenderungan kader dan minat warga Muhammadiyah menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga ini sangat minim.

Pemberdayaan Amal Usaha

Salah satu kendala yang selalu mengiringi kepemimpinan Muhammadiyah sebelum-sebelumnya, menurut Kiai Bahar adalah persoalan biaya. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di masanya adalah berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah mulai saat itu dibuatkan regulasi untuk secara rutin menyeter kewajiban dua setengah persen dari total anggaran pendapatannya untuk membiaya kegiatan organisasi. Amal usaha yang dimaksud adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Hal itu sesuai dengan slogan “*Amal Usah Maju bersama Persyarikatan*”.

Pemekaran PWM Sulawesi Barat

Pada periode kepemimpinan Baharuddin Pagim ini pula, seiring dengan pemekaran Provinsi Sulawesi

si Selatan dengan berdirinya Provinsi Sulawesi Barat, maka disusul pula dengan harapan warga Muhammadiyah yang ada di provinsi tersebut untuk berdiri sebagai satu pimpinan wilayah tersendiri. Musyawarah Wilayah Muhammadiyah ke-37 merekomendasikan hal tersebut dan akhirnya disetujui pendirian Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat. Proses pembentukan akhirnya tuntas dengan lahirnya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 114/KEP/I.o/B/2006, Tanggal 22 Rajab 1427 H / 16 Agustus 2006 M, tentang Pengesahan Berdirinya Muhammadiyah Sulawesi Barat yang berkedudukan di Polewali Mandar. Juga telah terbit Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 115/KEP/I.o/D/2006 Tanggal 22 Rajab 1427 H / 16 Agustus 2006 M, tentang Penetapan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sementara Provinsi Sulawesi Barat.

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2007, dalam rangka peringatan Milad ke-97 Muhammadiyah tingkat Wilayah Sulsel-Sulbar, bertempat di Kota Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dilaksanakan peresmian berdirinya Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Barat dan pelantikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat yang diketuai Drs. H. Muh. Yusuf Tuali. Pelantikan ini langsung dipimpin oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang selama ini diwilayahi oleh PWM Sulsel, juga diserahkan pembinaanya kepada PWM Sulawesi Barat. Ada tiga PDM

yang diserahkan pada PWM Sulselbar. Ketiga daerah tersebut adalah PDM Mamuju, PDM Majene, serta PDM Polewali Mandar dan Mamasa. Turut pula diserahkan seluruh aset dan amal usaha Muhammadiyah yang ada di seluruh Propinsi Sulawesi Barat.

Dr. H. MUHAMMAD ALWI UDDIN, M.Ag. (Ketua Muhammadiyah Sulsel 2010-2015)

Haji Muhammad Alwi Uddin, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel periode 2010-2015. Ia lahir di Maros, 8 Oktober 1950. Secara karakter, ada sejumlah sahabat Alwi yang menyebutnya memiliki karakter yang serupa dengan sahabat Umar bin Khattab, ra. Ketegasannya itulah yang membuat kebijakannya dianggap “keras”. Ada pula yang menyatakan sosok Alwi memiliki banyak kemiripan dengan KH. Fathul Muin Dg. Maggading.

Alwi Uddin merupakan anak dari Ayah yang bernama Uddin, dan Ibu Hj. Hana. Alwi menikah dengan St. Wardanah ZAM, puteri dari K. H. Zaenal Abidin Maffy. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai tujuh orang anak. Alwi memberi inisial keluarganya MAWAR ISLAMIS, yang merupakan singkatan dari nama-nama: Muhammad Alwi, Wardanah (Istri), Imaduddin Alwi (anak pertama), Sulthanillah Alwi (anak kedua), Lisanuddin Alwi (anak ketiga), Amilah Ma’rifah Alwi (anak keempat), Musbirah Alwi (anak kelima), Izzul Islam Alwi (anak keenam), dan Syahidah Amini Alwi (anak ketujuh).



Dr. H. MUHAMMAD ALWI UDDIN, M.Ag.
Ketua Muhammadiyah Sulsel 2010-2015

Sejak tahun 1960-an ia telah menekuni Islam melalui Sekolah Arab/Ngaji (sore). Kemudian ia menempuh pendidikan formal melalui Sekolah Rakyat Negeri (6 tahun), selesai pada tahun 1963. Takpuas dengan pendidikan di tingkat SR, ia pun kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Mu'allimin I Muhammadiyah selama 4 tahun, dan selesai tahun 1967. Pendidikan selanjutnya diselesaikannya di Madrasah Mu'allimin Ulya Muhammadiyah selama 2 tahun, hingga tahun 1969.

Tekadnya melanjutkan pendidikan tak pernah berhenti. Ia melanjutkan kuliah pada Fakultas Ushuluddin Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar. Gelar B.A. (Sarjana Muda) direngkuhnya tahun 1974. Lalu ia melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar, dan memperoleh gelar sarjana (Drs.) pada tahun 1982.

Semangat menuntut ilmu menghantarnya menyeberang pulau, dengan menempuh pendidikan S2, di Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Master Agama (M.Ag.) berhasil diraihinya tahun 1997. Namun, gelar magister tak membuatnya berpuas diri. Meski telah cukup 'berumur', ia tak berhenti belajar. Meski tertatih, sebab harus berbagi waktu mengurus Muhammadiyah, ia akhirnya mendapatkan gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2013.

Profesi pendidik adalah bagian terbesar dari perjalanan hidup Alwi Uddin. Ia menekuni profesi Guru Agama Islam Departemen Agama, sejak tahun 1967 hingga 1998. Di Universitas Muhammadiyah Makassar,

ia mulai berkarir sebagai dosen. Pertama kali, ia menjabat sebagai Sekretaris Fakultas Ushuluddin Unismuh Makassar tahun 1986–1988, Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin Unismuh Makassar tahun 1988–1990, Dekan Fakultas Tarbiyah/Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar 1990–1996.

Selain di Unismuh, Alwi Uddin juga mengabdikan sebagai Dosen Luar Biasa IAIN Alauddin Makassar selama 16 tahun (1982–1998). Pengabdian yang cukup panjang tersebut membuat status PNS Alwi sebagai Guru Agama dialihkan sebagai Tenaga Administrasi Fakultas Adab IAIN Alauddin Makassar tahun 1998–1999. Lalu, ia pun mulai menjadi Tenaga Pengajar/Dosen Tetap Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, sejak tahun 1999 hingga sekarang. Pernah menjadi Anggota Senat Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar (2008–2012).

Di samping mengajar di Unismuh dan IAIN/UIN Alauddin, Alwi juga mengajar di sejumlah kampus. Ia adalah dosen luar biasa di Akademi Teknik dan Radiologi (ATRO) Muhammadiyah Makassar (1997–Sekarang), Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Muhammadiyah Makassar (1997–Sekarang). Ia juga menjadi dosen luar biasa di STKIP Muhammadiyah Bone (1991–Sekarang), dan di Akademi Analisis Kesehatan (Anakes) Muhammadiyah Makassar (2015–Sekarang).

Selain sebagai seorang pendidik, Alwi Uddin juga adalah seorang aktivis sejak muda. Ia adalah Ketua pertama Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Cabang Camba (1964-1966), selanjutnya terlibat sebagai akti-

vis Pemuda Muhammadiyah dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) pada tahun 1966–1967. Selama bersekolah di Mu'allimin Ulya, ia juga menjadi Pengurus Ranting IPM. Di masa mahasiswa, dunia aktivis masih menarik minatnya. Ia melibatkan diri di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris IMM Korkom Unismuh (1970–1971). Jiwa kepemimpinan yang dimilikinya, membuatnya didaulat sebagai Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ushuluddin Unismuh Makassar (1972—1973), dan ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Mahasiswa (DEMA) Unismuh Makassar tahun 1973—1974.

Di luar kampus, Alwi muda juga merupakan Pimpinan Muhammadiyah bagian AMM Cabang Layang Parang Layang (1971–1974). Keberhasilannya memimpin AMM, membuatnya diamanahi sebagai Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Cabang Layang Parang Layang (1978–1985). Ia pernah pula menjadi Ketua Bidang Tabligh PCM Karunrung (1984–1985) dan Sekretaris PCM Karunrung (1985–1990).

Kiprahnya yang malang melintang sebagai da'i, membuatnya dilirik sebagai Sekretaris Majelis Tablig Muhammadiyah Sulsel (1974–1985). Di era orde baru inilah, Alwi dikenal sebagai seorang mubalig yang cukup vokal menyuarakan kritik terhadap penguasa. Khotbah-khotbahnya yang cukup keras, pernah dicurigai bermuatan subversif. Bahkan beberapa kali, ia sempat harus diinterogasi oleh di Markas KODIM kala itu.

Di usia yang cukup muda (35 tahun), ia telah terpilih sebagai Anggota Pimpinan Muhammadiyah Sulsel periode 1985—1990, dan diamanahi sebagai Wakil Sekretaris, pada periode pertama kepemimpinan K. H. Djamaluddin Amien tersebut. Perannya sebagai Wakil Sekretaris selama 5 tahun, membuatnya dipercayakan sebagai Sekretaris PWM Sulsel periode 1990—1995.

Selain aktif di PWM Sulsel, Alwi Uddin juga aktif di PDM Makassar. Ia pernah mendapatkan amanah sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) PDM Makassar (1995—2000), dan Ketua PDM Makassar tahun 2000—2005. Setelah menjabat sebagai Ketua PDM Makassar, ia kembali mendapatkan amanah sebagai Sekretaris PWM Sulsel (Periode 2005—2010) mendampingi K. H. Baharuddin Pagim sebagai Ketua PWM saat itu. Pada Musywil Muhammadiyah Sulsel ke-38, di Unismuh Makassar tahun 2010, ia didaulat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel tahun 2010—2015.

Selama menjadi aktivis Muhammadiyah, Alwi Uddin telah terlibat dalam permusyawaratan Muhammadiyah tingkat nasional, seperti Tanwir dan Mukhtar. Ia telah menjadi peninjau sejak tahun 1987, dalam Sidang Tanwir di Lhokseumawe - Daerah Istimewa Aceh, dan Tanwir 1997 di Semarang. Alwi kemudian menjadi Peserta Tanwir 2003 di Makassar, saat itu, ia terlibat dalam Komisi B yang membahas tentang Dakwah Kultural. Setelah itu, Alwi terlibat sebagai Anggota Tanwir dalam sejumlah Sidang di beberapa kota;

Yogyakarta (2007), Bandar Lampung (2009), Yogyakarta (2010), Bandung (2012), Samarinda (2013), dan Makassar (2015).

Selain keikutsertaan dalam Sidang Tanwir, partisipasi Alwi Uddin dalam forum Mukhtar juga sangat intensif. Pada Mukhtar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang, ia adalah panitia dan notulis sidang-sidang. Di Mukhtar ke-40, tahun 1978, di Surabaya, ia menjadi Ketua Sub Komisi D, yang membahas tentang aliran-aliran kepercayaan. Mukhtar ke-41 tahun 1985 di Surabaya/Solo, ia adalah Sekretaris Komisi III, yang membahas perubahan AD/ART/Azas Muhammadiyah. Pada Mukhtar inilah Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai azas organisasinya. Alwi Uddin juga terlibat sebagai Peninjau dalam Mukhtar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta.

Pada Mukhtar ke-45 tahun 2005, di Malang, Alwi adalah Wakil Ketua Komisi A, yang mengulas tentang Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bidang Organisasi dan Umum. Lima tahun kemudian, Alwi Uddin didaulat sebagai Ketua Komisi A, di Mukhtar ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta. Demikian pula di Mukhtar Makassar tahun 2015, ia tetap duduk di Komisi A.

Pada Mukhtar ke 47 inilah, Alwi Uddin memiliki banyak peran. Sebagai Ketua PWM tuan rumah, ia harus bekerja keras memastikan pelaksanaan mukhtar berjalan sukses. Ia juga disibukkan sebagai anggota panitia pemilihan, yang mesti memverifikasi Calon PP Muhammadiyah dan mempersiapkan pelaksanaan prosesi pemilihan. Peran yang paling penting Alwi ada-

lah sebagai Calon Anggota PP Muhammadiyah periode 2015—2020. Saat itu, hampir semua kalangan memastikan bahwa ia akan lolos sebagai salah satu dari 13 orang Anggota PP Muhammadiyah terpilih. Prediksi tersebut tidak tanpa alasan. Alwi bukan sosok baru dalam pentas nasional Muhammadiyah. Ia telah cukup dikenal oleh semua wilayah. Belum lagi, perannya sebagai Ketua PWM tuan rumah muktamar. Alwi berhasil lolos sebagai 39 Calon Anggota PP Muhammadiyah yang dipilih dalam forum Tanwir. Namun, realitas forum Muktamar berkata lain, Alwi hanya menempati posisi 16 besar dengan jumlah 829 suara.

Meski Alwi Uddin lebih banyak menghibahkan waktunya sebagai aktivis Muhammadiyah, ia juga pernah terlibat sebagai pengurus di sejumlah organisasi lain. Pernah menjadi Pengurus Ranting Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) tahun 1969–1971, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Makassar (2002–2007), Penasihat FORMASI Kota Makassar (2002–sekarang). Alwi juga pernah tercatat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kota Makassar (2009–2013), dan Wakil Ketua Dewan Penasehat MUI Makassar (2007–2012). Sejak tahun 2002, ia turut aktif di Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulsel. Di organisasi tersebut, ia menjabat sebagai salah satu Ketua Tanfidziyah (2005–2010), dan Sekretaris Dewan Syariah (2010–2015).

Selain sebagai seorang aktivis, Alwi Uddin adalah seorang akademisi yang cukup produktif menorehkan pikirannya secara tertulis, dalam bentuk karya ilmiah,

jurnal, buku, makalah, dan artikel. Dalam risalah Sarjana Muda di Unismuh Makassar (1975), ia telah menulis karya ilmiah yang berjudul “Kebijaksanaan Dakwah Islamiyah di Tana Toraja”.

Skripsi Sarjananya di IAIN Alauddin (1982) mengangkat judul “Kependudukan dan Keluarga Berencana (Suatu Studi Perbandingan). Tesisnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, berjudul “Aluk Todolo di Tengah Pluralitas Agama dan Transformasi Teologis”. Penelitian Doktoralnya di UIN Alauddin Makassar (2013), berjudul “Tajdid Gerakan: Studi Kritis Gerakan Dakwah Muhammadiyah (Tahun 2005-2011)”. Alwi juga menulis tentang “Syekh Yusuf: Ulama Sufi dan Pahlawan”, di Jurnal Adabiyah Fakultas Adab IAIN Alauddin Edisi IX, 2005.

Alwi Uddin telah menulis sejumlah makalah antara lain; “Aspirasi dan Orientasi Pemikiran Keagamaan Masyarakat Kampus pada Fakultas Tarbiyah-Universitas Muslim Indonesia (Hasil Penelitian, 1981)”, “Pembinaan Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Makassar (1990)”, “Jamaluddin Al-Afghani Studi tentang Ide Pembaharuan dan Politiknya (1994)”, “Amsal dan Jidal dalam Al-Quran (1994)”, “Periwayatan Hadis dengan Lafaz dan Makna (1995)”, “Perkembangan Pemikiran Teologi Klasik (1995)”, “Kedudukan Ilmu Kalam dalam Struktur Pengetahuan Keislaman (1995)”, “Perpustakaan Islam Yogyakarta: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini (1995)”, “Syekh Yusuf Ulama Suci Pahlawan (1995)”, “Ibadah Puasa dan Kesehatan Mental: Suatu Tinjauan Psikolo-

gis (1996)”, “Mulla Shadra: Al Hikma al-Muta’aliyah: Pemikiran Metafisika Mulla Shadra (1996).”

Makalah lain yang ditulis Alwi, yaitu: “Al-Syaukani dan Metode Ijtihadnya (2005)”, “Studi Kritis Terhadap Nalar Islam: Kejabariahan dan Keadariahan Masa Kini (2005)”, “Pendidikan dan Islamisasi Sains (2005)”, “Pluralisme Agama dan Tantangannya (2005)”, “Problematika Dakwah (2007)”, “Psikologi Dakwah (2008)”.

Alwi Uddin juga telah menuangkan intelektualitasnya dalam sejumlah buku. Ia tercatat sebagai editor buku “*Pokok-pokok Bahasan Khotbah Jum’ah 1423 H*” tahun 2001. Ia juga menjadi penyunting sejumlah buku: “*Syariat Islam Solusi Masalah Umat: Tema-tema Dakwah Ramadhan 1423 H* (2002)”, “*Membina Persatuan Menuju Masyarakat Qur’ani: Tema-tema Dakwah Ramadhan 1424 H* (2003)”, “*Revitalisasi Nilai-nilai Islam: Tema Khutbah Jum’ah 1427 H* (2006)”.

Tidak hanya sebagai editor dan penyunting, Alwi juga menjadi penulis beberapa buku, yaitu; “*Aluk Todolo di Tengah Pluralitas Agama* (2004)”, “*Problematika Kependudukan dan Fiqh Lintas Agama tentang Keluarga Berencana* (2010)”, “*Merenda Nalar Islami: Studi Kritis Pemikiran Islam* (2010)”, “*Problematika Gerakan Dakwah Muhammadiyah di Sulsel* (2014)”.

Ia juga menulis untuk Majalah dan Surat Kabar. Artikel yang berjudul “Dinamisasi Pemikiran Keislaman Muhammadiyah”, ditorehkannya di Harian Fajar, 20 Juli 1996. Alwi pun menulis “Kriteria Pemimpin”, di Majalah Islam Serambi Madinah (2006). Di Majalah Khittah Muhammadiyah Sulsel, Alwi menulis beberapa

artikel; “Refleksi Seabad Pers Persyarikatan: 10 Catatan untuk Majalah Suara Muhammadiyah (2014)”, “Paham Agama Perspektif Muhammadiyah (2015)”, “Pentingnya Kesadaran Historis (2015)”.

Dinamika Kepemimpinan

Selama menjadi Ketua PWM, Alwi Uddin, menyadari bahwa tantangan yang dihadapi begitu kompleks. Oleh karena itu, salah satu langkah yang diambil dengan melakukan penguatan militansi pimpinan dan kader Muhammadiyah.

Menurut Alwi Uddin, militansi Muhammadiyah dimaknai sebagai ketangguhan dalam ber-Muhammadiyah yang dibangun di atas basis nilai-nilai dasar persyarikatan, seperti Mukadimah Anggaran Dasar, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Kepribadian, Khittah, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ciri-ciri militansi, lanjut Alwi, ditunjukkan dengan komitmen tinggi pada misi dan kepentingan Muhammadiyah, tangguh dalam menjalankan usaha-usaha Muhammadiyah, dan memiliki integritas tinggi pada cita-cita dan jati diri Muhammadiyah.

Penguatan militansi di era kepemimpinannya dijadikan prioritas dengan menjalankan sejumlah langkah sebagai berikut:

Pertama, Baitul Arqam. Baitul Arqam diarahkan untuk para Pimpinan Muhammadiyah dan pengelola amal usaha Muhammadiyah. Dari beberapa kali kegiatan yang digelar, masih ada beberapa pimpinan per-

syarikatan dan para pengelola amal usaha yang tidak memahami secara baik visi dan misi Muhammadiyah. Di samping itu, kebiasaan dan cara pengamalan ajaran agama, cenderung tidak menganut paham keagamaan yang dipegang Muhammadiyah. Contoh sederhana, masih ada pimpinan amal usaha yang berwudu berbeda dengan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

Kedua, kunjungan ke daerah. Selama kepemimpinannya, Alwi Uddin selalu menyempatkan waktu melakukan kunjungan daerah. Bahkan, ia sering menjadi “cadangan” bagi pimpinan lainnya. Jika telah ada Pimpinan yang ditunjuk untuk bertugas ke daerah, namun tiba-tiba berhalangan, Alwi tak pernah menolak didadak menggantikan pimpinan yang tiba-tiba berhalangan. “Ustaz Alwi, adalah Pimpinan yang selalu siap menerima penugasan ke daerah meskipun mendadak, bahkan malam sebelum acara sekalipun,” ungkap Umar Sadiq, Sekretaris Eksekutif PWM Sulsel.

Dengan kunjungan-kunjungan yang dilakukan secara teratur, tentunya dapat memberikan motivasi kepada pimpinan cabang dan pimpinan daerah dalam mengemban amanah persyarikatan. Kunjungan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan biasanya dirangkaikan dengan satu rangkaian kegiatan yang menghadirkan audiens dari kalangan warga Muhammadiyah, di samping ada pula pertemuan khusus dengan pimpinan Muhammadiyah setempat. Mereka mengemukakan kondisi yang dialami dan berdiskusi guna mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.

Ketiga, pembinaan organisasi otonom. Bagi Alwi Uddin, kader ortom harus dilihat sebagai produsen kader pelanjut dan penyempurna Muhammadiyah. Oleh karena itu, ortom harus benar-benar dibina dengan baik. Di tingkat wilayah, pembinaan kader dilakukan dengan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas persyarikatan, serta memberikan bantuan finansial dan sarana dalam mendukung program kerja yang mereka lakukan. Selama kepemimpinan Alwi, pembinaan ortom banyak diserahkan kepada Wakil Ketua, K. H. Iskandar Tompo, yang membidangi Majelis Pendidikan Kader (MPK) yang dipimpin Syamsuriadi P. Salenda.

Keempat, Menyiapkan Kader Ulama dan Mubalig. Dalam mengantisipasi kelangkaan kader ulama dan mubalig Muhammadiyah, PWM Sulsel dibawah kepemimpinan Alwi Uddin, memberi prioritas dengan penguatan pembinaan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, dan membuka Program Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kelima, pemberdayaan Amal Usaha. Untuk membiayai agenda dakwah dan program kerja persyarikatan, dana yang terbatas kadang kala menjadi kendala yang selalu muncul. Oleh karena itu, PWM Sulsel telah berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Slogan “Amal Usaha Maju bersama Persyarikatan” telah diaktualkan selama kepemimpinan Alwi. Sejumlah kegiatan PWM, seperti pengajian ramadan, syawalan, pelatihan/workshop, seminar sering ditempatkan di kampus-kampus PTM.

Gebrakan sebagai Ketua

Di periode kepemimpinannya, Sulsel kembali menjadi Tuan Rumah Muktamar untuk ketiga kalinya, setelah Muktamar tahun 1938 dan 1971. Muktamar ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. “Sejak awal Pak Jusuf Kalla telah menyatakan bahwa Mukhtar Muhammadiyah di Sulsel adalah harga mati bagi masyarakat Sulsel. Hal ini merupakan *siri’ napacce*, sehingga atas dasar itulah kita bertekad untuk bekerja semaksimal mungkin. Apa yang kita miliki baik itu tenaga, pikiran, semuanya kita kerahkan untuk kesuksesan muktamar,” jelasnya.

“Ini bukan kita yang menilai, tetapi penilaian itu berasal dari luar. Alhamdulillah, kalau kita dinilai sukses. Maka dari itu kami, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Gubernur dan Walikota, serta panitia seluruhnya. Insya Allah, Allah memberkati usaha dan kerja keras kita semua. Semoga ini bernilai ibadah di sisi Allah swt, karena ini *Jihad fjsabilillah*,” pungkasnya.

Selain itu, Alwi juga membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Nahdlatul Ulama. Malah ia pernah mengundang sejumlah tokoh NU untuk memberikan pengajian di Pusat Dakwah Muhammadiyah, seperti AGH. Sanusi Baco. Meski langkah ini mengundang kritik, namun menurut Alwi, inilah perwujudan itikad untuk membangun dialog intensif antar Ormas Islam. Kegiatan tersebut dimotori oleh Majelis Tabligh, yang

diketuai oleh Dahlan Lamabawa S.Ag., M.Ag. Majelis ini juga cukup intensif melakukan penguatan kapasitas Mubalig, melalui *Kuliyatul Mubalighin*.

Aktivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan terhadap petani dan nelayan, melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Bentuk pemberdayaan dilakukan dengan mengembangkan pertanian terpadu (*Integrated Farming*) di beberapa daerah. Selain itu, dilakukan pula penguatan Lembaga Penanggulangan Bencana, atau MDMC (Muhammadiyah *Disaster Management Center*). Selama kepemimpinan Alwi, telah dilatih 200 relawan MDMC Sulsel. Selain itu, LPB Sulsel juga melaksanakan Program Kesiapsiagaan Rumah Sakit dan Kesiapan Masyarakat untuk Kedaruratan Bencana (*Hospital Preparedness and Community Readdines for Emergency and Disaster*, disingkat HPCRED).

Alwi Uddin juga dianggap “news maker”, pernyataan-pernyataan Alwi kerap dikutip oleh sebagian besar media massa di Sulsel. Bahkan beberapa kali, pernyataannya menjadi *headline* di sejumlah media massa. Ia juga tanpa *tedeng aling-aling*, berani bersikap kritis terhadap pemerintah, khususnya keberpihakan terhadap pengembangan bidang keagamaan. Selain itu, ia cukup ramah dan selalu menyediakan waktu untuk wartawan. Di periode ini pula, Muhammadiyah Sulsel berhasil menerbitkan majalah yang telah direncanakan selama beberapa periode. Majalah tersebut diberi nama Majalah Khittah, dengan semboyan “Suara Islam Berkemajuan”. Penegasan nama tersebut untuk

meneguhkan komitmen Muhammadiyah Sulsel untuk terus bergerak dalam poros Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang disahkan pada Mukhtamar Muhammadiyah tahun 1971, di Ujung Pandang. Selain itu, sebagai bagian dari upaya berdakwah di dunia maya, turut diluncurkan portal dakwah www.khittah.co sebagai jawaban atas tantangan dakwah di era digital. Pada era kepemimpinan Alwi Uddin di Muhammadiyah Sulsel juga berhasil diterbitkan buku sejarah dan biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulsel. Penerbitan buku sejarah tersebut, merupakan impian yang belum terwujud pada periode-periode sebelumnya. Program-program tersebut dijalankan oleh Majelis Pustaka dan Informasi.

Majelis-majelis lainnya juga menunjukkan progresivitas, misalnya Majelis Pembina Kesehatan Umum, dengan kehadiran apotik dan klinik di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen yang bergiat meningkatkan kapasitas guru Muhammadiyah dan ditugaskan khusus menangani Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Majelis-majelis lainnya juga tak kalah giatnya.



PENUTUP

Kenyataan yang tak dapat diingkari bahwa nasionalisme sebagai titik tolak tegaknya kesadaran nasional di Sulawesi Selatan, pada awalnya diperkenalkan oleh organisasi politik, Syarekat Islam. Tetepi, karena keberadaan Syarekat Islam sangat terbatas, hanya di beberapa tempat tertentu saja dengan jumlah anggota yang sangat sedikit maka pengaruh kesadaran nasional yang ditimbulkannya pun sangatlah terbatas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa pelopor kesadaran nasional di Sulawesi Selatan yang sesungguhnya adalah Persyarikatan Muhammadiyah.

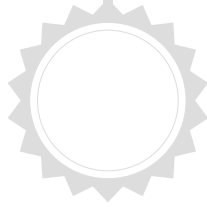
Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdullah, dalam kurun waktu lebih kurang sepuluh tahun sejak didiri-

kannya oleh Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro dan kawan-kawan di Makassar pada tahun 1926, organisasi sosial keagamaan yang berpusat di Yogyakarta itu telah tersebar luas di seluruh *onderafdeeling* Celebes Selatan. Dalam wadah organisasi itulah, para anggota dan simpatisan yang berasal dari Sulawesi Selatan berinteraksi dengan para anggota dan simpatisan yang berasal dari daerah lain, terutama melalui Kongres Muhammadiyah yang diselenggarakan di Makassar pada tahun 1932. Melalui interaksi itu, diruntuhkanlah “tembok-tembok kedaerahan” sedikit demi sedikit yang menjadi dinding pemisah dan penghalang bagi terciptanya kesatuan dan persatuan nasional. Di atas dasar nasionalisme yang dijiwai oleh perasaan senasib sepenanggungan itu, ditanamkanlah kesadaran akan pentingnya umat Islam melepaskan diri dari keterbelakangannya menuju ke kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Kemajuan mustahil diperoleh secara sempurna manakala umat Islam masih terikat dalam belenggu penjajahan Belanda, maka kesadaran akan pentingnya kemerdekaan pun harus ditumbuhkan.

Itulah sebabnya sehingga hampir semua pemimpin dan anggota Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan turut ambil bagian dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan pada sekitar tahun 1945-1949. Atas jasa dan keturutsertaan merekalah itulah yang kemudian mengantarkan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim itu ke alam kemerdekaan. Setelah Kemerdekaan para ketua dan para pemimpin Muhammadiyah lainnya juga tam-

pil ke depan sebagai pelopor dalam mengisi kemerdekaan melalui *amar ma'ruf nahi mungkar* berupa *da'wah bil lisan, da'wah bil qalam, dan da'wah bil hal*. Orang-orang yang pernah memimpin Muhammadiyah Sulsel memiliki latar belakang yang beragam, ada yang pedagang, ulama, politisi, sastrawan, guru, dosen, birokrat. Namun ada sejumlah titik simpul yang sama dari mereka, semuanya merupakan mubalig (dakwah lisan), sebagian besar mereka adalah penulis (dakwah tulisan), dan mereka adalah penebar keteladanan di tengah masyarakat (dakwah perbuatan).

Keteladanan para Ketua Muhammadiyah dari masa ke masa tersebut dapat dijadikan *ibrah* bagi para aktivis Muhammadiyah masa kini, maupun bagi masyarakat luas yang tertarik menapak jejak ketokohan mereka.



Daftar Pustaka

- Abdullah Taufik, 1983, “Pengantar” dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, V-XV, Jakarta: CV. Rajawali.
- , 1987, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Abidin, Andi Zainal, 1999, *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Alfian, Ibrahim, 1992, “Tentang Metodologi Sejarah” dalam T. Ibrahim Alfian dkk (ed), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*, 409-419, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Idwar, 2009, *H.M. Yunus Kadir Membangun Muhammadiyah di Tana Toraja*, Makassar: Pustaka Sawerigading.

- Arifin, 1987, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bosra, Mustari, 2008, *Tuan Guru, Anrong Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*, Makassar: La Galigo Press.
- Bonneff, Marsel, 1983, "Islam di Jawa, Dilihat dari Kudus", dalam Marcel Bonneff (ed), *Citra Masyarakat Indonesia*, 227-247, Jakarta, Sinar Harapan,
- Brugmans, I.J. 1987, "Politik Pengajaran", dalam H. baudet dan I.J. Brumans (ed), *Politik Etis dan Repolusi kemerdekaan*, 176-194, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cense, A. A., 1972, *Beberapa Catatan Mengenai Penulisan Sejarah Makassar-Bugis*, terjemahan KITLV Belanda, Jakarta: Bharata.
- Darmawijaya, 2012, *Muhammadiyah di Sulawesi Selatan 1926-1942*, Tesis, Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- De Jong, Chr. G. F., 1996, *Ilalang Arenna...: Sejarah Zending Belanda di antara Umat Bugis dan Makassar Sulawesi Selatan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Dhofier, Zamakhsyari, 1984, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES.
- Dijk, Cees van, 19983, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Gonggong, Anhar, 1992, *Abdul Qahhar Mudzakkar, dari Patriot hingga Pemberontak*, Jakarta: Grasindo.

- Hadikusumo, Djarnawi, (tt), *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al-Afghani sampai KHA. Dahlan*, Yogyakarta, Persatuan.
- Hamid, Abu, 1983, "Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan," dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, 323-447, Jakarta: Rajawali.
- Hamka, 1974, 1982, *Ayahku*, Jakarta: Wijaya.
- Harum, Rahmatullah, 2006, *Eksistensi Muhammadiyah di Sinjai*, Sinjai: MTs. Muhammadiyah Sinjai.
- Harvey, Barbara Sillars, 1989, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: Grafiti.
- Loyd, Christopher, 1993, *The Structures of History*, Oxford: Blackwell.
- Mattulada, 1983, "Islam di Sulawesi Selatan," dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, 209-321, Jakarta: Rajawali.
- Mattulada dkk, 1977, *Pengaruh Agama dan Sistem Pendidikan Agama (Islam) dalam Rumah Tangga Orang Bugis Makassar di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Fakultas Sastra UNHAS.
- Nakamura, 1982, *Matahari Terbit di Balik Pohon Beringin*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press.
- Noer, Deliar, 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Noerduyn, J., 1964, *Sejarah Agama di Sulawesi Selatan*, dalam W. B. Sidjabat (ed) *Panggilan Kita*

di Indonesia Dewasa Ini, 86-97, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

-----, 1972, *Islamisasi Makassar*, Jakarta: Bhratara.

Paeni. Muchlis, 1985, *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan*, Kota Makassar 1900-1950, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Patunru, Abd Razak Daeng, 1993, *Sejarah Gowa*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Patunru dkk, 1995, *Sejarah Bone*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

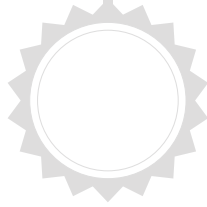
Pawiloy, Sarita, 1981, *Arus Revolusi di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Dewan Harian Daerah Angkatan 45.

Pelras, Ch., 1983, "Sulawesi Selatan Sebelum Datangnya Islam Berdasarkan Kesaksian Bangsa Asing," dalam Marsel Bonnef dkk (ed), *Citra Masyarakat Indonesia*, 56-82, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Putuhena, M. Shaleh, 2003, "Haji Indonesia: Suatu Kajian Sejarah tentang Perjalanan dan Pengaruhnya pada Pertengahan Pertama Abad XX", Disertasi Doktor, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Rajab Wahab, 1999, *Lintasan dan Perkembangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan*, Makassar: IPPSDM-WIN.

- Steenbrink, Karel A, 1986, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES.
- Suminto, Akib, 1986, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES.
- Syamsiah dan Ernarningsih, 2007, *Djabbar Ashiry: Perintis Pondok Pesantren Darul Arqam*, dalam Muhammad Ruslan dan Waspada Santing (Editor), *Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Dakwah*, Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Sulsel.
- Toge, Abd. Rahim, 1988, *Sesudah Makassar Kemudian Sengkang (Satu Fakta Berdirinya Muhammadiyah Sengkang)*, Makassar: Majelis Pustaka PWM Sulsel.
- , 1989, *Muhammadiyah Organisasi Dakwah Pertama di Soppeng*, Makassar: Majelis Pustaka PWM Sulsel.



Profil Penulis

Mustari Bosra adalah Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar. Memperoleh gelar Doktor Ilmu Sejarah dari Universitas Indonesia. Menulis buku *“Tuan Guru, Anrong Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942”*, pada tahun 2008. Sejak muda telah terlibat sebagai aktivis Muhammadiyah. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel ini, juga mengemban amanah sebagai Sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) Akademi-akademi Kesehatan Muhammadiyah Makassar.

Hadisaputra adalah Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PW Muhammadiyah Sulsel. Bersama sejumlah anak-anak muda Muhammadiyah lainnya, ia merintis penerbitan Majalah Khittah, yang didedikasikan sebagai corong Islam Berkemajuan. Magister Antropologi Unhas ini juga sering menuangkan gagasannya di se-

jumlah media cetak lokal di Makassar. Kesehariannya, ia banyak bergelut bersama Ibu-ibu 'Aisyiyah dalam advokasi penyakit Tuberkulosis di Sulawesi Selatan. Dapat dikunjungi di www.hadi-saputra.com, email: al-kemis.institute@gmail.com.

Kasri Riswadi adalah Wakil Sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi PWM Sulsel Periode 2013-2015. Alumni FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar ini bergelut sebagai aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ketua Umum Komisariat IMM FKIP Unismuh Makassar (2011-2012), Ketua Korkom IMM Unismuh (2013-2014), PC IMM Kota Makassar (2013-2014), dan Anggota Lembaga Media dan Komunikasi DPP IMM (2014-2016). Aktivitas lainnya sebagai penulis lepas, Redaktur di Majalah Khittah, dan kontributor di Majalah Kauman. Dapat dihubungi melalui email: kasri.riswadi@gmail.com

Zulfikar Hafid adalah Anggota Majelis Pustaka dan Informasi PW Muhammadiyah Sulsel. Hingga saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Makassar (UNM). Mulai bersentuhan dengan Muhammadiyah, sejak menjadi aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tingkat Komisariat hingga Cabang Makassar. Aktif dalam aktivitas literasi bersama Lembaga Transformasi Intelektual Mahasiswa (EI-Tiem) FBS UNM. Saat ini juga tercatat sebagai redaktur di Majalah Khittah. Email: zulfikarhafid.fikar@gmail.com.

MUSTARI BOSRA dkk.

Sejarah dan Biografi Ketua-ketua

MUHAMMADIYAH

SULAWESI SELATAN

SUARA MUHAMMADIYAH

Sejarah dan Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan

Penulis : Mustari Bosra (Ketua Tim Penulis)
Hadisaputra
Kasri Riswadi
Zulfikar Hafidz

Editor : Mukarramah Mustari
Layout : padangatine

Desain Sampul : Roslani Husein

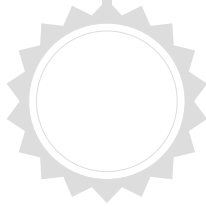
Penerbit : Suara Muhammadiyah
Jl. KHA. Dahlan 43 Yogyakarta 55122
Telp. (0274) 376955 Fax. (0274) 411306
E-mail: penerbitsm@gmail.com
www.suaramuhammadiyah.com

Hak cipta dilindung undang-undang. Dilarang mengutip,
memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau
seluruh isi tanpa izin penerbit.

Cetakan Pertama: Desember 2015

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN



Kata Pengantar

Alhamdulillah, syukur dan puji tim penulis persembahkan ke hadirat Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang telah dianugerahkan-Nya. Salah satu di antara nikmat-Nya yang tak terhitung itu ialah terselesaikannya konsep buku yang berjudul “Sejarah dan Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan” ini.

Ide untuk meneliti dan menulis buku ini sesungguhnya telah muncul sejak tahun 2001, saat itu Ketua Tim Penulis buku ini ditunjuk menjadi Ketua Lembaga Seni Budaya Pustaka dan Dokumentasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan periode 2000-2005. Namun ketika itu, penulis masih sibuk meneliti dan menulis disertasi untuk penyelesaian studi di Program Pasca Sarjana (S.3) Universitas Indonesia, maka ide penelitian dan penulisannya tersebut akhirnya tertunda.

Setelah Ketua Tim penulis merampungkan studi S3, pada bulan November 2003, ide penulisan buku ini muncul kembali. Oleh karena itu, pada bulan Januari 2004, rencana penelitian dan penulisan buku ini diajukan dalam rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Semua peserta rapat menyetujui asal tidak menggunakan dana Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Keputusan rapat tersebut dapat dimaklumi, apalagi ketika itu, untuk membiayai biaya operasional kantor pun, PWM mengalami kesulitan. Ketua Tim Penulis saat itu baru saja ditunjuk menjadi Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan menggantikan Almarhum Drs. H. Abdul Rasyid Abdullah.

Untuk mewujudkan rencana penulisan buku ini, penulis pun berusaha mengumpulkan bahan-bahan dengan jalan mewawancarai beberapa orang yang dianggap dapat memberikan informasi. Dan, untuk dua orang mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang masih hidup saat itu, yakni KH. Djamaluddin Amien, B.A. dan Drs. KH. Nasruddin Razak penulis memintanya membuat otobiografi. Dalam proses pencarian data lebih lanjut tentang riwayat hidup ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, penulis terbantu oleh beberapa catatan lepas Drs. Muhammad Yamin Data, mantan ketua Majelis Pustaka Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan periode 1995-2000. Sedangkan, penulisan sejarah kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang dituangkan

dalam bab III buku ini, terbantu oleh hasil penelitian yang telah dituangkan dalam salah satu sub bab disertasinya yang berjudul “Tuangguru, Anrongguru, dan Daengguru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942.”

Sebagian naskah yang ada dalam buku ini sempat direncanakan terbit pada tahun 2005, namun kembali mengalami sejumlah kendala. Rencana penerbitan naskah ini kembali mencuat pada pelaksanaan Workshop Penulisan Sejarah Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Parepare, bulan November 2014. Setelah workshop tersebut, dibentuklah tim penulisan Sejarah Muhammadiyah Sulsel, dimana saya diminta sebagai Ketua Tim Penulis, dengan beranggotakan tim dari Majelis Pustaka dan Informasi PW Muhammadiyah Sulsel periode 2010-2015. Naskah yang saya miliki kemudian disempurnakan dengan penelusuran arsip-arsip Muhammadiyah Sulsel, baik yang diperoleh dari Badan Arsip Provinsi Sulsel, maupun arsip yang masih tersimpan di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel. Naskah ini juga dilengkapi dengan biografi KH. Bahrudin Pagim dan Dr. H. Muhammad Alwi Uddin, yang belum sempat saya tulis sebelumnya.

Melalui pengantar ini, tim penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, khususnya Ketua Dr. H. Muhammad Alwi Uddin, yang tak kenal lelah menagih, dan bersedia memfasilitasi penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami haturkan bagi segenap Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-

Sulsel, khususnya yang sempat berpartisipasi dalam Workshop Penulisan Sejarah Muhammadiyah, tahun 2014 lalu. Buku ini adalah salah satu perwujudan tindak lanjut pertemuan tersebut. Sesudah buku ini, diharapkan seluruh PDM se-Sulsel dapat menerbitkan buku sejarahnya masing-masing, secara lebih utuh, walaupun sekilas sejumlah PDM telah mendapatkan ulasan singkat melalui buku ini. Secara teknis, buku ini juga takkan lahir tanpa dukungan sejumlah ananda crew Majalah Khittah, seperti Akhmad Dani, Muhammad Basri Lampe, dan Rahmawati Idrus. Dengan bantuan mereka, sejumlah dokumen berhasil ditemukan, sejumlah naskah juga telah dinarasikan ulang dengan sokongan anak-anak muda penghuni setia Pusat Dakwah Muhammadiyah ini.

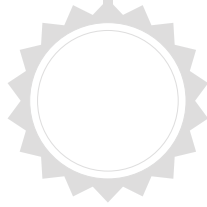
Meski demikian, buku ini masih jauh dari kesempurnaan, maka masukan dari berbagai pihak masih sangat diharapkan. Akhirnya, kepada penerbit dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ini, diucapkan terima kasih.

Makassar, Desember 2015

Wassalam

Ketua Tim Penulis

Mustari Bosra



Kata Sambutan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(١٩)

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik” Q.S. Al-Hasyr (59) ayat 18 dan 19.

Firman Allah tersebut diatas, menimbulkan pemikiran sekaligus kesadaran akan waktu, ruang, “sadar historis”, “sadar masalah”, “sadar nilai”, dan “sadar diri”. Jika kita tidak menghubungkan diri dengan masa lalu, dan seolah-olah memisahkan diri atau tidak menyadari hari ini dan hari esok, maka akan terjadi, kita tidak cukup siap dan kuat menghadapi keadaan masa kini dan tidak cukup berani menuju masa depan. Kita hanya terseret arus jalannya waktu dan terkungkung dalam jebakan matra-matra ruang.

Sejarah itu penting dan akan tetap penting, asal saja manusia sadar bahwa merekalah yang dapat membuat sejarah. Perintisan hari depan pada hakikatnya bersumber dari perenungan sejarah dan hidup bersejarah. Dengan cara ini sejarah memberikan kekuatan pada siapa saja yang menolak untuk pasrah menghadapi apa yang tak terelakkan dalam menapak suatu jalan.

Menurut Soedjatmoko, pandangan ke masa depan merupakan ciri penting manusia. Tindakannya di masa kini sekaligus dipengaruhi oleh penglihatannya ke depan, harapan dan kesadaran masa lampau. Ia menegaskan, bahwa sadar akan masa lampau, berarti kita bebas dalam kekinian dan bertanggung jawab untuk menentukan “ke-akan-an”.

Pendasaran garis kebijakan Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah tahun 1978-1981 pada Q.S. (59) Al-Hasyr ayat 18 dan 19 diatas, adalah pilihan atas dasar kesadaran historis. Kesadaran bahwa hidup dan kehidupan peseorangan maupun organisasi yang baik ia-

lah yang berdasar hasil satu penelitian/evaluasi pekerjaan masa lampau, serta pengamatan/ estimasi dalam menghadapi perkembangan masa datang dengan kemampuan melaksanakannya.

Sepanjang yang saya ketahui, sejarah Muhammadiyah Sulawesi Selatan belum banyak ditulis. Bahkan, biografi tokoh Muhammadiyah Sulsel sampai saat ini belum pernah ditulis dan diterbitkan.

Tradisi penulisan biografi memang mulai tampak semarak pada masa Orde Baru. Pada masa sebelumnya, penulisan biografi masih sangat langka. Akibatnya, banyak tokoh pemimpin yang pernah berjasa bagi bangsa dan negara terlupakan begitu saja. Jelas, Hal itu merupakan kerugian besar bagi masyarakat kita dewasa ini maupun yang akan datang.

Mengapa penulisan biografi dan otobiografi ini kurang mendapat perhatian? Paling tidak karena tiga sebab. Pertama, tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia, umumnya memang merupakan tradisi sejarah lisan. Riwayat hidup dan kisah kepahlawanan seseorang pada umumnya hanya direkam secara lisan kemudian dituturkan secara turun temurun. Kedua, adanya “budaya malu” di kalangan tokoh kalau biografinya ditulis, lebih-lebih kalau dia sendiri yang menulis otobiografinya. “*Nakana bawang taua, niangka dudu kalenta* (jangan sampai orang mengira bahwa kita terlalu mengangkat diri kita). Demikianlah kira-kira ungkapan (dalam bahasa Makassar) seorang tokoh yang enggan dan malu kalau ditulis biografinya atau menulis otobiografinya.

Sebagai hamba Allah yang *mukhlisin*, keengganan seorang pemimpin Islam untuk “menonjolkan diri” tentu dapat dimaklumi. Namun, dalam rangka pewarisan nilai-nilai kejuangan dan nilai-nilai keikhlasan itu sendiri, biografi seorang pemimpin Islam tentu sangat diperlukan.

Dalam spirit pewarisan nilai-nilai kejuangan dan nilai-nilai keikhlasan itulah sehingga penerbitan buku “Sejarah Muhammadiyah dan Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulsel (1931-2015)” menjadi penting.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel memberikan apresiasi kepada Dr. KH. Mustari Bosra, MA (Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulsel) dan Hadisaputra (Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PWM Sulsel) bersama timnya (Kasri Riswadi dan Zulfikar Hafid), yang telah merampungkan penulisan buku yang telah tertunda selama dua periode.

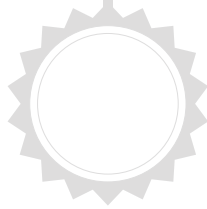
Semoga penerbitan buku ini dapat menjadi bahan refleksi bagi aktivis Muhammadiyah masa kini maupun di masa mendatang. Buku ini dapat pula dijadikan rujukan bagi para peneliti dan masyarakat luas yang tertarik mengkaji eksistensi persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, sejak berdiri hingga tahun 2015. *Jazaakumullahu Khaeral Jaza’i*.

Makassar, Desember 2015

Wassalam

Ketua PW Muhammadiyah Sulsel

Dr. H. Muhammad Alwi Uddin, M.Ag.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Kata Sambutan PWM Sulawesi Selatan	ix
Daftar Isi	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
SULAWESI SELATAN MENJELANG KEHADIRAN MUHAMMADIYAH	11
BAB III	
KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH CELEBES SELATAN.....	23
BAB IV	
PEMBENTUKAN MUHAMMADIYAH DI DAERAH- DAERAH	37

• Muhammadiyah di Gowa	38
• Muhammadiyah di Jeneponto	48
• Muhammadiyah di Bantaeng	49
• Muhammadiyah di Bulukumba.....	52
• Muhammadiyah di Selayar	61
• Muhammadiyah di Sinjai	62
• Muhammadiyah di Bone	65
• Muhammadiyah di Maros	67
• Muhammadiyah di Pangkep	68
• Muhammadiyah di Barru	70
• Muhammadiyah di Parepare	71
• Muhammadiyah di Rappang	77
• Muhammadiyah di Pinrang	80
• Muhammadiyah di Sengkang-Wajo	84
• Muhammadiyah di Soppeng	90
• Muhammadiyah di Palopo	93
• Muhammadiyah di Tana Toraja	96
• Muhammadiyah di Enrekang	101

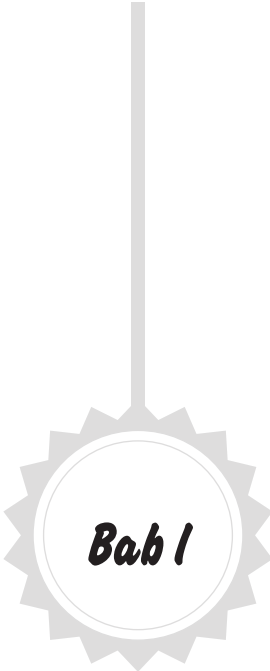
BAB V

BIOGRAFI KETUA-KETUA MUHAMMADIYAH

SULAWESI SELATAN (1931-2015).....	103
• KH. ABDULLAH (<i>Consoel Moehammadijah Celebes Selatan 1931-1938</i>)	105
• HAJI ANDI SEWANG DAENG MUNTU (<i>Consoel Moehammadijah Celebes Selatan 1938-1957</i>).....	110
• H. QURAI SY DJAILANI (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1957—1966).....	116

- H. ABDUL WAHAB RADJAB (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1966—1968)..... 122
- KH. MUHAMMAD AKIB (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1968-1971) 129
- K.H. ABDUL DJABBAR ASHIRY (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1971 – 1975)..... 132
- H. AHMAD MAKARAUSU AMANSYAH (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1975—1978)..... 146
- DRS. MUHAMMAD SALEH HAMDANI (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1977-1980)..... 163
- K.H. MUHAMMAD SANUSI MAGGU (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1980-1984) 170
- K.H. DJAMALUDDIN AMIEN (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 1985—2000)..... 181
- Drs. K.H. NASRUDDIN RAZAK (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 2000—2005)..... 196
- Drs. K.H. BAHARUDDIN PAGIM (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan Periode 2005-2010) 202
- Dr. H. MUHAMMAD ALWI UDDIN, M.Ag. (Ketua Muhammadiyah Sulsel 2010-2015) 214

BAB VI	
PENUTUP.....	231
Daftar Pustaka.....	235
Profil Penulis.....	241



Bab I

PENDAHULUAN

Kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan lahirnya gerakan pemurnian dan pembaruan Islam di beberapa belahan dunia, seperti Mesir, India, dan Arab Saudi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 berpengaruh terhadap kebangkitan umat Islam di Nusantara. Sejak akhir abad ke-19, di Sumatera Barat muncul suatu gerakan pemurnian dan pembaruan Islam yang dipelopori oleh, antara lain Haji Syekh Ahmad Khatib, Syekh Thahir Jalaluddin, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Abdul Karim Amrullah, dan Haji Abdullah Ahmad. Mereka dikenal sebagai Kaum Muda (Abdullah, 1971). Pada awal abad 20, di Jawa, beberapa gerakan pemurnian dan pembaruan Islam lahir, seperti

Jam'iyatul Khair, Persyarikatan Muham-madiyah, dan Persatuan Islam (Noer, 1996).

Di antara gerakan pemurnian dan pembaruan Islam yang lahir di Jawa tersebut, Persyarikatan Muhammadiyah adalah yang paling cepat tersebar dan paling banyak memperoleh pengikut di berbagai pelosok nusantara. Hanya dalam tempo lebih kurang dua puluh tahun setelah didirikan, persyarikatan ini telah membuka cabang di hampir seluruh wilayah nusantara. Di Sulawesi Selatan, Persyarikatan Muhammadiyah telah berdiri sejak tahun 1926.

Sebagai gerakan Islam modernis, kehadiran Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan sosial dan kultural umat Islam. Betapa tidak, umat Islam Sulawesi Selatan yang telah terbiasa dengan praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi dan adat-istiadat pra-Islam, tiba-tiba digugat oleh para anggota dan pimpinan Muhammadiyah yang secara sistematis melancarkan gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Mereka melarang dan mencela umat Islam yang melakukan bidah, takhayul, khurafat, dan kemusyrikan. Alasan untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran agama yang murni, yang bersumber dari Alquran dan Sunah dengan pemahaman rasional merupakan dasar gugatan Muhammadiyah tersebut.

Berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah yang di-sahkan dalam Muktamar ke-45, tahun 2005, di Malang, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, *da'wah amar ma'ruf nahi munkar*, dan tajdid, bersumber pada

Alquran dan *Al-sunnah*, berasas Islam, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta, bermaksud dan bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab I, Pasal 1, Ayat 2 dan 3, serta Bab II, Pasal 2).

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid yang diwujudkan dalam bentuk usaha, program, dan kegiatan yang meliputi penanaman keyakinan; pendalaman dan perluasan pemahaman; meningkatkan pengamalan; serta penyebarluasan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, Muhammadiyah juga memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya; memperteguh iman, mempergiat ibadah; meningkatkan semangat jihad; mempertinggi akhlak; meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, dan amal saleh lainnya; meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia. Selain itu, diusahakan pula untuk memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan; mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; serta mempergiat penelitian; memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; meningkatkan kualitas kesehatan

dan kesejahteraan masyarakat; memelihara, mengembangkan, melestarikan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan; mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri; memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan; mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk menyukseskan gerakan; mengupayakan penegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat; dan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah (Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab II, Pasal 3).

Oleh karena demikian tinggi maksud dan tujuan yang hendak dicapai dan demikian luas usaha yang telah, sedang, dan akan dijalankan, maka Muhammadiyah menata struktur organisasinya sedemikian rupa, sehingga meliputi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Secara partikel, susunan organisasi Muhammadiyah meliputi pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting (Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab III, Pasal 5).

Di setiap jenjang organisasi tersebut, terdapat pimpinan secara kolektif yang disebut sebagai: Pimpinan Pusat untuk Muhammadiyah tingkat pusat, yang kepemimpinannya meliputi seluruh wilayah, daerah, cabang dan ranting yang ada di Indonesia; Pimpinan

Wilayah untuk Muhammadiyah tingkat provinsi yang kepengimpinannya meliputi seluruh daerah, cabang, dan ranting yang ada dalam wilayahnya; Pimpinan Daerah untuk Muhammadiyah tingkat kabupaten dan kota yang kepengimpinannya meliputi seluruh cabang dan ranting yang ada dalam daerahnya; Pimpinan Cabang untuk Muhammadiyah tingkat cabang yang merupakan suatu kesatuan ranting yang kepengimpinannya meliputi seluruh ranting yang ada dalam cabangnya; Pimpinan Ranting untuk tingkat ranting yang kepengimpinannya meliputi seluruh anggota yang ada dalam rantingnya (Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab IV, Pasal 7—11).

Untuk membantu pimpinan persyarikatan, di semua jenjang pimpinan persyarikatan—selain ranting—dibentuk unsur pembantu pimpinan yang disebut majelis. Kecuali itu, di tingkat pusat, wilayah, dan daerah, terdapat unsur pembantu pimpinan lainnya yang disebut lembaga (Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab V, Pasal 14—17).

Secara horisontal, Muhammadiyah menata organisasinya dengan jalan membentuk organisasi otonom (ortom), yaitu: ortom khusus Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Gerakan Seni Beladiri Tapak Suci Putra Muhammadiyah (Tapak Suci), dan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan (HW).

Meskipun memiliki hak otonomi yang sangat luas, ortom-ortom tersebut harus sesuai dengan asas, mak-

sud, dan tujuan Muhammadiyah; anggaran dasarnya harus disahkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah; dan tetap berada di bawah pembinaan dan bimbingan Muhammadiyah. Susunan organisasi, demikian pula jenjang kepengimpinannya, pada umumnya mengikuti susunan organisasi dan jenjang kepemimpinan Muhammadiyah, yaitu: pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting.

Dalam melaksanakan dakwah, *amar ma'ruf*, dan *nahi munkar*, Muhammadiyah mendirikan: sarana ibadah, berupa masjid dan musala; lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, berupa *bustanul athfal*, sekolah, madrasah, pesantren, akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas; sarana kesehatan, seperti balai pengobatan, apotek, rumah bersalin, rumah sakit bersalin, dan rumah sakit; lembaga sosial, seperti binaan keluarga, panti asuhan, dan panti jompo; lembaga ekonomi, seperti toko, koperasi, *baitul maal wa tamwil*, dan bank perkreditan rakyat; dan sarana-sarana serta lembaga-lembaga lainnya. Oleh Muhammadiyah, sarana-sarana dan lembaga-lembaga seperti itu disebut amal usaha.

Oleh karena Muhammadiyah, ortom-ortom, dan amal-amal usahanya merupakan satu kesatuan yang utuh, maka seluruh gerakan dakwah, *amar ma'ruf*, dan *nahi munkar* yang dilakukan pimpinan, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah, demikian pula pimpinan dan anggota ortom-ortomnya, serta pengurus amal-amal usahanya, dari pusat sampai ke ranting, di semua jenjang, di semua sektor, di semua lini, di semua tem-

pat, dan pada semua waktu, keseluruhannya mengarah kepada maksud dan tujuan, sebagaimana tersebut di depan. Untuk itu, maka Muhammadiyah, sangat memperhatikan hal yang disebutnya sebagai “tertib organisasi” dan “tertib administrasi.”

Dilihat dari segi jumlah amal usahanya, Muhammadiyah adalah organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Sekadar sebagai gambaran sepintas, hingga tahun 2015, Muhammadiyah telah memiliki amal-amal usaha, berupa: perguruan tinggi sekitar 172 buah, terdiri atas universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi; sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah tidak kurang dari 10.000 buah, terdiri atas sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan seterusnya. Amal usaha tersebut tersebar di 33 wilayah, di lebih dari 300 daerah, dan di lebih dari 2000 cabang.

Keberhasilan Muhammadiyah menempatkan diri sebagai organisasi terbesar, sebagaimana terlukiskan itu, tentunya tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangannya yang memang sudah cukup lama. Secara keseluruhan, sejak didirikan sampai saat ini, Muhammadiyah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, meskipun di antara masa yang panjang itu terdapat juga masa-masa mandek bahkan masa surut.

Pada tahun 1912, Muhammadiyah hanya ada di daerah Yogyakarta; tahun 1919 memiliki 3 cabang; tahun 1921 berkembang menjadi 7 cabang; tahun 1922

menjadi 15 cabang yang semuanya berada di Jawa. Tahun 1927 menjadi 176 cabang dan sudah tersebar di beberapa daerah di luar Jawa; satu di antara cabang-cabang tersebut terdapat di Makassar, Celebes Selatan.

Berawal dari Cabang Makassar inilah, Muhammadiyah di Sulawesi Selatan berkembang menjadi satu konsulat pada tahun 1931, kemudian menjadi daerah pada tahun 1960, dan akhirnya menjadi wilayah sejak tahun 1978 hingga saat ini.

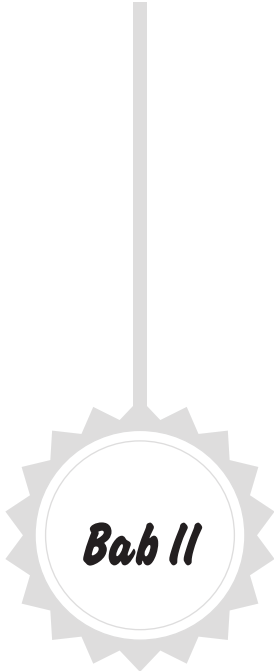
Sebagaimana halnya di tempat lain, Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, juga membina bermacam-macam amal usaha, seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. Menurut data yang diperoleh dari Pimpinan Wilayah, Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Muhammadiyah Sulsel terdiri atas 28 daerah, 163 cabang, dan tidak kurang dari 500 ranting.

Perkembangan dalam bidang organisasi sebagaimana tergambar di atas, tentunya dibarengi pula dengan pengembangan aktivitas dan perluasan amal usahanya. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak saja dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak dalam bidang tajdid, tablig, dan tarjih, tetapi ia juga dikenal sebagai organisasi sosial-kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi, dan sebagainya. Barangkali, dari perspektif amal usaha dan aktivitasnya inilah sehingga Nakamura (1982: x) menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan serba wajah. Muhammadiyah tercatat sebagai organisasi keagamaan di Departemen Agama, tercatat sebagai organisasi sosial

di Departemen Sosial, dan tercatat sebagai organisasi pendidikan dan kebudayaan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Syaifullah, 1997:1—2).

Tidak banyak warga muhammadiyah yang mengetahui sejarah awal perkembangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Padahal, keberadaannya dan kebesarannya sebagaimana disaksikan sekarang tidak dapat dipisahkan dari perkembangannya pada masa lalu. Oleh karena itu, buku kecil ini ditulis dengan berusaha menjawab dua permasalahan utama. Masalah pertama ialah: bagaimana kelahiran dan perkembangan awal Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan? Masalah kedua ialah bagaimana biografi singkat para tokoh yang pernah menjadi ketua Muhammadiyah di Sulawesi Selatan?

Sebagai pembahasan sekaligus jawaban terhadap kedua pertanyaan utama tadi, maka disusunlah “Sejarah dan Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan” dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi pengantar tentang pentingnya penulisan buku ini. Bab II menggambarkan keadaan Sulawesi Selatan menjelang kehadiran Muhammadiyah, Bab III menguraikan proses kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah Celebes Selatan. Bab IV memuat proses pembentukan Muhammadiyah di daerah-daerah. Bab V mengulas Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, dan Bab VI Penutup, sebagai penyimpul atas ulasan terdahulu.



Bab II

SULAWESI SELATAN MENJELANG KEHADIRAN MUHAMMADIYAH

Untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang Sulawesi Selatan, penelusuran sejarah mesti dimulai dari masa sebelum Islam, itupun harus dikaitkan dengan kawasan lain di nusantara ini. Perlunya Sulawesi Selatan dikaitkan dengan kawasan lain karena dua alasan. Pada satu sisi dimaksudkan sebagai pembandingan, di sisi lain karena Sulawesi Selatan merupakan satu mata rantai di antara mata rantai kesatuan Nusantara.

Sebagai satu provinsi, Sulawesi Selatan baru terbentuk pada tahun 1964, tetapi sebagai satu kesatuan budaya, Sulawesi Selatan sudah terbentuk sejak berabad-abad yang lalu. Menurut Mattulada (1998: 24), penduduk Sulawesi Selatan ini, pada awalnya hanya berasal dari satu persekutuan kaum, kemudian menyebar hingga membentuk empat suku etnik, yaitu: Bugis, Toraja, Makassar dan Mandar. Dia memperkirakan bahwa persekutuan kaum yang paling awal di Sulawesi Selatan terdapat di kawasan utara Pantai Teluk Bone, di daerah yang sekarang bernama Luwu. Dari tempat itu, terjadi pemekaran jumlah warga dan masing-masing memilih jalan persebarannya. Mereka yang memilih ke utara dan barat, ke arah dataran tinggi membentuk etnik *to riaja* (orang gunung) sedangkan yang menetap di pantai menyebut diri mereka *to luwu* (orang laut). Persebaran selanjutnya ke arah timur dan selatan sepanjang pesisir Teluk Bone yang kemudian membentuk persekutuan dan menyebut diri mereka *to wugi*. Di pesisir selatan dan sepanjang pesisir barat Selat Makassar, mulai dari wilayah Onto (sekarang Bantaeng) hingga ke Siang (sekarang Pangkajene Kepulauan) dihuni kelompok *tu mangkasara*. Lebih ke utara lagi, sepanjang pantai Selat Makassar bermukim kelompok kaum yang kemudian mengembangkan diri menjadi *tu mandara*.

Suku etnik utama Sulawesi Selatan tersebut kemudian membentuk ciri-ciri kekhususan masing-masing yang dibangun melalui hasil pengalaman dalam kehidupan kelompok. Dalam perjalanan selanjutnya,

masing-masing memilih kedekatannya antara satu sama lainnya. Bugis (termasuk Luwu) dan Toraja saling mendekati dalam kehidupan sosial budaya, sehingga dengan menyebut Bugis cukup mewakili keduanya. Makassar dan Mandar saling mendekati dalam kehidupan sosial budaya sehingga dengan menyebut Makassar cukup terasa mewakili keduanya. Bugis-Makassar pada akhirnya berkembang menjadi identitas yang diterima mewakili keempat suku etnik utama tersebut (Mattulada, 1998:70). Untuk itu, penggunaan istilah Bugis-Makassar tidak hanya tertuju kepada suku etnik Bugis dan Makassar saja, tetapi meliputi keempat suku etnik yang ada di Sulawesi Selatan.

Terlepas dari benar tidaknya analisis Mattulada di atas, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa sebelum Islam datang, kerajaan besar di Sulawesi selatan ini telah dipersatukan melalui mitos *lagaligo*. Sulawesi Selatan kemudian lebih dipersatukan lagi melalui penyebaran agama Islam.

Meskipun Islam belum sepenuhnya berhasil mengubah tatanan sosial budaya masyarakat Sulawesi Selatan, namun kefanatikan mereka memeluk Islam diakui para sejarawan. Bonneff (1983:228) misalnya, telah menyatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan menganggap Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat (daerah Sunda) sebagai tempat penganut Islam yang sangat kuat.

Islam masuk ke Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17, satu waktu yang sangat terlambat dibanding dengan Sumatera, Jawa, dan Maluku. Menurut *Lontara*

Patturioloanga ri Tugowaya, Raja Gowa menerima Islam pada tahun 1605. Hal ini diperkuat oleh *Lontara Sukkuna Wajo* yang menjelaskan bahwa ketika Datoq Ri Bandang, bersama Datoq Ri Patimang, dan Datoq Ri Tiro datang ke Gowa pada tahun 1603. Mereka belum berhasil meng-Islam-kan Raja Gowa. Ketika itu, Raja Gowa menyarankan kepada mereka untuk terlebih dahulu pergi ke Luwu, sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Atas saran dari Raja Gowa itulah, mereka bertiga pergi ke Luwu. Di sana, pada tahun 1603 mereka berhasil meng-Islam-kan Raja Luwu La Pattiware Daeng Parabbung. Dua tahun setelah Raja Luwu menerima Islam, Dato ri Bandang kembali ke Gowa bermak-sud meng-Islam-kan Raja Gowa. Akan tetapi, karena Raja Gowa masih sangat muda, Datoq ri Bandang dianjurkan lebih dahulu mengajak Raja Tallo. Setelah Raja Tallo mengiyakan, maka Raja Gowa bersama dengan Raja Tallo pun secara bersama-sama menerima Islam.

Berbeda dengan Raja Luwu yang menerima Islam tidak secara demonstratif; tidak secara radikal mengubah kerajaan menjadi kerajaan Islam; dan tidak memaksakan agama Islam kepada rakyatnya; Raja Gowa yang masih muda dan berjiwa pemuda itu menerima Islam secara demonstratif, dan atas persetujuan *Bate Salapanga*, Raja Gowa mengubah kerajaannya menjadi kerajaan Islam dan “memaksa” rakyatnya memeluk Islam, sehingga tidak seorang pun rakyatnya yang tidak mengaku muslim.

Persoalan kemudian timbul karena Raja Gowa bukan hanya bermaksud meng-Islam-kan rakyat yang diperintahnya secara langsung, melainkan juga rakyat raja-raja dari kerajaan yang sudah takluk kepadanya seperti kerajaan-kerajaan di Binamu, Bantaeng dan Sinjai, kerajaan-kerajaan di Maros, Pangkajene dan Barru, dan kerajaan-kerajaan yang berada dalam pengaruhnya seperti Bone, Wajo, Soppeng, Sidenreng, dan lain-lain.

Setelah kerajaan Gowa menerima Islam, atas alasan bahwa ada perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di kawasan Sulawesi Selatan bahwa “siapa yang lebih dahulu menerima kebajikan, maka ia wajib menyebarkan kebajikan itu kepada kerajaan lainnya,” maka Gowa kemudian mendakwakan dan bahkan “memaksakan” pula agama Islam kepada raja dan rakyat di tanah Bugis. Dengan menggunakan perjanjian tersebut sebagai perisai, diperangilah Soppeng pada tahun 1609; Wajo pada tahun 1610; dan akhirnya Bone pada tahun 1611.

Berbeda dari kerajaan-kerajaan Bugis, kerajaan-kerajaan Mandar sejak sebelum Islam sudah takluk ke Gowa. Oleh karena itu, islamisasi di daerah itu tidak berlangsung dengan kekerasan. Bersamaan atau segera setelah kerajaan-kerajaan Bugis diperangi, Gowa pun berusaha meng-Islam-kan kerajaan-kerajaan Mandar secara damai melalui mengirim mubalig-mubalig ke sana.

Sejak saat itu (awal abad ke-17), dapatlah dikatakan bahwa Islam telah merata diterima oleh seluruh penduduk Sulawesi Selatan, sebab yang belum ber-

hasil di-Islam-kan hanyalah penduduk yang berdiam di daerah yang jauh ke pedalaman, seperti di daerah pegunungan Tanah Toraja dan Mamasa. Terabaikannya daerah-daerah tersebut mungkin disebabkan oleh faktor alamiah dan faktor politis. Secara alamiah, daerah-daerah tersebut sangat sulit dijangkau dan secara politis, kerajaan Gowa sebagai pemimpin islamisasi merasa tidak terlalu berkepentingan, karena di daerah-daerah tersebut tidak ada kesatuan politik berupa kerajaan besar yang berpengaruh.

Di kemudian hari, sejak akhir abad ke-19, daerah-daerah yang belum sempat di-Islam-kan itu justru menjadi sasaran kristenisasi oleh para Zending Katolik dan Misionaris Protestan yang membonceng dan menumpang pengaruh serta mendapatkan berbagai macam fasilitas dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Di Sulawesi Selatan, Belanda yang diwakili VOC telah bercokol dan menguasai beberapa daerah sejak ditanda-tanganinya Perjanjian Bungaya pada tahun 1667 yang menjadi pertanda berakhirnya Perang Makassar, yakni perang antara Sultan Hasanuddin di satu pihak dengan Arung Palakka bersama Spelman di pihak lain. Sejak saat itu, proses penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan yang semakin hari semakin mantap dimulai. Hingga pada akhirnya, melalui Perang Pasifikasi, seluruh Sulawesi Selatan ditaklukkan dan diperintah secara langsung. Dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Gowa yang waktu itu dirajai oleh Makulau Karaeng Lembang Parang dan Bone yang waktu itu dirajai oleh La Pawawoi Karaeng Sigeri dibubarkan

setelah keduanya kalah dalam Perang Pasifikasi yang berlangsung pada akhir tahun 1905 dan awal tahun 1906.

Setelah Perang Pasifik selesai, maka disatukanlah seluruh Sulawesi Selatan ke dalam ‘satu’ pemerintahan, ‘satu’ wilayah, Hindia Belanda, yang kelak menjadi provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar penguasaannya terhadap daerah-daerah yang baru ditaklukkan itu dapat berjalan efektif, maka Pemerintah Hindia Belanda segera menata ulang pembagian wilayah administrasi pemerintahannya dengan berpatokan kepada sistem birokrasi modern.

Sulawesi Selatan yang termasuk dalam wilayah pemerintahan *Gouvernour van Celebes en Onderhoorigheden* yang dibentuk pada tahun 1903 oleh *Gouvernour General van Nederland Hindie*, pada Tahun 1908 dibagi ke dalam enam *afdeelingen*, yaitu *Afdeeling Makassar*, *Afdeeling Bonthain*, *Afdeeling Bone*, *Afdeeling Pare-Pare*, *Afdeeling Mandar*, dan *Afdeeling Luwu*. *Afdeeling* lain yang berada di bawah kekuasaan *Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden* adalah Buton dan Laiwu. Saat ini, keduanya berada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Tiap-tiap *afdeling* dibagi lagi ke dalam beberapa *onderafdelingen*. Di bawah *onderafdeling* dibentuk distrik dan dibawah distrik dibentuk sub distrik dan kampung. Untuk mengepalai suatu *afdeeling* dan *onderafdeeling*, pemerintah Hindia Belanda mengangkat seorang pejabat bangsa Belanda, yaitu sebagai *assistent-resident* dan *controleur*. *Controleur* inilah

yang disebut oleh orang Makassar *Tuang Petoro*. Sedangkan untuk mengepalai suatu distrik, pemerintah mengangkat seorang pejabat pribumi dengan jabatan sebagai *regent* atau menggunakan nama-nama tradisional seperti: *gallarrang*, *karaeng*, *lo'mo*, *punggawa*, dan sebagainya. Untuk mengepalai sebuah sub distrik atau kampung, pemerintah mengangkat seorang kepala sub distrik atau kepala kampung yang berasal dari kalangan bangsawan rendahan di kampungnya masing-masing.

Di dalam wilayah *afdeling* itu, Pemerintah Belanda masih juga mengakui adanya beberapa *selfbestuurgebied*, negeri yang berpemerintahan sendiri, yang dipimpin oleh rajanya masing-masing dengan tetap memakai nama-nama tradisional seperti: *somba*, *arung*, *payung*, *karaeng*, dan sebagainya.

Berdasarkan arsip pemerintah Celebes Selatan tahun 1938, daerah-daerah yang termasuk *selfbestuurgebied* adalah Gowa (setelah direhabilitasi pada tahun 1936), Bone (setelah direhabilitasi pada tahun 1930), Wajo, Soppeng, Mallusetasi, Suppa, Sawitto, Batulappa, Kassa, Sidenreng, Rappang, Maiwa, Enrekang, Maluwa, Bontobatu, Alla, Barru, Soppeng Riaja, Tanete, Majene, Pambauang, Cenrana, Balangnipa, Binuang, Mamuju, Tappalang dan Luwu. Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam *Rechtstreeksbestuurgebied* adalah: Makassar, Wajo, Ujungtanah, Mariso, dan Galesong (berada dalam wilayah *Onderafdeeling* Makassar); Marusu, Turikale, Simbang, Lau, Bontoa, Tanralili, Bira, Moncongloe, Sudiang, Biring-

kanaya, Camba, Cenrana, Laiya, Gantarang Matinggi, Wanua Waru, dan Mallawa (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Maros); Pangkajene, Balocci, Labbakkang, Ma'rang, Segeri, Bungoro, Mandalle, (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Pangkajene); Binamu, Tarang, Arungkeke, Bangkala, dan laikang (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Jeneponto); Takalar, Topejawa, Lengkesa, Pappa, Lakatong, Tompotana, Kalukurang, Bauluang, Satanga, Sanrobone, Polombangkeng (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Takalar); Bantaeng (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Bantaeng); Gantarang, Bulukumba, Bulukumbatoa, Ujunglooe, Kindang, Kajang, Lange-lange, Tanaberu, Lemo-lemo, Bira, Ara, Tiro, Batang, Bontotanga, dan Hero (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Bulukumba); Oest Bulobulo, Lamatti, Tondong, West Bulobulo, Manipi, dan Manimpahoi (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Sinjai); Bontobangung, Tanete, Batangmata, Onto, Buki, Bonea, Benteng, Ballabulo, Laiyolo, Barang-barang, Tombolongang, Jampea, Kajuadi, Bonerate, Kalao, Kalaoa, dan Rajuni (berada dalam wilayah *Onderafdeling* Seleier).

Penataan administrasi pemerintahan dan modernisasi sistem politik itu, diikuti pula dengan penataan dan modernisasi di bidang-bidang lainnya, seperti, hukum, ekonomi, dan pendidikan.

Berbicara tentang sejarah perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan, tidak boleh dilepaskan dari B. F. Matthes, seorang Sarjana Sastra, Pakar Bahasa Bugis dan Makassar. Dia tiba di Makassar pada tahun

1875. Sebagai sarjana sastra, dia bekerja sebagai pejabat mengumpul dan penelaah kesusastraan Bugis-Makassar. Untuk melaksanakan kegiatannya itu, dia mendirikan sebuah yayasan. Melalui yayasannya ini pulalah, pada tahun 1878, Matthes mendirikan sekolah yang kemudian dikenal sebagai *Kweeks school*. Sekolah yang didirikan dan dibina Matthes inilah yang merupakan sekolah pertama di Sulawesi Selatan.

Hampir bersamaan dengan kedatangan Matthes, berdatang pulalah beberapa orang zending dan misi yang bertugas menyebarkan agama Kristen dan Katolik, terutama di daerah-daerah yang belum berhasil di-Islamkan. Sejak saat itu, timbullah persolan baru menyangkut hubungan Islam dan Nasrani. Dengan alasan mengkristenkan orang yang belum bera-gama, para Zending Katolik dan Misionaris Protestan, juga menjadikan umat Islam sebagai sasaran kristenisasi. Menghadapi kenyataan seperti itu, umat Islam tidak berdiam diri. Di bawah kepeloporan Muhammadiyah, umat Islam tampil pula melakukan gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang diarahkan terutama meng-Islamkan kembali umat Islam, dalam arti mengarahkan agar umat Islam melaksanakan ajaran agama secara *kaffah* (menyeluruh) dan benar sesuai tuntunan alquran dan sunah. Hal ini dilakukan karena umat Islam ketika itu—meskipun telah menganut agama Islam lebih kurang tiga ratus tahun—masih tetap mencampuradukkan antara ajaran Islam dengan ajaran animisme dan dinamisme, adat-istiadat, dan tradisi-tradisi sebelum Islam lainnya.

Secara umum, keadaan umat Islam ketika itu dapat dikatakan masih bergelimang dalam kemusyrikan dan kejahilan yang diselimuti takhyul, bidah, dan *khu-rafat*. Kehidupan umat Islam pada umumnya masih dikendalikan oleh *pangaddakang/pangadereng* yang berbasis dan bertumpu pada hal yang disebut sebagai *gaukang* dan *kalompoang*.

Dalam bidang pendidikan, umat Islam sama sekali belum memiliki lembaga pendidikan modern yang ditandai dengan sistem klasikal, ada kurikulum, dan ada proses pembelajaran yang teratur. Lembaga pendidikan tradisional yang ada hanyalah lembaga pendidikan *mangaji tudang* untuk mempelajari alquran, yang biasanya diawali dengan *allepu-allepu* (belajar abjad bahasa alquran), diteruskan dengan *angngijja* (belajar mengeja), *ammaca lambusu* (tadarus), *assara baca* (tajwid), *abbarasanji* (belajar Kitab Barzanji), dan *assarapa* (belajar dasar-dasar Bahasa Arab).

Transformasi ilmu pengetahuan keagamaan lainnya, seperti belajar tahara, belajar salat, belajar *paraele* (kewarisan), dan sebagainya lebih banyak dilakukan melalui keluarga atau melalui guru tarekat atau melalui *Daengta Kalia*, *Daeng Imang*, dan, petugas *parewa sara* lainnya.

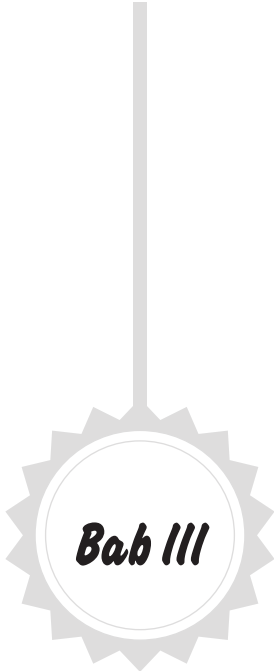
Di Sulawesi Selatan, sejak awal masuknya Islam hingga berakhirnya zaman penjajahan bahkan hingga awal tahun 1950-an, lembaga yang mengurus masalah-masalah keagamaan yang disebut *syara'* tetap dipertahankan dan berfungsi. Lembaga tersebut terintegrasi

ke dalam pranata sosial yang disebut *pangadakkang/pangadereng*.

Sebelum kerajaan Gowa dikonversi menjadi kerajaan Islam dalam struktur kekuasaannya terdapat suatu lembaga yang mengurus masalah-masalah yang terkait dengan kepercayaan dan upacara-upacara ritual keagamaan. Lembaga itu dipimpin oleh seorang yang digelar dengan *Daengta Alakaya*. Lembaga inilah yang dikonversi menjadi lembaga *Sara'* ketika kerajaan itu dikonversi menjadi kerajaan Islam.

Lembaga *sara'* tersebut dipimpin oleh seorang yang bergelar *Daengta Kaliya*. Dalam menjalankan tugasnya, *Daengta Kaliya* dibantu oleh beberapa orang pejabat sebagai bawahan-nya, yang disebut *Parewa Sara'* yaitu: *imang, katte, bidala*, dan *doja*.

Lembaga keagamaan sebagaimana terdapat di kerajaan Gowa tersebut, terdapat juga di kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan.



Bab III

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH CELEBES SELATAN

Pembicaraan kehadiran Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, tidak boleh tidak, harus dimulai dari kedatangan Mansur Al-Yamany di Makassar pada sekitar tahun 1923. Ketika itu, Al-Yamany dikenal sebagai seorang pedagang batik. Dia membuka toko di *Passarstraat* (sekarang, jalan Nusantara) Makassar.

Al-Yamany dilahirkan di Sumenap Madura, pada sekitar tahun 1894. Ayahnya adalah seorang Madura keturunan Arab. Di Sumenap, Al-Yamany kecil belajar agama kepada ayahnya sendiri dan kepada beberapa

orang kiai, di samping belajar di sekolah pemerintah. Sebelum hijrah ke Makassar, Al-Yamany muda menetap di Surabaya. Ketika Muhammadiyah Cabang Surabaya terbentuk, dia menjadi salah seorang anggotanya. Sebagai anggota Muhammadiyah, dia aktif belajar kepada Kiai Haji Mas Mansyur, Voorsitter Muhammadiyah Cabang Surabaya.

Berbekal ilmu agama dan ke-Muhammadiyah-an yang diperolehnya itu, maka sejak masih di Surabaya, Al-Yamany sudah menjadi Mubalig Muhammadiyah. Setelah hijrah ke Makassar, dia meneruskan kegiatan dakwahnya, di samping profesinya sebagai pedagang. Untuk melaksanakan aktivitas dakwahnya di Makassar, Al-Yamany menjalin hubungan dengan para pengurus dan anggota organisasi keagamaan lokal di Makassar, Shirathal Mustaqiim, yang pada umumnya juga pedagang. Berhubung dalam banyak hal, paham agama Al-Yamany sama dengan paham agama para pengurus Shirathal Mustaqiim, maka keikutsertaannya dalam diskusi-diskusi keagamaan yang dilaksanakan Shirathal Mustaqiim adalah ibarat kata pepatah ‘bertemu ruas dengan buku.’ Dalam diskusi-diskusi itulah, Al-Yamany memperkenalkan Persyarikatan Muhammadiyah kepada para pengurus dan anggota Shirathal Mustaqiim.

Setelah lebih kurang tiga tahun, Al-Yamany memperkenalkan Muhammadiyah kepada para pengurus dan anggota Shirathal Mustaqiim, sampailah pada suatu titik klimaks, yaitu ketika beberapa orang pengurus dan anggota Shirathal Mustaqiim berkehendak untuk

melebur organisasinya ke dalam Persyarikatan Muhammadiyah dengan jalan memben-tuk cabang Muhammadiyah di Makassar. Keinginan itu tentu disambut baik oleh Al-Yamany. Oleh karena itu, Al-Yamany menyampaikan berita gembira tersebut kepada *Hoofdbestuur* Muhammadiyah di Yogyakarta. Penyampaian Al-yamani itu dengan sendirinya disambut baik juga oleh *hoofdbestuur*.

Atas restu *Hoofdbestuur* Muhammadiyah yang disampaikan melalui Al-Yamany, pada malam tanggal 15 Ramadan 1344 H, bertepatan dengan tanggal 27 April 1926, diadakanlah rapat pembentukan Muhammadiyah, bertempat di rumah Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro yang terletak di *pasarstraat* (sekarang, Jalan Nusantara) Makassar. Rapat yang diprakarsai oleh Mansyur Al-Yamany, Haji Yusuf Daeng Mattiro, dan Haji Abdullah itu dihadiri oleh tidak kurang dari lima belas orang calon anggota Muhammadiyah. Di antara mereka yang hadir itu terdapat beberapa orang pengurus Shirathal Mustaqiim dan jemaah Masjid Kampung Buton yang selama ini dibina oleh K. H. Abdullah.

Setelah bebarapa orang peserta rapat mengemukakan pendapatnya, disepakatilah pendirian Muhammadiyah Gro-up Makassar dan pembentukan *bestuur*-nya. Menurut Rajab (1998), Perkumpulan Shirathal Mustaqiimlah yang dilebur menjadi Muhammadiyah Group Makassar. Tetapi barangkali tidak demikian adanya. Meskipun ada di antara pengurusnya yang terpilih menjadi *Bestuur* Muhammadiyah, Perkumpulan Shirathal Mustaqiim tidak dilebur menjadi Muham-

madiyah. Terbukti di kemudian hari, Perkumpulan Shirathal Mustaqiim masih tetap eksis dan berkembang ke beberapa daerah di luar Makassar.

Adapun yang terpilih sebagai *Bestuur* Muhammadiyah Group Makassar Periode Pertama, ialah:

Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, sebagai *Voorsitter*

Haji Abdullah, sebagai *Vice Voorsitter*

Muhammad Said Daeng Sikki, sebagai *Secretaris*

Haji Yahya, sebagai *Penningmeester*

Mansur Al-Yamany, sebagai *Commissaris*

Muhammad Tahir Cambang, sebagai *Commissaris*

Haji Ahmad, sebagai *Commissaris*

Abdul Karim Daeng Tunru, sebagai *Commissaris*

Haji Muhammad Yunus Saleh, sebagai *Commissaris*

Daeng Minggu, sebagai *Commissaris*

Hal lain yang juga menjadi keputusan rapat, ialah Muhammadiyah Group Makassar yang baru terbentuk itu akan mengutus Mansur Al-Yamany ke Yogyakarta untuk melaporkan kepada *Hoofdbestuur* Muhammadiyah tentang telah terbentuknya Muhammadiyah di Makassar dan memohon kepada *Hoofd Bestur* agar segera datang meresmikan dan memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan lebih lanjut.

Berselang lebih kurang satu bulan setelah terbentuknya, Muhammadiyah Group Makassar, bertolaklah Mansur Al-Yamani ke Yogyakarta. Sambil berbelanja untuk keperluan tokonya, dia pun segera menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya, yakni melapor

dan memohon kedatangan *Hoofdbestuur* Muhammadiyah ke Makassar. Kesibukannya sebagai pedagang, menyebabkan Al-Yamany tidak bisa berlama-lama tinggal di Yogyakarta menunggu *Hoofdbestuur* yang berjanji akan ke Makassar selepas Iduladha. Dia segera kembali ke Makassar melalui Surabaya. Satu minggu selepas Iduladha, *Hoofdbestuur* Muhammadiyah memenuhi janjinya. *Hoofdbestuur* mengutus Haji Muhammad Yunus Anis, *Secretaris Hoofdbestuur*, ke Makassar. Kedatangannya tentu disambut dengan gembira oleh bestuur dan para anggota dan simpatisan Muhammadiyah Group Makassar. Begitu hebat sambutan pengurus Muhammadiyah Group Makassar, Haji Muhammad Yunus Anis disewakan penginapan khusus di Jalan Buru. Selama lebih kurang dua minggu, penginapan yang ditempati Haji Muhammad Yunus Anis selalu ramai oleh pengurus yang datang berkonsultasi atau datang menjemput untuk memberi pengajian dan memulangkannya.

Kegiatan utama Haji Muhammad Yunus Anis di Makassar adalah meresmikan berdirinya Group Muhammadiyah Makassar dan melantik *bestuurnya*. Sebagai rangkaian acara pelantikan Muhammad Yunus Anis berfoto bersama dengan para *Bestuur* Group Muhammadiyah Makassar.

Dalam foto dokumentasi yang tersimpan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut, Haji Muhammad Yunus Anis dipotret bersama dengan para *Bestuur* Muhammadiyah Group Makassar. Ketika foto tersebut penulis perlihatkan kepada Ibu Sitti Rabiah,

aktivis Aisyiyah periode awal yang juga anak angkat K. H. Abdullah beberapa tahun yang lalu, dia hanya dapat mengidentifikasi Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, Haji Abdullah, Mansur Al-Yamani, Haji Yahya, Haji Muhammad Tahir Cambang, Haji Muhammad Saleh, dan Haji Muhammad Yunus Anis sendiri.

Berdasarkan tanggal yang tertera di dalam foto tersebut dapatlah dipastikan bahwa peresmian Muhammadiyah Group Makassar dan pelantikan *bestuur*-nya berlangsung pada tanggal 21 Zulhijjah 1344 H, bertepatan dengan 2 Juli 1926 (penentuan tanggal miladiyahnya dilakukan berdasarkan perhitungan *Al-manak Algemen* tahun 1926, yang terdapat di Arsip Nasional Jakarta). Peresmian dilakukan dalam suatu *open bare veergadering* (pertemuan umum Terbuka) bertempat di salah satu gedung Bioskop G. Wienland di Jalan Komedian (sekarang Jalan Bontolempangan) yang terdapat di kota Makassar ketika itu (Wawancara dengan Ibu Sitti Rabiah, Oktober 2001).

Segera setelah selesai peresmiannya, Muhammadiyah Cabang Makassar memulai aktivitasnya. Kegiatan pertama yang dilakukan Muhammadiyah Cabang Makassar adalah menyelenggarakan *vergadering* (rapat umum) yang oleh orang Makassar pada waktu itu disebut sebagai *parahadele*. Dalam *vergadering* itulah dibicarakan berbagai hal mengenai pengembangan organisasi Muhammadiyah dan masalah-masalah yang berkaitan dengan ajaran agama Islam yang dikenal dengan istilah “tablig”, yang oleh orang Makassar disebut *tabale*. Memanfaatkan keberadaan Yunus Anis

di Makassar yang lebih kurang sepuluh hari lamanya itu, dialah yang selalu diundang untuk bertabligh dalam *vergadering-vergadering* yang diadakan Muhammadiyah pada hari-hari pertama kegiatannya.

Melalui perantaraan Haji Muhammad Yunus Anis yang akan segera kembali ke Yogyakarta karena tugasnya di Makassar telah selesai, *Bestuur* Muhammadiyah Cabang Makassar menitipkan harapan, supaya *Hoofdbestuur* dapat segera mengirim tenaga guru ke Makassar untuk membina sekolah yang segera akan didirikan. Beberapa bulan kemudian datanglah dua orang guru, utusan dari *Hoofdbestuur* Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu: Raden Hilman dan Sangadi Kusumo.

Untuk memanfaatkan tenaga kedua orang guru tersebut, pada bulan 1928, *Bestuur* Muhammadiyah Cabang Makassar membuka sebuah sekolah setingkat sekolah dasar sekarang, yaitu *Honlandsche Inlandsche School med de Al-Quran* (HIS). Sekolah tersebut dipimpin oleh Yahya bin Abdul Rahman Bayasut, seorang keturunan Arab yang pernah mengajar lama di sekolah Pemerintah Hindia Belanda. Dalam melaksanakan tugas sebagai guru, dia dibantu Raden Hilman dan Sangadi Kusumo.

Masih pada tahun 1928, Muhammadiyah Cabang Makassar membuka satu sekolah lagi, yaitu *Munir School* semacam madrasah ibtidaiyah sekarang. Berbeda dari HIS yang pengajarannya dititikberatkan pada ilmu pengetahuan umum dan Bahasa Belanda dengan sedikit tambahan pelajaran agama. *Munir School* menekankan pada pelajaran agama dengan sedikit tam-

bahan pengetahuan umum. Sementara itu, digalakkan pula pemberantasan buta huruf di kalangan anggota Muhammadiyah, baik laki-laki, maupun perempuan. Untuk itu, maka dibuka pulalah sebuah sekolah (kursus) yang disebut “*Menyesal School*.”

Di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, Muhammadiyah Cabang Makassar berkembang dengan pesat. Tetapi, setelah berjalan lebih kurang satu tahun sesudah diresmikan, Muhammadiyah Cabang Makassar mengalami cobaan yang sangat besar. Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, *Voorsitter* Muhammadiyah Group Makassar diisukan telah menghamili seorang gadis yang tinggal di rumahnya. Apakah isu itu benar atau salah tidak diketahui secara pasti. Tetapi, Haji Yusuf Daeng Mattiro rupanya tidak dapat mengelakkan diri dari isu itu, bahkan isterinya sendiri meminta cerai sesaat setelah isu itu tersebar luas.

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro memimpin Muhammadiyah Group Makassar. Keterangan yang diperoleh melalui sumber lisan (Wawancara dengan Hajjah Rabbiah, Oktober 2001) hanya menjelaskan bahwa Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro berhenti sebagai *Voorsitter* Muhammadiyah Group Makassar, segera setelah dia tertimpa musibah fitnah bahwa dia menghamili seorang gadis yang tinggal di rumahnya.

Menjelang dan pada saat menjabat sebagai *Voor-sitter* Muhammadiyah Group Makassar, Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro dikenal sebagai seorang *pa-*

bantilang (pedagang grosir yang menampung barang kemudian dijual kepada pedagang kecil). Ia juga dikenal sebagai orang yang taat beragama dan sangat memperhatikan masalah dakwah.

Muhammad Yusuf Daeng Mattiro lahir di Selayar sekitar tahun 1895. Ayahnya adalah seorang pedagang kopra. Sebagai anak pedagang, dia hidup berkecukupan. Oleh karena itu, selain mengikuti pendidikan tradisional mengaji Alquran dan dasar-dasar ajaran agama Islam, diapun berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah Pemerintah Hindia Belanda.

Setelah menanjak dewasa, Muhammad Yusuf Daeng Mattiro merantau ke Makassar. Dengan bekal ijazah sekolah rakyat yang ia bawa dari Selayar, dia diterima bekerja di salah satu perusahaan ekspedisi di Pelabuhan Makassar. Sambil bekerja, Muhammad Yusuf Daeng Mattiro juga membangun usaha dagang, yang di kemudian hari mengantarkannya menjadi *pa-bantilang* sukses dan berkemampuan untuk menunai-kan ibadah haji.

Sebagai seorang perantau yang sukses, Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro menjadi tumpuan harapan keluarganya di Selayar. Sehubungan dengan itulah, maka salah seorang kerabat Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro mengirim anak gadisnya ke Makassar untuk tinggal di rumahnya. Harapan kerabat Daeng Mattiro, tentu saja dalam rangka meringankan beban hidupnya yang serba kekurangan, sekaligus membantu isteri Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro mengurus anak-anak dan mengerjakan pekerjaan

rumah tangganya sehari-hari.

Entah siapa yang menzinahi anak gadis yang tinggal di rumah Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro sehingga hamil itu, tidak diketahui secara pasti. Satu hal yang jelas ialah bahwa isteri Daeng Mattiro dan masyarakat umum menuduh Daeng Mattiro sebagai pelakunya. Meskipun tuduhan terhadap Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro itu tidak pernah terbukti kebenarannya, namun dampaknya terhadap persyarikatan Muhammadiyah sangat besar. Masyarakat yang sejak awal menentang kehadiran Muhammadiyah, tentu saja semakin mengolok dan mencemooh para anggota dan para pimpinan Muhammadiyah.

Menyadari diri sebagai tertuduh dalam kasus yang sangat memalukan dan mencemarkan nama persyarikatan itu, maka atas desakan dari para anggota dan para pimpinan Muhammadiyah, Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro mengundurkan diri dari jabatannya sebagai *Voorsitter* Muhammadiyah Grup Makassar.

Menurut Hajja Sitti Rabiah (wawancara Oktober 2001), setelah Muhammad Yusuf Daeng Mattiro mengundurkan diri dari jabatannya sebagai *Voorsitter* Muhammadiyah Group Makassar, dia tidak pernah lagi mengikuti kegiatan apa pun di Muhammadiyah. Tetapi, informasi yang diperoleh lebih lanjut, Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro rupanya masih tetap memberikan bantuannya kepada Muhammadiyah. Menurut Laporan Panitia Pelaksana Kongres Muhammadiyah ke 21 tahun 1932, Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro

adalah salah seorang di antara lima orang dermawan, yang mobilnya disumbangkan untuk mengangkut para peserta kongres (Suara Aisiyah, 1932).

Menyusul pengunduran diri Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, para *Bestuur* Muhammadiyah Makassar lainnya menyepakati memilih Kiai Haji Abdullah sebagai *Voorsitter* Muhammadiyah Group Makassar.

Di tangan Kiai Haji Abdullahlah, Muhammadiyah Group Makassar ditingkatkan statusnya menjadi cabang yang mengkoordinir group-group yang telah ada di Celebes Selatan hingga akhirnya menjadi konsoelat pada tahun 1931, setelah beberapa group yang tersebar di beberapa daerah ditingkatkan statusnya menjadi cabang.

Ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh suatu groep untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi cabang. *Pertama*, telah membentuk dan membina sekurang-kurangnya tiga groep. *Kedua*, telah memiliki amal usaha nyata berupa sekolah, masjid, dan panti asuhan. Untuk itu, maka berbarengan dengan peningkatan jumlah cabang dan groep, berkembang pula amal usaha Muhammadiyah dalam bentuk sekolah, masjid, dan panti asuhan. Dengan demikian, turut sertalah Muhammadiyah mewarnai jalannya pendidikan Sulawesi Selatan, sebagai salah satu alternatif di luar sekolah pemerintah dan sekolah Kristen dan Katolik.

Menyusul pembukaan madrasah di daerah-daerah sebagaimana telah dikemukakan, langkah selan-

jutnya yang ditempuh oleh Muhammadiyah Cabang Makassar ialah mendatangkan ulama-ulama muda dari Jawa dan Sumatera yang akan menjadi guru sekaligus memimpin madrasah atau sekolah yang didirikannya. Tugas pokok para ulama muda itu adalah mengajar dan berdakwah.

Memasuki akhir tahun 1931, Muhammadiyah Cabang Makassar diperkuat oleh seorang ulama muda yang datang dari Sumatra Barat, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Dia dikirim oleh *Hoofdbestuur* Muhammadiyah atas permintaan *Bestuur* Muhammadiyah Cabang Makassar. Kecuali sebagai guru dan mubalig, dia juga diharapkan mempersiapkan penyelenggara Kongres Muhammadiyah ke- 21 pada pada bulan Juni 1932, di Makassar.

Menurut *Hoofdbestuur* Muhammadiyah, sebagai mana tertuang dalam “buah kongres,” Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar dinilai sukses. Redaktur surat kabar ‘Tentara Islam’, demikian pula ‘Suara Muhammadiyah’, melaporkan bahwa Kongres Muhammadiyah yang ditempatkan di Makassar sangat menarik perhatian dan minat masyarakat Makassar. Setiap hari tidak kurang dari 5000 orang yang menonton dari luar arena kongres. Hal ini menandakan bahwa perhatian masyarakat sangat besar. Menurut ‘Tentara Islam’, masyarakat berduyung-duyung untuk menyaksikan kegiatan yang disebut kongres, ada juga masyarakat yang ingin menyaksikan dari dekat kegiatan Muhammadiyah yang sesungguhnya, sebab sebelumnya, mereka hanya mengetahui bahwa Muhammadiyah

adalah suatu gerakan yang membawa praktik agama baru, menentang adat istiadat negeri, menentang bidah, takhayul, dan khurafat.

Kongres Makassar ternyata berdampak besar terhadap perkembangan Muhammadiyah di Celebes Selatan. Setahun setelah kongres, anggota Muhammadiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari hanya dua cabang dan lima belas groep sebelum kongres, satu tahun sesudah kongres, meningkat menjadi empat cabang dan 39 groep. Demikian pula sekolah dan masjid mengalami perkembangan yang sangat pesat.

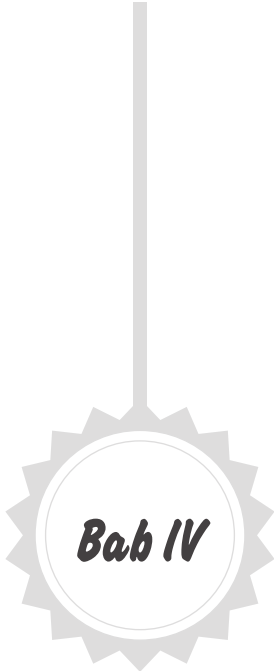
Segara setelah kongres, Muhammadiyah cabang Makassar membuka Madrasah Muallimin di Jalan Muhammadiyah. Untuk memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan Hamka di Makassar, dialah yang diangkat sebagai kepala sekolah. Setelah pembukaan Muallimin Muhammadiyah di Makassar, satu tahun kemudian Muhammadiyah Cabang Majene juga membuka Madrasah Tsanawiyah. Berbarengan dengan itu, di beberapa daerah, group-group baru juga dibuka, yang kemudian disusul dengan pendirian amal-amal usaha.

Selain itu, digalakkan pula kegiatan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, baik berupa tablig maupun debat dengan para ulama tradisional yang menentang Muhammadiyah. Masalah yang diperdebatkan biasanya berkisar pada masalah-masalah keagamaan yang dinilai bidah, seperti salat tarwih dua puluh rakaat, kunut subuh terus-menerus, baca talkin di kuburan, dan lain-lain. Perdebatan dan pertentangan lainnya, terjadi

antara Muhammadiyah dengan pejabat *parewa sara'* ketika Muhammadiyah mendirikan masjid dan hendak melaksanakan salat jumat. Menurut adat, dalam satu kampung hanya boleh ada satu masjid dan yang menjadi penyelenggara ibadah di dalam masjid adalah pejabat *parewa sara'*, khotbahnya pun harus dalam bahasa Arab. Sedangkan, bagi Muhammadiyah, siapa saja dapat menjadi imam, khatib, dan memimpin penyelenggaraan ibadah lainnya. Khotbah dapat disampaikan dalam bahasa Melayu atau bahasa daerah yang dimengerti oleh jemaah.

Demikianlah, tantangan demi tantangan di hadapi oleh Muhammadiyah. Namun, Muhammadiyah tetap saja berkembang dengan pesatnya. Anggota dan amal usahanya terus menerus saja bertambah.

Menurut laporan Konsul Muhammadiyah Celebes Selatan yang disampaikan pada Konferensi Muhammadiyah Celebes Selatan ke-16 tahun 1941 di Sengkang, Muhammadiyah di Celebes Selatan telah memiliki 6 buah cabang, 76 groep, anggota resmi 7000 rang, simpatisan atau pengikut 30000 orang, masjid/musalah 41 buah, sekolah diniyah 52 buah, sekolah HIS 4 buah, guru 79 orang, dan murid 5000 orang (Muntu, 1942).



Bab IV

PEMBENTUKAN MUHAMMADIYAH DI DAERAH-DAERAH

Muhammadiyah Cabang Makassar dibawah kepemimpinan KH. Abdullah memang nampak nyata dalam mengembangkan gerakannya. Infrastruktur organisasi semakin lengkap, tablig-tablig pun semakin digencarkan. Demikian pula penempatan kader melalui kelompok-kelompok pengajian semakin digiatkan. Peserta pengajian Muhammadiyah semakin bertambah, baik yang dari Makassar sendiri maupun yang berasal dari daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Ketentuan organisasi yang memberikan kesempatan kepada

anggota Muhammadiyah yang telah cukup berjumlah 15 orang untuk membuat group Muhammadiyah di daerah masing-masing, semakin menambah jumlah kelompok-kelompok Muhammadiyah bahkan sampai ke daerah-daerah lain di luar Makassar. Hingga tahun 1968 hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan telah terambah oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah di Gowa ¹

Perkembangan Muhammadiyah di Gowa juga bersamaan dengan perkembangannya di daerah-daerah lain di Sulawesi selatan. Radjab (1999:44) mengemukakan bahwa Abu Bakar Daeng Bombong salah seorang anggota Muhammadiyah Group Mariso yang tinggal di Pa'baeng-baeng dengan pekerjaannya sebagai tukang jahit dan aktif mengikuti pengajian di Mariso, memelopori berdirinya Muhammadiyah Group Jongaya pada tahun 1928.

Sebagai kader pergerakan Muhammadiyah yang ditempa langsung di Group Mariso Cabang Makassar, Abubakar Daeng Bombong berupaya untuk mengadakan pembinaan di daerah tempat tinggalnya di Pa'baeng-baeng yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Ranting Jongaya. Dia kemudian menjadikan Mushalla yang dibangunnya sendiri sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan atau pun

1 Bagian ini diresumekan dari buku “Mentari Bersinar di Gowa (Menelusuri Jejak Kehadiran Muhammadiyah di Gowa tahun 1928-1968)”, Mattayang (2014).

pengajian-pengajian. Di tempat itulah para peserta pengajian bersepakat untuk membentuk group Jongaya dengan komposisi pengurus, Abubakar Daeng Bombong sebagai *Voorzitter*, Abd. Razak Daeng Ngerang sebagai *secretaris*, dibantu oleh Abd. Razak Daeng Mile, Daeng Sikota, Ismail, dan Sarapa Daeng Tarru (Radjab, 1999:44).

Dengan terbentuknya Group Muhammadiyah Jongaya sebagai ranting pertama di Gowa di bawah pembinaan Muhammadiyah Cabang Makassar, maka mulailah secara organisatoris, Muhammadiyah masuk di daerah Gowa, untuk selanjutnya pengurus group Jongaya. Dengan kegiatan yang semakin giat, anggota-anggotanya pun semakin bertambah mengikuti pengajian. Untuk menyampaikan materi pengajian selain disampaikan oleh pengurus secara bergantian juga biasanya diundang pengurus-pengurus Cabang Makassar di antaranya dengan mengundang KH. Abdulah sebagai pemateri.

Dalam perkembangan selanjutnya mengingat peserta pengajian yang semakin bertambah, karena diikuti pula oleh orang-orang di luar kampung Jongaya, maka tempat tersebut dirasakan tidak lagi memadai, maka diusahakanlah tempat lain, sebidang tanah milik Abdul Razak Daeng Ngerang. Di atas tanah tersebut dibangun Mushalla, kemudian dibangun pula tempat pendidikan yang lebih modern dibandingkan dengan sekolah Islam milik kaum bangsawan sebelumnya yang bernama “Islahuddin”, yang dikelola secara tradisional, sekolah Muhammadiyah Group Jongaya tersebut

untuk selanjutnya dikenal bernama Muallimin Muhammadiyah Jongaya dengan pola pendidikan khas Muhammadiyah yang *multiscience* yaitu mengajarkan beberapa cabang ilmu pengetahuan baik agama maupun pengetahuan umum (Radjab, 1999:45).

Mushallah dan tempat pendidikan tersebut sangat berperan dalam menanamkan paham Muhammadiyah di masyarakat karena baik peserta pengajian di Mushalla maupun siswa-siswa pada sekolah tersebut selain orang Jongaya juga diikuti pula oleh orang-orang luar Jongaya dalam daerah Gowa. Hal tersebut cukup konstruktif dalam mengembangkan organisasi Muhammadiyah di daerah Gowa.

Untuk melihat peran dan pengaruh Muhammadiyah di daerah Gowa setidaknya dapat tergambarkan dalam 3 (tiga) aspek kehidupan sosial, yaitu aspek keagamaan, aspek pendidikan, dan aspek sosial politik.

Aspek Keagamaan. Seperti halnya perjuangan Muhammadiyah di daerah lain, baik dalam lingkup Sulawesi Selatan maupun tingkat nasional, maka Muhammadiyah di Gowa pun dalam aspek keagamaan berupaya memberantas syirik, Tahayul, Bid'ah, dan Khurafat. Muhammadiyah di Gowa juga berupaya mengadakan pelurusan terhadap pelaksanaan hukum islam atau syariat islam baik dalam ibadah maupun muamalat. Di samping itu berupaya menggairahkan umat islam di Gowa untuk beramal dan beribadah melalui tabligh-tabligh atau pun pengajian-pengajian yang dilakukan oleh para muballigh Muhammadiyah gowa. Tentunya hal tersebut menjadi orientasi perjuangan Muham-

madiyah di Gowa karena melihat kondisi dan keadaan masyarakat Gowa ketika itu dengan berbagai macam “penyakit agama”.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa sebelum kehadiran Muhammadiyah di daerah Gowa, maka kondisi keberislaman masyarakat sangat memperhatikan. Di mana-mana terjadi penghambaan terhadap kepercayaan lama yang sudah membudaya, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan aqidah islamiah karena akan merumuskan manusia kedalam syirik.

Demikian halnya ibadah dengan pengaburan syariat misalnya shalat 2 hari raya masih dilaksanakan di masjid dan tidak dilaksanakan di tanah lapang. (Daeng Lurang dalam Mattayang, 2011: 113). Hal lain adalah dalam pelaksanaan shalat jum'at, dimana khatib membacakan khotbahnya dengan memakai bahasa Arab, padahal menurut syariatnya khotbah harus didengar dan dipahami oleh jamaah, sehingga ketika khatib berkhotbah dengan bahasa Arab, bagi Muhammadiyah bagaimana mungkin jamaah Gowa yang hanya tahu bahasa Indonesia atau pun Makassar bisa mengetahui materi khotbah. Demikian pula dalam persoalan Azan di hari Jum'at sebelum kehadiran pengaruh Muhammadiyah, shalat biasanya dilaksanakan dua kali adzan. Dan berbagai bentuk-bentuk aktivitas lain yang oleh paham Muhammadiyah dianggap sebagai suatu yang syirik, thayyul, bid'ah dan khurafat (Daeng Lurang dalam Mattayang, 2011: 114).

Melihat hal demikian itu, para anggota Muhammadiyah di Gowa mengambil langkah dan tindakan konkrit, sesuatu yang dianggap syirik dikalangan masyarakat diperangnya melalui dakwah *Binafsihi* yaitu dakwah melalui diri sendiri dan keluarga. Langkah konkritnya selanjutnya misalnya anggota-anggota Muhammadiyah yang selesai mengikuti pengajian mengenai kemusyrikan setelah pulang di rumah, masing-masing menghancurkan Saukang, Boe-Boe, Anja-Anja, Dzimati ataupun lainnya yang terdapat pada rumah mereka (Daeng Tola dalam Mattayang, 2011:114).

Setelah itu baru mereka memerangi tempat dan benda-benda kemusyrikan lain yang ada di daerahnya. Di sini para muballigh Muhammadiyah melakukan dakwah dengan dua cara yaitu dengan menghancurkan dan memusnahkan dalam bentuk fisik dari tempat dan benda-benda yang dianggap biang kemusyrikan dan dengan mengubah cara pandang masyarakat yang mengadakan penghambaan terhadap hal-hal yang berbau syirik, melalui tabligh atau pun pengajian-pengajian.

Sementara kebiasaan khatib jum'at dalam berkhotbah memakai bahasa Arab, para muballigh Muhammadiyah mengubah kebiasaan lama tersebut dengan berkhotbah dengan memakai bahasa Indonesia atau bahasa Makassar. Hal ini dilakukan bukan hanya ketika berkhotbah di Masjid Muhammadiyah saja tetapi pada masjid manapun. Meski awal dirasa asing dengan khotbah demikian, namun kemudian masyarakat sudah mulai memahami mengenai perbaikan khotbah

dengan bahasa sendiri, dan semakin banyaklah jamaah pada masjid-masjid Muhammadiyah ketika hari jum'at dibandingkan dengan masjid yang lain, dan perkembangan selanjutnya hampir seluruh masjid di Gowa dalam khotbahnya memakai bahasa Indonesia atau pun bahasa Makassar, yang dimana Muhammadiyah sebagai perintisnya.

Peranan lain muhammadiyah di daerah Gowa, mulai dari awal keberadaannya sekitar tahun 1928 hingga tahun 1966 di daerah Gowa telah berdiri 10 buah masjid Muhammadiyah yang sebagian besar tetap bertahan hingga saat ini walaupun telah direnovasi gedung maupun namanya, masjid-masjid itu adalah Masjid Muhammadiyah di Pandang-Pandang Sungguminasa, Masjid Muhammadiyah di Limbung, Masjid Muhammadiyah di Panciro Lempangang, Masjid Muhammadiyah di amba Jawaya Allu, Masjid Muhammadiyah di Datarang-Tombolo Pao, Masjid Muhammadiyah di Barembeng, Masjid Muhammadiyah di kuboddong-Bonto Nompo, Masjid Muhammadiyah di Lembang bu'ne-Malakaji, Masjid Muhammadiyah di Ritaya-Bori Matangkasa, Masjid Muhammadiyah di Tompobalang-Moncobalang. Masjid-masjid tersebut di atas lebih awal didirikan oleh anggota Muhammadiyah sebelum Muhammadiyah di tempat masing-masing berdiri sebagai ranting atau cabang.

Aspek Pendidikan. Di Gowa, Muhammadiyah turut memerankan diri sebagai organisasi dakwah yang sangat memperhatikan pendidikan modern yang memadukan antara ilmu agama islam dan ilmu umum. Dalam

perkembangannya, sekolah-sekolah Muhammadiyah di Gowa mulai didirikan dan berkembang setelah masa kemerdekaan. Pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah merupakan pengembangan dari pola perjuangan Muhammadiyah di Kabupaten Gowa.

Pendirian sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut, tentunya hal yang sangat berharga bagi masyarakat Gowa, mengingat pada saat itu sekolah-sekolah pemerintah jumlahnya masih kurang, bahkan banyak daerah-daerah dalam wilayah Gowa yang belum mendirikan sekolah, sehingga warga yang menginginkan bersekolah atau pun melanjutkan sekolah harus keluar dari wilayahnya.

Disamping itu sekolah-sekolah agama pada saat itu amat kurang dan bahkan bisa dikatakan tidak ada. Sekolah pemerintah ketika itu kurang mengajarkan pelajaran Agama Islam sehingga keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah Gowa memiliki peranan dan pengaruh yang cukup besar. Demikian juga respon masyarakat terhadap sekolah sekolah Muhammadiyah tersebut amatlah besar pula (Daeng Lala' dalam Mattayang, 2011: 122).

Aspek Politik. Keberadaan Muhammadiyah di daerah Gowa sama halnya yang dialami di daerah daerah lain dalam perkembangannya, aspek politik turut berpengaruh apalagi ketika itu Indonesia termasuk Gowa masih diduduki oleh penjajah. Jauh sebelum Muhammadiyah datang hingga Muhammadiyah masuk sekitar tahun 1928, daerah Gowa dalam situasi politik yang tidak stabil, disatu sisi Belanda mengadakan penjaja-

han dan disisi lain masyarakat gowa dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga di daerah Gowa Muhammadiyah dengan sendirinya harus bersentuhan langsung dengan situasi dan kondisi politik di daerah tersebut.

Disinilah Muhammadiyah Gowa melalui anggota-anggotanya memainkan peranan yang cukup besar. Tidak saja fisik tapi lebih pada perjuangan Muhammadiyah dalam melawan imperialisme di Gowa melalui pola-pola tajdidnya, Muhammadiyah di Gowa turut berpartisipasi dalam melawan eksploitasi besar-besaran kaum imperialis dan berupaya mengeluarkan rakyat Gowa dari kungkungan hukum dan aturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu.

Sebagai Contoh, metode dakwah Muhammadiyah melalui ceramah dengan bahasa Indonesia atau pun Makassar memunculkan sikap nasionalisme terhadap rakyat Gowa. Dimana ketika itu pemerintah Belanda dengan hukum dan aturannya melarang bagi siapa pun memunculkan simbol-simbol nasionalisme, sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa Nasional dan Muhammadiyah dengan cukup mendemonstratif melakukannya, demikian juga dengan bahasa Makassar.

Melalui pengajian-pengajian dan tabligh Muhammadiyah, juga melahirkan jiwa-jiwa yang cinta islam dan menentang segala bentuk kemusyrikan dan kekafiran, dan akhirnya akan menganggap bahwa takut kepada belanda adal ciri kemusyrikan, sehingga dengan sendirinya akan memunculkan keberanian bagi rakyat untuk melawan kolonial belanda dan menganggap

bahwa setiap perjuangan adalah jihad dan ibadah kepada Allah swt. Sampai dengan kedatangan tentara jepang ditahun 1942, ketika kegiatan-kegiatan Muhammadiyah dan organisasi lainnya di Gowa divakumkan, pengajian Muhammadiyah walaupun tidak secara demonstratif tetap berlangsung di rumah-rumah warga Muhammadiyah, walau pun adakalanya digagalkan oleh tentara jepang (Daeng Nangka dalam Mattayang, 2011: 127).

Setelah bangsa Indonesia merdeka ditahun 1945, di mana berita tentang proklamsasi kemerdekaan baru diketahui secara terbatas di daerah Sulawesi Selatan sekitar bulan september 1945. Muhammadiyah mulai diaktifkan kembali demikian juga muhammadiyah di Gowa, setelah sekitar tiga tahun vakum, kegiatan-kegiatannya mulai digiatkan (Radjab 1999:85).

Namun kepergian tentara jepang, dan datangnya angin kemerdekaan di tahu 1945 belumlah membuat masyarakat Gowa dan organisasi Muhammadiyah di daerah ini bernafas lega, pada tanggal 23 september 1945 pasukan sekutu terdiri dari tentara *Australia* ditambah dengan tentara *Gurkha (Inggris)* mendarat di kota Makassar (Radjab 1999:87) yang mendapat tugas untuk melucuti senjata tentara jepang dan membentuk pemerintah sipil di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan *NICA (Nederlandsch Indie Civil Administration)*.

Menyadari bahwa kedatangan NICA sebenarnya adalah untuk kembali menjajah di Sulawesi Selatan, terlebih sikap mereka yang sangat terkesan arogan layaknya seorang penjajah, Maka di daerah Gowa para

tokoh Muhammadiyah mulai bangkit mengumandangkan semangat jihad melawan NICA, mereka berupaya menghimpun golongan pemuda atau pun dan golongan lain dan membentuk laskar perjuangan.

Diantara laskar perjuangan yang didirikan dan dipimpin oleh orang Muhammadiyah adalah Kelaskaran “berjuang untuk kemerdekaan dan agama” disingkat “BUKA” didirikan dan dipimpin oleh Nuhung Daeng Bani dan Abdul wahab Rajab, masing-masing merupakan ketua dan sekretaris Muhammadiyah group Bone-Limbung. Kelaskaran rakyat Pallangga, disingkat KERAP didirikan dan dikomandoi oleh Baso Tappa, merupakan pengurus Muhammadiyah ranting Boka (Limbung).

Semangat juang yang demikian besar semakin membuat NICA kelap mata dan beringas, bahkan mendatangkan pasukan istimewa yang diberi gelar “*Special troepen*” pasukan ini dipimpin oleh *Kapten Reimon Pierre Weaterling* (Radjab 1999:98), ditangan *Westeling* inilah pasukan NICA semakin gencar mengadakan penyerangan-penyerangan serta pembantaian. Di mana-mana rakyat baik yang mengadakan perlawanan maupun yang tidak dibantai, bahkan adakalanya mereka dikumpul pada satu tempat kemudian ditembak dan dikubur pada lubang yang mereka gali sendiri.

Semakin kuat dan besarnya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Gowa semakin beringas pula Pasukan *Westering* memusnahkannya, tak terhitung secara pasti berapa warga Muhammadiyah yang gugur dalam gejolak tersebut.

Muhammadiyah di Jeneponto ²

Kabupaten Jeneponto yang terletak sekitar 100 kilo meter dari kota Makassar, menjadi salah satu kabupaten yang dengan cepat disinggapi Muhammadiyah. Kehadiran Muhammadiyah di Jeneponto pertama kali dirintis oleh Sinowa Daeng Lalang pada tahun 1929. Sinowa Daeng Lalang sebelumnya adalah anggota Muhammadiyah Cabang Makassar.

Berawal sebagai peserta pengajian dan kemudian manjadi anggota Muhammadiyah Cabang Makassar, dia semakin paham dengan gerakan Muhammadiyah. Sinowa Daeng Lalang dengan keyakinannya terhadap Muhammadiyah juga mulai mengenalkan Muhammadiyah pada keluarga dan para sahabatnya. Atas usahanya untuk mengembangkan paham dan keyakinannya itulah, pada tahun 1933 Muhammadiyah Ranting Jeneponto berhasil dibentuknya. Sebagai pengurus pertama waktu itu adalah Sinowa Daeng Lalang sendiri, dan ditemani oleh Abdul Kadir Supu, Daeng Supu, Abdul Razak Sako dan Daeng Kulle.

Setelah terbentuk, Muhammadiyah dibawah kepemimpinan Sinowa Daeng Lalang mendirikan Amal usaha melalui lembaga pendidikan disamping juga tetap aktif melakukan kegiatan-kegiatan tabligh.

Pada tahun 1933, Muhammadiyah Ranting Jeneponto akhirnya berhasil mendirikan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Sebagai langkah pe-

2 Diolah dari Radjab (1999:54), dan Darmawijaya (2012:198-199)

mantapaan akan apa yang ia rintis itu, Muhammadiyah Ranting Jeneponto juga mendatangkan Hasyim, seorang guru dan Jawa sebagai Pembina lembaga pendidikan yang didirikannya.

Pada tahun itu juga, Muhammadiyah Ranting Jeneponto dengan segala usahanya berhasil pula memelopori berdirinya Ranting Muhammadiyah di Poko'bulo dan Ranting Muhammadiyah Tanetea.

Perkembangan Muhammadiyah di Jeneponto tidak terlalu mendapatkan tantangan yang keras dari masyarakat, hal itu dikarenakan keberadaan Muhammadiyah di Butta Turatea itu didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan mempunyai kharisma di dalam masyarakatnya, tokoh-tokoh itu seperti Haji Mattewakang Daeng Raja, Lanto Daeng Pasewang dan Haji Patoppoi Daeng Sutte.

Muhammadiyah di Bantaeng³

Muhammadiyah masuk di Bantaeng pada tahun 1927, yang dibawa oleh Daeng Paris Osman, Tanawali dan Mahmud Usman. Mereka mengenal Muhammadiyah, ketika mereka datang ke Makassar untuk berbelanja barang dagangan. Di Makassar mereka bertemu dengan anggota dan pengurus Muhammadiyah Cabang Makassar. Setelah mengenal Muhammadiyah, mereka pun tertarik dengan paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. dari situlah dengan ketertarikan dan keyakinan mereka pun beru-

3 Diolah dari Darmawijaya (2012:180-182) dan Putra (2007:11).

saha merintis organisasi Muhammadiyah di Bantaeng.

Daeng Paris dan kawan-kawan berhasil mendirikan Muhammadiyah Ranting Bantaeng ditahun 1927 dengan Daeng Paris sendiri sebagai ketua pertamanya. Hingga dalam perkembangannya, Muhammadiyah di Bantaeng dengan kegiatan-kegiatan tablignya terus mengalami kemajuan. Apalagi Muhammadiyah Ranting Bantaeng mendatangkan tokoh-tokoh Muhammadiyah Cabang Makassar sebagai muballig, sehingga hal ini mengundang antusias dari masyarakat setempat.

Pada tahun 1939, Muhammadiyah Cabang Bantaeng berhasil mendirikan Madrasah Wustha Muallimin dan Neutrale Hollandische School (NHS). Pembinaanya adalah Sayid Madjidi yang didatangkan dari Jawa dan dibantu oleh Abdul Rasyid Fakhir. Selain itu, Muhammadiyah Cabang Bantaeng juga berhasil mengembangkan organisasinya dengan mendirikan Muhammadiyah Ranting Pasorogi dan Muhammadiyah Ranting Batulabbu.

Kehadiran Muhammadiyah di Butta Toa ini akhirnya disambut baik oleh warga Bantaeng. Bahkan Raja Bantaeng kala itu, Pawilowi, menerima organisasi ini dan memberikan dukungan pada berbagai kegiatannya. Salah satu alasan diterimanya Muhammadiyah karena gerakan ini dianggap membawa nalar baru “pendidikan modern” yang beraroma “barat” namun tetap “Islami”, hal inilah yang membuat Muhammadiyah berkembang dengan cepat. Para penganjur Muhammadiyah awal berasal dari Jawa dan Sumatera, lebih

mementingkan aspek sosial dibanding aspek keagamaan. Apalagi masa itu, masyarakat mayoritas beragama Islam. Perubahan dalam bidang keagamaan, hanya penambahan jumlah khatib untuk shalat Jumat (Putra, 2007:11).

Sebelum kedatangan Muhammadiyah, shalat Jumat di seluruh Bantaeng memang hanya diadakan di masjid kerajaan, masjid pertama di Bantaeng. Hal ini mungkin disebabkan tidak adanya orang Islam yang dianggap mampu menjadi khatib pada pelaksanaan shalat Jumat, kecuali khatib kerajaan, yang memperoleh jabatannya, hanya berdasarkan keturunan. Kehadiran Muhammadiyah di Bantaeng, membuat hadirnya khatib-khatib baru di masjid-masjid selain masjid kerajaan. Implikasinya, menghilangkan “monopoli” ajaran Islam. Pemahaman Islam sudah lebih bervariasi sesuai dengan kemampuan khatib-khatib dari Muhammadiyah untuk memberikan tafsiran baru terhadap berbagai doktrin Islam.

Akhirnya kehadiran Muhammadiyah di Bantaeng membawa “Nalar Baru” bagi masyarakat Bantaeng, yakni dari segi pentingnya pengetahuan modern yang disandingkan dengan pengetahuan agama, maupun pentingnya kaderisasi ulama dan pengembangan pemahaman Islam.

Muhammadiyah di Bulukumba⁴

Setelah Muhammadiyah berkembang di Makassar, gerakan ini kemudian menyebar hingga menyambangi Labakkang-Pangkep, dan seterusnya sampai ke Kajang dan Gantarang Bulukumba. Saat Muhammadiyah pertama kali hadir di Bulukumba, Kehidupan masyarakat Bulukumba memang tidak bernuansa religi. Ketika itu, Bulukumba yang masih berstatus sebagai wilayah distrik-distrik bentukan Belanda, syariat Islam belum dijalankan secara utuh dan masih bercampur dengan faham-faham agama dan kepercayaan masyarakat yang tradisional.

Muhammadiyah baik sebagai faham maupun sebagai organisasi masuk di Bulukumba dari dua arah. Dari selatan yakni Kajang dipelopori Karaeng Aco Dg Pagising atau Yahya Daeng Pagising pada tahun 1926, yang bersumber dari KH Abdullah saat berada di Labakkang. Sedangkan dari utara melalui Gantarang dipelopori oleh Muh Noor dan Haji Muh Kasim tahun 1932, yang juga sumbernya dari KH Abdullah saat setelah menjadi konsul Muhammadiyah pertama di Makassar.

Dalam perkembangannya, paham Muhammadiyah di kedua tempat itu terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan beragama di kedua tempat tersebut. Faham Muhammadiyah berkembang sesuai

4 Bagian ini diresumekan dari draf Buku “Mutiar dari Selatan”, dibuat oleh tim penulis Sejarah Muhammadiyah Bulukumba, diketuai oleh Drs. Syamsul Baqir.

kondisi masing-masing wilayah. Muhammadiyah dikembangkan Karaeng Aco Dg Pagising di Kajang dan Muh Noor di Gantarang, berjalan dengan gerakan dan caranya masing-masing tanpa ada hubungan komunikasi dan koordinasi satu dengan lainnya. Kala itu, Bulukumba memang belum terbentuk sebagai kabupaten.

Walaupun belum ada koordinasi dan hubungan komunikasi, kedua kelompok Muhammadiyah ini terus berjalan dan menjadi suatu kekuatan dalam pengembangan ajaran Islam menuju pemurnian syariat di wilayahnya masing-masing. Masyarakat Islam kala itu yang masih dipengaruhi oleh kepercayaan dan keyakinan yang dianutnya sebelum memeluk agama Islam oleh kedua kelompok ini terus melakukan kegiatan tablig, pengajian sesuai visi dan misi masing-masing untuk mengembangkan ajaran Islam dalam komunitasnya melalui paham Muhammadiyah.

Gerakan Muhammadiyah yang diprakarsai Karaeng Aco Dg Pagising dimulai dari Kassi Kajang tahun 1926. Ia memulai kegiatannya bersama masyarakat dari sebuah bangunan sederhana sebagai pusat kegiatan peribadatan (surau) di Kassi, pusat peribadatan itu dibangun secara gotong royong.

Selain membangun Surau, anggota pengajian wanita yang kemudian disebut kelompok Aisyiyah juga membangun sebuah sekolah di Kassi sebagai tempat pembinaan anak-anak kala itu. Sekolah ini kemudian tertatih-tatih karena saat pemerintahan Belanda, kegiatan pendidikan ini selalu dicurigai sebagai gerakan yang menantang pemerintah. Begitupun ketika

pendudukan Jepang para pembinanya tidak diberi peluang untuk mengembangkan pendidikan terhadap anak-anak.

Ketika itu, Karaeng Aco melihat dan mencermati kondisi serta kebutuhan masyarakat akan pembinaan agama. Masyarakat Kajang khususnya di Kassi, butuh pencerahan dan pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan syariat Islam sesuai sunnah Rasulullah dan meninggalkan ritual-ritual yang sudah menjadi tradisi masyarakat sebelum Islam masuk. Disamping itu, dalam gerakan ini juga, dikembangkan paham bahwa kedudukan ummat manusia sama derajatnya di hadapan Allah, sehingga penjajahan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena itu, Islam harus membebaskan diri dari tekanan dan penjajahan.

Kembali ke cikal bakal hadirnya Muhammadiyah, Karaeng Aco dengan semangat menyebarkan syariat Islam pada mulanya membentuk kelompok pengajian yang dimulai dari Surau yang dibangun secara gotong royong dengan Masyarakat. Kelompok pengajian yang belum memiliki nama ini, terus berjalan. Namun, perkembangannya terhambat karena dianggap sebagai kelompok yang tidak resmi, tidak memiliki izin atau pengakuan Pemerintah Belanda.

Melihat kondisi ini, Karaeng Aco bersama kelompoknya terus memperkuat kelompok tablighnya dengan menghiraukan aturan Belanda sambil mencari organisasi yang bisa menjadi naungan bagi kelompok pengajiannya. Terdengarlah, kalau di Labbakang ada sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah se-

dang berkembang. Hal itu didengarnya dari sejumlah pelaut yang berlabuh di Pelabuhan Kassi, Karaeng Aco pun berangkat ke Labbakang untuk mencari tahu organisasi tersebut.

Sambil mencari informasi pasti akan hal tersebut, Karaeng Aco memastikan apa yang harus dilakukan. Setelah informasinya lengkap, persiapannya pun sudah matang, ia kemudian berangkat ke Labakkang dan bertemu dengan KH Abdullah.

Tidak sulit baginya untuk mendapatkan Muhammadiyah di Labbakkang. Sebab, KH Abdullah sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama ketika itu sedang giat mengembangkan dan memperkenalkan Muhammadiyah di kalangan masyarakat Labbakkang.

Setelah ia berada di Labbbakkang dan menemui KH Abdullah serta menyampaikan maksudnya untuk belajar tentang paham dan organisasi Muhammadiyah. Setelah mengetahui Muhammadiyah dan memahami visi misinya dalam pemurnian Islam, iapun kembali ke Kassi Kajang dan mengembangkan paham serta organisasi tersebut.

Bersama dengan teman-temannya, seperti Musu, Bakkong, Bolong Dg Mattola dan beberapa orang lainnya, ia semakin gencar melakukan tablig dan pengajian sehingga tak berselang lama, paham dan organisasi Muhammadiyah di Kassi pun kian berkembang. Kegiatan Tablig dan pengajian mulai berjalan dan menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat.

Mendengar hal itu, pemerintah Belanda kemudian membujuk Karaeng Aco untuk mendukungnya dalam

menjalankan roda pemerintahan. Kr Aco pun ditawarkan dan diangkat menjadi Kepala Distrik Kajang. Belanda melakukan hal ini untuk membendung dan menghalangi kegiatan pengajian yang dilakukan Kr Aco karena pengajian yang dilakukan itu semakin besar dan meluas ke pelosok kampung. Sebagai tokoh dan bangsawan Kajang, Karaeng Aco awalnya menerima jabatan itu sebagai Kepala Distrik. Namun, kemudian ia letakkan dan menolak untuk melanjutkan karena ia dilarang untuk mengembangkan Muhammadiyah dan harus memilih salah satunya.

Karaeng Aco akhirnya meletakkan jabatan sebagai Kepala Distrik setelah dua tahun ia jabat dan memilih tetap mengembangkan Muhammadiyah dan memimpin jamaah dalam mengembangkan ajaran Islam melalui paham dan gerakan Muhammadiyah.

Setelah meletakkan jabatannya, gerakan Karaeng Aco pun terus dipantau oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan, kegiatan yang dilakukan di Kassi terus ditekan dengan berbagai larangan khususnya larangan untuk berkumpul dan melakukan Tablig serta pengajian dari rumah ke rumah. Karena mendapat tekanan dari Belanda, sementara Tablig dan pengajian harus berjalan di satu sisi, akhirnya pada tahun 1928, Karaeng Aco Hijrah ke Laikang bersama teman-temannya untuk melanjutkan gerakannya.

Di Laikang, Karaeng Aco kemudian menyusun strategi pengembangan Muhammadiyah. Ia melakukan pengajian, membangun Masjid dan memberikan semangat kepada masyarakat akan pentingnya menjalankan

Syariat Agama dengan baik. Disamping menyemangati masyarakat untuk berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Untuk menyemangati masyarakat, maka diperlukan adanya tempat berkumpul dan tempat untuk beribadah. Iapun memutuskan untuk membangun sebuah masjid sebagai pusat kegiatan. Dengan semangat kebersamaan didukung dengan kekuatan iman yang matang, Karaeng Aco bersama Jama Dg Sitakka, Massang Dg Patombong dan Hayang serta teman-teman dan masyarakat mulai mengumpulkan bahan bangunan berupa balok dan papan. Tak lama kemudian, Masjid berukuran 10 x 10 meter yang diberi nama Nurul Jihad pun berdiri dan menjadi tempat peribadatan dan pusat kegiatan Muhammadiyah setelah meninggalkan Kassi di Kajang.

Masjid ini pun pertama kalinya digunakan untuk shalat jumat pada tahun 1928, dihadiri oleh Haji Abdul Malik Karim Abdullah (Hamka) dan menunaikan shalat jumat bersama. Buya Hamka ketika itu, datang ke Laikang untuk bertabligh atas undangan Karaeng Aco.

Dari Masjid Nurul Jihad inilah, Karaeng Aco mengembangkan Muhammadiyah Group Kajang dan terus melakukan kegiatan pengajian membina masyarakat sampai wafatnya pada tahun 1957.

Berbeda dengan kehadiran Muhammadiyah di Kajang, masuknya Muhammadiyah di Gantarang, diawali dengan peristiwa dilarangnya sebuah lembaga da'wah dan pendidikan yang dikenal dengan nama PERKUMPULAN SADAR untuk melakukan kegiatan oleh Pe-

merintahan colonial Belanda. Karena itu, dua orang tokoh pendiri PERKUMPULAN SADAR, yakni Muhammad Noor dan Haji Muhammad Kasim, mencoba untuk mencari organisasi yang dapat menaungi kegiatannya.

Awalnya pada Tahun 1930, masyarakat Gantarang membentuk suatu organisasi muslim yang diberi nama PERKUMPULAN SADAR, dipimpin Muh Noor dan kawan-kawan. Organisasi ini bergerak pada bidang pendidikan dengan melakukan gerakan pemberantasan buta huruf. Untuk program pemberantasan buta huruf tersebut, perkumpulan Sadar mendirikan taman bacaan. Selain itu, juga dilakukan pemberantasan buta agama dengan memberikan pelajaran kepada anggota dan masyarakat tentang shalat, Jawahir, adab kesopanan, tabligh dan sejumlah kegiatan sosial lainnya.

Kegiatan yang dilakukan Perkumuplan Sadar dipusatkan di Masjid Ponre (Masjid Attaqwa Muhammadiyah, sekarang). Masjid Attaqwa adalah salah satu masjid terbilang tua di Bulukumba karena dibangun tahun 1930-an, setelah masjid Jihad di Laikang yang didirikan tahun 1928. Kegiatan pemberantasan buta aksara dan agama yang dilakukan Perkumpulan Sadar, awalnya hanya diikuti oleh orang-orang tua laki-laki dan perempuan.

Dalam melakukan kegiatan pendidikan pemberantasan buta aksara dan buta agama, Perkumpulan Sadar ini menggunakan buku penuntun dari Persatuan Islam Bandung.

Kegiatan pendidikan tersebut terus berjalan dan berkembang, tidak hanya orang tua tapi juga anak-

anak muda pun sudah mulai tertarik bergabung, sehingga tak berapa lama peserta pendidikan semakin ramai dan sudah tidak memungkinkan hanya dilakukan di Masjid yang terbatas.

Dengan dasar pemikiran itulah, para pimpinan dan pengurus Perkumpulan Sadar, berniat untuk mendirikan sebuah sekolah. Namun usaha ini tidak dapat berjalan lancar karena pemerintah Belanda tidak memberikan izin pendirian sebuah sekolah apabila tidak bernaung pada salah satu organisasi yang telah mendapat pengakuan Pemerintah Belanda. Hambatan ini tidak membuat semangat para pengurus Perkumpulan Sadar berhenti. Mereka tetap berusaha untuk mencari jalan keluar mengatasi buta aksara dan agama sebagai upaya mengangkat derajat bangsanya dari keterbelakangan.

Muh Noor dan Haji Muh Kasim akhirnya berangkat ke Makassar dengan tujuan mencari sebuah organisasi yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Belanda. Setibanya di Makassar, Muh Noor dan Haji Muh Kasim, menemui Haji Abdullah (Konsul Muhammadiyah I). Mereka, kemudian mengutarakan masalah yang dihadapinya dalam mengembangkan gerakannya. Setelah melakukan diskusi yang cukup panjang, akhirnya terjalin kesepakatan nama Muhammadiyah dapat digunakan untuk menaungi kegiatan yang dilakukan Perkumpulan Sadar. Selain itu, disepakati pula untuk mengubah nama Perkumpulan Sadar menjadi Muhammadiyah.

Merekapun kembali ke Bulukumba dan membawa Muhammadiyah sebagai organisasi yang menaungi kegiatan organisasinya. Setibanya di Bulukumba, Muhammad Noor kemudian melakukan musyawarah dengan para pengurus Perkumplan Sadar dan disepakati nama Perkumpulan Sadar berubah menjadi Muhammadiyah. Dengan perubahan inilah, maka pada Februari 1932, diresmikanlah Muhammadiyah Gantarang oleh Pimpinan Muhammadiyah Cabang Makassar oleh Haji Mansyur Al Yamani.

Peresmian dan Pelantikan pengurusnya dihadiri oleh Konsul Muhammadiyah I, Haji Abdullah, Sekretaris Muhammadiyah Cabang Makassar, Kamaruddin Daeng Marala, dan Bendahara Cabang Muhammadiyah Makassar Daeng Manja.

Adapun pengurus Muhammadiyah pertama yang dilantik itu, sebagai penasehat Haji Muhammad Ali Barani Daeng Paewa. Ia seorang hartawan dan dermawan di Gantarang ketika itu. Pelindung I, Haji Andi Sultan Petta Raja (Karaeng Gantarang) dan Haji Kantoro (Kadhi Gantarang). Anggota Komisaris I, Mangngaweang Daeng Nassa, komisaris II, Taddang, Komisaris III, Ambe Lalo Dg Matteredu, Komisaris IV, Ismail, dan Komisaris V, Haji Jaji Daeng Pawinru. Ketua I, H Muh Kasim, Ketua II, H Muhammad Saleh bin H Kantoro. Panitera I, Muhammad Noor, Panitera II, Abdullah (seorang guru SR di Sapiri), dan bendahara H Salehe juga seorang guru SR di Sapiri.

Muhammadiyah Daerah Bulukumba resmi terbentuk pada 8 November 1981 dengan surat keputus-

an Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulukumba No A-2/05/1402 H bertepatan dengan 8 November 1981. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel No A/1/056/1402. 9- XII-1981 dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat No T.172/D-21/1981 tanggal 25 Safar 1402 H bertepatan tanggal 22 Desember 1981. Sejak itulah Muhammadiyah Daerah Bulukumba resmi berdiri sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulukumba, dan berkembang sampai sekarang.

Muhammadiyah di Selayar ⁵

Muhammadiyah di Selayar resmi hadir pada tahun 1930 dengan dibentuknya Muhammadiyah Ranting Selayar. Sebelumnya, kehadiran Muhammadiyah di Kabupaten daerah Selayar dirintis oleh dua orang Haji yakni Haji Hayyong dan Haji Ganiun, dua tokoh Islam kota Benteng, yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebagai orang Selayar yang memiliki hubungan dengan pengurus Muhammadiyah Cabang Makassar. Ia membawa paham Muhammadiyah ke daerahnya tersebut dan berkembang kemudian dengan dibentuknya Ranting pada tahun 1930 itu. Selain itu, Muhammadiyah juga dapat dengan cepat berkembang di Selayar dikarenakan peran penting orang-orang Selayar yang tinggal di Makassar, apa yang mereka peroleh di Makassar itu kemudian diajarkan juga kepada masyarakat Selayar disaat pulang ke kampung

5 Diolah dari Darmawijaya (2012:185-186).

halaman, terutama dikalangan keluarganya sendiri.

Muhammadiyah ranting Selayar pasca didirikannya, memulai kegiatannya dengan aktif membuat tablig-tablig yang dalam perkembangannya cukup menggembirakan. Respon masyarakat Selayar memang cukup antusias sehingga setahun berselang tepatnya pada tahun 1931, Muhammadiyah Ranting Selayar telah berhasil merintis Ranting-Ranting baru. Ranting-ranting baru itu diantaranya adalah Ranting Buki, Ranting Polebungi, Ranting Onto Sapo, Ranting Bontobangun, Ranting Odaiya, dan Ranting Laiyolo.

Setelah kehadiran ranting-ranting tersebut, Muhammadiyah semakin berkembang, bahkan Muhammadiyah mampu menarik perhatian dari tokoh-tokoh Islam lainnya. Misalnya, pada tahun 1933, Muhammad Daeng Boko bersama dengan teman-temannya adalah pimpinan Partai Sarekat Islam (PSI) Selayar yang telah meleburkan organisasi PSI Selayar ke dalam Muhammadiyah Cabang Selayar.

Muhammadiyah di Sinjai ⁶

Perihal awal masuk Muhammadiyah di Sinjai terdapat dua versi. Versi pertama menyebutkan bahwa Muhammadiyah Cabang Balangnipa sebagai cabang pertama Muhammadiyah di Sinjai berdiri pada tahun 1932 dengan pengurusnya, H. Muh. Sanusi dan kawan-kawan. Data ini diperoleh berdasarkan tulisan dari Ha-

6 Diolah dari Radjab (1999:52), Darmawijaya (2012:197-198) dan Harum (2006).

rum (2006). Versi kedua menyebutkan bahwa Muhammadiyah pertama kali masuk di Sinjai pada tahun 1928 ditandai dengan berdirinya Pimpinan Ranting Sinjai. Versi ini berdasarkan ulasan Radjab (1999: 52).

Muhammadiyah Sinjai tidak dapat dilepaskan dari peran Ahmad Marzuki sebagai pendiri Pimpinan Ranting Sinjai. Ahmad Marzuki dibantu oleh Muhammad Sanusi, Andi Bintang, dan La Bunna (Andi Muawiyah Ramly dalam Darmawijaya, 2012: 197,. Organisasi otonom (ortom) yang pertama kali didirikan di Sinjai adalah Hizbul Wathan (HW) yang dipimpin oleh Ibnu Daeng Magassing. Setelah itu, pada tahun 1930, 'Aisyiyah Sinjai pun terbentuk di bawah kepemimpinan Ibu Indar (Radjab, 1999: 52).

Salah satu wujud keberadaan Muhammadiyah di Sinjai adalah ketika H. Muhammad Abduh, Sekretaris Cabang Muhammadiyah Balangnipa, bersama dengan Ust. Marzuki Hasan dan kawan-kawan, mensponsori pembangunan Gedung Sekolah/ Madrasah Muhammadiyah pada tahun 1935 (Harum, 2006). Data ini kembali kontradiksi dengan data yang disampaikan oleh Radjab. Gedung yang berwujud Madrasah Ibtidaiyah ini berdiri pada tahun 1930. Selanjutnya, pada tahun 1933, Madrasah Muallimin berdiri di bawah pembinaan Abdul Rasyid Faqih (Radjab, 1999:52).

Terlepas dari kontradiksi tersebut, sampai sekarang, gedung tersebut (Gedung Tua Kampus I Balangnipa) masih dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan. Gedung tersebut dibangun dengan semangat tinggi, meski jumlah pengurus dan anggota Muham-

madiyah saat itu masih terbatas. Gedung yang digunakan sebagai madrasah ini cukup banyak melahirkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, di antaranya K.H. Jamaluddin Amin, Mantan Ketua Muhammadiyah Sulsel.

Terkait awal masuknya Muhammadiyah di Sinjai disebutkan bahwa sebelum masuknya Muhammadiyah, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) yang dipimpin oleh H. Muhammad Said (Ayah dari Muh. Syarikat atau Muh. Syurkati Said) sudah terlebih dahulu berdiri. Hingga, kedatangan Muhammadiyah akhirnya membuat para pengurus PSII Sinjai membagi diri, ada yang menjadi pengurus PSII, ada juga yang menjadi pengurus Muhammadiyah (Harum, 2006).

Kehadiran PSII dan Muhammadiyah di Sinjai (Balangnipa) membawa pengaruh atas kesadaran berbangsa masyarakat Sinjai melalui pendidikan kepanduan Hizbul Wathan (HW) dan Sarekat Islam *Afdeeling* Pandu (SIAP). Hal ini membuat angkatan muda yang dikader di gerakan kepanduan tumbuh dan berkembang mengikuti irama perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Kesadaran politik kebangsaan pun semakin kuat setelah masuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang juga dipegang oleh tokoh-tokoh pemuda dari PSII dan Muhammadiyah.

Di Sinjai ini, PSII dan PNI mengobarkan perjuangan di bidang politik, sedangkan Muhammadiyah mengobarkan kesadaran beragama melalui pembinaan tablig. Salah satu wujud pembinaan tablig tersebut yaitu dengan melatih para pemuda untuk ber-

tablig, mahir berpidato, dan mendakwahkan agama Islam. Inilah yang kemudian berkembang sehingga masyarakat Sinjai dikenal dengan masyarakat religius. Terlebih dengan munculnya tokoh-tokoh agama yang cukup disengani seperti K.H. Muh. Thahir (Mantan Kepala Urusan Agama Swatanra Bonthain yang meliputi Kewedanan Bulukumba, Selayar, dan Sinjai. Kiai Thahir juga merupakan Mantan *Kadhi* Lamatti). Selain itu, hadir juga K. H. Muh. Hasan (Mantan *Kadhi* Bulu-bulo, yang juga merupakan ayah dari K.H. Marzuki Hasan).

Muhammadiyah di Bone ⁷

Dalam sejarah Islamisasi di Sulawesi Selatan, Bone merupakan kerajaan terakhir yang masuk Islam. Islam masuk di Bone pada tahun 1611, setelah diperangi oleh Kesultanan Makassar. Dalam perkembangannya, di Bone pernah berkuasa seorang raja yang bernama La Maddaremeng. Sebagai Raja Bone, La Maddaremeng berusaha menerapkan syariat Islam di Bone, namun La Maddaremeng tidak berhasil dalam kebijakannya karena mendapat penolakan dari bangsawan Bone, termasuk ibunya sendiri. Kaum bangsawan, termasuk ibunya lebih suka melestarikan adat-istiadat, dari pada mendukung gerakan penerapan syariat Islam yang dicanangkan oleh La Maddaremeng. Hal ini menandakan betapa kuatnya adat-istiadat dalam kehidupan masyarakat Bone dan keadaan seperti ini ber-

⁷ Diolah dari Radjab (1999:55), dan Darmawijaya (2012:199-202)

jalan terus hingga lahirnya gerakan modernisme Islam pada awal abad ke-20.

Di awal abad ke-20, di Bone hanya ada organisasi Persatuan Arab Indonesia (PAI), dan organisasi ini saja yang mendapatkan izin dari Raja Bone, sedangkan organisasi-organisasi lainnya tidak memperoleh izin untuk berdiri di wilayah Bone.

Sikap Raja Bone yang tidak mengizinkan organisasi-organisasi Islam berdiri di wilayah kekuasaannya didasari atas ketakutan akan adanya pencerahan yang bisa merusak tatanan adat-istiadat Bone yang telah diwarisi secara turun temurun. Hal ini bisa dilihat dari sikap Raja Bone yang menolak PAI Cabang Bone untuk mengadakan *algemeene vergadering*. Setelah dikritik, akhirnya Raja Bone memberikan izin kepada PAI untuk mengadakan *algemeene vergadering*, apabila PAI mau menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Raja Bone. Salah satu syaratnya adalah *algemeene vergadering* tersebut tidak boleh menyinggung masalah adat-istiadat negeri.

Apa yang menjadi sejarah tentang perkembangan Islam di Bone, secara umum juga sama halnya dengan yang dialami Muhammadiyah selanjutnya. Muhammadiyah di Bone berulang kali mengajukan surat permohonan izin bagi berdirinya organisasi Muhammadiyah di daerah tersebut, tetapi Raja Bone selaku kepala pemerintahan *selfbestuur* juga tidak memberikan izin. Raja Bone menjelaskan bahwa ia tidak menolak kehadiran organisasi-organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah, sejauh organisasi-organisasi Islam tersebut

tidak bermaksud menyingkirkan adat-istiadat serta kebiasaan masyarakat yang telah wariskan secara turun-temurun, tapi jika organisasi-organisasi tersebut tidak mau menghargai adat, justru ingin menyingkirkannya, maka tidak ada tempatnya di daerah Bone.

Muhammadiyah di Maros ⁸

Muhammadiyah di Maros resmi hadir pada tahun 1929 dengan didirikannya Ranting Maros dengan dipelopori oleh Haji Ba Alwi dan Daeng Rahim. Meski secara resmi hadir di tahun itu, tapi sebelumnya Muhammadiyah memang telah ada di Maros melalui kader-kader pengajian atau Tablig Muhammadiyah Makassar yang berasal dari daerah Maros tersebut.

Sebelum membentuk Muhammadiyah di Maros, Haji Ba Alwi dan Daeng Rahim memang telah giat mengikuti tabligh-tabligh yang diadakan di kota Makassar dan sekaligus juga menjadi pengurus di Muhammadiyah Cabang Makassar.

Akan tetapi dalam perkembangannya, Haji Ba Alwi dan Daeng Rahim, juga merasa perlu untuk menghadirkan Muhammadiyah di Maros. Sehingga atas dasar itulah Ranting Maros berhasil didirikan tepatnya di tahun 1929. Adapun susunan pengurus generasi pertama Ranting Maros waktu itu adalah Haji Ba Alwi, Daeng Rahim, Ali Usman, Haji Ambo Masse dan Haji Sikkiri.

8 Diolah dari Darmawijaya (2012: 188)

Setelah terbentuk itulah, pengurus Muhammadiyah Ranting Maros mulai memasifkan gerakannya dengan berupaya menyampaikan dakwahnya sampai di daerah Camba. Selain itu, mereka juga membuka amal usaha dalam bidang pendidikan.

Muhammadiyah di Pangkep ⁹

Muhammadiyah masuk di Kabupaten Pangkep pada tahun 1927 dibawah oleh Haji Andi Sewang Dg Muntu. Seorang bangsawan yang berpengaruh di wilayah Pangkajene Kepulauan pada waktu itu.

Lahir di Kampung Baruwa, Takalar pada tahun 1905, ia hijrah ke Labbakang, Pangkajene Kepulauan dalam usia enam tahun mengikuti orang tuanya yang pindah. Di Labbakang inilah, ia menyelesaikan pendidikan formalnya hingga *volkschool*. Setelah tamat, ia melanjutkan sekolah di *Vervolgschool* di Pangkajene. Setelah itu, ia merantau ke Sumatera Barat mengikuti orang tuanya yang dibuang ke Sumatera Barat oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena dituduh terlibat dalam suatu usaha pemberontakan menentang penjajahan Belanda.

Di Sumatera Barat, Daeng Muntu melanjutkan pendidikannya di Sumatera Thawalib hingga tingkat Tsanawiyah. Dan melalui belajar di tempat tersebutlah, Daeng Muntu mengenal gerakan pembaharuan Islam hingga pada tahun 1927, ia pulang ke Labbakang setelah pendidikannya selesai.

9 Diolah dari Darmawijaya (2012:186-188)

Setiba di Labbakkang, Daeng Muntu dipertemukan dengan Muhammadiyah, sehingga dari sinilah sebagai orang yang telah mengenal gerakan pembaharuan maka ia dengan mudah menerima paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Ia pun mulai berinisiatif untuk turut mengembangkan faham dan gerakan itu dengan mengajak teman-temannya untuk memelopori berdirinya organisasi Muhammadiyah di Labbakkang.

Keinginan Andi Sewang Daeng Muntu untuk mendirikan sebuah organisasi akhirnya menjadi kenyataan pada tanggal 9 Oktober 1927, melalui suatu pertemuan umum, Muhammadiyah Ranting Labbakkang diresmikan dan Haji Andi Sewang Daeng Muntu langsung dipercayakan sebagai Ketua pertama. Dalam kepengurusan awal Muhammadiyah Ranting Labbakkang ini Andi Sewang Dg Muntu didampingi dan banyak diisi oleh para haji. Selain Haji Andi Sewang Daeng Muntu sendiri, ada Haji Muhammad Daeng Nojeng, Haji Mas-yhud, dan Haji Baso Daeng Bombong. Selain itu duduk pula seorang keturunan Arab, yaitu Sayid Hamid.

Sebagai langkah awal setelah berdiri, Muhammadiyah Ranting Labbakkang mengadakan tabligh dengan mendatangkan muballigh dari Makassar serta mendirikan Amal Usaha Madrasah Diniyah. Untuk memperkuat sekolah yang didirikan itu, hingga tahun 1934, Muhammadiyah Ranting Labbakkang telah mendatangkan empat guru dari Jawa.

Selain itu, Haji Andi Sewang Daeng Muntu bersama pemuka-pemuka umat Islam di Pangkajene, seperti

Haji Muhadi, Haji Abdul Hamid dan Haji Parumpa juga berhasil membentuk Muhammadiyah Ranting Pangkajene, Muhammadiyah Ranting Bonto-bonto, Muhammadiyah Ranting Sigeri, dan Muhammadiyah Ranting Ujungloe. Akhirnya Ranting-ranting inilah yang menjadi penguatan bagi Muhammadiyah dalam melebarkan kiprahnya dan berkembang selanjutnya hingga Muhammadiyah Pangkep berdiri sebagai Pimpinan Daerah yang menaungi ranting-ranting dan cabang yang telah ada.

Muhammadiyah di Barru ¹⁰

Kehadiran Muhammadiyah di Barru dibawa oleh dua orang pedagang yang bernama Haji Asaf dan Haji Yahya. Mereka adalah pedagang yang berasal dari Barru sendiri yang menjadi anggota Muhammadiyah Cabang Makassar.

Karena aktivitas dagang, kota Makassar dan Kabupaten Barru bagi kedua pedagang tersebut tentu menjadi dua daerah yang silih berganti didatanginya, membeli barang di Makassar dan memperdagangkannya di Barru telah menjadi aktivitasnya. Maka setiap ke kota Makassar itulah, mereka selalu meluangkan waktu untuk datang mendengarkan tabligh di masjid Ta'mir. Merasa bahwa apa yang diperolehnya dipengajian itu perlu disebarluaskan, Haji Asaf dan Haji Yahya berkeinginan untuk merintis pula dakwah Muhammadiyah di daerah Barru.

10 Diolah dari Darmawijaya (2012:189).

Setiap pulang dari kota Makassar, mereka mulai mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat Barru, dan dengan segala usahanya akhirnya pada tahun 1930, mereka berhasil membentuk Muhammadiyah Ranting Kampung Barru. Hadirnya Ranting Kampung Barru inilah menjadi cikal bakal berkembangnya Muhammadiyah di Barru, hingga berdiri pula Ranting Tanete, Ranting Ele dan Ranting Raila.

Di Barru, gerakan Muhammadiyah memang tidak sama berkembangnya dengan di daerah lain, Muhammadiyah kurang mendapat simpati dari masyarakat. Jumlah anggotanya pun relatif kecil. Walaupun demikian, mereka tetap bersemangat dalam menyebarkan dakwah Muhammadiyah dengan aktif mengadakan tablig-tablig serta mendirikan mushalla.

Muhammadiyah di Parepare ¹¹

Muhammadiyah pertama kali masuk di Parepare pada tahun 1935. Hal ini bersumber dari pernyataan K.H. M. Sanusi Maggu, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) Parepare/ Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) Sulawesi Selatan Periode 1978—1985. Akan tetapi, di lain pihak, ada juga yang menyatakan bahwa masuknya Muhammadiyah untuk pertama kali ke Bandar Madani ialah pada tahun 1933. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa Muhammadiyah

11 Diresumekan dari draf buku Sejarah Muhammadiyah di Parepare (2015), disusun oleh Drs.H.Sawaty Lambe, Drs. Hisbulah, dan Drs. Muh. Yamin Yusuf.

telah masuk jauh sebelumnya yakni pada tahun 1928.

Awalnya, Muhammadiyah Parepare merupakan pimpinan ranting dari Pimpinan Cabang Rappang. Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pelopor pendiriannya antara lain, M. Nur, seorang guru HIS dari Makassar yang bertugas di Parepare; Ahmad Bakoko, seorang pedagang pemilik toko “Indonesia” asal Pinrang; Abdul Gani, Pengusaha “MPS”; dan Tadi, Kepala Bagian *Landrente* Parepare.

Sesuai dengan watak Muhammadiyah yang selalu menghadirkan karya nyata, Muhammadiyah periode ini antara lain telah mendirikan madrasah ibtidaiyah, *Standarschool*, dan *Schakelschool*, serta membentuk dan mendirikan ranting Muhammadiyah di Jampoe. Data ini berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Kantor Muhammadiyah Daerah Parepare.

Keadaan dan perkembangan keanggotaan Muhammadiyah di Parepare pada waktu itu pun cukup menggembirakan. Menurut buku daftar anggota (*stamboek*) yang ditemukan, sampai dengan masuknya Jepang ke daerah ini, anggota Muhammadiyah telah berjumlah 135 orang. Sayangnya, analisis terhadap perkembangan keanggotaan Muhammadiyah, okupasi, daerah asal, jenis pekerjaan, dan pendidikannya secara menyeluruh tidak dapat dilakukan karena tidak lengkapnya buku daftar anggota tersebut.

Berdasarkan data-data dan catatan yang terdapat di dalam buku *stamboek* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya, anggota Muhammadiyah masa itu terdiri dari pendatang luar daerah Pare-

pare. Akan tetapi, menurut struktur pemerintahan di zaman itu, daerah tersebut masih termasuk ke dalam daerah administratif *Afdeling* Parepare. Data dalam *stamboek* tersebut juga menunjukkan, dari 24 orang anggota Muhammadiyah, 12 orang berprofesi sebagai pedagang (*handelaar*), 9 orang adalah pegawai dan guru (5 pegawai dan 4 guru), dan pekerjaan lain-lain sebanyak 3 orang.

Sayangnya, jelang kedatangan Jepang di Sulawesi Selatan pada tahun 1942, usaha-usaha dan amal yang dibina oleh Muhammadiyah mulai tersendat-sendat. Saat-saat seperti ini pun dimanfaatkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengorganisasi dan menyiapkan pemuda-pemuda daerah untuk menjadi tenaga pertahanan menghadapi Jepang. Oleh karena itu, pemuda-pemuda tersebut dididik dengan kemiliteran menghadapi serangan Jepang. Begitu pun dengan guru sekolah Muhammadiyah, tokoh-tokoh, serta pemuka-pemuka, dan anggota Muhammadiyah. Keadaan ini menyebabkan banyak orang tua murid bersama anaknya menyingkir ke luar daerah Parepare, bahkan ke daerah pedalaman, sementara, Ketua Muhammadiyah Parepare saat itu, M. Nur, dimutasikan ke Makassar dan diangkat sebagai *school-opziner*. Sayangnya, pimpinan yang lain tidak mampu mengatasi situasi ini. Kekosongan dalam pimpinan Muhammadiyah Parepare pun tidak terelakkan. Dengan demikian, terhentilah semua kegiatan formal organisasi, meski pembinaan jiwa kemuhammadiyah secara kekeluargaan dan informal tetap dipelihara dan dilaksanakan.

Warga Muhammadiyah yang bersimpati dengan Jepang berusaha melepaskan diri dari ikatan kemiliteran yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda. Pada saat Jepang mendarat di bumi Indonesia, Muhammadiyah ikut mempercepat proses kejatuhan kekuasaan Belanda ke tangan Jepang. Pada masa itu, masyarakat memang menganggap bahwa Jepang merupakan sekutu Indonesia untuk dapat melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Anggapan itu timbul dengan adanya siasat yang digalakkan oleh Jepang bahwa Jepang adalah “saudara tua” dari matahari terbit dengan semboyan “Asia Timur Raya”. Sikap Muhammadiyah ini kontradiksi dengan sikap PSII, PNI, dan Parindra sebagai partai politik di daerah ini yang justru bekerja sama dengan pemerintahan penjajahan Belanda.

Siasat lain yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati pribumi saat itu adalah pendirian organisasi keagamaan yang bernama *Jami'atul Islamiyah*. Banyak warga dan guru-guru Muhammadiyah, terutama tokoh-tokohnya yang berpengaruh dimanfaatkan oleh Jepang di dalam organisasi ini, kecuali beberapa tokoh, seperti K.H. M. Sanusi Mg., Abbas Daeng Mallawo, Ahmad Makaraus, dan beberapa lainnya. Tokoh-tokoh ini senantiasa menghidupkan jiwa Muhammadiyah dengan menjelajahi seluruh pelosok Sulawesi Selatan. K.H. M. Sanusi Mg bertugas menjelajahi bagian utara, sementara Abbas Daeng Mallawo serta Ahmad Makaraus bertugas di bagian selatan Sulawesi Selatan. Tokoh-tokoh ini memberikan pemahaman kepada anggota Muhammadiyah agar tetap dalam keyakinan

mereka. Paham-paham Al-Islam dan Kemuhammadiyah harus terus dipelihara.

Hubungan Muhammadiyah Pare-pare dengan pimpinan pusat di Jogjakarta selama pendudukan Jepang juga terputus sama sekali. Hal ini karena kegiatan lahir keorganisasian pada saat itu yang sama sekali tidak ada. Pemerintah Jepang saat itu memang melarang aktivitas Muhammadiyah. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh struktur pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia, yang menjadikan Indonesia timur berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang. Pembagaian kekuasaan ini membuat hubungan antara Indonesia Timur terlepas dengan kekuasaan Jepang yang ada di Jawa dan Sumatera serta pulau-pulau bagian dalam barat lainnya yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang yang berkedudukan di Singapura.

Di masa penjajahan Jepang, semua organisasi Islam, selain Jam'iatul Islamiyah, kegiatannya memang diambil alih oleh Jepang, termasuk harta dan kekayaan milik Muhammadiyah Parepare dan organisasi lainnya. Tanah dan sekolah Muhammadiyah Parepare yang terletak di Lontange di daerah Cappa Ujung yang strategis diambil Jepang untuk dijadikan pusat kegiatan Angkatan Laut Jepang dan gudang peralatan persenjataan. Daerah yang sekarang bernama Cappa Ujung dan Jalan Lasinrang dibongkar dan dikosongkan. Penghuninya dipindahkan ke daerah yang sekarang bernama "Ujung Baru". Pada tempat yang telah dikosongkan inilah dibangun pusat Angkatan Laut dan

gudang peralatan Jepang

Pada saat detik-detik pertama proklamasi kemerdekaan diperdengarkan, Muhammadiyah menentukan sikap yaitu menyambut gembira dan mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan tersebut. Muhammadiyah akan berjuang dan membela Negara Republik Indonesia yang baru lahir tersebut oleh karena perjuangan kemerdekaan itu adalah juga perjuangan Muhammadiyah. Sikap ini diambil dalam suatu rapat—semacam konferensi “kilat”—yang diadakan di Makassar dengan spontan. Sikap ini merupakan sikap aktif di saat organisasi lain dan partai-partai hanya berdiam diri atas berita yang didengar dari radio terkait proklamasi kemerdekaan ini.

Keputusan konferensi “kilat” ini dijadikan sebagai modal untuk mempersiapkan kembali usaha-usaha Muhammadiyah di seluruh daerah yang dahulu pernah ada Muhammadiyah di Sulawesi Selatan ini. Keluarga dan pemuda Muhammadiyah dikumpulkan kembali untuk menghidupkan lagi Muhammadiyah. Hingga kelengkapan alat perjuangan terutama di bidang politik Muhammadiyah daerah ini, akhirnya, memelopori berdirinya partai politik Masyumi di daerah ini. Hal ini dianggap perlu dalam rangka perjuangan politik, oleh karena Muhammadiyah sendiri sejak semula telah berprinsip tidak akan menggarap masalah-masalah politik praktis.

Muhammadiyah Parepare dibangun kembali sekitar tahun 1949 akhir atau awal 1950. Pembangunan kembali itu berdasarkan instruksi dari Pimpinan

Muhammadiyah di Makassar. Pembangunan kembali Muhammadiyah di Parepare adalah atas inisiatif dari H. Mahmud Rahim (meninggal tahun 1955), seorang pedagang asal Belawa (Wajo) setelah bermusyawarah dengan beberapa temannya antara lain Said Amir Al Katiri, H. Ahmad Badar, Bustam (seorang penilik sekolah), dan lain-lain,

Dalam rangka pembangunan kembali ini yang pertama sekali diusahakan ialah mengambil kembali tanah Muhammadiyah yang terletak di Lontang'e. Akan tetapi, rupanya karena perubahan situasi, tanah tersebut telah diambil oleh pewakaf semula. Atas kenyataan ini, H. Mahmud Rahim sebagai Ketua Muhammadiyah Parepare, meminta sebidang tanah sebagai pengganti tanah wakaf Muhammadiyah yang telah diambil kembali oleh pewakaf semula itu kepada Kepala Daerah Parepare. Oleh Kepala Daerah, permintaan Muhammadiyah ini dipenuhi. Muhammadiyah diberi tanah lokasi yang bernama Ujung Lare. Di atas tanah itu, sekarang berdiri gedung SMP Muhammadiyah dan sejak berdirinya fakultas yang diasuh oleh Muhammadiyah Parepare juga menempati gedung itu.

Muhammadiyah di Rappang¹²

Kehadiran Muhammadiyah di Rappang dirintis oleh Haji Ibrahim, seorang ulama yang sangat disegani di daerah tersebut. Ia pernah menuntut ilmu selama beberapa tahun di Makkah. Sekembali dari Makkah, ia

12 Diolah dari Darmawijaya (2012:173-175).

diangkat menjadi guru bagi anak-anak bangsawan, sehingga dari pekerjaannya sebagai guru bagi anak-anak bangsawan itu, ia mendapat gelar kehormatan sebagai Gurunna Andi, nama yang dikemudian hari lebih populer dari pada nama aslinya.

Dala suatu kesempatan, Haji Ibrahim dipertemukan dengan seorang pedagang kaya yang bemama Haji Zaini. Dari pertemuan itulah, Haji Zaini belajar pada Haji Ibrahim yang kemudian dalam perkembangannya membuatnya tertarik dengan paham agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah.

Sebagai pedagang, Haji Zaini memiliki hubungan dagang yang luas dengan beberapa daerah di luar Rappang, di antaranya Enrekang, Pinrang, Mandar dan Tator, bahkan jaringan dagang Haji Zaini sampai di Singapura. Dalam kesehariannya, Haji Zaini terkenal sebagai seorang pedagang yang dermawan dan ulet dalam usaha dagangnya. Ia pernah memberangkatkan 30 orang yang terdiri dari keluarga dan para sahabatnya untuk menunaikan ibadah haji. Semua biayanya ditanggung sendiri oleh Haji Zaini. Dalam menjalankan usaha dagangnya, ia dibantu oleh Haji Ismail Ambo Mariana, yang juga dikenal sebagai seorang muslim yang dermawan.

Pada tahun 1928, Haji Ibrahim dan Haji Zaini mendirikan Muhammadiyah Ranting Rappang. Istri Haji Zaini yang dibantu oleh anak-anaknya dan anak-anak Haji Ismail juga turut mendirikan Aisyiyah. Mereka mengawali kegiatannya dengan mengadakan tabligh. Kemudian mendirikan sekolah Ibtidaiyah serta Tsanawiyah.

Sementara untuk tenaga guru, pengurus mendatangkannya langsung dari Jawa dan Sumatera, mereka adalah Abdul Rauf dari Jawa serta Gazali Syahlan dan Syamsuddin Razak Nasution dari Sumatera. Guru-guru lainnya adalah Ali Mathar, Haji Ibrahim dan Haji Abdul Mannan, ketiganya adalah putra Rappang sendiri. Semua biaya pendidikan, termasuk gaji guru ditanggung oleh Haji Zaini. Bahkan untuk keperluan itu, Haji Zaini telah menyisihkan 40 hektar tanah dan sawahnya serta 12 petak rumah sewanya.

Pada tahun 1929, status Muhammadiyah Ranting Rappang berubah menjadi Muhammadiyah Cabang Rappang. Dari situlah, Pengurus Muhammadiyah Cabang Rappang semakin meluaskan wilayah geraknya. Dalam upaya ini, Haji Zaini sendiri yang langsung turun ke lapangan dalam menyiarkan paham Islam Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat Rappang dan sekitarnya. Karena sulitnya sarana transportasi, Haji Zaini tidak segan-segan menggunakan kuda sebagai kendaraannya, bahkan ia pun rela mendatangi daerah yang ingin dikunjunginya dengan berjalan kaki.

Hasil kerja keras yang dilakukan oleh Haji Zaini membuahkan hasil. Masih di tahun 1929, Haji Zaini berhasil mendirikan Muhammadiyah Ranting Parepare, dibawah pimpinan Haji Bakoko, yang juga berprofesi sebagai pedagang. Ia juga berhasil mendirikan Muhammadiyah Ranting Mandar dan Muhammadiyah Ranting Wonomuiyo. Muhammadiyah Ranting Mandar dipimpin oleh Haji Abdul Rahim dan Haji Harun, keduanya adalah ulama asli orang Mandar. Pada tahun 1930, pe-

ngurus Muhammadiyah Cabang Rappang berhasil pula membentuk Muhammadiyah Ranting Pinrang, yang dipimpin oleh Ambo Saleng dan Wak Daude. Pada tahun yang sama, berdiri pula Muhammadiyah Ranting Jampue, yang dipimpin oleh Haji Haruna, seorang hartawan dan bangsawan di daerah pesisir.

Muhammadiyah di Pinrang¹³

Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Pinrang mulai masuk dan berkembang pada tahun 1928 yaitu kurang lebih dua tahun setelah masuknya Muhammadiyah di Makassar. Perihal masuknya Muhammadiyah di Bumi Lasinrang ini terdapat dua versi pendapat, versi pertama berpendapat bahwa masuknya Muhammadiyah pertama melalui pesisir pantai bagian selatan Pinrang yaitu Desa Jampue yang diperkenalkan oleh *Muhammad Suud Rais*, seorang guru dan pemain bola dari Jawa. Muhammad Suud Rais di samping mengajar sepak bola, juga memperkenalkan Muhammadiyah yang pada akhirnya masyarakat mulai tertarik pada gerakan Muhammadiyah ini, hingga pada tahun 1928 dilaksanakan kongres pertama pendirian Muhammadiyah di Jampue.

Ada pun pengurus/pendiri pada awal masuknya Muhammadiyah di Jampue sebanyak 9 orang, yaitu *Abd Rahim, H.P. Haruna, Abd Hafid, H. Abbas, H. Abu,*

13 Diresumekan dari draf Buku “Matahari Bersinar di Bumi Lasinrang”, ditulis oleh Tim Penulisan Sejarah Muhammadiyah Pinrang.

P. Jabi, H. Saleha, Wa' Kanja, dan satu orang lagi yang dilupa oleh informan. Mereka inilah yang memulai membangun dan mengembangkan Muhammadiyah di Jampue.¹⁴ Selanjutnya, pengembangan Muhammadiyah di daerah ini dibantu oleh guru-guru dari Jawa dan Sumatera. Hal ini sesuai dengan keadaan garis pantai yang sangat mudah di jangkau melalui transportasi laut pada saat itu, sehingga berkembang dan terbentuklah group (ranting) yang jauh dari Rappang,

Versi ke dua berpendapat bahwa Muhammadiyah mulai masuk pertama kali di Pinrang bagian utara, tepatnya di Bungi dengan alasan bahwa kedatangan Muhammadiyah dibawa langsung oleh masyarakat Rappang pada waktu itu. Ini terbukti dengan banyaknya warga dan keturunan masyarakat Rappang yang berdomisili di Desa Bungi, Lembang. Dugaan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa orang-orang Rappang inilah yang lebih dahulu menerima Muhammadiyah di Rappang, sebelum masyarakat Pinrang.

Dari kedua versi masuknya Muhammadiyah di Kabupaten Pinrang dapat diinterpretasi sebagai berikut :

1. Muhammadiyah masuk di Jampue pada tahun 1928 dibawah oleh warga atau kader Muhammadiyah dari Jawa dan membentuk lembaga Muhammadiyah secara resmi, berupa Pengurus Muhammadiyah atau Grup Muhammadiyah Jampue.

14 Abd Hamid Rahim (Ambo Hamka Umur ± 100 Thn) warga Muhammadiyah Jampue, Tim (Drs. Zubair Zaenal) telah melakukan wawancara untuk kedua kali pada tanggal 1 Maret 2015 di rumah (kediaman) Ambo Hamka di Jalan Langnga Ir. 1 Pinrang.

2. Muhammadiyah masuk di Desa Bungi oleh warga dan simpatisan Muhammadiyah dari Rappang, namun tidak membentuk lembaga berupa kepengurusan atau Group Muhammadiyah,

Kehadiran persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Pinrang cukup memberi warna dan pengaruh di tengah-tengah masyarakat yang cenderung tradisional-konservatif dan fanatik terhadap tokoh agama (ulama). Menurut data dan dokumen yang ada, setelah masuknya Persyarikatan Muhammadiyah di Bumi Lasinrang melalui Jampue, kemudian dikembangkan oleh *Sayyid Husain* dari Takkalasi Barru di Kota Pinrang,¹⁵ maka berdirilah Muhammadiyah di Kota Pinrang. Hal ini merupakan usaha atau kerja keras yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah pada saat itu. Di antara tokoh-tokoh tersebut antara lain *H. Abdul Fattah, Wa'Daudu, Ahmad, Abu (Dari Jampue), Jamain, La Kadang, Karto, La Tamping, dan H.Abd Samad*. Tokoh-tokoh ini didukung oleh tokoh masyarakat yang bernama Haji Nure dan pejabat setempat bernama H. A. Calo.

Usaha, komunikasi dan kerja keras yang dilakukan ternyata tidak mudah menuai hasil. Usaha ini bahkan mendapat hambatan dan tantangan dari seorang pen-

15 Tulisan tangan Wa'Daudu yang kemudian dimasukkan dalam Dokumen Pidato Milad Muhammadiyah ke 82 Tgl 30 Zulhijjah 1412 H/1 Juli 1992 M. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pinrang Periode 1990/1995, oleh Drs. H. Abd Hamid Matong, Sekretaris Drs M Rusydi Rauf. Dan dokumen Majelis Pustaka PDM Pinrang, Ketua Muhiddin Chalid, BA tgl 17 Ramadan 1414.H/ 28 Februari 1994.M.

ghulu Syara' (*Kadhi*) pada saat itu yang bernama *Haji Abdul Majid*. Akan tetapi, hambatan dan tantangan tersebut tidak dapat mengurungkan usaha dan kerja keras yang dilakukan para tokoh-tokoh Muhammadiyah pada saat itu. Hal ini terbukti bahwa persyarikatan Muhammadiyah tetap terbentuk pada tahun 1929 dengan nama Muhammadiyah Grup Pinrang.¹⁶

Muhammadiyah Group Pinrang Periode I, tahun 1929 – 1932. Pada periode ini, Muhammadiyah Pinrang masih merupakan ranting yang pada masa itu menggunakan istilah grup. Jadi, Muhammadiyah Grup Pinrang merupakan bagian dari cabang Rappang. Pelopornya terdiri dari Sayid Husain (penasihat), H. Abdul Fattah (Ketua I), Wa'Daudu (Ketua II), Ahmad Ambo Saleng (Penulis I), H. Abu (Penulis II), Jamain (Bendahara), dan pembantu-pembantu yang terdiri dari; Lakadang, Karto, Latamping, dan H. Abd Samad. Peresmian dan pengesahan Muhammadiyah Grup Pinrang beserta pengurusnya dilakukan oleh wakil PP Muhammadiyah, Bapak H.M. Yunus Anis pada Tahun 1929. Amal Usaha muhammadiyah yang berdiri pada periode ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM). Madrasah ini berdiri pada tahun 1930 dan dalam perkembangannya, madrasah ini berubah menjadi SD Muhammadiyah I.

16 Muhammadiyah Group Pinrang (Ranting Pinrang, Jampue, dan Bungi)

Muhammadiyah di Sengkang-Wajo ¹⁷

Kehadiran Muhammadiyah di Sengkang berawal dari sebuah pertemuan dalam bentuk pengajian yang dilakukan secara kultural. Waktu itu sekitar tahun 1927, melalui suatu kelompok bernama Kongsi Tujuh di Sengkang. Kongsi Tujuh itu beranggotakan guru dan pedagang, mereka diantaranya Abd. Latif Cenning, Abd. Muttalib, Haebah (guru HIS), dan Yohannes asal NTB (guru HIS).

Kongsi Tujuh ini sering mengadakan pertemuan di Toko Ambo Kemme yang dilaksanakan setiap hari Jumat dengan dipelopori oleh H. Makka. Toko itu sendiri bernama Toko Melati, dan Ambo Kemme sang pemilik toko adalah seorang pedagang dan perantau. Ia kadang merantau sampai di Makassar.

Melalui Ambo Kemme itulah pengajian sering diisi oleh Masyur Al Yamany (seorang keturunan Arab) yang juga Tokoh Muhammadiyah di Ujung Pandang. Mansyur Al Yamany datang ke Sengkang atas undangan Abd. Latif Cenning, seorang pedagang di Sengkang yang juga merupakan langganannya.

Selain Mansyur Al Yamani pengajian kadang pula diisi oleh K.H. Abdullah dan R. Himam (orang Jawa). Sehingga dari usaha pengajian itulah kemudian diperoleh faham Muhammadiyah yang selanjutnya menjadi

17 Diresumekan dari Buku “*Sesudah Makassar Kemudian Sengkang (Satu Fakta Berdirinya Muhammadiyah Sengkang)*”, ditulis oleh Abd. Rahim Toge, 1988. Diterbitkan oleh Majelis Pustaka PWM Sulsel.

pendorong timbulnya hasrat untuk mendirikan organisasinya di kemudian hari.

Sejarah berdirinya Muhammadiyah Sengkang erat hubungannya dengan pemerintah Wajo. Pada waktu itu pemerintah Wajo terdiri dari Selfbestuur dan Pemerintah Beanda.

Selfbetuur (pemerintah otonom) dipimpin oleh seorang raja bergelar Arung Matowa. Pada waktu itu Arung Matowa Wajo bernama Andi Oddang. Seorang Arung Matowa dibantu beberapa anggota adat dan beberapa Arung Lili. Sesungguhnya jiwa agama yang bersarang di dada para pemerintah otonom sangat tebal. Tetapi beraliran *Ahlusunna Wal Jamaah* menurut Mashab Syafiiyyah.

Pemerintah Belanda dipimpin oleh seorang Contoreleuur berkedudukan di Bone. Pemerintah penjajah Belanda ini adalah penguasa yang harus di taati oleh pemerintah otonom yang dipimpin oleh seorang raja yang didewakan.

Baik pemerintah otonom maupun pemerintah penjajah mempunyai sikap keras terhadap Nasionalisme agama. Oleh Mansyur Al Yamany, K.H. Abdullah dan R. Himan ketiganya adalah tokoh agama Islam yang tahu persis pentingnya kebebasan bagi seorang hamba, maka tidak disangsikan lagi bahwa isi dakwanya di Toko Ambo Kemme kepada anggota Kongsi Tujuh akan bernada Nasionalisme Agama.

Hal inipun akhirnya terdengar oleh Contoreleuur, dan Ambo Kemme mendapat panggilan untuk menghadap pada Contoreleuur, tetapi karena Ambo

Kemme dianggap sudah uzur dan diyakini tidak akan memiliki pengaruh besar, Contorleuur meminta kedua anaknya, Abd. Latif dan Abd.Mutalib yang datang untuk menghadap. Dari kedua anak Ambo Kemme inilah, Contorleuur mulai merasa was-was dengan gerakan mereka. Contorleuur mengambil siasat, kedua pemuda itu dijanji jabatan akan diangkat menjadi Arung Loa dan Tancung (Tanah Sitola) agar keduanya tidak melanjutkan gerakan nasional dan gerakan agamanya. Tetapi kedua pemuda itu tidak terpengaruh oleh janji itu. Pemerintah pun dengan segala kaki tangannya tidak berhenti mengikuti langkah-langkah kedua pemuda itu bersama dengan kawan-kawannya.

Bukan saja Pemerintah yang senantiasa mengamati anggota Kongsi Tujuh. Tetapi juga oknum lain, baik ia penganut satu aliran Islam yang bukan Muhammadiyah, maupun ia sebagai pengusaha lain dari Ambo Kemme. Rupanya ini kemudian menjadi kendala bagi tiga tokoh Muhammadiyah Makassar dalam berdakwah di Sengkang.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa Abd.Latif dan Abd.Mutalib sempat dijanji jabatan yang kemudian mereka menolaknya. Hal itu memperbesar kecurigaan pihak Pemerintah. Tetapi anggota Kongsi Tujuh tetap pada istiqomahnya yaitu Islam akan tegak melalui Muhammadiyah. Mereka pun mengambil langkah dengan melakukan pendekatan silaturahmi baik kepada Pemerintah, dan kelompok muslim lainnya.

Kehadiran tiga tokoh Muhammadiyah dari Makassar (Cabang Makassar) yakni Mansyur Al Yamany, K.H.

Abdullah, dan Raden Himam adalah pengaruh besar dalam membuminya ajaran Islam menurut paham Muhammadiyah di Sengkang. Selain dengan kepeloporan H. Makka (Kadhi Wajo) yang merupakan seorang Ulama yang juga banyak menanamkan faham Islam di rumah Ambo kemme melalui pengajiannya tiap hari Jum'at kepada anggota Kongsi Tujuh. Termasuk juga dengan jasa Ambo Kemme sebagai seorang pedagang besar di Sengkang yang dengan ikhlas menyediakan tokonya untuk tempat pertemuan dan pengajian.

Muhammadiyah berdiri di Sengkang tidaklah dengan waktu yang singkat, ia hadir terlebih dahulu secara kultural dan butuh waktu bertahun-tahun untuk merintisnya sebagai sebuah organisasi bernama Muhammadiyah. Toko Ambo Kemme tentu menjadi bukti tempat penggarapan muslim Sengkang untuk ditempah mental, iman dan keyakinannya agar mereka faham dan cinta agama Islam menurut ajaran Muhammadiyah. Sepanjang usaha dan perjuangan mereka, ejekan dan cercaan bahkan telah menjadi hal yang lumrah dilemparkan oleh berbagai pihak kepada mereka.

Dengan segala usaha, kesabaran dan perjuangan yang tanpa henti, dan dengan dana, daya serta ilmunya secara ikhlas memantapkan Islam menurut ajaran Muhammadiyah, maka datanglah rahmat Allah SWT. Muhammadiyah grup Sengkang dapat didirikan pada tahun 1927.

Muslim Sengkang akhirnya telah hadir Muhammadiyah. Dengan kehadiran ini, menjadikan Muhammadiyah juga dapat dengan cepat mengalami perkem-

bangun. Satu tahun pasca resmi didirikan di Sengkang, ia telah dapat membangun sekolah pertama tepatnya pada 16 Juli 1928. Bukan itu saja, pada tahun itu juga diadakan kursus tablig tanpa guru. Kemudian berlanjut pada November 1928, diadakan penjualan buku keluaran Taman Pustaka Muhammadiyah di pasar malam Sengkang. Muhammadiyah semakin berkembang, bahkan dengan pengaruhnya pada tahun itu pula melalui kepeloporan Muhammadiyah, sholat Id untuk pertama kalinya juga telah diadakan di lapangan.

Tahun 1929 pengurus HW pun memberi bantuan kepada bagian pendidikan Muhammadiyah. Tanggal 21 Januari 1929 Muhammadiyah Sengkang telah mengirim utusan ke Kongres ke 18 di Solo. Utusan-utusnya ialah Abd. Latif, Dg. Mattata, dan M. Yahya. Pada 25 Pebruari 1929 Muhammadiyah telah mengangkat pengurus zakat fitrah sehingga pada 11 Maret 1929 telah dapat dikumpulkan zakat dari 446 orang wajib zakat.

Karena perkembangan yang signifikan itu, Konferensi Daerah I Muhammadiyah Sulsel diterima oleh Muhammadiyah Sengkang pada 20 Mei 1929. Sesuai dengan kondisi dan situasinya konferensi itu telah dapat mengumpulkan umat secara besar-besaran dan mengagumkan. Tidak heran kalau sudah konferensi itu anggota Muhammadiyah di Sengkang semakin bertambah pesat. Hingga pada bulan pebruari 1930 mulailah diadakan sholat tarwih sendiri oleh Muhammadiyah Sengkang yang dihadiri rata-rata 15 orang.

Satu hal yang sangat menarik ialah pada tanggal

15 pebruari 1930 diadakan permusyawaratan oleh Muhammadiyah dan semua bagiannya. La Bandolo dari PSI, Saiyyid Safie dari Pengurus Pendiri Mesjid Sengkang, H. Asad dan beberapa orang ternama turut serta dalam hajatan tersebut.

Sejak April 1930 sampai dengan 15 Juli 1930 Muhammadiyah Sengkang mengusahakan berdirinya sebuah sekolah dan lantai dua dari gedung sekolah itu dijadikan mushollah. Tanah tempat berdirinya berukuran 50 x 50 m diberikan oleh Arummatowa (Andi Oddang) terletak di kampung Ladduppa Sengkang. Perhitungan anggaran pembangunan sekolah itu Rp 5.000.00 (pada waktu itu harga beras dua setengah sen = satu rupiah, seratus sen).

Grup Belawa telah mendapat kiriman guru dari Jawa pada 17 Maret 1931 walaupun sekolahnya telah beku. Tetapi kemudian besar kembali. Tanggal 23 1931 telah tiba pengganti Sanyono guru Voksschool Batu-batu dari Yokyakarta.

Akhir-akhir tahun ini yaitu 25 November 1931 Con-torleuur Van Wajo meminta lapor bulanan sekolah Muhammadiyah Sengkang. Dan ini suatu pertanda Pemerintah Belanda pun telah mengadakan perhatian kepada usaha Muhammadiyah Sengkang.

Dalam tempo lima tahun saja muhammadiyah sudah memperlihatkan perubahan banyak di Kota Sengkang dan luarnya. Sekolah, Ranting Muhammadiyah, bagian Aisiyyah, Pandu HizbunWathan, kegitan Tablig, sholat Id, tarwih, zakat, qur'ban, dan sebagainya adalah amalan Muhammadiyah yang jelas dapat dilihat.

Muhammadiyah di Soppeng¹⁸

Sekitar tahun 1927, tujuh orang pengusaha di Sengkang membentuk satu kelompok yang diberi nama “Kongsi Tujuh”. Kongsi Tujuh inilah yang mengadakan pengajian setiap hari Jumat bertempat di rumah Ambo Kemme. Ustaznya ialah H. Makka, kadhi Wajo. Salah seorang anggota Kongsi Tujuh ialah Abd. Latif Cenning. Abd. Latif Cenning ialah yang sering mendatangkan tokoh Muhammadiyah seperti Mansyur Al Yamani dari Ujung Pandang. Mansyur Al Yamani mempunyai hubungan dagang dengan Abd. Latif Cenning. Selain dari itu sering datang pula KH. Abdullah dan Raden Himan. Keduanya tokoh Muhammadiyah dari Makassar.

Tiga tokoh Muhammadiyah di atas inilah yang berhasil mengajak beberapa orang Sengkang sehingga dapat mereka membentuk Grup Muhammadiyah Sengkang. Grup inilah kemudian yang mengembangkan sayapnya, ke Soppeng, Sidenreng Rappang, Palopo, dan Siwa. Di Soppeng berhasil didirikan grup Batu-batu, grup Watan Soppeng, grup Lajjoa, grup Tajjucu, dan Tottong.

Di Batu-batu, seorang pengusaha bernama La Saenong (Ayah La Unta) mempunyai banyak keluarga di Sengkang. Salah seorang keluarganya juga aktif pada

18 Diresumekan dari Buku “Muhammadiyah: Organisasi Dakwah yang Pertama di Soppeng” (1989), ditulis oleh Drs. H. Abd. Rahim Toge, dengan editor Drs. Muhammad Yamin Data. Penerbit: Majelis Pustaka PWM Sulsel 1985-1990.

pengajian Kongsi Tujuh. Dari pengetahuannya tentang Muhammadiyah yang didapatnya di Sengkang itulah, La Saenong yang berpengaruh di Desa Limpo Majang, Batu-batu, berusaha mendirikan Muhammadiyah di tempat itu. Pada tahun 1930, ia telah dapat mendirikan Muhammadiyah grup Batu-batu.

Berdirinya Muhammadiyah grup Batu-batu, ditandai dengan berdirinya sekolah Muhammadiyah disitu. Salah seorang guru sekolah yaitu Sanyoto. Pada 1 Januari 1931 Muhammadiyah batu-batu telah mengelola sekolahnya sendiri. Dan pada 23 Maret 1931 Sanyoto guru *Volkschool* Batu-batu telah diganti oleh seorang guru yang lain dari Yogyakarta. Diantara muridnya ialah H. Abd. Malik, dan Sinring Ahmad.

Proses berdirinya Muhammadiyah di Watan Soppeng tak jauh berbeda dengan grup Batu-batu. Di Soppeng terkenal Andi Juranga, seorang bangsawan Sengkang yang mempunyai darah Soppeng, ia merupakan seorang muballig Muhammadiyah di Sengkang. Disamping itu, La Saenong dari Batu-batu, yang juga merupakan salah seorang aparat Datu Soppeng senantiasa berusaha pula untuk mendirikan Muhammadiyah di Watang Soppeng.

Usaha tersebut mendapat sambutan baik dari La Dapi dan kawan-kawannya. Dengan demikian maka diadakanlah satu Tabligh Akbar bertempat di Watang Soppeng pada tahun 1933, yang juga merupakan awal berdirinya Muhammadiyah grup Watang Soppeng. Grup ini diresmikan oleh K.H Abdullah Konsul Muhammadiyah dari Makassar. Selain La Dapi, nama-nama lain

yang turut menjadi perintis berdirinya Muhammadiyah di Watang Soppeng, antara lain; La Hati Uwwa Subaedah, H. Reso, Ambo Pipa, La Budu, La Haming, Lambere, H. Salama, H. Sitti Ama, Lantana, H. Kampe, H. Saebe. Tokoh-tokoh inilah sekaligus menjadi muballig Muhammadiyah diwaktu itu. Pada tahun 1934, berdirilah sekolah Muhammadiyah bertempat di rumah Uwak Subaedah, yang berlokasi di sebelah barat kuburan Jerae, sekarang telah dipugar oleh pemerintah.

Sementara itu, di Lajjoa Muhammadiyah pun telah terbentuk. Sebenarnya paham Muhammadiyah telah memasuki Lajjoa pada tahun 1933, dibawa oleh seorang Arab bernama S. Husain. Ia datang dari Tanete Barru memberi pengajian di Lajjoa. Terlihatlah di dalam pengajian itu nama-nama seperti La Emang, H. Jafar, Tibyah, H. Ahmad Dg. Mabbabali, H. Nawung (H. Abd. Latif). Orang-orang inilah berusaha mendirikan Muhammadiyah Lajjoa. Maka diresmikanlah Muhammadiyah grup Lajjoa bersama dengan Muhammadiyah grup Watan Soppeng di Pasar Watang Soppeng oleh K. H. Abdullah pada tahun 1933. Sesudah itu silih berganti menjadi ketua H. Ahmad dengan H. Nawung. Satu hal yang mesti dicatat, ialah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang tergabung di dalam Kelaskaran GAPIS, adalah putra Muhammadiyah Lajjoa, antara lain M. Idris selaku Komandan kelaskaran, yang sebelumnya adalah anggota Pandu Wizbul Wathan.

Grup Muhammadiyah juga mulai terbentuk di Tajuncu, sekitar tahun 1937. Pengurusnya antara lain; Andi Palle (Ketua), La Majja (Sekretaris), Ambo Barli-

an (Bendahara). Mesjid Tajuncu yang letaknya sebelah utara masjid raya Tajuncu sekarang, dibikinlah oleh Muhammadiyah. Pada tahun 1939, telah diberi tugas mengajar di sekolah Muhammadiyah Tajuncu. Kepala sekolah waktu itu ialah Muh. Amin Latif.

Pada tahun 1939, Umar Hasan dan kawan-kawannya mendirikan grup Tottong Turungeng Lappa E. Mula-mula Umar Hasan bersama dengan Lebba membuka sekolah Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Tamatan sekolah itulah yang dimasukkan kedalam sekolah pertama Muhammadiyah. Lama pendidikannya tiga tahun. Izin mendirikan sekolah diperoleh dari Residen Selebes, enam bulan setelah permohonan diajukan. Setelah pemerintah Jepang berkuasa sekolah itu ditutup. La Huseng seorang pengurus Muhammadiyah Batu-batu diangkat menjadi ketua pada grup Tottong. Ia beristri di Turungeng Lappa E. Ambo Lebba Wakil Kepala Kampung Turungeng Lappa E menjadi Wakil Ketua, La Mallarangeng sekretaris, dan La baere anggota. Menurut Umar Hasan, murid-murid SD Muhammadiyah Tottong sempat dibawa ke Sengkang pada Konferensi Muhammadiyah ke-16 Sengkang pada tahun 1941.

Muhammadiyah di Palopo ¹⁹

Andi Djuranga, *Vice Vorsitter* Muhammadiyah Ranting Sengkang adalah orang yang berjasa dalam mengenalkan Muhammadiyah di daerah Palopo dan

19 Diolah dari Darmawijaya (2012:182-185).

sekitarnya. Andi Djuranga sendiri adalah seorang bangsawan Luwu yang bermukim di Sengkang.

Sebagai aktivis Muhammadiyah yang aktif sebelumnya di Sengkang, Andi Djuranga memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam ala Muhammadiyah di tanah leluhurnya. Dengan tekad kuat itulah ia mulai mengembangkan Muhammadiyah, dengan dibantu oleh sahabatnya yang bernama Abu. Dalam perkembangannya paham Muhammadiyah dengan cepat mendapatkan simpati di Palopo khususnya dari kalangan para pedagang, termasuk juga beberapa pedagang keturunan Arab yang ada di Palopo pada waktu itu.

Adapun para pedagang yang bergabung itu adalah La Tang, Sayyid Muhammad serta Sayyid Mahmud, dan melalui kepeloporan ketiga pedagang itu pula, akhirnya pada tahun 1928, mereka berhasil mendirikan Muhammadiyah Ranting Palopo dan menjadikan La Tang sebagai ketuanya.

Dalam kepengurusan tersebut sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa aktivis generasi awal di Palopo ini turut pula beberapa orang keturunan Arab. Mereka adalah Sayyid Mahmud, Sayyid Abdullah, Sayyid Muhammad. Disamping itu, kepengurusan Muhammadiyah Ranting Palopo diperkuat pula oleh beberapa orang bangsawan, seperti Andi Taha dan Andi harun.

Setelah secara resmi berdiri, Muhammadiyah Ranting Palopo terus aktif dalam melebarkan dakwah dan gerakannya, hingga memasuki tahun kedua mereka

berhasil melengkapi organisasinya dengan membentuk bagian Aisyiyah dan Hisbul Wathan, Siti Fatimah adalah ketua petama Aisyiyah. Sementara Hisbul Wathan dipimpin oleh Muhsen dan dibantu oleh Sulaeman, Umar, Landau, Umar Abdullah dan Andi Kasim.

Muhammadiyah Ranting Palopo memulai kegiatannya dengan tablig pada setiap malam jumat. Usaha lainnya adalah mendirikan sekolah dengan cara bergotong royong. Setiap anggota Muhammadiyah dan Aisyiyah waktu itu diminta untuk memberikan sumbangan sekurang-kurangnya satu lembar seng, dan setiap Pemuda Muhammadiyah, termasuk calon murid diminta menyumbang lima buah batu-bata. Pada tahun 1929, Muhammadiyah Ranting Palopo berubah status menjadi Muhammadiyah Cabang Palopo.

Pengurus Muhammadiyah Cabang Palopo, yang sebagian besarnya adalah para pedagang terus berupaya mengembangkan Muhammadiyah di daerah Palopo dan sekitarnya dengan berbagai usaha. Hingga berkat usaha dan kerja keras itulah kemudian membuahkan hasil, mereka berhasil membentuk Ranting-ranting baru Muhammadiyah, diataranya Ranting Cappaosolo, Ranting Malili, Ranting Kolaka, Ranting Larompong, dan Ranting Masamba. Diantara Ranting-ranting yang ada ini, Muhammadiyah Ranting Cappasolo merupakan ranting yang paling menonjol, ranting ini boleh dikata mapan secara keuangan. Ranting Cappasolo memiliki perahu dagang sendiri yang digunakan untuk mengangkut barang dagangan yang berupa hasil hutan.

Pada tahun 1930, Muhammadiyah Cabang Palopo juga telah dapat membuka sekolah dengan menggunakan gedung yang dibangun secara gotong-royong. Sekolah yang didirikan itu dibina oleh Muhsin, seorang Ustad yang didatangkan langsung dari Yogyakarta. Muhsin dibantu oleh Mahmud dan Muhammad Nur, keduanya adalah guru *Hollands Inlansce School* (HIS) milik pemerintah. Kemudian dalam waktu yang tidak lama, guru bertambah lagi, tepatnya ketika Muhammadiyah Cabang Palopo kembali mendatangkan dua guru bantu yang baru, yaitu Muhammad Bakri dan Muaz Ali. Selain mengajar, guru-guru ini juga berperan besar dalam membina para pemuda.

Pada tahun 1931, Muhammadiyah Cabang Palopo kembali menambah kelengkapan organisasinya dengan membentuk Pemuda Muhammadiyah Cabang Palopo. Selain itu, gerakan Muhammadiyah Cabang Palopo juga semakin meluas sampai di daerah Tanah Toraja, yaitu Makale dan Rante Pao. Oleh Sayid Mahmud sebagai tokoh Muhammadiyah Cabang Palopo yang berjasa dalam mengembangkan Muhammadiyah hingga sampai di daerah Tana Toraja itu.

Muhammadiyah di Tana Toraja ²⁰

Muhammadiyah masuk di Tana Toraja dibawah oleh S. Machmud, seorang pedagang dan guru keturunan Arab yang juga merupakan anggota Muhammad-

20 Diolah dari buku “H.M. Yunus Kadir Membangun Muhammadiyah”, Idwar Anwar (2009).

iyah Cabang Palopo. Muhammadiyah di Palopo pada waktu itu memang sementara dalam perkembangannya yang pesat dalam membua ranting-ranting baru, dan Tana Toraja adalah salah satu daerah yang menjadi sasaran gerakannya dengan membentuk Muhammadiyah Groep Makale dan Rantepao.

S. Machmud datang ke Tana Toraja sekitar tahun 1935, bersama Abdul Gani (Wa'na/Wa'ganing) memang dengan niatan untuk mengembangkan Muhammadiyah. Tidak berselang lama setelah kedatangan keduanya, Muhammadiyah pun terbentuk di Tana Toraja pada tahun itu pula. Adapun generasi pertama yang menjadi pelopor terbentuk dan berdirinya Muhammadiyah di Tana Toraja adalah S. Machmud (Guru Mude) sebagai ketua. Dia dibantu oleh Abd. Gani (Wa'Ganing), Balendeng Makkawaru, Paibing Makkawaru, Ladia, Musa, Muhammad, Makkalu, H. Landicing, Mattaiyya (M. Thaiyyeb), Canno', H. Dara', Ambo Nandi, Ismail (Samaila), dan Andi Achmad.

Pada mulanya, organisasi Muhammadiyah Groep Makale ini masih didominasi oleh para pedagang yang berasal dari luar Tana Toraja. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya masyarakat Tana Toraja yang memeluk agama Islam (minoritas). Di samping itu, pengaruh paham Aluk Todolo dan agama Kristen ketika itu juga masih sangat kuat, sehingga penyebaran paham Muhammadiyah juga masih mengalami kendala.

Kendati demikian, semangat dari pada anggota Muhammadiyah Groep Makale tidaklah surut dalam mengembangkan Muhammadiyah dan menyebarkan

paham kebebasan dari penjajah. Hal inilah yang menjadikan Muhammadiyah cepat tersosialisasi di Tana Toraja dan semakin membangkitkan semangat rakyat rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah.

Pada masa penjajahan Belanda, tidak terkecuali di Tana Toraja, pendidikan merupakan hal yang sangat sulit didapatkan oleh masyarakat kelas bawah. Selain itu, dominasi paham penjajahan juga semakin menggunkung pemikiran rakyat, sehingga tidak sedikit pun muncul pemikiran untuk merdeka.

Karena itulah, keberadaan Muhammadiyah di Tana Toraja terus berusaha membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan, utamanya melalui pendidikan. Untuk memenuhi maksud tersebut, Muhammadiyah kemudian untuk mengiatkan pembinaan keagamaan dan pendidikan melalui kegiatan pengajian-pengajian. Bahkan sekitar setahun setelah berdirinya, Muhammadiyah pun mampu mendirikan Madrasah di Rantepao pada tahun 1936 dan pada tahun 1937 dipindahkan di Makale.

Melalui pengajian-pengajian dan sekolah inilah, paham Muhammadiyah dan kemerdekaan dan diajarkan kepada para siswa. Bukan hanya itu, berbagai kegiatan pun dilakukan untuk membangun persatuan dikalangan masyarakat diharapkan nantinya mampu membangun kekuatan untuk melakukan perlawanan.

Pada tahun 1942, Belanda diusir dari Indonesia oleh Jepang, sehingga penjajahan diambil alih oleh Jepang, hal ini juga secara otomatis membuat banyak perubahan, tidak terkecuali pada sistem pendidikan yang

dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda. Meski tidak terlalu signifikan, namun sedikit memberi ruang bagi sistem pendidikan yang dibangun oleh Muhammadiyah.

Tahun 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Dari kemerdekaan ini ruang Muhammadiyah di Tana Toraja menjadi semakin terbuka, sesuatu yang cukup berharga ditorehkan, bukan hanya bagi kepentingan umat Islam, namun juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Kendati Tana Toraja merupakan daerah yang mayoritas penduduknya menganut paham Aluk Tudolo dan agama Kristen, namun keberadaan Muhammadiyah telah mampu menunjukkan jati diri dan komitmen perjuangannya, utamanya dalam bidang pengembangan pendidikan.

Dalam membangun komitmen tersebut, semangat Muhammadiyah di Tana Toraja tak pernah surut. Pada masa revolusi kemerdekaan misalnya, Muhammadiyah memaksakan diri untuk kembali membuka sekolah-sekolah Muhammadiyah yang di tutup oleh Jepang dan Belanda. Oleh Wa' Ganing dan Made Ali, SMP Muhammadiyah di buka kembali pada tahun 1948. Berturut-turut di buka program PGA 4 tahun (1956). Selama setahun beberapa sekolah Muhammadiyah selama setahun beberapa sekolah muhammadiyah ditutup akibat peristiwa 1958 (konflik agama). Pada tahun 1959, SMP Muhammadiyah di buka kembali bersama program PGA 4 tahun (1960). Pada tahun 1970, Muhammadiyah membuka program PGA 6 tahun. Dan di tahun 1979-1984 di buka pula SMA Muhammadiyah

(SMA ini, sejak 1984 dipindahkan ke To'kaluku berhasil bertahan hingga tahun 1997).

Meski begitu sulit bertahan hingga kini, namun Sekolah-sekolah yang dibangun oleh Muhammadiyah tersebut telah mengoreksikan tinta emas pada perjalanan sejarah pendidikan di Tana Toraja. Cukup banyak orang-orang sukses bahkan hingga tingkat nasional, yang pernah menuntut ilmu di sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut diantaranya, Prof. Dr. Beddu Amang, Prof. Dr. Badrun Sakariah, Prof. Nasri dan Prof. Noor Nasri Noor.

Mencermati kondisi riil tersebut, Muhammadiyah Tana Toraja tidaklah tinggal diam. Berbagai usaha pembenahan terus dilakukan untuk kembali membangun komitmen, khususnya dalam hal pendidikan. Karenanya Muhammadiyah Tana Toraja tetap berusaha mendirikan kembali beberapa sekolah diantaranya 8 buah Taman Kanak-kanak, 3 buah SMP, 1 Aliyah dan 1 Pondok Pesantren.

Demikian pula dengan Sekretariat semakin lama dirasakan semakin tidak kondusif. Karenanya, setelah beberapa tahun Muhammadiyah Tana Toraja Berkantor di Mesjid Raya Makale, hingga ditahun 1980, setelah Mesjid Raya Makale terbakar, Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah pun dipindahkan ke Jalan Musa.

Di sekretariat yang merupakan bangunan peninggalan Belanda ini segala aktivitas Muhammadiyah digerakkan. Hingga dalam masa kepemimpinan Haji Muhammad Yunus Kadir (2000-2005 dan 2005-2010), sekretariat ini mengalami perkembangan yang signifikan dan sekarang bahkan menjadi Gedung Dakwah

Muhammadiyah cukup megah.

Muhammadiyah di Enrekang²¹

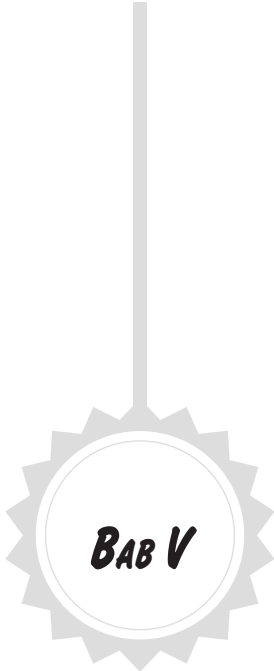
Kehadiran Muhammadiyah di daerah Enrekang dirintis oleh Muhammadiyah Cabang Rappang tepatnya ditahun 1933. Muhammadiyah Cabang Rappang yang sedang massifnya melebarkan sayapnya berhasil membentuk Muhammadiyah Ranting Enrekang.

Haji Ibrahim, Haji Ismail Ambo Sakki dan Ibrahim adalah tiga pedagang yang berjasa dalam proses pembentukan Muhammadiyah Ranting Enrekang itu. Haji Ismail Ambo Sakki sendiri adalah penghulu Enrekang, tapi setelah bergabung dengan Muhammadiyah, ia dipecat dari jabatannya sebagai kadi.

Muhammadiyah Ranting Enrekang memulai kiprah dakwah dan gerakannya dengan mengadakan tabligh-tabligh serta mendirikan amal usaha melalui lembaga pendidikan. Muhammadiyah Enrekang mendirikan sekolah Muallimin, dengan guru pembinanya adalah M. Arifin yang didatangkan dari Batusangkar, Sumatera Barat, ia dibantu oleh guru-guru yang berasal dari daerah Enrekang sendiri.

Selain itu, Muhammadiyah Ranting Enrekang juga berusaha memperluas kiprahnya dengan membantu pendirian Ranting-Ranting baru di wilayah Enrekang, diantara yang berhasil dirintis itu ialah Ranting Bantu Lamba tahun 1934 dan Muhammadiyah Ranting Kalosi tahun 1935.

21 Diolah dari Darmawijaya (2012: 189-190).



BAB V

BIOGRAFI KETUA-KETUA MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN (1931-2015)

Dalam bab IV ini akan dikemukakan biografi singkat 13 orang yang pernah menjabat Konsoel dan Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Namun, sebelumnya, perlu dijelaskan beberapa hal sebagai pengantar bab ini.

Sepanjang sejarah Muhammadiyah, numenklatur pimpinan setingkat pimpinan wilayah telah dua kali mengalami perubahan. Untuk pertama kalinya pada

tahun 1930 atau 1931, Muhammadiyah menggunakan istilah *konsoelat*, kemudian berubah menjadi daerah, dan terakhir berubah menjadi wilayah. Selama menjadi wilayah pun sudah pernah mengalami perubahan. Pada awalnya wilayah disebut Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) dan terakhir sesudah Mukhtar Muhammadiyah di Solo, istilah PMW berubah menjadi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM).

Istilah *consoel*/konsoel dalam Persyarikatan Muhammadiyah digunakan untuk menyebut pimpinan yang secara struktur organisasi berada di bawah pimpinan pusat atau sama dengan pimpinan wilayah yang berada di provinsi sekarang. Konsoel merupakan perwakilan pimpinan pusat (*hoofdbestuur*) Muhammadiyah untuk mengoordinasikan cabang-cabang dan group-group yang ada dalam wilayahnya. Istilah konsoel digunakan dalam Muhammadiyah hingga tahun 1954. Dengan demikian, di Sulawesi Selatan, Pimpinan Muhammadiyah yang terakhir disebut konsoel adalah H. Andi Sewang Daeng Muntu.

Sesudah kemerdekaan RI, Muhammadiyah mengubah nomenklatur konsul menjadi daerah yang wilayahnya sama dengan konsul. Sehubungan dengan itu, maka di Sulawesi Selatan yang ketika itu masih meliputi Sulawesi Tenggara, juga mengalami perubahan. Adapun pimpinan Muhammadiyah yang menggunakan nomenklatur pimpinan daerah adalah H. Quraisi Djailani dan H. Abdul Wahab Rajab. Sedangkan, pimpinan Muhammadiyah yang menggunakan nomenklatur pimpinan wilayah adalah KH. Muhammad Akib, KH.

Abdul Djabbar Ashiry, H. Ahmad Makkarasusu Amansjah, Drs. Muhammad Saleh Hamdani, KH. Muhammad Sanusi Maggu, KH. Djamaluddin Amien, B.A., Drs. KH. Nasruddin Razak, Drs. KH. Baharuddin Pagim, dan Dr. KH. Muhammad Alwi Uddin, M.Ag.

KH. ABDULLAH (*Consoel Moehammadijah Celebes Selatan 1931-1938*)

Abdullah lahir di Maros pada sekitar tahun 1895, ayahnya bernama Abdur Rahman dan Ibunya bernama Halimah. Kepada putranya Abdullah, Abdur Rahman menaruh harapan agar anaknya kelak dapat menjadi ulama. Oleh karena itu, Abdullah kecil diajari mengaji oleh ayahnya sendiri. Setelah bacaan Alquran dan pengetahuan dasar-dasar agamanya dirasa cukup, Abdullah remaja dikirim oleh orang tuanya belajar ke Petta Kalie di Maros.

Berbekal pengetahuan agama yang diperolehnya dari Petta Kalie Maros, Abdullah berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus untuk tinggal belajar memperdalam bahasa Arab dan ilmu agama. Di Mekah, Abdullah menetap lebih kurang sepuluh tahun. Di sana, dia belajar kepada berbagai guru. Konon, di sana dia pernah bertemu dengan Darwis yang kemudian berubah nama menjadi Ahmad Dahlan.

Setelah beberapa tahun tinggal di Mekah, Haji Abdullah kawin dengan Hajjah Fatimah yang juga berasal dari Maros. Hajjah Fatima datang ke Mekah bersama ayahnya untuk menunaikan ibadah haji. Sebagai



KH. ABDULLAH
Consoel Moehammadijah Celebes Selatan 1931-1938

seorang pedagang kaya yang sangat prihatin terhadap perkembangan Islam di daerahnya, ayah Hajjah Fati-mah mendorong dan membantu Haji Abdullah agar tetap tinggal di Mekah memperdalam pengetahuan agama hingga kelak dapat menjadi ulama dan kembali ke kampung halamannya. Harapan dan cita-cita mertuanya itulah yang membuat Haji Abdullah betah tinggal di Mekah selama lebih kurang sepuluh tahun.

Setelah bekal ilmu pengetahuan agamanya dirasakan telah memadai, pulanglah Haji Abdullah bersama isterinya ke kampung halamannya di Maros. Sekembalinya ke Maros, mertua yang sangat menyayanginya itu pun mendorongnya hijrah ke Makassar. Haji Abdullah pun membelikan rumah oleh mertuanya di Kampung Butung, dekat Masjid Kampung Butung.

Bersama isteri tercintanya, Haji Abdullah tinggal di rumah tersebut hingga akhir hayatnya. Di rumahnya itulah, Haji Abdullah mengajarkan agama Islam kepada masyarakat sehingga masyarakat pun memberinya gelar sebagai kiai. K.H. Abdullah dikabarkan aktif bersalat jamaah di masjid dan sangat rajin bersilaturahmi dengan sahabat-sahabatnya yang ada di sekitar Kampung Butung, Kampung Melayu, dan Kampung Wajo. Keaktifan Kiai Haji Abdullah mengajar, berjamaah, dan bersilaturahmi itulah sehingga dia banyak berkenalan dengan orang-orang yang telah menerima paham Muhammadiyah melalui hubungan dagang dengan orang-orang dari Jawa (Yogyakarta, Surabaya, Pekalongan, dan lain-lain).

Di antara orang yang telah menerima bahkan telah menjadi anggota Muhammadiyah yang menjadi sahabatnya ialah Mansyur Al-Yamani. Atas inisiatif Mansyur Al Yamanilah sehingga diadakan pertemuan di rumah Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro, pada malam tanggal 15 Ramadan. Pertemuan tersebut melahirkan Muhammadiyah Group Makassar yang K.H. Abdullah menjadi salah seorang *bestuur*-nya, dengan posisi *Vice Vorsitter*.

Lebih kurang satu tahun kemudian, K.H. Abdullah malah menjadi *Voorsitter* Muhammadiyah Group Makassar. Dalam masa kepemimpinannya lah Muhammadiyah Group Makassar ditingkatkan statusnya menjadi Cabang. Dalam statusnya sebagai *Vorsitter* Muhammadiyah Cabang, K.H. Abdullah sekaligus menjadi *Coordinator* Group-group yang terbentuk di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, yaitu: Labbakkang, Pangkajene, Maros, Sengkang, Limbung, Bantaeng, Belawa, Majene, Balangnipa, Mandar, Rappang, Pinrang, Palopo, kajang, Soppeng Riaja, Takkalasi, Lampoko, Ele Tanete, Tabba, Batu-batu (Soppeng), Campalagian, dan lain-lain.

Sejak terbentuknya Cabang pada tahun 1927, secara berturut-turut diadakanlah Konferensi Muhammadiyah. Pertama di Makassar tahun 1928; yang kedua di Sengkang pada tahun 1929; ketiga di Majene tahun 1930; keempat Bantaeng tahun 1930; kelima di Labbakkang tahun 1931; dan keenam di Palopo tahun 1932. Pada konferensi ke-6 inilah K.H. Abdullah terpilih menjadi konsul Muhammadiyah Celebes Selatan

yang pertama.

Menurut keputusan konferensi, K.H. Abdullah didampingi oleh Mansyur Al-Yamani selaku *vice voor-sitter* (wakil konsul) , H. Nurdin Dg Magassing selaku *secretaris*, Daeng Manja selaku *penning meester* (bendahara), Andi Sewang Daeng Muntu, Saloko Daeng Malewa, Syahadat Daeng Situju, Ali Seilalla, dan Hajjah Daeng Rampu, sebagai *commissaris* (pembantu umum).

K.H. Abdullah memegang jabatan konsoel dari konferensi ke-7 hingga konferensi ke-13, setelah Haji Andi Sewang Daeng Muntu terpilih menggantikan K.H. Abdullah pada konferensi ke-13 di Selayar, tahun 1938. Meskipun ia tidak terpilih lagi sebagai konsul, K.H. Abdullah dengan kebesaran jiwanya tetap menjadi *commissaris* konsul hingga akhir hayatnya.

K.H. Abdullah meninggal dunia bertepatan dengan serangan bom oleh serdadu sekutu terhadap kapal-kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan pada tanggal 24 April 1944 pukul 12.00 menjelang salat Zuhur.

Beberapa pesan K.H. Abdullah yang sering disampaikan dalam bahasa Bugis, dituturkan kembali oleh Drs. Muhammad Yamin Data, yaitu “*Aja muallejjai tauwe mu enre, tanrerei padammu rupa tau nawatakko menreq*” (Janganlah engkau injak orang untuk kau naik, junjunglah orang agar engkau ditarik naik). “*Ngini piarai bere jamaqna risempoangngi dalleqna pole ri Puangnge*” (Barang siapa yang memelihara salat jemaahnya, Allah memudahkan rezekinya).

HAJI ANDI SEWANG DAENG MUNTU (Consoel Moehammadiyah Celebes Selatan 1938-1957)

Andi Sewang Daeng Muntu lahir di Kampung Baru-wa, Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, pada tahun 1903. Dalam usia sekitar 6 tahun, dia mengikuti orang tuanya pindah ke Labbakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

Di Labbakkang, Daeng Muntu menyelesaikan pendidikan formalnya hingga *volksschool*. Lalu dia meneruskan pendidikan ke *vervolgschool* di Pangkajene. Setelah tamat, Daeng Muntu terpaksa merantau ke Sumatera Barat mengikuti orang tuanya yang dibuang oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pembuangan itu karena orang tuanya dituduh terlibat dalam usaha pemberontakan menentang penjajahan Belanda.

Di Sumatera Barat, Ia melanjutkan pendidikan di Sumatra Thawalib hingga tamat tingkat Tsanawiyah. Di Minangkabau, Daeng Muntu terpengaruh oleh gerakan pembaruan Islam. Namun, tidak diketahui apakah dia telah menjadi anggota Muhammadiyah sebelum pulang ke Labbakkang, ataukah dia bergabung ke dalam Muhammadiyah setelah kembali dari Minangkabau.

Sekembalinya dari Minangkabau pada awal tahun 1927, ide-ide pembaruan H.A. Sewang Dg. Muntu, demikian pula rencananya membuka sekolah, dan keinginannya mendirikan Muhammadiyah Groep Labbakkang sudah sering disampaikan kepada teman-temannya. Dalam artikelnya yang termuat dalam “Al-



HAJI ANDI SEWANG DAENG MUNTU
Consoel Moehammadijah Celebes Selatan 1938-1957

manak Muhammadiyah 1454, Hal. 170”, Daeng Muntu menyatakan bahwa pada permulaan tahun 1927, dia kerap bersoal jawab dengan sahabatnya Machmud terkait kemajuan gerakan Islam di tanah Jawa dan Makassar. Lebih lanjut, dia menyatakan:

“Akhirnya, dalam pada masa itulah penulis mendapat kemufakatan dengan saudara tersebut (Machmud, ed.) akan mendirikan sebuah sekolah Igama, lebih-lebih pula setelah kami mendapat teman dua tiga orang, termasuk almarhum S.H. Hamid. Akan tetapi, kami mufakatilah akan mendirikan perkumpulannya lebih dahulu. Kemudiannya, setelah kami mengadakan *vergadering* berkali-kali, keraslah permintaan saudara Machmud supaya perkumpulan yang didirikan itu ialah Muhammadiyah.”

Pada tanggal 9 Oktober 1927, perjuangan Daeng Muntu untuk mendirikan perkumpulan menjadi kenyataan. Dalam suatu *algemeene vergadering*, Muhammadiyah Groep Labbakkang diresmikan, dengan susunan *bestuur* sebagai berikut: Sewang Daeng Muntu sebagai *voorsitter*, Muhammad Daeng Nojeng sebagai *vice voorsitter*, Machmud Daeng Mammase sebagai *secretaris*, Haji Masyhud sebagai *penningmeester*, Baso Daeng Bombong sebagai *commissaris*, Sayid Haji Hamid sebagai *commisaris*, dan Abdurrahman Daeng Sila sebagai *commissaris*.

Berbekal pengalaman yang sebagian ia peroleh di Minangkabau, dalam waktu yang sangat singkat, Daeng Muntu berhasil mengembangkan Muhammadiyah

Labbakkang. Pada tahun 1928, Muhammadiyah Labbakkang telah berhasil membuka sebuah sekolah. Sejak didirikan hingga tahun 1934, Muhammadiyah Labbakkang telah berhasil mendatangkan empat orang guru dari Jawa (Muntu, 1354: 173).

Di bawah kepemimpinan Dang Muntu, Muhammadiyah Labbakkang berhasil pula mendorong dan memfasilitasi terbentuknya groep-groep Muhammadiyah dalam wilayah *onderafdeeling* Pangkajene lainnya, seperti Groep Pangkajene, Bonto-bonto, Groep Sigeri, dan Ujungloe. Melihat keberhasilan dan potensi yang dimiliki Daeng Muntu, Haji Abdullah selaku *Voorsitter* Muhammadiyah Cabang Makassar (hingga 1932), maupun selaku *Consul Hoofdbestuur* Muhammadiyah Celebes Selatan (mulai tahun 1931) berulang kali mengajaknya pindah ke Makassar, dengan harapan supaya Daeng Muntu dapat mendampingi dirinya. Tetapi, karena alasan pengembangan Muhammadiyah Groep Labbakkang khususnya dan Pangkajene Kepulauan pada umumnya, demikian pula usaha tambak dan pertaniannya yang tidak bisa ia tinggalkan, Daeng Muntu selalu menolak ajakan Haji Abdullah.

Harapan Haji Abdullah pada akhirnya terpenuhi juga. Dalam Konferensi Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang ke-13 di Selayar, tanggal 1—4 Januari 1938, Daeng Muntu terpilih menjadi *Consul Hoofdbestuur* Muhammadiyah Celebes Selatan. Pada saat itulah, Daeng Muntu terpaksa pindah ke Makassar. Tetapi, kali ini, ia tidak lagi mendampingi Haji Abdullah, malahan sebaliknya. K.H. Abdullahlah sebagai *commissaris*-nya.

Haji Andi Sewang Daeng Muntu sebagai *consoel*.

Daeng Muntu berperawakan besar dan berkulit sawo matang kehitam-hitaman. Darah bangsawan Makassar, perpaduan Gowa, Galesong, dan Labakkang mengalir dalam dirinya. Dia terkenal sebagai seorang orator, jago mimbar, dan singa podium yang menguasai bahasa Indonesia, bahasa Makassar, dan bahasa Bugis. Penguasaan atas ketiga bahasa tersebut sama mantapnya, bahkan ia sedikit memahami bahasa Minang.

Dia terkenal sangat rajin membaca dan menulis. Dengan penguasaan Bahasa Indonesia yang mantap, ditambah dengan bakat dan jiwa seni yang memadai, membuat Dg. Muntu mampu menuangkan ide-idenya dalam bentuk tulisan. Dia termasuk salah seorang kader yang tulisannya sering dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah. Daeng Muntu pernah menulis buku profil dan sejarah singkat perkembangan Muhammadiyah Celebes Selatan pada tahun 1941 dengan judul “Langkah dan Oesaha Kita.” Dia, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai sastrawan. Dengan menggunakan nama samaran yang merupakan singkatan namanya, HASDA, dia berhasil menulis dua buah novel, yaitu: “*Dari Makassar ke Sawah Lunto*” dan “*Si Cincin Stempel*.”

Pada zaman pendudukan Jepang, Ahmad Sewang Daeng Muntu diangkat menjadi Penasihat Pemerintah Kai-Gun (Angkatan Laut) Jepang di kota Makassar yang waktu itu disebut *San-Yo*. Selain itu, dia juga diangkat menjadi Anggota *Syukai-Gin*, semacam dewan perwa-

kilan rakyat saat itu.

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, dan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Daeng Muntu turut aktif berjuang memertahankan kemerdekaan. Pada era berkuasanya Republik Indonesia Serikat (RIS), dia adalah salah seorang di antara beberapa orang Anggota Parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) yang pro-republik dan berjuang agar Indonesia mendapatkan pengakuan dan kemerdekaan penuh dari Belanda, serta kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika Partai Masyumi dibentuk di Sulawesi Selatan pada awal tahun 1950, Daeng Muntu adalah salah seorang dari beberapa orang pengurus inti Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan. Pada Pemilu 1955, Masyumi mengantarkan Daeng Muntu duduk sebagai Anggota Parlemen Republik Indonesia. Dia menjadi anggota parlemen hingga lembaga tinggi negara itu dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960.

Selain kegiatan memimpin Muhammadiyah dan menjalankan tugas sebagai Anggota Parlemen Republik Indonesia, Daeng Muntu juga menumpahkan perhatian di bidang pendidikan. Bersama-sama dengan pemuka-pemuka Islam lainnya, dia mendirikan Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Daeng Muntu meninggal dunia di Labakkang pada tanggal 10 Mei 1968, dalam usia 65 tahun. Dia meninggalkan seorang isteri bernama Andi Hudaya Daeng Ngugi dan tiga orang anak, yaitu: Andi Patiri Daeng Matu, Andi Basse Daeng Bannang, dan dr. H. Andi

Sofyan Hasdam, Sp.S. Anaknya yang disebut terakhir pernah pula mengikuti jejak bapaknya sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dan pernah menjabat sebagai Walikota Bontang.

H. QURAI SY DJAILANI (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1957—1966)

Haji Quraisy Djailani dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 22 Februari 1920. Ia berperawakan agak tinggi dengan kulit hitam manis. Ia merupakan satu-satunya anak laki-laki dari enam orang bersaudara. Ia merupakan anak dari pasangan Djailani dan Hj. Indo Ugi. Quraisy Djailani menikah dengan Hajjah Sitti Maemunah. Dari pernikahannya itu, mereka dikarunial empat orang putera dan dua orang puteri.

Haji Quraisy Djailani menempuh pendidikan *Vervolgsschool* di Bantaeng dan tamat tahun 1933. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang *Diniyah School* Muhammadiyah Bantaeng sampai kelas tiga. Setelah itu, ia ikut Sekolah Wal-Fajri di Yogyakarta dan tamat tahun 1942. Ia juga sempat mengikuti kursus Bahasa Inggris di Wal-Fajri selama satu tahun. Pendidikan Pegawai Staf Kementerian Penerangan di Jakarta ia selesaikan pada tahun 1953.

Sekembalinya dari Yogyakarta tahun 1942, ia diangkat menjadi guru bantu pada Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Bantaeng selama tiga tahun. Ia juga sempat menjadi Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bantaeng merangkap Ketua



H. QURAI SY DJAILANI
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1957—1966)

Bagian Pengajaran dan pembantu Majelis Tablig selama empat tahun (sampai tahun 1949).

Haji Quraisy Djailani terpilih menjadi Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara pada Konferensi Muhammadiyah Sulsel ke 20, di Rappang, tahun 1957. Ketika itu, usianya baru 37 tahun. Ia menggantikan Haji Andi Sewang Daeng Muntu. Dia menjadi Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara selama dua periode hingga akhir hayatnya tahun 1966.

Pada bagian akhir kepemimpinannya di Persyarikatan Muhammadiyah, bangsa Indonesia berada dalam keadaan yang serba tidak menentu. Presiden Republik Indonesia Soekarno memberi peluang terlalu besar kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk berkuasa. Akibatnya, pada tanggal 30 September 1965, terjadi percobaan kudeta yang didalangi PKI.

Akibat dari kudeta yang gagal itu, gejolak sosial yang memaksa para pemuda dan segenap komponen bangsa yang anti komunis turun ke jalan berdemonstrasi meminta PKI dibubarkan. Gerakan ini dipelopori oleh pelajar yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Pelejar-pelajar Indonesia (KAPPI) dan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Di kemudian hari, para pelaku gerakan yang akhirnya meruntuhkan orde lama dan melahirkan orde baru ini dikenal dengan nama Angkatan 66.

Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang dipimpin Haji Quraisy Djailani tentu tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai salah satu komponen

bangsa yang selalu tampil sebagai pelopor. Oleh karena itu, dengan segera, setelah terbentuk di tingkat pusat, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) pun segera dibentuk di tingkat wilayah.

Dalam catatan Radjab (1999: 133), pengurus KOKAM Sulsel angkatan pertama terdiri dari: Abdul Qadir Sarro (Ketua/Komandan), M. Ja'far Tinri (Wakil Ketua/Komandan Operasi), M. Anas Ponreng (Sekretaris), Drs. Med. M. Nur Daeng Riolo (Anggota Urusan Intelijen), Andi Muhammad Amin (Anggota Urusan Logistik), Haji Muhammad Idrus (Anggota Urusan Penerangan), Marwan Aidid (Anggota Urusan Pembinaan), Roslimah Wahid, BA (Anggota Urusan Yon Wanita), Ina Syamsuddin (Anggota Pembantu Umum).

Sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah, Haji Quraisy Djailani adalah koordinator sekaligus penanggung jawab tertinggi KOKAM. Dalam kapasitas inilah, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan pertemuan dengan banyak pihak. Ia juga intensif melakukan koordinasi dengan sesama pimpinan Muhammadiyah, maupun ortom, dengan melakukan kunjungan ke daerah-daerah, baik yang dilakukan sendiri, maupun mendampingi pejabat. Bahkan, Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel Solihin GP merasa tidak *afdal* berkunjung ke daerah kalau tidak tidak didampingi oleh Haji Quraisy Djailani. Dalam penumpasan PKI, hubungan mesra ABRI dan Muhammadiyah tergambar melalui pernyataan Panglima Kodam Hasanuddin, Kolonel Solihin (Radjab, 1999:138—

139): “pintu rumah saya terbuka siang dan malam bagi pengurus-pengurus Muhammadiyah. Dan kalau memerlukan di kantor, datang saja, tak usah mendaftarkan diri pada piket. Beritahukan saja bahwa anda dari Muhammadiyah”. Kemesraan ini juga tergambar dalam salah satu poin keputusan Musker I AMM Sulselra tahun 1966, dengan mengangkat Kolonel Solihin sebagai warga kehormatan AMM.

Dalam rangkaian kunjungan Quraisy Djailani ke daerah-daerah, ia pernah menunjukkan betapa tinggi perhatian dan baktinya kepada Ibunya. Setiap hendak keluar kota, ia selalu meminta izin kepada sang Ibu. Suatu waktu, ia lupa meminta izin. Ia baru teringat setelah perjalanannya ke daerah sudah jauh meninggalkan Makassar. Dia terpaksa kembali ke rumah orang tuanya untuk pamit dan meminta izin. Menurut Quraisy, rasa hormatnya yang demikian besar kepada sang Ibu merupakan pantulan dari rasa hormat yang ia peroleh dari semua kalangan. Oleh karena itu, maka semestinya, makin tinggi kedudukan seseorang, makin tinggi pula rasa hormat kepada kedua orang tuanya.

Menurut Ahamad Malik Sya’ban dalam wawancara dilakukan oleh penulis, salah satu dari keistimewaan kepemimpinan Quraisy Djailani adalah kemampuannya mempertautkan berbagai keinginan untuk diramu ke dalam sebuah adonan dengan sebuah hasil yang nyaman untuk semua. Dia juga dikenal sabar dan tabah menghadapi situasi segenting apa pun juga.

Ada satu kisah tentang sosok Quraisy yang menarik. Suatu ketika, dia pernah dimarahi oleh Walikota

Makassar, Haji Muhammad Daeng Patompo. Ketika itu, Generasi Muda Islam (GEMUIS) dideklarasikan pendiriannya di Makassar dan Haji Muhammad Daeng Patompo adalah salah seorang deklaratornya. Oleh karena berbagai macam pertimbangan, Muhammadiyah tidak turut serta di dalamnya, bahkan dukungan pun ia tidak berikan.

Ketika Haji Muhammad Daeng Patompo mengetahui itu, Patompo tidak kuasa menahan diri dan pada malam harinya. Dia datang ke rumah Haji Quraisy Djailani di Jalan Manggis Nomor 5. Mulai datang sampai pulang, Haji Muhammad Daeng Patompo mengomel dan terus marah. Sementara itu, Haji Quraisy Djailani hanya terdiam, tidak satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Menurut Quraisy Djailani, melayani kemarahan sama saja dengan menggali lubang pertengkarannya, dan hal itu harus dihindari. Boleh jadi, karena sikap Haji Quraisy Djailani yang memilih diam pada saat itu, sehingga keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Haji Muhammad Daeng Patompo datang lagi ke rumahnya. Akan tetapi, kali ini, Patompo datang tidak lagi untuk mengomel dan marah-marah, melainkan untuk meminta maaf atas ulahnya semalam.

Setelah masa-masa kritis dalam kepemimpinannya terlewatkan dengan dibubarkannya PKI pada tanggal 10 Maret 1966, Haji Quraisy Djailani jatuh sakit. Boleh jadi, disebabkan oleh kelelahan dan kurang istirahat selama empat bulan terakhir, sehingga kesehatannya tidak dapat dipulihkan kembali. Dia akhirnya meninggal dunia pada malam tanggal 19 Maret 1966

dalam usia 46 tahun.

Selain berkiprah di Muhammadiyah, Quraisy Jalani juga pernah bekerja pada perusahaan NV Budi, tahun 1945—1951. Di sana, ia bekerja sebagai *Boukhouder* pada cabang perusahaan tersebut di Bantaeng. Kemudian, ia dipindahkan ke Selayar menjadi pimpinan dari perusahaan itu selama satu tahun. Kemudian ia dipindahkan ke Makassar sebagai tata usaha menangani urusan ekspor-impor.

Pada tahun 1951, ia beralih menjadi pegawai negeri pada Departemen Agama Republik Indonesia. Mula-mula, ia diangkat sebagai Propagandis Pada Kantor Penerangan Agama Provinsi Sulawesi sampai November 1952. Lalu, ia dipindahkan ke Jawatan Penerangan Agama Departemen Agama RI di Jakarta, sampai November tahun 1953. Ia ditempatkan kembali pada Kantor Penerangan Agama sebagai Propagandis Kelas I sampai Juli 1956. Selanjutnya, jabatan Kepala Kantor Penerangan Agama Provinsi Sulawesi Selatan ia jabat hingga akhir hayatnya.

H. ABDUL WAHAB RADJAB (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1966—1968)

Haji Abdul Wahab Radjab dilahirkan di Dusun Balla Tabbua, Desa Mandalle, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada tahun 1928. Ia adalah anak kedua dari tujuh orang bersaudara. Orang tuanya memberi nama Abdul Wahab Rajab, karena lahir pada tanggal 27 Radjab, sama dengan tanggal terjadinya peristiwa



H. ABDUL WAHAB RADJAB
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1966—1968

Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.

Wahab Rajab menempuh pendidikan dasar di *Vervolgsschool* (Vvs) Limbung dan tamat pada tahun 1939. Tamat dari Vvs, dia melanjutkan pendidikan ke Madrasah Wustha Muhammadiyah di Jongaya, Kabupaten Gowa (sekarang masuk wilayah Kota Makassar). Setelah lebih kurang dua tahun belajar di Madrasah itu, Jepang mendarat dan mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda. Jepang kemudian memberlakukan kebijakan “menutup semua sekolah formal.” Kebijakan inilah yang menyebabkan Madrasah Wustha Muhammadiyah, tempatnya belajar terpaksa ditutup. Semua muridnya berhenti dan kembali ke kampung masing-masing, termasuk Wahab Rajab.

Setelah Pemerintah Jepang membuka Sekolah Jam’iyah Islamiyah di Watampone, Wahab Rajab meneruskan pendidikan di sana pada tahun 1944—1945. Namun, ia juga tidak tamat, karena setelah Jepang kalah dari sekutu, sekolah ini pun bubar. Tahun 1948, ia kembali melanjutkan pendidikan di sekolah Guru Islam Menengah Atas di Makassar. Lagi-lagi, sekolah ini pun bubar pada tahun 1949, sebelum Wahab Rajab memperoleh surat tamat.

Pada tahun 1950—1952, Wahab Rajab kuliah di Universitas Muslim Indonesia, namun tidak selesai. Kali ini, penyebabnya bukan karena tempat belajarnya dibubarkan atau membubarkan diri, akan tetapi, karena ia telah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan. Untuk menambah ilmu, ia mengikuti kursus-kursus, seperti: kursus bahasa Belanda, kursus bahasa

Inggris, kursus wartawan, dan kursus politik.

Berbekal pendidikan formal yang dimiliki, Wahab Rajab menerjunkan diri ke masyarakat. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, dan Negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Wahab Rajab tampil membe-la dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Awalnya, ia bergabung menjadi anggota Kelaskaran Pemuda-pemuda Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia di Watampone, Bone, pada tahun 1945.

Setelah kembali ke kampung halamannya di Limbung, Gowa, Wahab Rajab melanjutkan perjuangan menentang penjajah dengan bergabung ke dalam Kelaskaran BUKA-Limbung yang dipimpin oleh Sultan Daeng Mile. Dalam kelaskaran itu, ia duduk sebagai kepala staf. Setelah LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi) terbentuk, BUKA-Limbung adalah salah satu anggota dari kelaskaran tersebut. Dalam perjuangan melawan penjajah inilah, Wahab Rajab ditangkap dan dipenjara oleh Belanda selama lebih kurang tujuh bulan (Februari—Agustus 1947).

Setelah lepas dari penjara, perjuangan menentang penjajah sudah mulai reda. Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) pun terbentuk. Pasca itu, Wahab Rajab menerjunkan diri dalam organisasi keagamaan, yakni Persyarikatan Muhammadiyah. Awalnya, ia menjadi Sekretaris Muhammadiyah Groep Bone, Limbung (1949—1951), selanjutnya sebagai Sekretaris Pimpinan

Muhammadiyah Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, merangkap Ketua Majelis Dakwah (1961—1964). Tahun 1964—1966, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sulselra merangkap Ketua Majelis Tablig. Wahab Rajab ditunjuk sebagai Pejabat Ketua Pimpinan Daerah Sulselra pada tahun 1966—1968. Selanjutnya, Sekretaris Majelis Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1968—1971. Ketua Majelis Hikmah PW Muhammadiyah Sulsel tahun 1971—1977; Anggota PW Muhammadiyah Sulsel tahun 1982—1985; Anggota PW Muhammadiyah Sulsel merangkap Ketua Majelis Tablig tahun 1985—1990; dan Penasihat PW Muhammadiyah Sulsel tahun 1990—1995.

Selain sebagai pengurus, Wahab Rajab juga terlibat aktif dalam pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah. Pada tahun 1948—1949, ia menjadi guru pada Madrasah Ibtidaiyah Jongaya. Tahun 1949—1950, sebagai Kepala Sekolah Menengah Islam Muhammadiyah Cabang Limbung. Sejak tahun 1950, pengabdian Wahab Rajab di bidang pendidikan terputus karena terjun ke bidang lain. Tetapi, tahun 1982, ia kembali lagi ke dunia pendidikan dengan menjadi dosen tetap yayasan pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Tahun itu pula, ia diangkat menjadi Pembantu Rektor IV hingga tahun 1985. Selain sebagai dosen tetap yayasan dan Pembantu Rektor IV Unismuh, ia juga pernah menjadi anggota pada Badan Koordinasi Perguruan-Perguruan Tinggi Islam Swasta Indonesia bagian Timur.

Wahab Rajab juga berpengalaman sebagai birokrat pemerintahan. Ia pernah menjadi Pegawai Departemen Agama RI pada Kantor Pendidikan Agama Propinsi Sulawesi dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Umum pada tahun 1953—1955. Di lapangan ekonomi dan bisnis, Wahab Rajab pernah menjadi menjadi Staf Direksi dan Pemegang Kuasa N.V. Bank Pembangunan Sulawesi di Makassar selama lebih kurang lima tahun (1960—1965). Ia juga pernah menjadi Direktur Apotek Rumah Bersalin St. Khadijah I yang didirikan oleh Muhammadiyah Cabang Makassar.

Dalam bidang politik, Wahab Rajab memiliki pengalaman yang cukup lengkap. Ia pernah menjadi legislator di semua tingkatan legislatif, mulai dari kota, provinsi, sampai ke tingkat pusat. Ketika Partai Masyumi dibentuk di Makassar tahun 1950, Wahab Rajab adalah Sekretaris Cabang Makassar. Tahun 1951, ia menjadi Sekretaris Partai Masyumi Wilayah Sulawesi Selatan hingga tahun 1960.

Ketika Muhammadiyah memprakarsai pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada tahun 1968, Wahab Rajab sedang menjabat sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sulawesi Selatan merangkap Sekretaris Majelis Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia pun diberi amanah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Parmusi Sulawesi Selatan. Tatkala Parmusi berfusi dengan partai Islam lainnya menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ia masih diberi kepercayaan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah partai hasil fusi tersebut.

Wahab Rajab duduk sebagai Anggota DPRD Kotapraja Makassar mewakili Partai Masyumi tahun 1955—1960. Pada saat bersamaan, ia juga merupakan Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Makassar. Jika menggunakan sudut pandang kekinian, hal itu adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan mustahil, mengingat pemisahan eksekutif dan legislatif sangat jelas aturannya.

Tahun 1968—1971, Wahab Rajab diutus oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi anggota DPR-GR RI dan dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi X. Saat itu, Muhammadiyah disebut sebagai ormaspol, sehingga berhak memiliki utusan di DPR-GR. Pada Pemilu 1971, ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Parmusi. Disitu, ia dipercaya sebagai Ketua Komisi D yang membidangi agama, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pada Pemilu 1977, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR/MPR-RI.

Setelah masa baktinya berakhir di DPR/MPR RI tahun 1982, Wahab Rajab kembali ke Makassar. Masa inilah yang ia gunakan untuk menulis buku. Dua bukunya telah diterbitkan, yaitu: *“Iman Dasar Hidup Sejahtera”* dan *“Lintasan Perkembangan dan Sumbangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.”*

Abdul Wahab Rajab meninggal dunia pada tahun 2004. Ia meninggalkan dua orang isteri dan 13 orang anak.

KH. MUHAMMAD AKIB (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1968-1971)

K.H. Muhammad Akib dilahirkan di kota Parepare pada bulan Januari 1910. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Parepare, dia melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Al-Irsyad di Batavia (Jakarta) dan selesai pada tahun 1930.

Sekembali dari Jakarta, ia mengabdikan diri di Muhammadiyah dan ditugaskan mengajar di Perguruan Muhammadiyah Groep Takkalasi, Barru. Dua tahun kemudian, dia dipindahkan mengajar ke Madrasah Muhammadiyah Bulukumba hingga tahun 1935. Dari Bulukumba, dia ditarik ke Makassar menjadi guru di Muallimin Muhammadiyah Makassar. Oleh karena kemampuannya yang sangat menonjol ditambah dengan daya tarik pribadinya, sejak tahun 1936, dia terpilih menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Makassar. Dua tahun kemudian, tepatnya pada Konferensi Muhammadiyah di Sengkang pada tahun 1938, dia pun terpilih menjadi salah seorang *Commisaris* Konsoelat Muhammadiyah Celebes Selatan, mendampingi Haji Andi Sewang Daeng Muntu. Sejak saat itu, hingga tahun 1954, namanya selalu tercantum sebagai Anggota Konsul Muhammadiyah.

Pada tahun 1951, Kementerian Agama menugaskan kepada H. Muhammad Akib membentuk Kantor Urusan Pendidikan Agama Propensi Sulawesi dan sekaligus mengangkatnya sebagai kepala kantor. Satu tahun kemudian, dia dipindahtugaskan menjadi Kepala



KH. MUHAMMAD AKIB
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1968-1971

Kantor Urusan Penerangan Agama Provinsi Sulawesi.

Pada Pemilu tahun 1955, Partai Masyumi menca-
lonkan Haji Muhammad Akib. Ia pun terpilih sebagai
Anggota Parlemen Republik Indonesia. Dia mengabdikan
sebagai anggota parlemen sampai lembaga tersebut
dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.
Selepas menjadi anggota parlemen dengan hak pen-
siun, dia menetap di Jakarta. Selama di Jakarta dia
tetap aktif di Muhammadiyah sebagai pengurus salah
satu majelis di Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sekembali ke Makassar, H. Muhammad Akib me-
neruskan pengabdianannya kepada bangsa dan negara
sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Hasanud-
din hingga akhir hayatnya.

Pada Konferensi PD Muhammadiyah Sulsel ke-28,
di Makassar pada tahun 1968, H. Muhammad Akib ter-
pilih sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Sulawesi Selatan dan Tenggara periode 1968—1971.
Dia dibantu oleh tiga orang wakil ketua, yaitu Ahmad
Makkarasus Amansyah, Drs. Abdul Watif Masri, dan
Drs. A. Tadjuddin Baso Rum; tiga orang sekretaris yaitu
Drs. Idrus Nurdin, Drs. Najamuddin, dan Muhammad
Anwar; dua orang bendahara, yakni Drs. A. Muhiddin
dan H. Salama Tambo; dan tiga belas orang anggota se-
bagai ketua majelis dan pembantu, yaitu: K. H. Abdul
Djabbar Ashiry (Ketua Majelis Tarjih), K. H. Marsuki
Hasan (Ketua Majelis Tablig), H. Makmur Ali (Ketua
Majelis Hikmah), M. Saleh Daeng Mattinri (Ketua Ma-
jelis PKU), H. Muhammadong (Ketua Majelis P dan K),
Abdul Qadir Sarro (Ketua Majelis Angkatan Muda),

Drs. M. Saleh Hamadani (Ketua Majelis Ekonomi), Siti Ramlah Azis (Ketua 'Aisyiyah), Abdul Wahab Rajab (Pembantu), Abdul Rahman Jamal (Pembantu), Drs. Fachruddin Ambo Enre (Pembantu), Drs. Med. Nur Daeng Riolo (Pembantu), dan Palinrungi (Pembantu).

Selain aktif di Muhammadiyah, K. H. Muhammad Akib juga aktif menangani masalah-masalah keagamaan secara umum. Bersama-sama dengan Mukhtar Lutfi, dia aktif memprakarsai pendirian Masjid Raya Makassar. Sepanjang hidupnya, dia selalu menjadi pengurus Yayasan Masjid Raya, bahkan pernah menjadi ketuanya.

Kemampuan retorika dan gaya bahasanya yang memukau, membuat semua orang senang mendengarkan khotbah-khotbah dan ceramah-ceramahnya. Semua orang yang pernah bergaul dengannya pasti mengakui ketinggian pribadi dan kedalaman ilmunya. Namun demikian, dia selalu berperenampilan sederhana. Tidak pernah tampak cemberut karena marah atau bersedih. Hal yang selalu tampak dibibirnya hanyalah senyum.

K.H. ABDUL DJABBAR ASHIRY (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1971 – 1975)

K.H. Abdul Djabbar Ashiry Thalib, dikenal waktu kecil dengan nama Andu Lolo yang berarti Pemuda Harapan. Ia dilahirkan di Rappang, pada tanggal 27 Agustus 1916. Ayahnya H Muhammad Ashiry dengan gelar Araie Rilautang Salo yang berarti orang Arab di



K.H. ABDUL DJABBAR ASHIRY
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1971 – 1975

Laotang Salo. Gelar ini diberikan karena ia lama menetap di Makkah untuk menuntut ilmu-ilmu agama, sehingga saat pulang ia selalu memakai bahasa Arab kepada keluarganya maupun kepada muridnya.

Sedangkan ibunya adalah Hj. Halijah yang waktu kecil disapa Ajarei atau Siti Hajar. Nama panggilan ini diberikan orang tuanya dengan harapan Hj. Halijah mampu menjadi sosok wanita yang kuat mental dan dapat melahirkan keturunan yang saleh. Djabbar Ashiry adalah anak sulung dari pasangan ini. Saudara-saudaranya yang lain adalah H. Abd. Rahman Ashiry, Hj. Aisyaton Ashiry, Hj. Syamsiah Ashiry, dan Hj. Hasanah Ashiry.

Jabbar Ashiry memperoleh pendidikan pertama dari ayahnya, melalui pelajaran Al Qur'an dengan huruf-huruf makhraj yang betul. Tahun 1928-1933, ia memulai pendidikan formalnya pada madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Rappang, dengan guru-guru dari Sumatera bernama Abdul Jalil dan Abdul Rauf. Tahun 1937-1940 Jabbar Ashiry dikirim oleh orang tuanya ke Siwa, Sengkang untuk belajar di Madrasah Muhammadiyah, serta nyantri kepada Almarhum Husain Thaha (Mantan Kepala Depag Kota Makassar tahun 1970-an). Tahun 1947, Jabbar Ashiry berangkat ke Mekah, selain untuk menunaikan ibadah haji, juga untuk belajar. Sebelum kembali ke tanah air, Jabbar membeli sejumlah buku. Dari buku-buku itulah dia belajar dengan tekun memperdalam dan meningkatkan kemampuannya di bidang pengetahuan agama, sebagai bekal membimbing umat.

Selama hidupnya KH. Abd. Djabbar Ashiry menikah tiga kali. Istri pertamanya bernama Amirah Binti Musa, dari perkawinan ini, ia tidak dianugerahi anak. Istri keduanya, Hj. Salmiah Binti Haji Taju memberinya keturunan 9 orang anak, yaitu; Hj. Surianti Abd. Djabbar, A.Md, Dra. Hj. Khaeriah Abd. Djabbar (istri dari H. Abd. Jalil Thahir), Mardiah Abd. Djabbar, Drs. Muhajir Abd. Djabbar, Drs. Mujahid Abd. Djabbar, LC, M.Ag, H. Mursid Abd. Djabbar, Mutawakkil Abd. Djabbar, H. Munawar Abd. Djabbar. Setelah Hajjah Salmiah meninggal dunia, K.H. Abdul Djabbar Ashiry menikah lagi dengan Hajjah Marhamah Binti K.H. Hasyim Hasan, dikaruniai tiga orang anak, yaitu H. Ibnu Hasyim Abd. Djabbar, A.Md, Ibnu Katsir Abd. Djabbar (Almarhum), dan Abdul Rahman Abd. Djabbar (Almarhum).

Setelah berkeluarga, Abdul Djabbar Ashiry tetap melanjutkan cita-citanya untuk memperbanyak amal jariyah. Salah satunya dengan mengembangkan pendidikan yang berbasis Islam. Akan tetapi bukan hanya lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islam yang ditekuni oleh Djabbar Ashiry, tapi beliau juga aktif memberi ceramah-ceramah (menjadi mubalig) di Masjid-masjid. Bahkan beliau sempat menjadi Imam tetap di Masjid Raya sewaktu menetap di Jalan Bandang. Ia juga sempat menjadi Pimpinan Majelis Tarjih bersama Marzuki Hasan, pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqamah, Maccopa, Maros.

Setelah pindah ke jalan Majid Raya, ia sempat mendirikan masjid yang bernama Mawaddatullah, di Jalan Sembilan. Efeknya, masyarakat sekitar mulai ra-

jin shalat berjamaah di masjid tersebut. Setiap selesai shalat 5 waktu, Djabbar Ashiry selalu memberikan Kul-tum (Kuliah Tujuh Menit). Hal ini menambah daya tarik masyarakat datang berjamaah ke masjid Mawaddatul-lah. Banyak mahasiswa yang datang dari jauh, bahkan tinggal di masjid itu secara gratis hanya untuk berguru kepada Djabbar Ashiry. Djabbar Ashiry sempat menunjuk salah satu dari jamaah yang sering datang salat berjamaah di masjid tersebut sebagai pengganti beliau saat wafat.

Bersama dengan uztads Gazali Thalib, Bustaman Tamrin, H. Hasanuddin, H. Fachruddin dan H. Wail Mansyur, KH. Abd. Djabbar Ashiry membuka Madrasah Muallimin Muhammadiyah Rappang. Sekolah tersebut menggunakan gedung Sekolah Diniyah Muhammadiyah Cabang Rappang, yang terletak di sebelah utara Masjid Taqwa Muhammadiyah. Muallimin Muhammadiyah Rappang menerima murid baru pada tahun pelajaran 1950-1951.

Perkembangan sekolah ini cukup pesat, gedung Madrasah Diniyah tidak mampu lagi menampung siswa-siswi Muallimin yang bertambah banyak. Sebagian besar siswa tersebut berasal dari Pangkajene, Enrekang, Pinrang, dan Polmas. Untuk mengatasinya, Jabbar Ashiry dan teman-temannya membeli satu lokasi tanah kosong di sebelah selatan lapangan sepak bola Rappang. Di atas tanah itulah, dibangun gedung Madrasah Muallimin Muhammadiyah Cabang Rappang, dan mulai digunakan pada tahun ajaran 1951-1952.

Pada tahun pelajaran 1953, Djabbar Ashiry terpaksa meninggalkan Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang didirikannya karena hijrah ke Makassar. Di Makassar, ia mengontrak rumah di jalan Kubis, belakang pasar Kalimbu. Setelah rumah kontrakannya disana berakhir, ia pindah ke jalan Bandang, samping Masjid Raya Makassar. Di tempat inilah ia membuka pendidikan mubalig Muhammadiyah. Selain itu, ia juga aktif mengajar dan memberi pengajian di Masjid Raya, sekaligus menjadi salah seorang imam rawatibnya. Ketika itu, yang menjadi Ketua Panitia Masjid Raya Makassar adalah Kiai Haji Husaini Thaha.

Kiprah di Muhammadiyah

Djabbar Ashiry pernah menjadi Ketua Pimpinan Muhammadiyah Ranting Lautang Salo Rappang. Ia juga pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Bontoala Makassar, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Makassar. Djabbar Ashiry menjadi Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan periode 1971-1975. Setelah itu, meski terkesan “turun pangkat”, ia masih menerima amanah sebagai Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan Tenggara periode 1975-1980. Menurut, Drs. Muhammad Yamin Data, Kiai Haji Abdul Djabbar Ashiry pernah berpesan, *“Kalau engkau menerima suatu jabatan pastikan engkau ikhlas, jujur, dan berani berbuat.”*

Pada tahun 1963, ketika Ketua Muhammadiyah Sulsel dijabat oleh Haji Quraisy Djailani, Pimpinan Mu-

hammadiyah Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara memutuskan membina Pendidikan Kader Ulama. Rencana semula Pendidikan Kader Ulama tersebut ditempatkan di Cabang Bantaeng dan Cabang Rappang. Panitia yang ditunjuk, yaitu Abdul Djabbar Ashiry sebagai Ketua, Haji Muhammad Arsyad Daud sebagai Sekretaris, Kiai Haji Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ngilau, Haji Abdul Malik Ibrahim, dan Haji Muhammad Nawawi Yazid, masing-masing sebagai anggota. Namun, kendala kekurangan guru pembina dan dana, program tersebut akhirnya dipindahkan ke Makassar, dan ditempatkan di Perguruan Muhammadiyah Cabang Bontoala, di samping Masjid Raya Makassar.

Setelah berjalan beberapa tahun, Pendidikan Kader Ulama direncanakan dipindahkan ke lokasi baru, di Gombara-Bulurokeng, yang merupakan tanah hibah dari Bupati Maros kala itu. Namun, masalah dana dan pembina kembali menjadi kendala. Alhasil, pendidikan Kader Ulama tersebut tidak jadi dipindahkan sampai akhirnya terhenti dengan sendirinya, setelah menamatkan 27 orang ulama muda Muhammadiyah. Penyebab terhentinya pendidikan kader ulama tersebut adalah terjadinya apa yang dikenal dengan peristiwa “Penggajian Lotto”. Lotto adalah nama salah satu bentuk perjudian di masa Walikota Makassar, Muhammad Daeng Patompo, pertengahan tahun 1960-an.

Sebagian peserta Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah yang berjumlah 27 orang, terlibat dan menjadi pelopor pengganyangan Lotto pada tahun

1968. Tindakan tersebut dianggap tindakan kriminal, mereka pun diburu dan ditangkap. Ada yang berhasil dijebloskan ke dalam penjara, ada pula sempat meloloskan diri ke luar daerah.

Salah seorang yang berhasil melarikan diri adalah Mukhsin Kahar. Ia lari ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Di sana, ia mengganti nama menjadi Abdullah Said. Sebagai mubalig yang memiliki pengetahuan agama yang luas, dia disenangi masyarakat dan diterima pemerintah. Di Balikpapan, Abdullah Said berhasil mendirikan Pondok Pesantren Hidayatullah di atas tanah perbukitan yang gersang. Keberhasilannya menghidupkan lokasi Pesantren tersebut, mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto. Setelah pesantren Hidayatullah berhasil membuka cabang di beberapa daerah, Mukhsin Kahar alias Abdullah Said mendirikan organisasi sosial keagamaan yang diberi nama Hidayatullah.

Meski ada pula peserta Pendidikan Kader Ulama yang tidak ikut dalam pengganyangan Lotto, namun mereka tak lagi melanjutkan pendidikannya. Akhirnya, tamatlah riwayat Pendidikan Kader Ulama yang didirikan, dipimpin, dan dibina oleh KH. Abdul Djabbar Ashiry.

Para Pembina lainnya, yakni: DR. S. Majidi, Kiai Haji Marzuki Hasan dan Kiai Haji Fathul Muin Daeng Maggading yang secara bersama-sama dengan Kiai Haji Abdul Djabbar Ashiry disebut “Imam Empat”, masing-masing membina pengajian atau pesantren di tempatnya. Dr. S. Majidi membina pengajian di rumah-

nya, dengan nama pangajian “Orang Baik-Baik”. Pada tahun 1970-an, atas permintaan dari kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Dr. S. Majidi membuka lagi pengajian di Jalan Bandang, Samping Masjid Raya, yang pernah ditempati Pendidikan Kader Ulama yang sudah mati. Di sinilah Dr. KH. Mustari Bosra (Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sulsel 2010-2015), menjadi murid Dr. S. Majidi selama lebih kurang 4 tahun, sejak tahun 1975 hingga tahun 1978.

Pembina lainnya, Kiai Haji Fathul Muin Daeng Ma’gading, kembali fokus membina pengajiannya di Ta’mirul Masjid. Pengajiannya berlangsung hingga ia meninggal dunia pada tahun 1985. Murid-murid angkatan terakhir yang dibinanya sebelum wafat, itulah yang menjadi cikal bakal pendiri Wahdah Islamiyah. Menjelang Mukhtamar Muhammadiyah ke-38 di Solo, Kiai Haji Fathul Muin Daeng Ma’gading memper-maklumkan kepada murid-murid dan masyarakat secara umum bahwa jika dalam mukhtamarnya, Muhammadiyah menerima asas tunggal yang diharuskan oleh pemerintah Orde Baru, maka dirinya keluar dari Persyarikatan Muhammadiyah. Beberapa hari sebelum pemberangkatan ke Mukhtamar, Kiai Haji Fathul Muin Daeng Ma’gading wafat. Mukhtamar Muhammadiyah pun memutuskan menerima Pancasila sebagai azas organisasinya. Setelah Fathul Muin wafat, dan Muhammadiyah berubah azas, murid-murid Fathul Muin Daeng Ma’gading mendirikan Yayasan Fathul Muin. Yayasan tersebut kegiatannya sama dengan Muhammadiyah, melakukan dakwah amar ma’ruf nahi mung-

kar, dan membina amal usaha. Yayasan inilah yang di-konversi menjadi oranisasi sosial keagamaan Wahdah Islamiyah pada tahun 1998.

Tidak jauh beda dengan kolega “Imam Empat” lainnya, KH. Marzuki Hasan mendirikan pesantren “Darul Istiqamah” Maccopa Maros. Pesantren yang didirikannya itu juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lokasi pesantrennya di Maccopa terus diperluas, dan saat ini sudah menjadi perkampungan yang dihuni oleh ribuan santri dan warga. Cabang-cabang pesantren ini pun telah pula berdiri di beberapa daerah, bahkan sampai di luar Sulawesi Selatan.

Konflik Pesantren

Lokasi yang yang sedianya ditempati Pendidikan Kader Ulama, di Gombara-Bulurokeng, akhirnya ditempati pondok pesantren yang juga berorientasi sebagai tempat pendidikan kader ulama Muhammadiyah. Setelah bekerja keras dengan penuh kesungguhan, KH. Abdul Djabbar Ashiry, bersama KH. Fathul Muin Daeng Ma’gading, DR. S. Madjidi, dan KH. Marzuki Hasan akhirnya berhasil mendirikan pondok pesantren yang diberi nama “Darul Arqam Gombara” pada tahun 1971.

Santri angkatan pertama Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara hanya berjumlah sepuluh orang, semuanya putera. Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1980-an, pondok pesantren tersebut pernah membina lebih dari seribu orang santri putra dan putri.

Dalam kapasitas sebagai Direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara inilah, ia mendapat undangan dari Jama'ah Tabligh untuk menghadiri pertemuan di Pakistan. Setelah kembali, ia mulai menjalankan misi dakwah Jama'ah Tabligh, dengan jalan *Khuruj*, yaitu meninggalkan pesantren untuk berda'wah dan bermalam di masjid-masjid.

Ketika *khuruj* ke Takalar bersama dengan tamu Jamaah Tabligh dari Pakistan sekitar tahun 1985, Mustari Bosra, yang waktu itu merupakan Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Daerah Takalar, sempat dimintai pertolongan oleh Kapolres dan Kapten Munir dari Kodim Takalar untuk mengamati gerakan tamu dari Pakistan yang berpakaian Arab tersebut. Mustari dianggap mu-balig yang punya kecakapan berbahasa Arab. Setelah sampai di Masjid Palleko, tempat tamu itu menginap, Mustari tercengang karena yang membawa tamu itu adalah KH. Abdul Djabbar Ashiry. Dalam pertemuan itu, malah Mustari Bosra diminta oleh KH. Djabbar Ashiry untuk mengalihbahasakan ceramah tamu Pakistan tersebut yang disampaikan dalam Bahasa Arab. Kiai Djabbar Ashiry akrab dengan Mustari, karena Mustari pernah tinggal di rumahnya selama satu bulan penuh. Kala itu, Mustari belajar intensif Bahasa Arab kepada Ustaz Abdul Khalik Rabasan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, pada bulan Ramadan tahun 1976.

Sekembali dari Masjid Palleko, Mustari Bosra menyampaikan kepada Kapolres dan Kapten Munir bahwa tamu yang datang tersebut tidak usah dicurigai.

Mereka adalah turis sekaligus mubalig, yang mungkin karena kekurangan dana sehingga mereka memilih menginap di Masjid. Menurut Mustari, selama menerjemahkan ceramah tamu asing tersebut, tidak ada satu pun ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi yang membawa tamu itu adalah mantan Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara, yang sedang menjabat sebagai Direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Berkat penjelasan Mustari, akhirnya Kapres dan Kapten Munir dapat memahami, sehingga KH. Djabbar Ashiry dan tamunya tidak diusir dari Takalar.

Belakangan, Mustari Bosra mendapatkan kabar bahwa KH. Djabbar Ashiry dipecat oleh Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dari jabatannya selaku direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Pemecatan tersebut merupakan tuntutan dari keterlibatannya di Jama'ah Tabligh. Pimpinan Muhammadiyah Wilayah waktu itu memintanya menentukan sikap, tetap di Muhammadiyah dan meninggalkan Jama'ah Tabligh, atau memilih Jamaah Tabligh dan keluar dari Muhammadiyah.

Setelah dipecat dari jabatannya selaku Direktur, timbullah konflik di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Sebagian guru dan sebagian santri memihak kepada Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan, dan sebagian lainnya memihak kepada KH. Abdul Djabbar Ashiry. Konflik internal tak dapat dielakkan. Perseteruan terjadi di antara

kedua belah pihak, yang klimaksnya menelan korban jiwa dari santri yang memihak kepada Pimpinan Muhammadiyah Wilayah. Salah seorang dari dua orang santri yang meninggal adalah anak Ustaz Abdul Khalik Rabasang.

Menghindari korban jiwa yang lebih banyak, kedua belah pihak saling mengalah. KH. Abdul Djabbar Ashiry menerima pemecatannya, dan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara juga merelakan sebagian tanah dan bangunan yang diklaim oleh KH. Djabbar Ashiry dan pendukungnya untuk ditempati Pondok Pesantren Darul Aman Gombara. Selain pemisahan lokasi pesantren, perpecahan juga mengakibatkan terbaginya pembina, dan santri. Sebagian tetap berada di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara dibawah binaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Sebagian lainnya tergabung ke dalam Pondok Pesantren Darul Aman Gombara, milik Yayasan Buk'atun Mubarakah yang dipimpin oleh KH. Abdul Djabbar Ashiry bersama Abdul Jalil Thahir.

Setelah dipecat dari jabatannya sebagai Direktur Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, terhentilah segala aktivitas KH. Djabbar Ashiry di Muhammadiyah, setelah berkiprah dan menghabiskan sebagian besar hidupnya mengurus Muhammadiyah dan amal usahanya.

Keteladanan dan Akhir Hayatnya

Salah satu strategi dakwah KH. Djabbar Ashiry adalah “berdakwah dengan pena”. Buku yang ditulisnya berjudul “Penuntun Hidup Bahagia”, yang diterbitkan pada 26 Rabiul Awal 1408 H/18 November 1987 M. Dalam buku tersebut, Djabbar Ashiry menjelaskan tentang pedoman dalam menjalani kehidupan. Tema-tema yang diulasnya antara lain; bagaimana merawat anak mulai dari bayi sampai remaja, kiat menghadapi anak yang sudah dewasa, bagaimana memilih jodoh, tanggungjawab sumi/istri, cara menghadapi orang yang sakaratul maut, dan hal-hal lainnya yang harus diperhatikan dalam mengarungi kehidupan dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Topik-topik yang ditulis KH. Djabbar Ashiry tersebut, merupakan topik yang sering diulasnya pada saat ceramah maupun khutbah (Syamsiah dan Ernaningsih, 2007:64-65).

Sebagai ulama, KH. Djabbar Ashiry dikenal sebagai ulama zuhud, sehingga mendorong banyak orang meneladani kepribadiannya. Menurut Syamsiah dan Ernaningsih (2007:64-65), keteladanan yang dapat diikuti dari Djabbar Ashiry antara lain; keikhlasan dalam mengerjakan sesuatu, ketekunannya dalam menjalankan syariat, kesederhanaan dalam berpakaian, bersifat ramah terhadap siapa saja, senantiasa berprasangka baik, materi-materi ceramahnya menyentuh hati jamaah, tidak tergoda dengan jabatan, dan mampu diterima di seluruh lapisan masyarakat meski berbeda organisasi dan mazhab. Djabbar Ashiry juga tidak pernah

meninggalkan amalan beriktikaf setiap sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.

KH. Djabbar Ashiry meninggal dunia pada tanggal 13 April 1990, setelah dirawat selama 13 hari di Rumah Sakit Islam Faisal. Ia dimakamkan di "Pekuburan Baqi" yang lokasinya masih tersambung dan merupakan bagian dari lokasi Pondok Pesantren Darul Aman Gombara. Walikota Makassar Patompo sempat hadir melepas jenazahnya.

H. AHMAD MAKARASU AMANSYAH (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1975—1978)

Nama lengkapnya adalah Haji Ahmad Makarasu Amansyah Daeng Ngilau. Dia dilahirkan di Kampung Kalappo, Distrik Topejawa, *Onder Afdeling* Takalar pada tanggal 3 Januari 1903. Ayahnya bernama Amansyah Daeng Ngewa, seorang bangsawan lokal, keturunan Lo'mo (Kepala Distrik) Topejawa. Ibunya bernama Tien Ayu Hamidah Daeng Tongi yang berdarah campuran Makassar dan Madura. Daeng Ngilau adalah anak tertua dari sembilan orang bersaudara (dua orang seayah dan seibu serta tujuh orang seayah).

Kakek Daeng Ngilau dari pihak ibunya yang juga bernama Daeng Ngilau pernah dibuang ke Sumenep oleh penjajah Belanda karena kasus pembunuhan. Setelah masa hukuman pembuangannya selesai dijalani, Daeng Ngilau (kakek Ahmad Makkarasusu) menikahi Tien Maemunah, anak dari Raden Mas Kouto di Sumenap, Madura. Kemudian diboyongnya ke Topejawa.



H. AHMAD MAKARUSU AMANSYAH
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1975—1978

Dari Tien Maemunah itulah lahir ibu kandung Ahmad Makkarausu Daeng Ngilau.

Sebagai tuntutan keadaan yang selalu berpindah-pindah tugas, Haji Ahmad Makkarausu Amansyah menikah lima kali. Untuk yang pertama kalinya, dia menikah dengan Dewi Daeng Sugi. Dari pernikahannya dengan isteri pertamanya, dia dikarunia sembilan orang anak, masing-masing bernama Zaenab Basse Kandari Daeng Bau, Zubaedah Basse Mare Daeng Pati, Muhammad Anwar, Kaima Basse Jipang Daeng Patta, Muhammad Akbar, Muhammad Adam, Muhammad Ayub, Zohrah Basse Parang, dan Muhammad Aslan.

Selanjutnya, Ahmad Makkarausu Amansyah menikah lagi dengan Rahmatiah Dang Ngai. Dari isteri keduanya ini, dia dikaruniai dua orang anak, yaitu: Abdur Razak Amansyah dan Abdur Rahman Amansyah.

Pernikahannya yang ketiga dengan Siti Sumirah. Pernikahannya yang ketiga berlangsung di Yogyakarta. Ketika itu Ahmad Makkarausu Amansyah berada di Yogyakarta berjuang mempertahankan kemerdekaan RI. Dia menikahi seorang gadis bernama Sitti Samirah. Dari pernikahannya ini, lahirlah putra-putri yang bernama Bambang Sumiro dan Ummi Astuti.

Ketika ditugaskan ke Bukittinggi, sebagai Ketua Mahkamah Syariah Sumatra, Haji Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ngilau menikah lagi untuk yang keempat kalinya dengan Yuliani Islami. Dari pernikahannya itu, mereka dikarunia lagi dua orang anak, yaitu: Muhammad Zain dan Zubaedah.

Pernikahannya yang kelima terjadi ketika dia diculik oleh gerombolan DI/TII dan ditempatkan di Malakaji. Di sana dia menikahi seorang perempuan, tetapi tidak dikarunia anak.

Haji Makarausu Amansyah Daeng Ngilau menempuh pendidikan formalnya di *Vervolgschool* (VvS) Takalar. Setamat dari VvS Takalar, dia melanjutkan pendidikannya ke *Normal School* di Makassar. Berbekal ijazah *Normal School*, Amansyah terangkat menjadi guru negeri dan ditempatkan di Bontoala. Ketika itulah, Amnansyah berkenalan dengan Muhammadiyah dan sekaligus menjadi *bestuur* Muhammadiyah Groep Bontoala. Dari Bontoala, Amansyah dipindahkan ke Bau-bau, dari Bau-bau dimutasi ke Kendari dan dari kendari dipindah ke Mare. Setelah Jepang dia kembali ke Makassar.

Di setiap daerah yang di tempati bertugas Makarausu Amansyah Daeng Ngilau selalu berusaha mengembangkan dakwah Muhammadiyah dan mempepori pembentukan Groep Muhammadiyah. Setelah beberapa tahun bertugas di Mare sebagai kepala sekolah, dia berhasil mendirikan Muhammadiyah Groep Mare. Sebelum kemerdekaan, bahkan hingga tahun 1960-an, Mare adalah satu-satunya daerah dalam wilayah *onderafdeeling* (Kabupaten) Bone yang ada Muhammadiyahnya.

Haji Makarausu Amansyah Daeng Ngilau terpilih menjadi ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara menggantikan Kiyai Haji Abdul Djabbar Ashi-

ry pada tahun 974. Dan, dia tetap menjadi ketua Muhammadiyah sampai wafat pada tahun 1977.

Memimpin Muhammadiyah Sulsel

Dari laporan pertanggungjawaban PMW Sulselra Periode 1974—1978, periode kepemimpinan Ahmad Makkarausu Amansyah, secara umum dilaporkan bahwa kader Muhammadiyah mengalami penurunan antusias untuk bersyarikat. Akan tetapi, setelah Mukhtar ke-40 di Surabaya, terpaan angin cobaan tersebut cukup mereda dan awan tebal masalah-masalah yang selama ini dianggap menaungi persyarikatan ini menjauh. Namun, warga yang sudah terlanjur meninggalkan Muhammadiyah tidak kunjung kembali, begitupula yang sedang beristirahat tak kunjung mendekat.

Pengaruh iklim politik saat itu menjadi salah satu penyebab niat untuk bersyarikat menurun. Hampir dapat dikatakan semua organisasi mengalami hal serupa akibat dari cengkeraman orde baru, kebebasan berkumpul dan bersyarikat menjadi hal yang tabu saat itu. Apalagi masa kurun waktu 1970-an, saat iklim politik memanas menjelang pemilu tahun 1977.

Keaktifan pimpinan atau anggota Muhammadiyah dalam membina dan mengembangkan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) sebagai salah satu peserta pemilu 1977 menjadi salah satu penyebab hal tersebut. Hingga tiba suatu kesimpulan sesaat terhadap Muhammadiyah yang menganggap persyarikatan ini tidak dapat dipisahkan dari sebuah partai politik.

Hal tersebut menimbulkan ketakutan tersendiri oleh warga Muhammadiyah untuk menyatakan diri secara terang-terangan sebagai anggota. Tidak hanya anggota yang berstatus pegawai negeri sipil, pedagang, petani, nelayan, dan segenap warga pun takut mengakui keanggotaannya. Bahkan, menyebut nama Muhammadiyah saja mereka enggan.

Situasi tersebut menimbulkan hal yang mencekamkan hati, sehingga saat itu muncul kutipan oleh kalangan warga Muhammadiyah sendiri “Seingat saya, sepanjang umur Muhammadiyah, baru kali ini mengalami tantangan yang sungguh sungguh mengerikan. Betapa tidak, karena sesama warga Muhammadiyah kita saling curiga-mencurigai.”

Keadaan tersebut menjadi faktor yang melumpuhkan organisasi persyarikatan, terutama di daerah, cabang dan ranting. Hal ini menyebabkan data pengesahan pimpinan daerah sampai saat itu belum juga selesai seluruhnya. Persentase pengesahan pimpinan cabang dan pengesahan kembali cabang-cabang dan ranting sebagai realisasi dari pelimpahan wewenang pimpinan pusat yang sekalipun sudah sejak tahun 1975 digalakkan, belum selesai pada akhir periode tahun 1978. Hingga kepengurusan tersebut selesai baru mencapai 40 % yang sudah disahkan yang memaksa untuk bekerja keras pada periode berikutnya guna merampungkan hal tersebut.

Menghadapi masalah masalah tersebut, pengurus memutuskan untuk mengambil beberapa langkah seperti membina hubungan lebih dekat dengan peme-

rintah. Keakraban dalam hal ini ialah saling pengertian, paham-memahami sehingga terjalinlah hubungan yang baik antara Muhammadiyah dengan pemerintahan. Keakraban dengan pemerintah ini diputuskan pada Sidang Tanwir tahun 1973 yang dihelat di Yogyakarta sebagai program yang harus diprioritaskan. Sikap konfrontatif masa itu dianggap sebagai hal yang kurang perlu mengingat kondisi represif orde baru. Namun, tidak berarti Muhammadiyah menutup mata dan bungkam seribu bahasa terhadap keadaan dan gejala masyarakat terutama terhadap kemaksiatan yang terjadi dalam masyarakat. Dapat dipahami hal demikian mengingat Muhammadiyah memiliki banyak hal yang perlu dipertimbangkan jika sampai terjadi pelarangan terhadap aktivitas memajukan umat.

Mengapa muncul keputusan menjalin keakraban ini? Sebab kritikan apalagi mencaci maki bukanlah cara yang bijaksana oleh Muhammadiyah dan dianggap tidak akan dapat menyelesaikan persoalan. Pendekatan pribadi dengan pejabat lebih dipilih untuk dapat menyelesaikan persoalan. Dalam rangka menjalin keakraban dengan pemerintah ini, maka Pengurus Muhamadiyah khususnya di wilayah Sulselra kala itu menempuh langkah-langkah dengan mengadakan beberapa pertemuan seperti silaturahmi dengan Gubernur Sulsel H Achmad Lamo dalam rangka hari iduladha 1396 H, silaturahmi dengan Panglima Kodam XIV/HN Brigjen TNI Sukma E di rumah jabatannya pada tanggal 25 desember 1975, serta Panglima Kodam yang baru Brigjen TNI Kusnadi pada tanggal 6 Oktober 1977, dan

dilanjutkan dengan ramah-tamah dengan keluarga besar Muhammadiyah yang berdomisili di Kota Makassar kala itu.

Selain itu, pengurus Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ahmad Makkarasus mengadakan kunjungan kepada Gubernur Sul-sel H Andi Oddang pada tanggal 29 Juli dalam rangka pengenalan dengan pejabat baru. Sekaligus dalam pertemuan tersebut disampaikan rencana penyelenggaraan Musyawarah Wilayah ke-32 PMW Sulselra dan pembincangan beberapa persoalan, antara lain persoalan pengusiran yang menimpa Warga Muhammadiyah di Wajo menjelang Pemilu 1977. Terakhir, Ahmad Makkarasus dan pengurusnya mengadakan kunjungan konsultasi dengan Kadapol Sulselra Brigjen Polisi R.A Makmoer Suryajane negara pada tanggal 15 agustus 1978 untuk meminta perizinan dalam penyelenggaraan Musywil ke-32.

Dalam setiap kesempatan mengadakan konsultasi dengan pejabat tersebut, pengurus senantiasa menjelaskan kepada mereka bahwa Muhammadiyah ini adalah suatu gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan sesuatu partai politik apapun juga. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan anggapan selama ini bahwa Muhammadiyah identik dengan partai politik.

Tidak hanya menjalin keakraban dengan pemerintah,. Pengurus wilayah juga kala itu mengadakan konsolidasi organisasi, mengingat masih banyaknya kalangan warga yang tidak menghayati dengan baik keputusan Tanwir Muhammadiyah tentang larangan

persyarikatan dibawa ke ranah perpolitikan. Banyaknya pengurus yang terlibat pada aksi politik menimbulkan ekses yang menjurus kepada renggangnya rasa ukhuwah di kalangan warga.

Seusai pemilu tahun 1977 dengan tujuan utama untuk menyembuhkan luka akibat pemilu dan untuk menciptakan terbinanya kembali ukhuwah islamiyah di kalangan warga persyarikatan, diadakanlah musyawarah kerja tingkat wilayah tanggal 23 s/d 25 desember. Dalam keputusan musyawarah kerja tercantum bahwa *bertaqarrug ilallah*, membina ukhuwah islamiyah dan menetapkan Kabupaten Bulukumba sebagai lokasi Musywil ke-32.

Salah satu hal yang menjadi penting dalam membina ukhuwah islamiyah ini adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat pembangunan gedung PMW Sulselra yang akhirnya menjadi polemik di Suara Muhammadiyah bahkan telah menjurus kepada persoalan pribadi antara ketua panitia pembangunan (Alm.) A Pawellangi dengan beberapa pribadi di kalangan PMW periode 1971-1974 antara lain HA (Alm) Makkarusu. Permasalahan tersebut akhirnya dapat terselesaikan dengan baik sebelum keduanya berpulang ke rahmatullah

Dalam periode kepengurusan ini juga coba dirintis pendirian MPW Sulawesi Tenggara, namun pemisahan wilayah dari Sulsel ke Sultra ibarat jauh panggang dari api. Hampir tidak ada usaha serius kecuali usaha pembinaan lewat cabang Pomalaa yang sempat dihubungi sekertaris wilayah yang ia telah berusaha mengumpul-

kan dana untuk pembangunan kantor PMW Sulselra. Harapan pendirian PMW Sulra terus ditumbuhkan dengan harapan akan diselesaikan oleh kepengurusan berikutnya.

Sementara itu, pembangunan kantor PMW dengan konstruksi permanent dan persiapan yang telah dimulai sejak periode 1971—1974 sampai dengan berakhirnya periode tersebut telah berhasil dibangun 70% untuk tahap pertama. Yakni bagian belakang dan depan lantai dua sedang bagian tengah berlantai satu. sehingga pada akhir periode ini kantor tersebut sudah banyak kemajuan pembangunan tahap pertama sudah dapat dikatakan selesai dan sudah dimanfaatkan bersama dengan majelis-majelis dan ortom-ortom dan sesekali aulanya dimanfaatkan untuk pertemuan-pertemuan. Baik yang dilaksanakan oleh persyarikatan ataupun oleh masyarakat sekitarnya.

Begitupula lantai dua bagian belakang sudah sering digunakan sebagai tempat menginap terutama oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah dari daerah yang datang berkuliah di Makassar yang kala itu masih bernama Ujung Pandang.

Tak semua program kepengurusan PMW 1970—1974 ini kerja berjalan mulus. Beberapa hal menjadi perhatian ketika program kerja tidak berjalan maksimal. Beberapa hal yang tidak terlaksana dengan baik tersebut adalah:

Pembentukan jamaah tauladan

Pembentukan jamaah tauladan yang merupakan amanat dari muswil ke 31 di Parepare. Diharapkan dengan pembentukan jamaah ini semakin memotivasi warga persyarikatan untuk membentuk jamaah yang saling menyeru pada kebaikan. Jamaah ini pada akhir kepengurusan ini nyatanya masih sedikit yang terbentuk di kota Ujung Pandang.

Pemurnian amal usaha persyarikatan

Pemurnian ini kedengarannya sangat sederhana namun kenyataannya berkata lain, terjadi beberapa kasus yang menyebabkan hancurnya keakraban di antara pengurus amal usaha atau anggota. Seperti contoh kasus cabang Mamajang di Kota Ujung Pandang. Karena sikap tidak ingin diambil alih pimpinan cabang sebelumnya enggan memberikan jabatannya kepada pimpinan yang terpilih dengan alasan-alasan yang kurang dapat diterima.

Kasus ini disebabkan oleh saudara Syarifuddin bersama anggotanya. Hingga pada akhirnya PMW mengambil keputusan dengan menskorsing tiga orang anggota yakni Syarifuddin, Abubakar Dg Nai, dan Mapamassing BA.

Beberapa bulan kemudian setelah keputusan tersebut daranglah surat dari Pimpinan Pusat menanyakan perkembangan dan kemungkinan untuk direhabilitir. Sesungguhnya jika masalah pemurnian amal usaha menjadi hal yang cukup menyita perhatian

pengurus periode tersebut, terbukti dengan pelaporan yang mengatakan bahwa periode ini PMW hanya terbatas pada berusaha menyelesaikan beberapa kasus apalagi jika usaha ini ditinjau dari segi materil dan idiologis maka akan semakin ruwet keadaannya dan memaksa menghabiskan waktu untuk itu.

Peningkatan mutu anggota dan pimpinan persyarikatan

Beberapa kegiatan dibentuk pengurus untuk meningkatkan mutu anggota persyarikatan. Beberapa hal dilakukan seperti melaksanakan pengajian berkala selama dua kali sebulan yang dihadiri oleh segenap pimpinan dan anggota-anggota yang berdomisili di Ujung Pandang. Yang secara teknis dilaksanakan oleh Majelis Tabligh Wilayah.

Melaksanakan seminar tarjih dalam rangka persiapan untuk menghadiri seminar tarjih nasional yang dilaksanakan di Klaten pada bulan Mei 1978. Seminar tarjih tersebut dilaksanakan pada tanggal 21-23 April 1978 di Tamirul Masa'jid Ujung Pandang.

Dengan dibantu oleh PMD kodya Ujung Pandang dan PMC Makassar seminar tersebut dimoderatori oleh ketua Majelis Tarjih Wilayah KH Sanusi Manggu. Sedang materi diisi oleh Dra. A Rasdianah, Dr S Madjidi, Drs Amir Said, Drs Suhudi Ismail. Sementara yang member penafsiran adalah KH. A Marthan, KH Abduh Pabbaja, KH Junaid Sulaeman, dan H.M. Quraish Syihab, M.A. Akan tetapi, berhubung suatu dan lain hal

sehingga mereka urung hadir pada acara.

Peningkatan mutu juga dilakukan untuk kaum muda Muhammadiyah. Usaha ini dilakukan dengan pembinaan melalui organisasi otonom. Seperti menyediakan fasilitas kantor dan alat-alatnya sebagai pusat kegiatan sehari-hari di kantor PMW. Menyediakan alat olahraga seperti tenis meja, aula untuk latihan putera-puteri Muhammadiyah “Tapak Suci”, mengikut sertakan berulang kali pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan persyarikatan semisal melaksanakan Milad atau hari besar islam lainnya. Mengaktifkan mereka pada pengajian rutin Majelis Tabligh, membentuk badan konsultasi angkatan muda Muhammadiyah dan aktif membimbing pelaksanaan muktamar IPM yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Agustus 1975 di Ujung Pandang.

Selain itu, adapula pembinaan lewat pesantren yang dilakukan di Darul Arqam Gombara, Ujung Pandang. Untuk kelancaran pesantren ditempuh beberapa hal seperti membentuk badan Pembina pesantren, yang diberi amanat untuk mengusahakan dana baik rutin maupun pembangunan. Menetapkan pimpinan dan mengangkat guru-guru untuk melaksanakan teknis edukasi dan pendidikannya, menetapkan Mapendapwil selaku pembimbing dalam bidang ketertiban administrasi dan edukasi. Selain itu atas inisiatif pada orangtua siswa mereka membentuk ikatan wali murid Muhammadiyah (Ikwam) yang merupakan salah satu usaha untuk menunjang kelancaran pendidikan pesantren tersebut.

Adapun program peningkatan warga yang lain adalah pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera. Program ini sudah ada sejak muktamar ke- 38 di Ujung Pandang yang segenap lapisan persyarikatan harus melaksanakannya. Program ini mendapatkan bantuan dari sebuah lembaga donor luar yakni *The Path Finder Fund*. Dengan jaminan moril dari H Kusnadi untuk mendapatkan bantuan berupa proyek pendidikan kependudukan yang disingkat PKLP.

Berdasarkan penilaian PP kala itu PMW Sulselra sudah dianggap mampu melaksanakan proyek tersebut. Maka ditetapkanlah wilayah Sulselra sebagai salah satu dari beberapa wilayah di luar Pulau Jawa sebagai tempat pelaksanaan PKLP.

Mengawali realisasi proyek tersebut maka oleh PP Majelis PKU melaksanakan penataran keluarga sejahtera pada pertengahan tahun 1975 di Jakarta, yang diikuti antara lain oleh K.H Abd Jabbar Asyiri, KH Fathul Muin Dg Maggading dan Drs Zainuddin Sialla. Selanjutnya untuk pelaksanaan teknis ditunjuk Drs Zainuddin Sialla selaku ketua proyek dan Muh Alwy Uddin BA selaku sekretaris dan H Bakri Wahid BA selaku penasehat akademis.

Proyek PKLP untuk wilayah Sulselra dimulai pada bulan September 1976. Materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut tidak menggunakan metode monolitik akan tetapi dengan metode integratif yang berarti tidak diajarkan materi pendidikan kependudukan secara langsung akan tetapi diintegrasikan melalui mata pelajaran yang biasa diajarkan di dalam fo-

rum pengajian tersebut seperti pelajaran hadist tafsir akhlak dan lain-lain.

Hingga sampai pada evaluasi oleh PP unit Perencanaan Keluarga Sejahtera Muhammadiyah (UPKSM) terhadap pelaksanaan PKLP tersebut maka proyek ini masih diperpanjang untuk angkatan ke II yang dimulai pada bulan September 1977 sampai agustus 1978. Anggaran untuk kegiatan ini baik untuk angkatan 1 maupun 2 telah dipertanggung jawabkan langsung kepada PP UPKSM di Jakarta sesuai dengan pos-pos pengeluaran yang memang sudah ditetapkan oleh pusat. Adapun penggunaan keuangan yang karena kelebihan dana di alihkan kepada pos anggaran lain.

Tak hanya program kerja yang dijalankan. Masalah masalah yang timbul juga turut menjadi perhatian pada PMW periode ini. Ada beberapa persoalan-persoalan yang harus diselesaikan khususnya yang terjadi di daerah seperti:

Terusirnya beberapa warga Muhammadiyah di kota Sengkang menjelang pemilu tahun 1977 oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat mereka diungsikan ke Kota Ujung Pandang dan ditampung oleh warga Muhammadiyah lain. Dengan diberi bantuan materi dan non materi. Selain itu PMW telah mengapproach PM PPP agar mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Juga PMW meminta kepada PP Muhammadiyah agar ikut aktif mengusahakan penyelesaian di tingkat pusat.

Kemudian langkah yang diambil PMW adalah mengutus Drs Saleh Hamdani yang pada waktu itu

sebagai PMW berangkat ke Sengkang untuk mengusahakan penyelesaian secara damai namun belum diperoleh hasil yang memuaskan khususnya bagi rekan-rekan yang bersangkutan,

Juga dalam kesempatan berkunjung kepada Gubernur kala itu untuk mempertanyakan penyelesaian masalah tersebut. Dan gubernur mengatakan telah menyelesaikan masalah tersebut dengan jalur keluarga.

Adapula penerimaan wakaf diserahkan bantuan tanah kosong seluas 50 Ha oleh Hasan Lakallu tahun 1976 dengan status hak guna usaha yang tertletak di Polmas. Akan tetapi sayang sekali karena tanah tersebut surat-suratnya belum diserahkan secara lengkap sebab penyelesaiannya yang membutuhkan dana cukup banyak.

Yayasan pendidikan islam anggeraja kabupaten Enrekang yang dipimpin oleh Bukhari Razak BA selaku ketua dan Abd Gaffar santa BA selaku sekretaris pada awal desember 1976 menyerahkan gedung sekolah semi permanen yang terletak di tanah seluas 1950 Meter persegi. Sekolah tersebut sebelumnya digunakan untuk PGA Islam akan tetapi oleh karena perkembangan sekolah tersebut tidak menggembirakan maka atas persetujuan pengurus yayasan menyerahkannya kepada Muhammadiyah.

Selain itu adapula perkembangan menggembirakan dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Adalah fakultas Ilmu Pendidikan kelas dari Enrekang yang telah berhasil mencetak lebih dari 60 orang sarjana muda

Negara sekalipun hanya dipimpin dari Ujung Pandang yaitu oleh Drs Zainuddin Sialla selaku dekan dan kepada perguruan tinggi inilah diserahkan gedung tersebut untuk dimanfaatkan sebagai tempat kuliah.

Sehingga hingga akhir laporan ini ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu dalam masalah internal persyarikatan yakni; (1) Ranting dan cabang yang kebanyakannya hanya tinggal nama saja; (2) Belum terlaksananya jamaah dan dakwah jamaah pada ranting-ranting; (3) Pembaharuan surat keputusan ranting dan cabang sesuai instruksi PP masih sangat seret jalannya; (4) Belum mantapnya kesadaran berorganisasi dan belum kokohnya istiwamah warga; (5) Dana persyarikatan memprihatnkan; (6) Masih sangat kurang kesadaran komunikasi, laporan, dokumentasi dan catatan persyarikatan.

Sementara masalah eksternal ialah; (1) adanya anggapan sementara pihak bahwa Muhammadiyah identik dengan partai politik tertentu; (2) Masih adanya anggapan bahwa anggota Korpri tidak boleh menjadi anggota Muhammadiyah; (3) Munculnya wadah-wadah baru yang lapangan ruang geraknya sama dengan ruang gerak atau lapangan usaha Muhammadiyah.

Menjawab permasalahan di atas maka Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dibawah kepemimpinan KH. Ahmad Makkarasus, mengeluarkan sejumlah argumentasi pembelaan diri, seperti; (1) Terbitnya surat edaran Menteri Agama bahwa dakwah tidak lagi memerlukan izin; (2) Pernyataan Kaskomkamtib Jenderal Yoga Sugama dalam Mukta-

mar ke-40 bahwa pegawai negeri tidak dilarang menjadi anggota Muhammadiyah; (3) Penjelasan Menteri Dalam Negeri Jenderal Amir Mahmud kepada PP Muhammadiyah bahwa pegawai negeri/Korpri tidak dilarang menjadi anggota Muhammadiyah.

DRS. MUHAMMAD SALEH HAMDANI (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1977-1980)

Nama lengkapnya adalah Muhammad saleh Hamdani Daeng Nassa. Dia lahir di Salaka Polombangkeng, Takalar pada tanggal 17 Mei 1934, putera dari Haji Binu Daeng Tarra dan Hajjah Lu'mu Daeng Ngugi. Haji Binu Daeng tarra adalah anggota Muhammadiyah Group Palleko-Takalar yang dipimpin oleh Makkaraeng Daeng Manjarungi. Pada tanggal 12 Mei 1967 Muhammad Saleh Hamdani menikah dengan Hj. Rahmatiah Dg Parang dikaruniai lima orang anak yaitu St. Sarah Saleh Hamdani, Muhammad Iqbal Saleh Hamdani (Diploma STAN), Muhammad Imran Saleh Hamdani (Dokter Unhas), Muhammad Irfan Saleh Hamdani (Sarjana Teknik ITB), dan Zakiah Saleh Hamdani (Sarjana Teknik ITB). Drs. Muhammad Saleh Hamdani meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1980.

Saleh Hamdani menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di Salaka Takalar pada tahun 1950. Setamatnya di sekolah dasar, dia hijrah ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan. Di Makassar, dia menempuh pendidikan di dua tempat. Pada pagi hari, dia belajar di Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) dan pada waktu

sore, dia belajar di Madrasah Wustha Muallimin Muhammadiyah Jongaya. Dia tamat dari kedua lembaga pendidikan tersebut pada tahun 1953.

Setelah menyelesaikan studinya di jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama, Saleh Hamdani meneruskan pendidikannya di Sekolah Menengah Ekenomi Atas (SMEA). Sementara belajar di SMEA, dia mengikuti Ujian Guru Agama dan berhasil memperoleh Ijazah Guru Agama Islam pada tahun 1954. Dia tamat SMEA pada tahun 1956.

Berbekal Ijazah SMEA, Saleh Hamdani diterima kuliah di Jurusan Ekonomi Umum Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar. Dia memperoleh gelar Sarjana Muda pada tahun 1961 dan memperoleh gelar sarjana lengkap pada tahun 1965.

Berbekal ijazah Guru Agama Islam, Saleh Hamdani diterima menjadi guru di sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun Gunungsari dan di Muallimin Muhammadiyah Jongaya pada tahun 1954. Sambil mengajar di dua tempat, dia pun belajar di SMEA sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Setelah tamat SMEA pada tahun 1956, Saleh Hamdani meninggalkan lapangan pekerjaannya di dunia pendidikan yang mungkin dianggapnya kurang menjanjikan. Dia terangkat menjadi pegawai Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Dia bekerja sambil kuliah.

Menjelang selesai sarjana lengkapnya di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Saleh Hamdani, B.A. meninggalkan lagi lapangan pekerjaannya sebagai pe-

gawai bank dan kembali lagi ke dunia pendidikan. Dia diangkat menjadi Kepala Sekolah Kursus Pegawai Administrasi (KPA) pada tahun 1965.

Pada tahun 1973. Drs. Muhammad Saleh Hamdani, diangkat menjadi Direktur Akademi Administrasi Niaga (AAN). Jabatan itu dipegangnya sampai akademi tersebut diintegrasikan ke dalam Universitas Hasanuddin pada tahun 1977. Sejak tahun 1977, dia menjadi Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin sampai wafatnya pada tanggal 17 Oktober 1980.

Kiprah di Muhammadiyah

Keterlibatannya dalam Muhammadiyah dawali dengan menjadi anggota di Cabang Mamajang pada tahun 1962 dengan nomor baku 171.163. Setelah beberapa saat menjadi anggota biasa, dia pun terpilih menjadi Pimpinan Muhammadiyah Cabang Mamajang, meskipun bukan Ketua. Selanjutnya, dia menjadi Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sulawesi Selatan mulai tahun 1965 sampai tahun 1975.

Pada masa kepemimpinan Haji Ahmad Makkarusu Amansyah, Drs. Muhammad Saleh Hamdani adalah Wakil ketua I Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) Sulawesi Selatan dan Tenggara. Setelah Haji Ahmad Makkarusu Daeng Ngilau meninggal dunia, dialah yang menjadi ketua melanjutkan periode yang masih tersisa. Pada musyawarah Wilayah Muhammadiyah di Bulukumba tahun 1978, dia terpilih menjadi Ketua Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan

Tenggara. Tugas itu diembannya sampai dia meninggal dunia tahun 1980.

Sewaktu menjabat Ketua PMW Sulselra, Muhammad Saleh Hamdani didampingi oleh KH. M. Sanusi Maggu sebagai Wakil Ketua I, H. Djamaluddin Amien sebagai Wakil Ketua II, dan Drs. A. Tadjuddin Baso Rum sebagai Wakil Ketua III, Drs. Zainuddin Sialla' sebagai Sekretaris, Abd. Rasyid Abdullah, B.A. sebagai Wakil Sekretaris I, Drs. M. Room Narsam sebagai Wakil Sekretaris II, dan H. A. Salama Tambo sebagai Bendahara.

H. Saleh Hamdani juga didampingi oleh dr. Andi Lawang, Drs. Nasruddin Razak, dr. H. M. N. Anwar, S.K.M., H. A. Qadir Sarro, dan Salahuddin Mahmud sebagai anggota pimpinan hingga Saleh Hamdani mangkat.

Di masa kepemimpinan Saleh Hamdani ini, penelitian terhadap penerimaan anggota Muhammadiyah sesuai persyaratan pimpinan pusat diupayakan seefektif mungkin. Calon anggota yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota diperhatikan itikad baik dan kemampuannya memenuhi kewajiban terhadap persyarikatan. Klasifikasi keanggotaan tersebut adalah simpatisan, calon anggota, dan anggota inti. Saat itu, pengurusan kartu anggota tidak secepat sekarang ini. Kartu anggota atau persetujuan keanggotaan oleh pimpinan pusat membujutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, PMW harus meneliti amalan nyata calon anggota tersebut untuk diklasifikasikan sesuai dengan petunjuk pimpinan pusat.

Pembinaan potensi dan pendirian cabang dan ran-

ting juga dilakukan dalam kepemimpinan Saleh Hamdani ini. Begitu juga dengan penertiban registrasi anggota dan intensifikasi registrasi, sehingga membuat tenaga khusus untuk menangani hal ini di setiap tingkatan persyarikatan diperlukan. Untuk itu, PMW Sulselra membuat petunjuk pelaksanaan registrasi dan herregistrasi untuk cabang dan ranting, serta petunjuk pembentukan cabang dan ranting sesuai AD/ART. Selain itu, intensifikasi pengajian dan kursus kemuhammadiyah juga dilaksanakan untuk pembinaan anggota sehingga dapat dijadikan sebagai anggota inti.

Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) juga dilakukan dengan pengenalan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), pemosisian AMM dalam kepengurusan amal usaha, serta intensifikasi pengajian bersama pimpinan persyarikatan dan pembinaan forum-forum pengaderan. Forum pengaderan AMM ini juga diarahkan untuk persiapan dan pembentukan anggota pimpinan yang bermutu dan berdisiplin.

Selain itu, salah satu tindakan yang dilakukan di periode kepemimpinan Saleh Hamdani ini adalah pengajuan nama-nama guru swasta Sekolah Muhammadiyah kepada Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan (Pemprop. Sulsel) untuk diangkat menjadi guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah guru swasta yang diusulkan oleh PMW Sulselra periode ini sebanyak 701 orang. Usulan tersebut disambut baik oleh Pemprop Sulsel dengan diteruskannya usulan tersebut kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

(BAKN) di Jakarta. Sayangnya, usulan tersebut ditolak oleh BAKN karena nama-nama yang diusulkan dinilai tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.

Dalam kepemimpinan Saleh Hamdani, Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Tenggara (PMW Sultra) juga resmi memisahkan diri dari PMW Sulsel. Berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 12/PP/V/1980 tertanggal 13 Rajab 1400/ 28 Mei 1980, PMW Sulselra telah terbagi menjadi PMW Sulsel dan PMW Sulra. Meskipun, PMW Sulawesi Tenggara ini baru menjalankan kepengurusannya pada 1 Muharram 1401 dipimpin oleh H. Muhammad Amin.

PMW Sulselra di bawah kepemimpinan Muhammad Saleh Hamdani ini juga pernah mengirimkan pernyataan sikap atas produksi film dan reklame yang menyimpang dari Ketetapan MPR RI No IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam surat yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, PMW Sulsera menyatakan bahwa film dan reklame yang mempunyai daya tarik pembentukan sikap pada diri individu, sudah banyak menyimpang karena telah dikuasai oleh kepentingan komersial semata. Hal ini dapat menghancurkan sendi-sendi kepribadian bangsa. Hancurnya nilai-nilai budaya bangsa, melunturnya pengembangan kreativitas generasi muda, dan pelecehan terhadap martabat kaum wanita demi keuntungan komersial dalam produksi dan pengedaran film.

Hal yang lebih meresahkan adalah reklame di depan bioskop, iklan di majalah dan koran-koran harian yang terbit sepengetahuan pemerintah. Di media-media ini telah terpampang iklan-iklan film yang dianggap dapat langsung memengaruhi masyarakat, terlebih generasi muda ke tingkat menggoda sikap naluri biologis melalui gambar-gambarnya.

Atas persoalan ini, PMW Sulselra di bawah kepemimpinan Saleh Hamdani meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah positif dan bimbingan yang memadai sehingga semua produksi film dapat sesuai dengan GBHN dan membina manusia Indonesia seutuhnya meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. PMW Sulsel juga meminta kriteria penilaian yang sesuai dengan GBHN dan nilai moral juga harus disusun oleh Badan Sensor Film Indonesia, termasuk pengaktifan Badan Sensor Film Daerah. Melalui pengaktifan Badan Sensor Film Daerah ini, kepekaan sosial budaya, adat-istiadat, dan agama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dapat menjadi landasan penilaian film yang diedarkan sebagai konsumsi umum.

Selain itu, PMW Sulselra juga meminta pemerintah mengharuskan semua pengusaha bioskop, penerbit majalah, koran harian dan sejenisnya untuk menaati TAP MPR terkait GBHN dalam pemasangan atau pembuatan reklame dan iklan. Hal ini dilakukan agar para pengusaha juga memiliki rasa tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia yang turut terlibat dalam proses

pembangunan dan pembinaan kepribadian bangsa, khususnya kepribadian generasi muda.

K.H. MUHAMMAD SANUSI MAGGU (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1980-1984)

K. H. Muhammad Sanusi Maggu lahir pada tahun 1913 di Desa Lise Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dari pasangan suami isteri La Maggu dan I Canname. Kedua orang tuanya memberinya nama Sanusi dan setelah belajar kepada Kiai Haji Ibrahim di Rappang, Sang Kiai melengkapi namanya menjadi Muhammad Sanusi Maggu. Dia adalah anak kedua dari empat orang bersaudara, yaitu: Patinang, Muhammad Sanusi Maggu, Kocci alias Maryam, dan Saenabe.

Sanusi kecil belajar mengaji Alquran, mulai dari *allepu-lepu* hingga *maccara baca* di rumah di rumah Haji Guru (Imam Desa Lise). Setelah tamat, dia pindah ke Rappang Kecamatan Panca Rijang mengaji pondok di bawah bimbingan K.H. Ibrahim (*gurunna Andi*) ayah dari K.H. Malik Ibrahim selama 12 tahun. Bacaan alquran Sanusi Maggu sering dipuji oleh gurunya karena kecepatannya memahami pelajaran yang diberikan kepadanya dan kebagusan bacaanya.

Setelah menyelesaikan proses pendidikan, Muhammad Sanusi Maggu kembali ke Lise. Di Lise, dia mulai tampil mendakwahkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan di Rappang. Tetapi, tidak berapa lama di Lise, Muhammad Sanusi Maggu



K.H. MUHAMMAD SANUSI MAGGU
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1980-1984

hijrah ke Pare-pare dan bergabung dalam organisasi Muhammadiyah Cabang Pare-pare.

Ketika Muhammad Sanusi Maggu menetap di Pare-pare inilah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) datang ke Makassar. Mendengar bahwa di Makassar ada seorang ulama dari Minangkabau, Muhammad Sanusi Maggu pun hijrah ke Makassar dengan maksud berguru kepada Hamka. Maksud dan keinginannya pun tercapai, setelah Muhammad Sanusi Maggu diterima belajar Madrasah Muallimin yang waktu itu lebih dikenal dengan nama *Tabligh School* yang dipimpin Hamka.

Seperti disebutkan di depan bahwa Hamka datang ke Makassar atas penugasan dari *Hoofdt Bestuur* Muhammadiyah. Maka, sehubungan dengan berakhirnya tugasnya, HAMKA pun kembali ke Sumatra Barat pada tahun 1935. Ketika itulah Muhammad Sanusi Maggu ikut bersama HAMKA ke Padang Panjang untuk melanjutkan pelajarannya pada “*kulliatul muballighin*”.

Muhammad Sanusi Maggu kembali ke Sulawesi Selatan pada tahun 1938, setelah menyelesaikan pendidikan. Tidak lama kemudian, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekkah dan tinggal mengaji Al-Islam selama dua kali musim haji. Setelah kembali dari tanah suci, barulah dia dinikahkan dengan Hj. Kaddase. Tetapi, karena tidak dikaruniai anak, maka dia menikah lagi dengan Hj. Bakkennung dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Dra. Hj. St. Ramlah Sanusi dan Ir. Fahmi Sanusi.

Setelah berkeluarga dan menetap di Pare-pare sebagai mubalig, masyarakat pun memberinya gelar

‘kiai’ atau dalam bahasa Bugis *anre’gurutta*. Sejak saat itu, gelar ‘kiai’ melekat di depan namanya.

Walaupun beliau menetap di Pare-pare, daerah operasional dakwahnya meliputi wilayah *Aja Tappareng* dan sekitarnya, yaitu Sidenreng, Rappang, Sawito, Mallusetasi, Pare-pare, Soppeng Riaja, Majene, dan Wajo.

Jabatan-jabatan dalam Muhammadiyah dan amaliah yang pernah diemban oleh Kiai Haji Muhammad Sanusi Maggu, ialah Kepala SMP Muhammadiyah Sengkang, Kepala SMA Muhammadiyah Pare-pare, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Pare-pare, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan 1980—1984.

Adapun aktivitas dan jabatan yang pernah diembanya di luar Muhammadiyah antara lain, adalah sebagai pejuang perintis kemerdekaan bersama Andi Abdullah Bau Massepe, Andi Makkasau, dan La Nakka. Dia juga pernah menjadi anggota DPRD Pare-pare mewakili Muhammadiyah selama beberapa bulan karena dia mengundurkan diri sebelum masa tugasnya berakhir. Alasan pengunduran dirinya adalah karena dia merasakan bahwa dunia politik bukanlah dunianya. Dia juga pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Kota Parepare.

Memimpin Muhammadiyah Sulsel

Kepemimpinan periode Sanusi Maggu adalah periode lanjutan dari kepemimpinan Saleh Hamdani yang

mangkat pada tahun 1980. Awalnya, Sanusi Maggu hanya diamanahkan sebagai pelaksana tugas ketua karena jabatan Wakil Ketua I yang saat itu ia emban, namun karena musywil untuk laporan pertanggungjawaban periode 1978—1981 tidak dilaksanakan, maka ia pun diamanahkan untuk melanjutkan periode 1981-1983.

Sanusi Maggu resmi berkhidmat sebagai Ketua PMW Sulsel lanjutan pada 17 Maret 1981 dengan dasar Surat Ketetapan PMW Sulsel Nomor A-2/051/1401. Ia merupakan ketua pertama PMW Sulsel pasca mandiri-nya PMW Sulawesi Tenggara. Periode kepemimpinan K. H. Sanusi Maggu ini idealnya memang telah berakhir pada tahun 1983, namun, karena kondisi politik pada saat itu, musywil baru bisa dilaksanakan pada tahun 1986 di Palopo. Musywil Palopo ini mengevaluasi kepengurusan periode 1978—1985.

Personalia kepengurusan di periode Sanusi Maggu tidak terdapat banyak perubahan dari periode Saleh Hamdani. Hanya Drs. A. Tadjuddin Baso Rum yang semula menjabat sebagai Wakil Ketua III naik posisi menjadi Wakil Ketua II, sementara H. A. Qadir Sarro yang semula anggota pimpinan, naik posisi menjadi Wakil Ketua III. Drs. H.M. Marzuki juga ditarik masuk untuk mengisi posisi anggota pimpinan yang ditinggalkan H. A. Qadir Sarro (susunan personalia pengurus PMW, majelis, lembaga, badan, dan biro terlampir).

Majelis yang terbentuk di masa kepemimpinan Sanusi Maggu adalah Pimpinan Muhammadiyah Majelis Tarjih, Pimpinan Muhammadiyah Majelis Tabligh,

Pimpinan Muhammadiyah Majelis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (P. P. & K), Pimpinan Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Pimpinan Muhammadiyah Majelis Ekonomi, dan Pimpinan Muhammadiyah Majelis Penyelamat Kesengsaraan Umat (PKU). Konsolidasi organisasi, pemantapan kepemimpinan, penertiban administrasi di seluruh tingkatan pimpinan masih menjadi fokus utama kepengurusan ini. Kerja-kerja persyarikatan yang dilakukan berprinsip pada kerja sama atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikhlaskan tenaga, pikiran, dan dana yang dapat dipersembahkan dalam rangka terwujudnya tujuan atau cita-cita persyarikatan, serta berkhuznudzan (berperisangka baik) antar unsur pimpinan dalam menangani kewajiban yang diamanatkan kepadanya.

Untuk konsolidasi pimpinan dan organisasi, tidak hanya agenda rapat rutin pimpinan yang dilaksanakan. Pengajian rutin bulanan pimpinan oleh Majelis Tablig PMW dilaksanakan pada tiap malam jumat pekan pertama dan ketiga. Pengajian ini dihadiri oleh unsur pimpinan, majelis, dan ortom. Sementara itu, untuk konsolidasi dengan daerah, kunjungan kerja ke beberapa daerah dan cabang pun intensif dilakukan 3—5 kali di tiap-tiap daerah. Alhasil, angka 136 pimpinan cabang dapat dicapai pada periode dan menyisakan satu daerah yang belum berdiri pimpinan daerah muhammadiyah saat itu, yaitu daerah Majene. Pertemuan antara majelis, biro, lembaga, badan dan ortom tingkat wilayah juga diadakan satu kali dalam satu bulan setiap

selasa pagi pekan pertama untuk konsolidasi dan pemantapan kepemimpinan lingkup PMW.

Meski konsolidasi pimpinan telah dilaksanakan dan efek dari konsolidasi organisasi ini telah terasa di tataran pimpinan tingkat daerah, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah masih kurangnya kader Muhammadiyah yang bersedia menjadi unsur pimpinan di tingkat cabang. Hal ini masih merupakan imbas dari ketegangan iklim politik Pemerintah Orde Baru dan Muhammadiyah. Sebagian kader atau simpatisan Muhammadiyah masih trauma dengan sentimen yang pernah diterimanya pada masa pemilu tahun 1977. Termasuk karena larangan anggota KORPRI untuk berorganisasi di organisasi lain.

Sebenarnya juga, jumlah pimpinan cabang yang berada di bawah naungan PMW Sulsel adalah 172 cabang. Akan tetapi, 36 cabang dianggap masih belum berhasil dibina kembali melalui konsolidasi organisasi yang dilakukan. Di cabang-cabang ini, kader Muhammadiyah masih ada, hanya saja dengan jumlah yang semakin menipis dan tidak seorang pun yang bersedia untuk menjadi pimpinan.

Meski krisis kader pimpinan tersebut meresahkan PMW Sulsel, penertiban sistem administrasi sebagai salah satu fokus kerja tidak turut terhalang. Periode ini memberlakukan Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) dan penerbitan Pedoman Pengelolaan Organisasi Terpadu dengan Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) pada 4 Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD), yaitu PMD Ujung Pandang, PMD Pare-pare,

PMD Pinrang, dan PMD Bantaeng sebagai suatu inovasi. Pedoman Pengelolaan Terpadu dengan SAMSAT ini diputuskan oleh PMW Sulsel pada 17 Rajab 1404 bertepatan 19 April 1984. Pedoman ini berlaku mulai tanggal 1 Rajab 1404/ 2 April 1984.

SAMSAT yang tersebar di empat daerah ini mengatur tentang kepaduan kerja antara pimpinan, majelis, staf amal usaha, dan staf sekretariat pimpinan tiap tingkatan. Pelaksanaan administrasi diatur harus terpusat pada sekretariat yang terkoordinasi, sementara kegiatan-kegiatan administrasi yang dimaksud adalah pembentukan ortom, amal usaha, pengelolaan personalia yang meliputi pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan atau kepengurusan di tiap tingkatan, pengelolaan permusyawaratan berupa perencanaan, penyelenggaraan, dan penyusunan keputusan permusyawaratan. Selain itu, pengelolaan prasarana seperti pemilikan bukti hak milik, penaatan dan penggunaan lokasi hak milik persyarikatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, termasuk tata kelola administrasi keuangan.

Untuk kesekretariatan PMW Sulsel, sekretariat terletak di atas tanah seluas 13 x 30 M di Jalan Gunung Lompobattang Nomor 149. Sementara itu, daftar inventaris yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban PMW Sulsel Periode 1978—1985 menyebutkan bahwa pimpinan wilayah saat itu hanya memiliki dua kendaraan bermotor, yaitu satu buah mobil Jeep Toyota Hartop dan satu buah motor bebek Yamaha .

Terkait pengadaan mobil dinas ini, dalam Laporan Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) PMW Sulsel tahun 1981 disebutkan bahwa Mobil jenis jip hartop keluaran Toyota ini dibeli pada tanggal 19 Rajab 1401/ 23 Mei 1981, dan sebagian harganya dibayarkan oleh Drs. H.M. Jusuf Kalla, Dirut NV. Hadji Kalla *Trading Coy* saat itu sebagai sumbangan. Mobil ini diberi nama *Al-Buraq* karena mulai beroperasi pada 27 Rajab 1401/ 2 Juni 1981. Sementara itu, menurut kisah Alwi Uddin (Sekretaris Majelis Tabligh PMW Sulsel saat itu), mobil ini, selain karena memang dibutuhkan untuk mempermudah akses kerja organisasi, memang dibeli sebagai unjuk gigi Muhammadiyah Sulsel bahwa untuk mendapatkan mobil operasional bisa dilakukan meski tanpa mengharap bantuan dari pemerintah yang saat itu mengeluarkan kebijakan pembagian satu mobil untuk setiap ormas. Hingga mobil ini pun tiba di sekretariat PMW Sulsel, yang pertama kali digunakan bertepatan pada 1 Muharram 14301 H. Inilah alasan mobil tersebut dinamakan *alboursaq*.

Wujud ketertiban administrasi PMW periode Sanusi Maggu yang lainnya adalah data potensi dan data pertambahan anggota Muhammadiyah yang rinci. Data ini dapat ditemukan dalam Laporan Akhir PMW Sulsel Periode 1978—1985. Untuk data potensi Muhammadiyah dipaparkan data pimpinan daerah beserta pimpinan cabang yang dinaungi, lengkap dengan nomor SK-pendirian dan jumlah anggota laki-laki dan perempuan di setiap Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Untuk

pertambahan jumlah anggota laki-laki mencapai angka 2413 orang, sementara untuk pertambahan anggota perempuan mencapai 766 orang dalam periode 1978—1985.

Laporan angka pertambahan anggota dan potensi cabang-ranting ini merupakan sesuatu hal yang tidak mustahil karena pada masa itu, domain tanggung jawab pimpinan Muhammadiyah wilayah memang adalah cabang dan ranting. Pimpinan daerah dan pimpinan wilayah berada dalam domain pimpinan Pusat (wawancara Alwi Uddin).

Tidak hanya itu, laporan infak anggota, infak tiap pimpinan cabang, simpatisan persyarikatan, dan dermawan juga merupakan wujud dari penertiban administrasi ini. Begitu pun dengan lampiran kas persyarikatan. Infak inilah sumber keuangan PMW Sulsel yang diperoleh dari iuran anggota pimpinan cabang.

Akan tetapi, seperti yang telah dimafhumi, bahwa masalah memang bisa saja akan selalu ada dalam kehidupan, termasuk dalam kepengurusan persyarikatan. Keuangan PMW, terkhusus pembayaran infak oleh pimpinan cabang juga banyak sekali kendala. Walaupun begitu, alhamdulillah, persyarikatan masih tetap berkisah dalam dakwah sosioereligiusnya.

Di bawah kepemimpinan Sanusi Maggu, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) juga diberikan ruang untuk duduk di struktur majelis PMW. Perhatian kepada AMM oleh periode ini juga dapat dilihat dari pengupayaan dihadapkannya kembali Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Sulawesi Selatan. Baitul

Arqam Muhammadiyah pun wajib diikuti oleh seluruh kader, meski sebelumnya kader tersebut sudah kader dalam ortom.

Periode kepemimpinan Sanusi Maggu juga berhasil mendirikan empat pondok pesantren, yaitu Pesantren Muhammadiyah Salutabang tingkat Madrasah Ibtidayah di Larompong, Luwu, Pesantren Muhammadiyah Balebo tingkat Madrasah Tsanawiyah di Masamba, Luwu (sekarang Luwu Utara), Pesantren Muhammadiyah Marannu tingkat Madrasah Tsanawiyah di Mattiro Bulu, Pinrang, dan Pesantren Muhammadiyah Mattekko tingkat Madrasah Ibtidayah di Tinggi Moncong, Gowa. Selain itu, pada tahun 1984, Panitia Pendiri Pesantren Muhammadiyah Cerowali, Tanasitolu, Wajo baru saja dibentuk. Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan pembangunan pesantren yang rencananya akan setingkat madrasah tsanawiyah.

Laporan majelis juga menyebutkan, periode ini telah melakukan penerbitan diktat silabus ceramah dan khutbah ramadan sebanyak lima kali. Pengiriman mubalig ke daerah pada bulan ramadhan, hari besar islam, dan pengiriman khusus ke perusahaan negara dan swasta seperti, PT Inco, Aneka Tambang Pomala, dan PT Freeport Indonesia Incorporate di Papua.

Forum diskusi secara periodik antar mubalig, penerbitan mubalig juga dilakukan antara lain di Ujung Pandang, Pare-pare, Maros, Bulukumba, Palopo, Polmas, Kolaka, dan Toraja. Kesemua agenda ini merupakan program kerja Majelis Tablig periode ini.

Untuk majelis pembina kesejahteraan umat

(PKU), kegiatan yang dilakukan adalah pendidikan medis, pembinaan fakultas perawat, pembinaan 10 rumah bersalin, 8 panti asuhan, dan 3 balai pengobatan.

K.H. DJAMALUDDIN AMIEN (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 1985—2000)¹

K.H. Djamaluddin Amien lahir di Tekolampe, di sebuah desa yang terletak di bagian selatan Kota Balangnipa, Sinjai. Lahir dari pasangan suami-isteri Muhammad Amin dan St. Sukaenah pada tahun 1930. Nama Djamaluddin diberikan oleh neneknya, seorang Imam Masjid Tekolampe. Dia beruntung karena hidup dengan ayah dan ibu yang taat beribadah. Ayahnya senantiasa adzan di setiap waktu salat magrib dan subuh, ibunya pun sering membaca wirid sementara memangku putra tunggalnya itu. Inilah yang sangat berpengaruh dalam pembentukan iman seorang Djamaluddin Amien. Selain itu, setiap malam jumat, Kiai Djamal selalu menghadiri acara *barazanji* di masjid, oleh karena banyaknya kue-kue sumbangan masyarakat untuk acara itu. Kebiasaan inilah yang tentunya menambah perasaan ke-Islam-annya.

Ketika berumur lima tahun lebih, ia dimasukkan pada sekolah dasar yang ada di desanya. Ini karena desakannya sendiri kepada orang tuanya, padahal, saat

1 Bagian ini diambil dari Otobiografi yang ditulis sendiri oleh KH. Djamaluddin Amien, disertai dengan penambahan sejumlah informasi yang didapatkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan periode 1985-1990.



K.H. DJAMALUDDIN AMIEN
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 1985—2000

itu ia belum cukup umur. Tiga tahun kemudian, ia pindah ke Vvs (sekolah lanjutan di Balangnipa, ± 2 km dari desanya). Setiap hari Djamaluddin berjalan kaki ke sekolahnya ini sampai ia tamat pada tahun 1942.

Pada tahun yang sama, Jepang mendarat di Indonesia dan berkuasa di Balangnipa. Djamaluddin tidak dapat lagi melanjutkan sekolahnya. Ia bekerja di sawah membantu ayahnya dan memelihara kuda yang digunakan ayahnya berdagang beras dan gula merah di Palattae, Kabupaten Bone, ± 30 km dari Balangnipa. Suatu kali, Djamaluddin pernah ikut ayahnya berdagang ke Palattae ini.

Ketika Djamaluddin menginjak dewasa, ia jatuh cinta pada seorang gadis di desanya. Ketika itu, K.H. Husain yang baru pindah dari Bone membuka Madrasah di desa Teko-lampe. Anak-anak di desa itu ramai-ramai masuk di madrasah itu, termasuk gadis pujaan Djamaluddin. Mengetahui gadis itu mendaftar ke sekolah tersebut, Djamaluddin pun ikut mendaftar. Di madrasah itu, Djamaluddin belajar ilmu *sharaf* dengan cara menghafal di luar kepala seperti menghafal surah al-fatihah.

Rupanya, Djamaluddin mendapat hidayah dari Allah. Ia tertarik dengan bahasa Arab dan lanjut belajar *nahwu* pada Ustaz Marzuki Hasan, seorang ulama muda di Balangnipa yang dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah. Tamat mempelajari *jurumiah*, ia lanjut mempelajari *Mutammimah*, selanjutnya *qatrunnada*. Djamaluddin tambah tertarik mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Ia ikut belajar tafsir dengan kitab *Tafsir*

Jalalain di pagi hari dan fikih dengan kitab *Fathul Mu'in* di sore hari pada K.H. Muhammad Thahir, seorang ulama besar di Balangnipa yang dikenal sebagai Kali Balangnipa.

Djamaluddin mengenal Muhammadiyah lewat Hizbul Wathan yang ia sering lihat berbaris, bernyanyi, dan meniup peluit di lapangan depan rumahnya. Ia juga pernah membantu Muhammadiyah mengantarkan zakat fitri untuk fakir miskin di desanya. Setiap bulan Ramadan, ia salat tarawih di sekolah Muhammadiyah dengan imam dan penceramah tunggal yakni Ustaz Marzuki Hasan.

Pada awal tahun 1948, Ali AT datang di Balangnipa dari Makassar mengajak anak-anak remaja bergabung dalam HW. Djamaluddin pun bergabung, walaupun susah mendapat baju seragam, apalagi sepatu. Saat itulah, dia resmi masuk dalam lingkungan Muhammadiyah. Ibunya gembira atas hal tersebut.

Pada tahun itu juga, saat bulan Ramadan, Abdullah Sabda pulang ke Balangnipa sebagai pelajar Muallimin Muhammadiyah Bantaeng. Pada saat itulah, Djamaluddin memutuskan untuk melanjutkan pelajarannya di Muallimin Muhammadiyah Bantaeng karena diajak oleh Abdullah Sabda. Sayangnya, Djamaluddin mengalami kesulitan biaya. Ayahnya yang hanya seorang petani biasa tidak mampu membiayainya. Tetapi, karena ia memiliki kemauan keras, ia lalu menghubungi ibu Ros, ibunda Prof. Dr. Kahar Mustari, sepupu Djamaluddin yang ketika itu berada di Bantaeng. Walhasil, Djamaluddin diterima di kelas II Muallimin. Di Mualli-

min, ia bertemu para kader persyarikatan dari seluruh penjuru Sulawesi Selatan, antara lain, Aminullah Lewa dari La'bakkang, Abidin Senreng dari Enrekang, Andi Rosdianah dari Bulukumba dan Andi Lolo Tonang dari Tiro Bulukumba. Ketika itu, belum ada organisasi pelajar nasional seperti IPM dan sebagainya. Oleh Karena itu, dibentuklah organisasi lokal bernama PPM (Pemuda Pelajar Muhammadiyah).

Citra Muallimin cukup baik dengan siswa-siswanya yang berkualitas. Mereka sudah menjadi mubalig, baik tulisan maupun lisan yang disenangi oleh masyarakat. Di samping itu, dengan seni bambunya yang digemari oleh masyarakat dan olahraga sepak bolanya yang disegani baik sesama pelajar maupun kesebelasan masyarakat menjadikan Muallimin Muhammadiyah tambah populer.

Di Muallimin, Djamaluddin bertemu Ustaz Madjidi, Abdul Rasyid Faqi, dan Badaruddin Ali. Atas bimbingan Ustaz Madjidilah ia memahami Islam dan lebih memahami bahasa Arab, sementara, untuk semangat patriotik, Djamaluddin belajar kepada Ustaz Abdul Rasyid Faqi, Pemimpin Pemuda Penerjang Penjajah di Bantaeng yang selalu dengan gagah berani menghadapi tentara Belanda ketika menggeledah rumahnya. Untuk nilai-nilai akhlak mulia, Djamaluddin belajar kepada Ustaz Badaruddin.

Tahun 1950, Muallimin Muhammadiyah pindah ke Bulukumba karena gedung sekolahnya ditempati oleh tentara (TNI). Hanya sebagian pelajar dan guru yang pindah, yaitu Ustaz Madjidi, pelajar kelas 5, dan pela-

jar kelas 6, sementara, selebihnya tetap di Bantaeng. Mereka belajar di Bulukumba selama dua tahun. Pada tahun 1952, ketika diadakan acara penamatan, murid-murid yang ditamatkan memohon agar pelajarannya ditambah 1 tahun lagi. Akan tetapi, Muhammadiyah cabang Bulukumba tidak menyetujui. Ustaz Majdidi sebagai kepala sekolah melepas mereka tanpa ijazah.

Beberapa dari mereka yang ditamatkan itu, termasuk Djamaluddin, tinggal berbakti di Muallimin Bulukumba. Akhir tahun 1952, dia ditawarkan oleh Muhammadiyah cabang Bantaeng untuk mengajar di Muallimin, sekolah yang ia tinggalkan dahulu dengan uang 200 rupiah sebagai uang perjalanan. Djamaluddin akhirnya pergi ke Bantaeng atas persetujuan gurunya Ustaz Madjidi di awal tahun 1953. Pesan gurunya, “Engkau harus bersikap orang tua karena engkau akan menghadapi remaja, sementara engkau masih muda.”

Paling tidak, setiap bulan, Djamaluddin menemui gurunya di Bulukumba untuk belajar dan menanyakan masalah-masalah yang perlu pemecahan. Begitulah yang berjalan bertahun-tahun, sampai Ustaz Madjidi pun pindah ke Makassar. Djamaluddin kembali bertemu gurunya itu ketika ia pindah ke Makassar pada tahun 1962.

Sebagai guru dalam persyarikatan, tentu Djamaluddin aktif dalam Muhammadiyah. Dari ketua ranting, ketua cabang, sampai menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantaeng. Sampai tahun 1962, ketika pindah ke Makassar, Djamaluddin masih ketua PDM Bantaeng. Selain itu, ia juga menjabat Ke-

tua Pemuda Muhammadiyah dan ketua GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) Kabupaten Bantaeng.

Pada pemilihan umum pertama, tahun 1955, Djamaluddin selaku ketua GPII bersama MASYUMI melakukan kampanye, hingga akhirnya 90 % kursi DPR Bantaeng dimenangkan oleh MASYUMI. Djamaluddin ditawarkan satu kursi, namun karena dia lebih memilih mengajar, maka tawaran itu ditolak.

Sebelum Djamaluddin tiba di Bantaeng, Samir Imam Batua, Kepala sekolah Muallimin telah meninggalkan Bantaeng karena terangkat sebagai pegawai penerangan agama di Makassar. Tanpa ada penugasan, Djamaluddin bertindak sebagai kepala sekolah dan memimpin Muallimin sesuai dengan kemampuannya. Muallimin pun meningkat setapak demi setapak.

Hingga pada tahun 1954, Djamaluddin menikah dengan St. Chamsiah, gadis teman sekolah dan rekan gurunya di Muallimin Muhammadiyah Bantaeng. Ia dikaruniai 10 orang anak yaitu St. Djalaliah, St. Shaliati, Abd. Hadi, Sitti Muthiah, Ashabul Kahfi, Samhi Muawan, Siti Munira (meninggal ketika masih umur 3 bulan), Siti Mujizatullah, Siti Mutmainnah, dan Siti Afievah.

Pada tahun 1985, istri tercintanya meninggal dunia. Pada tahun 1990 dengan anjuran semua anaknya dan dengan pilihan mereka semua, ia menikah dengan Siti Rabihah Binti Muhammad Siddik, sepupunya sendiri. Mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu Ahmad Harakam dan Muktashim Billah.

Semua anak Djamaluddin Amien dipersiapkan jadi pemimpin. Untuk tu, mereka disekolahkan di Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah Yokyakarta. Kecuali Ahmad Harakam dan Muktashim Billah, mereka disekolahkan di SMP Unismuh Makassar. Semuanya menjadi aktivis Muhammadiyah, Aisyiyah, dan Hisbul Wathan. Ashabul Kahfi sempat menjadi Sekertaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Samhi Muawan kini menjadi Wakil Rektor III Unismuh Makassar, dan Abd. Hadi sempat menjadi sebagai Ketua Jurusan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ketiga putra Djamaluddin Amien ini juga menjadi aktivis Partai Amanah Nasional. Sementara, Ahmad Harakan selepas kuliah dari Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, kini menjadi dosen di Unismuh Makassar, dan adiknya hingga kini masih sementara kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir.

Tahun 1962, Djamaluddin pindah mengajar ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun di Makassar atas permintaan kepala sekolah, Djamaris dan wakilnya Ustaz Muhammad Gazali. Djamaluddin memenuhi permintaan itu dengan pertimbangan bahwa ia dapat juga belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar.

Walaupun Djamaluddin telah menyelesaikan semua mata kuliah di tingkat doktoral, ia tidak dapat menyelesaikan studi, karena skripsi yang tidak sempat diselesaikan. Dengan pertimbangan bahwa ia hanya mencari ilmu, tidak mencari titel, maka sampai ia wafat, dia tidak mengantongi ijazah sarjana lengkap.

Begitu ia pindah ke Makassar, ia menggabungkan diri pada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Makassar yang ketika itu diketahui oleh K.H. Abdul Djabbar Ashiry. Tahun 1970, Djamaluddin menjadi Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pada Musyawarah Wilayah Muhammadiyah tahun 1985 di Palopo, ia terpilih menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Sebelum terpilih menjadi ketua, Djamaluddin ditugasi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar atas persetujuan Senat Universitas Muhammadiyah Makassar yang ketika itu diketahui oleh Drs. Lantana Fakhri. Ketika itulah, terjadi konflik berat antara Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang diketuai oleh K.H. Sanusi Maggu.

Dengan pertolongan Allah dan dengan bantuan serta kerjasama antara kedua pihak yang bertikai, Djamaluddin dapat menciptakan damai di antara keduanya dan dengan kerjasama dalam suasana ukhuwah Islamiyah, Universitas Muhammadiyah Makassar dapat maju sedikit demi sedikit dan pindah dari kampus lama yang terletak di Jalan Ranggong ke kampus baru di Jalan Tala' Salapang. Suatu hal yang patut disyukuri, alhamdulillah.

Sebelum di-SK-kan sebagai ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan periode 1985—1990, ia lebih dahulu dipanggil oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diminta memilih salah satu diantara

dua jabatan tersebut. Djamaluddin pun memilih menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Walau demikian, ia tetap ditugasi selama tiga bulan sebagai rektor untuk menyelesaikan beberapa masalah dan mempersiapkan rektor baru. Namun, setiap Djamaluddin merencanakan penggantian dirinya sebagai rektor, Pimpinan Pusat Muhammadiyah selalu menjawab “jalan saja dulu”. Demikian selanjutnya, hingga dalam kenyataannya, Djamaluddin merangkap dua jabatan itu sampai tiga periode yaitu 1985—2000. Ia harus mengakhiri kepemimpinannya, karena adanya peraturan di Muhammadiyah bahwa ketua hanya diperbolehkan dua periode berturut-turut. Selanjutnya, dia diangkat oleh P.P Muhammadiyah menjadi ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Unismuh Makassar.

Hal lain yang ada baiknya juga ditulis bahwa pada Muswil Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan yang pertama ia terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulawesi Selatan periode 2000—2005. Setelah terpilih pengurus PAN Sul-Sel yang baru, ia pun berhenti dari semua aktivitas politik.

Kiai Djamaluddin Amien meninggal dunia pada tanggal 16 November 2014 dan dimakamkan di kampung halamannya, di Beloparang, Bantaeng. Sebelum dimakamkan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melepas jenazah Djamaluddin Amien di Masjid Kampus Unismuh, Jl Sultan Alauddin, Makassar, tempat ia pernah menjadi rektor dan ketua BPH.

Kiprah dan Dinamika Kepemimpinan

Di masa kepemimpinan Djamaluddin Amien sebagai Ketua PWM Sulsel, khususnya pada periode pertama kepemimpinannya, ia banyak mendorong untuk memelihara kesadaran dan kegairahan serta kemantapan bersyarikat, menegakkan amanah dan keikhlasan bermuhammadiyah. Peningkatan kualitas pimpinan dan anggota senantiasa menjadi perhatian PWM Sulsel dan inti program saat itu.

Bagi Djamaluddin, maju mundurnya perkembangan dan jalannya persyarikatan Muhammadiyah, termasuk amal usaha atau proyek, sangat ditentukan oleh faktor kualitas pimpinan dan anggota. Meski harus diakui, pengaruh perkembangan situasi global di tanah air dan kondisi Sulawesi Selatan, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika persyarikatan pun turut berpengaruh.

Selain itu, peningkatan kualitas pimpinan anggota juga sangat diperlukan sebagai upaya mengantisipasi perkembangan eksternal dan internal berupa permasalahan-permasalahan pokok yang berkembang menjadi tantangan gerak persyarikatan. Memang, pada saat itu, beragam persoalan muncul ke permukaan. Di antara persoalan-persoalan itu ialah semakin berkembangnya kelompok organisasi atau aliran-aliran baru, khususnya di bidang keagamaan yang langsung memengaruhi kehidupan kerohanian atau paham agama warga Muhammadiyah. Bahkan, hal ini menyebabkan adanya tokoh anggota pimpinan yang menyebarkan

ke aliran tertentu meninggalkan Muhammadiyah dan bahkan memusuhinya.

Masyarakat juga semakin cenderung memasuki organisasi profesional yang memungkinkan untuk dapat melakukan mobilitas vertikal dalam persaingan memasuki supra struktur sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini membuat Muhammadiyah meninjau kebijakan perangkapan jabatan pimpinan persyarikatan dengan organisasi lain. Muhammadiyah pun mempertegas lagi persyaratan dan ketentuan yang mengatur pelaksanaannya.

Puncaknya, ketegasan itu perlu dan harus dilakukan. Wujudnya, antara lain, terjadinya berbagai macam konflik internal, terutama di berbagai amal usaha yang merusak cita dan citra Muhammadiyah. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak jelasnya batas-batas kewenangan antar lembaga, terutama yang terkait dengan amal usaha. Masalah-masalah yang timbul, antara lain, penyusunan komposisi dan personalia pimpinan yang sejak semula terjadi kesenjangan, sebab pembagian kerja beberapa personil terpilih tidak terlaksana sebagaimana semestinya. Kemudian, kamelut Unismuh yang pada periode sebelumnya belum tuntas menjadi beban yang cukup berat, sehingga PP Muhammadiyah terpaksa mengangkat Djamaluddin Amien sebagai Ketua PWM Sulsel merangkap sebagai Rektor Unismuh Makassar, sehingga jadilah Djamaluddin Amien sebagai Ketua Muhammadiyah pertama yang sekaligus menjadi rektor di perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM).

Sementara itu, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam di Gombara yang sejak bertahun-tahun sebelumnya juga sudah sering menimbulkan kasus, akhirnya mencapai klimaks. Pembangkangan terhadap ketentuan-ketentuan persyarikatan yang berlaku masih terjadi. Padahal, baru beberapa saat saja musywil ke 33 selesai. Salah satu permasalahannya adalah keterlibatan pimpinan pesantren tersebut kepada “Gerakan *Jamaah Tabligh*”.

Atas hal itulah, kemudian PWM di bawah kepemimpinan Djamaluddin Amien memberikan ketegasan yang berujung pada pemberhentian kepada pimpinan pesantren, dalam hal ini K.H. Djabbar Asyirie yang notabenenya juga merupakan penasihat PWM Sulsel pada waktu itu. Sebelum diberhentikan, PWM berusaha secara maksimal untuk melakukan pendekatan. Akan tetapi, titik temu tidak juga ditemui. Hingga akhirnya, PWM mengambil langkah dengan meminta pendapat dan pertimbangan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Permintaan itupun disetujui oleh PP Muhammadiyah dengan pertimbangan secara seksama, menegakkan disiplin, cita dan citra persyarikatan, hingga diterbitkanlah surat pemberhentian K.H. Djabbar Asyirie sebagai Penasihat PWM Sulsel Periode 1985–1990 yang juga menandai diberhentikannya sebagai pimpinan pondok. Surat pemberhentian itu ditandatangani langsung oleh ketua Djamaluddin Amien sebagai Ketua dan Zainuddin Sialla sebagai Sekretaris PWM Sulsel tertanggal 6 November 1989 atau 7 Rabiul Akhir 1410.

Persoalan di tingkat wilayah juga diikuti oleh persoalan di daerah, salah satunya adalah permasalahan persyarikatan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Luwu. Permasalahan ini bermula dari kasus Saudara Mansur, S.H., yang pada waktu itu sebagai Ketua Majelis Tablig PDM Luwu dan merupakan salah seorang guru Muhammadiyah. Mansur terbukti menganut dan mengembangkan paham yang mirip dengan paham Lingkar Sunnah. Buntut permasalahan ini adalah pengunduran diri H. M. Nawawi dari jabatannya selaku Ketua PDM Luwu periode 1985—1990.

Salah satu hal yang berkembang secara umum di lingkungan persyarikatan pada era kepemimpinan Djamaluddin Amien juga adalah adanya asumsi bahwa masyarakat lebih suka memasukkan anaknya di sekolah umum (SMTP, SMTA). Hal ini menyebabkan hampir semua madrasah Muhammadiyah diputuskan untuk memakai nama ganda, misalnya Mts.M/SMPM, MAM/SMAM. Hal ini, pada akhirnya, akan menghilangkan esensi dan eksistensi madrasah sebagai akibat kurang memahami surat keputusan bersama tiga menteri.

Membangun Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan

Di masa kepemimpinan Djamaluddin Amien, salah satu peristiwa penting yang patut dicatat juga adalah untuk pertama kalinya Sekretariat Pusat Dakwah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, di Jalan Perintis Kemerdekaan ditempati, setelah sebelumnya ber Kantor di Jalan Gunung Lompobattang Nomor 201.

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 38 Tamalanrea Makassar merupakan tanah wakaf seluas 1,8 Ha dari alm. Mr. H. Mustamin Dg. Matutu, S.H. yang menyerahkan kepada Muhammadiyah Sulsel untuk kepentingan umat dan pengembangan dakwah Islam. Penyerahan ini disertai catatan dari pewakaf bahwa tanah itu harus segera ada bangunannya. Setelah menerima tanah wakaf tersebut, dengan catatan yang diberikan pewakaf, Djamaluddin Amien bersama pimpinan Muhammadiyah yang lain segera memulai pembangunan gedung. Dalam pembangunan ini, Ia sendiri yang menjadi ketua pembangunan. Berkat usaha yang gigih, serta bantuan dari berbagai pihak, khususnya amal usaha Muhammadiyah sendiri, pembangunan pun dapat dimulai.

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh H. Mansyur Sultan pada tanggal 19 Jumadil Awal 1416 H atau 14 Oktober 1995 M. Gedung tersebut seluas 15 x 50 m berlantai tiga dengan model arsitektur rumah adat Minang Kabau Sumatera Barat. Model ini diambil karena pesan dari pewakafnya sebagai bentuk mengenang jasa para ulama dari Minang yang membawa ajaran Islam ke Sulawesi Selatan.

Pembangunan gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan berlangsung lebih dari 15 tahun. Memang terasa lama, tapi bagi pimpinan Muhammadiyah ada perasaan senang tersendiri, karena sumber dana untuk pembangunan gedung ini adalah

murni usaha-usaha yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan melalui panitia pembangunan.

**Drs. K.H. NASRUDDIN RAZAK (Ketua
Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 2000—2005)²**

Nasruddin Razak dilahirkan di Rappang, (sekarang berada dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang) Sulawesi Selatan, tanggal 6 Maret 1938. Ayahnya bernama Abdul Razak, seorang petani/pedagang (wafat tahun 1986). Ibu bernama Hj. Fatimah, seorang guru Aisyiah dan guru mengaji Al-Qur'an (wafat tahun 2005). Kakeknya (ayah dari ibu) bernama K.H. Ibrahim, seorang alim ulama yang lama bermukim dan belajar di Mekkah. Dua mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yakni K.H. Abdul Djabbar Ashiry dan K.H. Muhammad Sanusi Maggu adalah mantan santrinya. Pada kakek K.H. Ibrahim itulah Nasruddin kecil mulai mengaji, belajar dasar-dasar Islam dan bahasa Arab. Karena kharisma K.H. Ibrahimlah sehingga Persyarikatan Muhammadiyah dan Madrasah Muhammadiyah dapat berkembang di Sidrap. Untuk penghormatan baginya, di Kota Rappang, Pemerintah Daerah Sidrap mengabadikan namanya pada sebuah jalan, yakni Jalan K.H. Ibrahim.

2 Bagian ini diambil dari Otobiografi yang ditulis sendiri oleh KH. Nasruddin Razak, diedit hanya untuk penyesuaian Bahasa dengan biografi lainnya.



Drs. K.H. NASRUDDIN RAZAK
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, 2000—2005

Nasruddin Razak memulai pendidikannya di tempat kelahirannya (Rappang), di Sekolah Rakyat Negeri (SR) 6 Tahun, waktu pagi dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Tahun waktu sore hari, tamat tahun 1952. Selama itu ia aktif di kepanduan H.W. (Hizbul Wathan).

Pendidikannya kemudian dilanjutkan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah (5 tahun). Selanjutnya mengikuti ujian Negara pada Sekolah Guru Bantu Negeri (SGB) di Pangkajene Sidrap dan memperoleh ijazah SGB Negeri tahun 1957.

Pada tahun 1957 itu ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Muallimin Ulya Muhammadiyah 3 tahun, di kampus perguruan Muhammadiyah, jalan Muhammadiyah Makassar. Di Muallimin Ulya inilah ia menerima ilmu terutama dari guru-guru yang menjadi idolanya : Ustadz S. Madjidi, K.H. Makmur Ali, K.H. Abd. Malik Ibrahim, M. Noor DP, dan H.M. Halim Yahya.

Dua tahun terakhir di Muallimin Ulya, dia terpilih menjadi ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Dia mengambil ujian persamaan Pendidikan Guru Agama Atas Negeri (PGAA) dan amat mujur karena menjadi juara I, tamat tahun 1960.

Pada tahun 1960, dia melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta. Pada seleksi ujian masuk kedua, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) “Sunan Kalijaga,” ia cukup beruntung karena dari 200 peserta, ia termasuk salah seorang dari 12 orang peserta yang dinyatakan lulus. Ia memilih Fakultas Ushuluddin dan lulus Bakaloriat dalam Ushuluddin tahun 1963. Selama kuliah di Yogya-

karta, Nasruddin adalah seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bahkan ia pernah menjabat sebagai Ketua HMI Cabang Yogyakarta. Pada masa inilah, ia banyak berinteraksi dengan Nurcholish Majid atau akrab disapa Cak Nur (Mantan Ketua Umum PB HMI). Bahkan, setiap berkunjung ke Yogya, Cak Nur sering menginap di kamar kos Nasruddin. Cak Nur senang berkunjung kesana, karena Nasruddin memiliki koleksi buku yang cukup banyak. Setiap datang, Cak Nur sering begadang membaca buku-buku tersebut.

Pada tahun 1966, ia menyelesaikan studi pada Doktoral Lengkap Fakultas Ushuluddin di Jurusan Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai seorang yang mendapat biaya ikatan dinas dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ia segera ditempatkan di Universitas Diponegoro (UNDIP) di Semarang sebagai Dosen Pendidikan Agama Islam. Ia mengajar di UNDIP dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1976. Selama di Semarang ia diamanati menjadi Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Jawa Tengah.

Kemudian, ia pindah ke Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar mulai tahun 1976-2003, tahun pensiun sebagai PNS. Di UNHAS juga selalu mendapat jabatan struktural, berturut-turut : Sekretaris Lembaga Studium Generale (1979-1982), Ketua Bagian Studium Generale FIISBUD (1982-1986), Ketua Jurusan MKDU (1990-1996), Kepala UPT MKU (1998-2003) dan Anggota Senat Universitas sampai pensiun PNS dengan pangkat Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) tahun 2003.

Sebagai Akademisi, ia aktif menjadi kolumnis di berbagai media cetak, melakukan berbagai penelitian ilmiah dan menulis buku-buku. Berbagai karya tulisnya : Islamologi (Diktat th. 1969-1971), Dienul Islam, sudah dicetak ulang 20 kali, Ibadah Shalat Menurut Sunnah Rasul, sudah 10-an kali cetak ulang, kedua-nya diterbitkan PT. Alma'arif Bandung, Ibadah Puasa (PT. Alma'arif Bandung), Metodologi Dakwah (PT. Toha Putra Semarang), Pemikiran Politik Islam (Diktat th. 1985-2005). Dan lebih 10 judul Brosur dari berbagai judul diterbitkan oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahun 1991, ia mendapat tugas dari Universitas Hasanuddin melakukan studi tentang Sistem Pendidikan Tinggi pada 6 Universiti di Malaysia. Tahu 1997, mendapat penghargaan Satyalencana Kar-ya Satya 30 Tahun dari Pemerintah. Ia telah tiga kali menunaikan ibadqah haji sambil mela-kukan tugas selaku Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIH), tahun: 1989, 1993 dan tahun 2003.

Di Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, ia adalah salah seorang Ketua dari 7 orang Ketua (2000-2005). Selain itu, ia adalah Wakil Ketua Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan (2001-2005).

Di Persyarikatan Muhammadiyah, di tingkat Wilayah, berturut-turut: Ketua Majelis Tabligh selama 2 periode(1977-1985); Ketua Majelis Pendidikan dan Kebudayaan satu periode (1985-1990); Wakil Ketua Pimpinan Wilayah selama dua periode (1990-2000). Ia kemudian menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muaham-

madiyah Sulawesi Selatan periode 2000-2005.

Sejak pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil, ia menjadi Dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ia juga menjadi Dosen Luar Biasa di Akademi Perawat (AKPER) Muhammadiyah Makassar dan di UNHAS sendiri. Di STISIP Muhammadiyah Sidrap, ia adalah dosen Mata Kuliah Pemikiran Politik Islam.

Menurut Nasruddin Razak, guru, dunia pendidikan, dunia tabligh adalah habitatnya. Selama tahun 1981-2001, dua kali sebulan mengisi ceramah subuh di RRI Nusantara IV Ujung Pandang. Hampir setiap Jum'at, ia menjadi khatib di berbagai masjid. Di Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, ia terjadwal pada setiap Selasa Magrib-Isya memberi pengajian rutin.

Melalui kerjasama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Pemerintah Inggris, ia terpilih bersama 10 ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bengkulu, Maluku Utara, Kaltim, NTB, NTT, dan Sul-Sel), berkunjung di Britania Raya (Inggris). Tujuan kunjungan itu, untuk membangun silaturahmi dengan masyarakat Muslim, mempelajari kehidupan multi cultural, interfaith dan Sistem Pendidikan Studi Islam di 2 perguruan tinggi : The Centre for Study of Islam, University of Birmingham dan The Centre for Islamic Studies, Oxford University.

Adalah British Council yang berjasa memfasilitasi kerjasama ini, merupakan program berkelanjutan. Untuk membangun satu dunia yang damai yang dinamis, madani ditengah peradaban global.

Drs. K.H. BAHARUDDIN PAGIM (Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan Periode 2005-2010)

Kiai Haji Baharuddin Pagim lahir di Belawa, Wajo, 31 Agustus 1940. Ia mengenyam pendidikan formal pertama kali di SD Muhammadiyah Cabang Belawa selama 6 tahun, dan tamat pada tahun 1956. Setelah itu, ia hijrah ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan menengah di MTS Muallimin Cabang Makassar dari tahun 1956—1959, kemudian lanjut lagi di Muallimin Uliyah dan tamat pada tahun 1961. Setamat dari sekolah tersebut, Bahar tidak langsung melanjutkan kuliah, melainkan menunaikan pengabdianya sebagai alumni Muallimin dengan tugas mengajar di Muallimin Tante, Kabupaten Barru selama 3 tahun.

Sekembali dari tugas mengajar, tepatnya di tahun 1963, Baharuddin melanjutkan pendidikannya di Universitas Muslim Indonesia (UMI), integrasi IAIN Fakultas Tarbiyah. Sementara melanjutkan pendidikan, di tahun 1964, ia menikah dengan Siti Marhaban Ahmad. Dari pernikahan inilah, ia dikaruniai sebelas orang anak. Dua tahun setelah itu, gelar Sarjana Muda pun berhasil diraihinya, tepatnya pada tahun 1966. Selepas itu, ia kembali pada aktivitas mengajarnya di Muallimin, kemudian pindah ke Muallimat pada tahun 1971, sampai ia terangkat sebagai pegawai negeri di Departemen Agama Kota Makassar pada 1974. Melalui Depag, ia ditugaskan mengajar di Darul Arqam Gombara bersama tiga kader Muhammadiyah lainnya, yakni Salmiah Jabbar, Muchtar Waka, dan Muh Dahlan Yusuf.



Drs. K.H. BAHARUDDIN PAGIM
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan Periode 2005-2010

Di saat mengajar di Gombara itulah, sambil megajar, ia melanjutkan kembali kuliahnya di IAIN dan memperoleh gelar Doktorandus pada tahun 1977.

Di tahun 1977 juga, Bahar ditarik kembali ke Muallimat atas permintaan Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulsel untuk menjadi direktur. Hal ini karena direktur pada waktu itu, Musyawarah Musa, melanjutkan pendidikan ke Surabaya. Ia menjadi direktur di Muallimat selama dua periode, berakhir pada tahun 1984 karena di tahun tersebut, bersamaan ia diminta kembali ke Kantor Departemen Agama Makassar untuk selanjutnya dialihutugaskan ke Kanwil Agama Sulsel. Sementara, posisinya di Muallimat digantikan oleh Abdullah Renre.

Di Kanwil Depag, Bahar ditempatkan sebagai Kepala Seksi Lembaga Dakwah dan Penerangan Agama, kemudian sebagai Kepala Seksi Peringatan Hari Besar Umat Islam (PHBI) dan MTQ. Beberapa tahun di kanwil, permintaan untuk kembali ke Muallimat datang kembali untuk Baharuddin. Kali ini, permintaan datang langsung dari Direktur Muallimat waktu itu, Abdullah Renre, karena Abdullah Renre akan melanjutkan studi S2 di IAIN sehingga mengharuskannya meninggalkan Muallimat. Hal ini sebenarnya tidak disetujui oleh kanwil, akan tetapi karena permintaan dan dorongan kuat dari pihak Muallimat, maka akhirnya kanwil mengizinkan, dengan catatan, ia diharuskan membuat perjanjian dengan kanwil, Abdullah Renre, serta dirinya sendiri. Secara resmi, ia kembali untuk yang kedua kalinya sebagai direktur di Muallimat pada tahun 1994. Di masa itu pula, selain sebagai direktur, ia sekaligus

menduduki posisi sebagai Kepala Sekolah Aliyah Muallimat sampai pensiun di tahun 2000.

Selain itu, aktivitas lain yang ditekuni Bahar ialah menjadi Dosen Al-Islam Kemuhammadiyah di Unismuh dan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah, seperti STKIP Muhammadiyah Bone dan Sengkang sebagai dosen luar biasa. Aktivitas ini ia lakukan setelah ia meraih gelar sarjana di tahun 1977. Di kampus, selain mengajar, ia juga pernah diamanahkan sebagai Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi Unismuh selama dua periode, dari tahun 1994—1998.

Baharuddin diangkat sebagai dosen persyarikatan di Unismuh Makassar di tahun 1998, dua tahun sebelum dirinya pensiun sebagai pegawai negeri sipil. Setelah pensiun itulah, ia akhirnya total mengajar di Unismuh dan ditempatkan di Fakultas Agama Islam.

Tahun 2010, atas permintaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel dan atas persetujuan Badan Pembina Harian (BPH) Unismuh, Bahar diminta untuk menjadi Direktur di Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara periode 2010—2015.

Di Muhammadiyah, Baharuddin pertama kali menjadi pimpinan saat menjadi Ketua Ranting Marro Cabang Ujung Tanah pada tahun 1976—1981. Setelah itu, ia memimpin Cabang Muhammadiyah Ujung Tanah tahun 1981—1985. Selanjutnya, ia diamanahkan sebagai Ketua Majelis Tarjih PDM Kota Makassar tahun 1985--1990. Ia kemudian menjadi Ketua PDM Kota Makassar 1990--1995, Anggota Majelis Tarjih PWM Sulsel 1995—2000, dan Ketua Majelis Tarjih PWM 2000-2005.

Baharuddin Pagim terpilih menjadi Ketua PWM Sulsel periode 2005—2010 melalui Musywil ke 37 di Parepare. Saat ini, ia diamanahkan sebagai Wakil Ketua PWM Sulsel 2010—2015.

Aktivitasnya di luar Muhammadiyah sebagai Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulsel tahun 2010—2015, serta pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel sebagai salah satu Ketua Bidang pada tahun 2010—2015.

Sebagai alumni Muallimin, aktivitas mubalig adalah hal yang tentu tidak terlepas dari diri Baharuddin Pagim. Tugas mubalig baginya adalah identitas yang melekat dalam dirinya. Sejak masih belajar di Muallimin, ia memang telah banyak menjalani aktivitas tersebut. Dengan bekal sebagai lepasan Muallimin yang *mondok* selama enam tahun, ditambah ketekunannya untuk belajar pada para ulama, baik di dalam lingkungan Muallimin, maupun di luar, menjadikan Baharuddin Pagim matang dalam hal paham keagamaan.

Secara pemikiran, Baharuddin Pagim banyak terpengaruh oleh pemikiran keagamaan yang ia kaji dari K.H. Makmur Ali. Bahar belajar kepada Kiai Makmur tentang perjuangan Islam dan kepada K.H. Djabbar Asyirie ia belajar terkait ulama Zuhud. Hal ini membuat gambaran dari kedua tokoh tersebut sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya. Selain itu, ia juga banyak belajar dari K.H. Bilalu melalui pengajian *Dur-ratumasihin* atau mutiara-mutiara nasihat, serta K.H. Mustari melalui kajian *Tafsir Jalalain*.

Dari banyak belajar kepada ulama-ulama itu, bekal paham agama Baharuddin semakin matang, sehingga dari hal itu pula peran mubalighnya semakin mantap. Hal ini akhirnya membuat ia mulai banyak mengisi pengajian sebagai ulama yang sangat menjunjung tinggi pada kemurnian agama sesuai dengan Alquran dan Hadis.

Dalam setiap pengajiannya, dia banyak menekankan bahwa Islam harus dipahami dari sumber aslinya, yaitu Alquran dan Sunah. Menurut Kiai Bahar, fanatik itu hanya kepada Alquran dan Hadis, dan menolak untuk fanatik terhadap satu ulama saja, termasuk itu ulama Muhammadiyah sekalipun. “Dulu pernah suatu waktu, saat Dr. S. Madjidi banyak berpengaruh terhadap pemikiran orang-orang Muhammadiyah di Sulsel. Saya merasa, hal itu mesti dikoreksi. Bagaimanapun, kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap beliau.” (dalam Wawancara, Jumat, 3/11/2015).

Selain itu, ia juga banyak berpesan untuk belajar agama kepada semua ulama tidak dibeda-bedakan. Intinya, berprinsip pada Quran dan Hadis, tidak berdasar pada pendapat pribadi. Ia menganut *Ijma jama’i*, bukan pendapat pribadi. Hal lain dari Baharuddin, sekalipun terkadang menemukan perbedaan bersama teman-temannya di Muhammadiyah, akan tetapi, selalu disikapinya dengan bijak. Menurutnya, sikap ini adalah keyakinan dan prinsip setiap orang.

Sosok Bersahaja yang Amanah

Baharuddin dikenal sebagai pimpinan yang sangat menjunjung tinggi amanah. Usia bahkan tidak menjadi halangan baginya untuk tetap beraktivitas di lingkungan persyarikatan. Di saat dalam kondisi fisik yang semakin menurun, ia tetap aktif menghadiri setiap acara-acara, baik sebagai peserta, mau pun sebagai penceramah. Dalam menjalankan kesibukannya, Baharuddin kerap hanya ditemani motor tua. Setelah tak dapat lagi mengendarai kendaraan sendiri, ia difasilitasi oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel sebuah mobil Toyota Kijang beserta supir untuk menunjang aktivitas-aktivitasnya.

Kebersahajaan inilah yang membuat ia disukai banyak orang, baik rekan-rekannya sesama warga Persyarikatan Muhammadiyah, maupun orang-orang yang mengenalnya. Di Masjid Hisbul Wathan dekat rumahnya, Baharuddin juga merupakan Ketua pengurus masjid. Di lingkungan tempat tinggalnya, Baharuddin juga dikenal sebagai orang yang ramah. Warga sekitar rumahnya mengaku tidak pernah melihat Ustaz Bahar terlibat konflik dengan tetangga sekitar.

Baharuddin mengaku menempati rumah di suatu gang sempit, di Jalan Satando, sejak tahun 1959. Rumah dengan luas 8x5 meter persegi. Di rumah inilah, Baharuddin bersama istrinya, Hj Sitti Marhaba membesarkan sepuluh anak-anaknya. Ia pernah ingin pindah dari rumah itu, tapi dilarang oleh banyak warga. Mereka meminta Baharuddin untuk tetap tinggal di sana. Ia bagi warga setempat dianggap sebagai teladan.

Kiprah Kepemimpinan di Muhammadiyah

Baharuddin Pagim ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan masa jabatan 2005--2010 melalui Musyawarah Wilayah ke-37 di Kota Parepare pada tanggal 10--12 Syawal 1426 H / 12--14 November 2010 M. Dalam memimpin, Baharuddin adalah tipikal pemimpin yang sangat mengedepankan model kepemimpinan kolektif kolegial. Ia pun sering mengaku tidak terlalu banyak berpikir. Muhammadiyah Sulsel di bawah kepemimpinannya hanya mengontrol kinerja dua belas unsur pimpinan lainnya. Hal ini tentu saja menjadi dorongan bagi pimpinan yang lain untuk memaksimalkan potensi dalam berkontribusi terhadap kepemimpinan masa itu.

Kepemimpinan Baharuddin Pagim berjalan normal dan dinamis. Hal itu ditunjang dengan personalia Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang diisi oleh kader-kader terbaik Muhammadiyah masa itu. Para personalia ini adalah pimpinan yang juga memiliki posisi dan jabatan di birokrasi pemerintahan maupun di kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal ini diakui Baharuddin menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya. Keterbatasan waktu yang dimiliki untuk mengurus organisasi menjadi hambatan.

Akan tetapi, dengan kondisi tersebut, tidak berarti ia juga tidak berkinerja. Secara teknis, ia mungkin tidaklah terlalu menonjolkan diri. Akan tetapi, di periode ini peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam sangat dirasakan aktivitasnya dalam

memberikan tawaran dan solusi-solusi konkrit terhadap kondisi sosial masyarakat dan kehidupan beragama, khususnya di Sulawesi Selatan.

Proaktif Kunjungan “Ke Bawah”

Keberadaan para pengurus Muhammadiyah di tingkat daerah dan cabang, tidak boleh mengalami kemandekan. Hal inilah yang adalah yang juga menjadi perhatian besar di kepemimpinan Baharuddin Pagim. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di masa itu berupaya mengadakan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Para pimpinan daerah dan cabang tentu menyambut positif kunjungan seperti ini. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan secara teratur dianggap menjadi motivasi kepada pimpinan cabang dan pimpinan daerah dalam mengemban amanah persyarikatan.

Dalam setiap kunjungan ke daerah, ia selalu mendapat sambutan positif dan antusiasme dari pimpinan dan warga Muhammadiyah. Kunjungan PWM biasanya dirangkaikan dengan satu rangkaian kegiatan yang menghadirkan audiens dari kalangan warga Muhammadiyah, di samping ada pula pertemuan khusus dengan pimpinan Muhammadiyah setempat. Mereka mengemukakan kondisi yang dialami dan berdiskusi guna mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.

Mendirikan Sekolah Kader Ulama dan Mubaligh

Kesadaran bahwa seiring dengan perkembangan zaman, pimpinan persyarikatan di berbagai level kepe-

mimpinan sudah mulai merasakan adanya krisis kader ulama dan mubalig. Di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), keberadaan kader mubalig yang sungguh-sungguh mengasah dirinya sebagai calon ulama atau mubalig dianggap sudah langka ditemukan. Sistem pengaderan yang dirancang AMM saat itu cenderung memperkuat indikasi yang dimaksud. Sementara, lembaga perguruan Muhammadiyah yang seharusnya juga sebagai lembaga pengaderan calon-calon ulama dan mubalig Muhammadiyah pun tidak lagi berbuat maksimal untuk mengantisipasi masalah ini.

Di beberapa amal usaha Muhammadiyah, seperti masjid dan perguruan, kader mubalig yang memiliki pengetahuan yang kuat terhadap paham agama yang dipedomani Muhammadiyah sudah mulai sulit ditemukan. Justru, sekarang banyak nonkader yang mendominasi pengelolaan amal usaha masjid dan perguruan tersebut. Bagi PWM, jika hal itu tidak diantisipasi, maka cepat atau lambat bisa menyebabkan terputusnya hubungan antara persyarikatan dengan amal usaha.

Untuk mengantisipasi kelangkaan kader ulama dan mubalig Muhammadiyah ini, PWM di masa kepemimpinan Baharuddin Pagim terus berupaya dengan berbagai cara. Cara pertama, meningkatkan pembinaan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Makassar dan pesantren lainnya yang ada di daerah-daerah. Kedua, membuka Program Pendidikan Ulama Muhammadiyah bekerjasama dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Ketiga, mengirim kader-kader Muhammadiyah dari

berbagai daerah untuk mengikuti Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta dan Pondok Hajjah Nurriyah Sabron Universitas Muhammadiyah Surakarta Jawa Tengah.

Belakangan, upaya tersebut menampakkan hasil, walaupun masih terbatas dan belum begitu terasa. Meskipun kecenderungan kader dan minat warga Muhammadiyah menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga ini sangat minim.

Pemberdayaan Amal Usaha

Salah satu kendala yang selalu mengiringi kepemimpinan Muhammadiyah sebelum-sebelumnya, menurut Kiai Bahar adalah persoalan biaya. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di masanya adalah berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah mulai saat itu dibuatkan regulasi untuk secara rutin menyeter kewajiban dua setengah persen dari total anggaran pendapatannya untuk membiaya kegiatan organisasi. Amal usaha yang dimaksud adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Hal itu sesuai dengan slogan “*Amal Usah Maju bersama Persyarikatan*”.

Pemekaran PWM Sulawesi Barat

Pada periode kepemimpinan Baharuddin Pagim ini pula, seiring dengan pemekaran Provinsi Sulawesi

si Selatan dengan berdirinya Provinsi Sulawesi Barat, maka disusul pula dengan harapan warga Muhammadiyah yang ada di provinsi tersebut untuk berdiri sebagai satu pimpinan wilayah tersendiri. Musyawarah Wilayah Muhammadiyah ke-37 merekomendasikan hal tersebut dan akhirnya disetujui pendirian Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat. Proses pembentukan akhirnya tuntas dengan lahirnya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 114/KEP/I.o/B/2006, Tanggal 22 Rajab 1427 H / 16 Agustus 2006 M, tentang Pengesahan Berdirinya Muhammadiyah Sulawesi Barat yang berkedudukan di Polewali Mandar. Juga telah terbit Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 115/KEP/I.o/D/2006 Tanggal 22 Rajab 1427 H / 16 Agustus 2006 M, tentang Penetapan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sementara Provinsi Sulawesi Barat.

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2007, dalam rangka peringatan Milad ke-97 Muhammadiyah tingkat Wilayah Sulsel-Sulbar, bertempat di Kota Polewali Kabupaten Polewali Mandar, dilaksanakan peresmian berdirinya Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Barat dan pelantikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat yang diketuai Drs. H. Muh. Yusuf Tuali. Pelantikan ini langsung dipimpin oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang selama ini diwilayahi oleh PWM Sulsel, juga diserahkan pembinaanya kepada PWM Sulawesi Barat. Ada tiga PDM

yang diserahkan pada PWM Sulselbar. Ketiga daerah tersebut adalah PDM Mamuju, PDM Majene, serta PDM Polewali Mandar dan Mamasa. Turut pula diserahkan seluruh aset dan amal usaha Muhammadiyah yang ada di seluruh Propinsi Sulawesi Barat.

Dr. H. MUHAMMAD ALWI UDDIN, M.Ag. (Ketua Muhammadiyah Sulsel 2010-2015)

Haji Muhammad Alwi Uddin, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel periode 2010-2015. Ia lahir di Maros, 8 Oktober 1950. Secara karakter, ada sejumlah sahabat Alwi yang menyebutnya memiliki karakter yang serupa dengan sahabat Umar bin Khattab, ra. Ketegasannya itulah yang membuat kebijakannya dianggap “keras”. Ada pula yang menyatakan sosok Alwi memiliki banyak kemiripan dengan KH. Fathul Muin Dg. Maggading.

Alwi Uddin merupakan anak dari Ayah yang bernama Uddin, dan Ibu Hj. Hana. Alwi menikah dengan St. Wardanah ZAM, puteri dari K. H. Zaenal Abidin Maffy. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai tujuh orang anak. Alwi memberi inisial keluarganya MAWAR ISLAMIS, yang merupakan singkatan dari nama-nama: Muhammad Alwi, Wardanah (Istri), Imaduddin Alwi (anak pertama), Sulthanillah Alwi (anak kedua), Lisanuddin Alwi (anak ketiga), Amilah Ma’rifah Alwi (anak keempat), Musbirah Alwi (anak kelima), Izzul Islam Alwi (anak keenam), dan Syahidah Amini Alwi (anak ketujuh).



Dr. H. MUHAMMAD ALWI UDDIN, M.Ag.
Ketua Muhammadiyah Sulsel 2010-2015

Sejak tahun 1960-an ia telah menekuni Islam melalui Sekolah Arab/Ngaji (sore). Kemudian ia menempuh pendidikan formal melalui Sekolah Rakyat Negeri (6 tahun), selesai pada tahun 1963. Takpuas dengan pendidikan di tingkat SR, ia pun kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Mu'allimin I Muhammadiyah selama 4 tahun, dan selesai tahun 1967. Pendidikan selanjutnya diselesaikannya di Madrasah Mu'allimin Ulya Muhammadiyah selama 2 tahun, hingga tahun 1969.

Tekadnya melanjutkan pendidikan tak pernah berhenti. Ia melanjutkan kuliah pada Fakultas Ushuluddin Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar. Gelar B.A. (Sarjana Muda) direngkuhnya tahun 1974. Lalu ia melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar, dan memperoleh gelar sarjana (Drs.) pada tahun 1982.

Semangat menuntut ilmu menghantarnya menyeberang pulau, dengan menempuh pendidikan S2, di Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Master Agama (M.Ag.) berhasil diraihinya tahun 1997. Namun, gelar magister tak membuatnya berpuas diri. Meski telah cukup 'berumur', ia tak berhenti belajar. Meski tertatih, sebab harus berbagi waktu mengurus Muhammadiyah, ia akhirnya mendapatkan gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2013.

Profesi pendidik adalah bagian terbesar dari perjalanan hidup Alwi Uddin. Ia menekuni profesi Guru Agama Islam Departemen Agama, sejak tahun 1967 hingga 1998. Di Universitas Muhammadiyah Makassar,

ia mulai berkarir sebagai dosen. Pertama kali, ia menjabat sebagai Sekretaris Fakultas Ushuluddin Unismuh Makassar tahun 1986–1988, Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin Unismuh Makassar tahun 1988–1990, Dekan Fakultas Tarbiyah/Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar 1990–1996.

Selain di Unismuh, Alwi Uddin juga mengabdikan sebagai Dosen Luar Biasa IAIN Alauddin Makassar selama 16 tahun (1982–1998). Pengabdian yang cukup panjang tersebut membuat status PNS Alwi sebagai Guru Agama dialihkan sebagai Tenaga Administrasi Fakultas Adab IAIN Alauddin Makassar tahun 1998–1999. Lalu, ia pun mulai menjadi Tenaga Pengajar/Dosen Tetap Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, sejak tahun 1999 hingga sekarang. Pernah menjadi Anggota Senat Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar (2008–2012).

Di samping mengajar di Unismuh dan IAIN/UIN Alauddin, Alwi juga mengajar di sejumlah kampus. Ia adalah dosen luar biasa di Akademi Teknik dan Radiologi (ATRO) Muhammadiyah Makassar (1997–Sekarang), Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Muhammadiyah Makassar (1997–Sekarang). Ia juga menjadi dosen luar biasa di STKIP Muhammadiyah Bone (1991–Sekarang), dan di Akademi Analis Kesehatan (Anakes) Muhammadiyah Makassar (2015–Sekarang).

Selain sebagai seorang pendidik, Alwi Uddin juga adalah seorang aktivis sejak muda. Ia adalah Ketua pertama Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Cabang Camba (1964-1966), selanjutnya terlibat sebagai akti-

vis Pemuda Muhammadiyah dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) pada tahun 1966–1967. Selama bersekolah di Mu'allimin Ulya, ia juga menjadi Pengurus Ranting IPM. Di masa mahasiswa, dunia aktivis masih menarik minatnya. Ia melibatkan diri di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris IMM Korkom Unismuh (1970–1971). Jiwa kepemimpinan yang dimilikinya, membuatnya didaulat sebagai Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ushuluddin Unismuh Makassar (1972—1973), dan ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Mahasiswa (DEMA) Unismuh Makassar tahun 1973—1974.

Di luar kampus, Alwi muda juga merupakan Pimpinan Muhammadiyah bagian AMM Cabang Layang Parang Layang (1971–1974). Keberhasilannya memimpin AMM, membuatnya diamanahi sebagai Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Cabang Layang Parang Layang (1978–1985). Ia pernah pula menjadi Ketua Bidang Tabligh PCM Karunrung (1984–1985) dan Sekretaris PCM Karunrung (1985–1990).

Kiprahnya yang malang melintang sebagai da'i, membuatnya dilirik sebagai Sekretaris Majelis Tablig Muhammadiyah Sulsel (1974–1985). Di era orde baru inilah, Alwi dikenal sebagai seorang mubalig yang cukup vokal menyuarakan kritik terhadap penguasa. Khotbah-khotbahnya yang cukup keras, pernah dicurigai bermuatan subversif. Bahkan beberapa kali, ia sempat harus diinterogasi oleh di Markas KODIM kala itu.

Di usia yang cukup muda (35 tahun), ia telah terpilih sebagai Anggota Pimpinan Muhammadiyah Sulsel periode 1985—1990, dan diamanahi sebagai Wakil Sekretaris, pada periode pertama kepemimpinan K. H. Djamaluddin Amien tersebut. Perannya sebagai Wakil Sekretaris selama 5 tahun, membuatnya dipercayakan sebagai Sekretaris PWM Sulsel periode 1990—1995.

Selain aktif di PWM Sulsel, Alwi Uddin juga aktif di PDM Makassar. Ia pernah mendapatkan amanah sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) PDM Makassar (1995—2000), dan Ketua PDM Makassar tahun 2000—2005. Setelah menjabat sebagai Ketua PDM Makassar, ia kembali mendapatkan amanah sebagai Sekretaris PWM Sulsel (Periode 2005—2010) mendampingi K. H. Baharuddin Pagim sebagai Ketua PWM saat itu. Pada Musywil Muhammadiyah Sulsel ke-38, di Unismuh Makassar tahun 2010, ia didaulat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel tahun 2010—2015.

Selama menjadi aktivis Muhammadiyah, Alwi Uddin telah terlibat dalam permusyawaratan Muhammadiyah tingkat nasional, seperti Tanwir dan Mukhtar. Ia telah menjadi peninjau sejak tahun 1987, dalam Sidang Tanwir di Lhokseumawe - Daerah Istimewa Aceh, dan Tanwir 1997 di Semarang. Alwi kemudian menjadi Peserta Tanwir 2003 di Makassar, saat itu, ia terlibat dalam Komisi B yang membahas tentang Dakwah Kultural. Setelah itu, Alwi terlibat sebagai Anggota Tanwir dalam sejumlah Sidang di beberapa kota;

Yogyakarta (2007), Bandar Lampung (2009), Yogyakarta (2010), Bandung (2012), Samarinda (2013), dan Makassar (2015).

Selain keikutsertaan dalam Sidang Tanwir, partisipasi Alwi Uddin dalam forum Mukhtar juga sangat intensif. Pada Mukhtar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang, ia adalah panitia dan notulis sidang-sidang. Di Mukhtar ke-40, tahun 1978, di Surabaya, ia menjadi Ketua Sub Komisi D, yang membahas tentang aliran-aliran kepercayaan. Mukhtar ke-41 tahun 1985 di Surabaya/Solo, ia adalah Sekretaris Komisi III, yang membahas perubahan AD/ART/Azas Muhammadiyah. Pada Mukhtar inilah Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai azas organisasinya. Alwi Uddin juga terlibat sebagai Peninjau dalam Mukhtar ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta.

Pada Mukhtar ke-45 tahun 2005, di Malang, Alwi adalah Wakil Ketua Komisi A, yang mengulas tentang Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bidang Organisasi dan Umum. Lima tahun kemudian, Alwi Uddin didaulat sebagai Ketua Komisi A, di Mukhtar ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta. Demikian pula di Mukhtar Makassar tahun 2015, ia tetap duduk di Komisi A.

Pada Mukhtar ke 47 inilah, Alwi Uddin memiliki banyak peran. Sebagai Ketua PWM tuan rumah, ia harus bekerja keras memastikan pelaksanaan mukhtar berjalan sukses. Ia juga disibukkan sebagai anggota panitia pemilihan, yang mesti memverifikasi Calon PP Muhammadiyah dan mempersiapkan pelaksanaan prosesi pemilihan. Peran yang paling penting Alwi ada-

lah sebagai Calon Anggota PP Muhammadiyah periode 2015—2020. Saat itu, hampir semua kalangan memastikan bahwa ia akan lolos sebagai salah satu dari 13 orang Anggota PP Muhammadiyah terpilih. Prediksi tersebut tidak tanpa alasan. Alwi bukan sosok baru dalam pentas nasional Muhammadiyah. Ia telah cukup dikenal oleh semua wilayah. Belum lagi, perannya sebagai Ketua PWM tuan rumah muktamar. Alwi berhasil lolos sebagai 39 Calon Anggota PP Muhammadiyah yang dipilih dalam forum Tanwir. Namun, realitas forum Muktamar berkata lain, Alwi hanya menempati posisi 16 besar dengan jumlah 829 suara.

Meski Alwi Uddin lebih banyak menghibahkan waktunya sebagai aktivis Muhammadiyah, ia juga pernah terlibat sebagai pengurus di sejumlah organisasi lain. Pernah menjadi Pengurus Ranting Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) tahun 1969–1971, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Makassar (2002–2007), Penasihat FORMASI Kota Makassar (2002–sekarang). Alwi juga pernah tercatat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kota Makassar (2009–2013), dan Wakil Ketua Dewan Penasehat MUI Makassar (2007–2012). Sejak tahun 2002, ia turut aktif di Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulsel. Di organisasi tersebut, ia menjabat sebagai salah satu Ketua Tanfidziyah (2005–2010), dan Sekretaris Dewan Syariah (2010–2015).

Selain sebagai seorang aktivis, Alwi Uddin adalah seorang akademisi yang cukup produktif menorehkan pikirannya secara tertulis, dalam bentuk karya ilmiah,

jurnal, buku, makalah, dan artikel. Dalam risalah Sarjana Muda di Unismuh Makassar (1975), ia telah menulis karya ilmiah yang berjudul “Kebijaksanaan Dakwah Islamiyah di Tana Toraja”.

Skripsi Sarjananya di IAIN Alauddin (1982) mengangkat judul “Kependudukan dan Keluarga Berencana (Suatu Studi Perbandingan). Tesisnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, berjudul “Aluk Todolo di Tengah Pluralitas Agama dan Transformasi Teologis”. Penelitian Doktoralnya di UIN Alauddin Makassar (2013), berjudul “Tajdid Gerakan: Studi Kritis Gerakan Dakwah Muhammadiyah (Tahun 2005-2011)”. Alwi juga menulis tentang “Syekh Yusuf: Ulama Sufi dan Pahlawan”, di Jurnal Adabiyah Fakultas Adab IAIN Alauddin Edisi IX, 2005.

Alwi Uddin telah menulis sejumlah makalah antara lain; “Aspirasi dan Orientasi Pemikiran Keagamaan Masyarakat Kampus pada Fakultas Tarbiyah-Universitas Muslim Indonesia (Hasil Penelitian, 1981)”, “Pembinaan Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Makassar (1990)”, “Jamaluddin Al-Afghani Studi tentang Ide Pembaharuan dan Politikanya (1994)”, “Amsal dan Jidal dalam Al-Quran (1994)”, “Periwayatan Hadis dengan Lafaz dan Makna (1995)”, “Perkembangan Pemikiran Teologi Klasik (1995)”, “Kedudukan Ilmu Kalam dalam Struktur Pengetahuan Keislaman (1995)”, “Perpustakaan Islam Yogyakarta: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini (1995)”, “Syekh Yusuf Ulama Suci Pahlawan (1995)”, “Ibadah Puasa dan Kesehatan Mental: Suatu Tinjauan Psikolo-

gis (1996)”, “Mulla Shadra: Al Hikma al-Muta’aliyah: Pemikiran Metafisika Mulla Shadra (1996).”

Makalah lain yang ditulis Alwi, yaitu: “Al-Syaukani dan Metode Ijtihadnya (2005)”, “Studi Kritis Terhadap Nalar Islam: Kejabariahan dan Keadariahan Masa Kini (2005)”, “Pendidikan dan Islamisasi Sains (2005)”, “Pluralisme Agama dan Tantangannya (2005)”, “Problematika Dakwah (2007)”, “Psikologi Dakwah (2008)”.

Alwi Uddin juga telah menuangkan intelektualitasnya dalam sejumlah buku. Ia tercatat sebagai editor buku “*Pokok-pokok Bahasan Khotbah Jum’ah 1423 H*” tahun 2001. Ia juga menjadi penyunting sejumlah buku: “*Syariat Islam Solusi Masalah Umat: Tema-tema Dakwah Ramadhan 1423 H* (2002)”, “*Membina Persatuan Menuju Masyarakat Qur’ani: Tema-tema Dakwah Ramadhan 1424 H* (2003)”, “*Revitalisasi Nilai-nilai Islam: Tema Khutbah Jum’ah 1427 H* (2006)”.

Tidak hanya sebagai editor dan penyunting, Alwi juga menjadi penulis beberapa buku, yaitu; “*Aluk Todolo di Tengah Pluralitas Agama* (2004)”, “*Problematika Kependudukan dan Fiqh Lintas Agama tentang Keluarga Berencana* (2010)”, “*Merenda Nalar Islami: Studi Kritis Pemikiran Islam* (2010)”, “*Problematika Gerakan Dakwah Muhammadiyah di Sulsel* (2014)”.

Ia juga menulis untuk Majalah dan Surat Kabar. Artikel yang berjudul “Dinamisasi Pemikiran Keislaman Muhammadiyah”, ditorehkannya di Harian Fajar, 20 Juli 1996. Alwi pun menulis “Kriteria Pemimpin”, di Majalah Islam Serambi Madinah (2006). Di Majalah Khittah Muhammadiyah Sulsel, Alwi menulis beberapa

artikel; “Refleksi Seabad Pers Persyarikatan: 10 Catatan untuk Majalah Suara Muhammadiyah (2014)”, “Paham Agama Perspektif Muhammadiyah (2015)”, “Pentingnya Kesadaran Historis (2015)”.

Dinamika Kepemimpinan

Selama menjadi Ketua PWM, Alwi Uddin, menyadari bahwa tantangan yang dihadapi begitu kompleks. Oleh karena itu, salah satu langkah yang diambil dengan melakukan penguatan militansi pimpinan dan kader Muhammadiyah.

Menurut Alwi Uddin, militansi Muhammadiyah dimaknai sebagai ketangguhan dalam ber-Muhammadiyah yang dibangun di atas basis nilai-nilai dasar persyarikatan, seperti Mukadimah Anggaran Dasar, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Kepribadian, Khittah, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ciri-ciri militansi, lanjut Alwi, ditunjukkan dengan komitmen tinggi pada misi dan kepentingan Muhammadiyah, tangguh dalam menjalankan usaha-usaha Muhammadiyah, dan memiliki integritas tinggi pada cita-cita dan jati diri Muhammadiyah.

Penguatan militansi di era kepemimpinannya dijadikan prioritas dengan menjalankan sejumlah langkah sebagai berikut:

Pertama, Baitul Arqam. Baitul Arqam diarahkan untuk para Pimpinan Muhammadiyah dan pengelola amal usaha Muhammadiyah. Dari beberapa kali kegiatan yang digelar, masih ada beberapa pimpinan per-

syarikatan dan para pengelola amal usaha yang tidak memahami secara baik visi dan misi Muhammadiyah. Di samping itu, kebiasaan dan cara pengamalan ajaran agama, cenderung tidak menganut paham keagamaan yang dipegang Muhammadiyah. Contoh sederhana, masih ada pimpinan amal usaha yang berwudu berbeda dengan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

Kedua, kunjungan ke daerah. Selama kepemimpinannya, Alwi Uddin selalu menyempatkan waktu melakukan kunjungan daerah. Bahkan, ia sering menjadi “cadangan” bagi pimpinan lainnya. Jika telah ada Pimpinan yang ditunjuk untuk bertugas ke daerah, namun tiba-tiba berhalangan, Alwi tak pernah menolak didadak menggantikan pimpinan yang tiba-tiba berhalangan. “Ustaz Alwi, adalah Pimpinan yang selalu siap menerima penugasan ke daerah meskipun mendadak, bahkan malam sebelum acara sekalipun,” ungkap Umar Sadiq, Sekretaris Eksekutif PWM Sulsel.

Dengan kunjungan-kunjungan yang dilakukan secara teratur, tentunya dapat memberikan motivasi kepada pimpinan cabang dan pimpinan daerah dalam mengemban amanah persyarikatan. Kunjungan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan biasanya dirangkaikan dengan satu rangkaian kegiatan yang menghadirkan audiens dari kalangan warga Muhammadiyah, di samping ada pula pertemuan khusus dengan pimpinan Muhammadiyah setempat. Mereka mengemukakan kondisi yang dialami dan berdiskusi guna mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.

Ketiga, pembinaan organisasi otonom. Bagi Alwi Uddin, kader ortom harus dilihat sebagai produsen kader pelanjut dan penyempurna Muhammadiyah. Oleh karena itu, ortom harus benar-benar dibina dengan baik. Di tingkat wilayah, pembinaan kader dilakukan dengan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas persyarikatan, serta memberikan bantuan finansial dan sarana dalam mendukung program kerja yang mereka lakukan. Selama kepemimpinan Alwi, pembinaan ortom banyak diserahkan kepada Wakil Ketua, K. H. Iskandar Tompo, yang membidangi Majelis Pendidikan Kader (MPK) yang dipimpin Syamsuriadi P. Salenda.

Keempat, Menyiapkan Kader Ulama dan Mubalig. Dalam mengantisipasi kelangkaan kader ulama dan mubalig Muhammadiyah, PWM Sulsel dibawah kepemimpinan Alwi Uddin, memberi prioritas dengan penguatan pembinaan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, dan membuka Program Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kelima, pemberdayaan Amal Usaha. Untuk membiayai agenda dakwah dan program kerja persyarikatan, dana yang terbatas kadang kala menjadi kendala yang selalu muncul. Oleh karena itu, PWM Sulsel telah berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Slogan “Amal Usaha Maju bersama Persyarikatan” telah diaktualkan selama kepemimpinan Alwi. Sejumlah kegiatan PWM, seperti pengajian ramadan, syawalan, pelatihan/workshop, seminar sering ditempatkan di kampus-kampus PTM.

Gebrakan sebagai Ketua

Di periode kepemimpinannya, Sulsel kembali menjadi Tuan Rumah Muktamar untuk ketiga kalinya, setelah Muktamar tahun 1938 dan 1971. Muktamar ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. “Sejak awal Pak Jusuf Kalla telah menyatakan bahwa Mukhtar Muhammadiyah di Sulsel adalah harga mati bagi masyarakat Sulsel. Hal ini merupakan *siri’ napacce*, sehingga atas dasar itulah kita bertekad untuk bekerja semaksimal mungkin. Apa yang kita miliki baik itu tenaga, pikiran, semuanya kita kerahkan untuk kesuksesan muktamar,” jelasnya.

“Ini bukan kita yang menilai, tetapi penilaian itu berasal dari luar. Alhamdulillah, kalau kita dinilai sukses. Maka dari itu kami, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Gubernur dan Walikota, serta panitia seluruhnya. Insya Allah, Allah memberkati usaha dan kerja keras kita semua. Semoga ini bernilai ibadah di sisi Allah swt, karena ini *Jihad fjsabilillah*,” pungkasnya.

Selain itu, Alwi juga membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Nahdlatul Ulama. Malah ia pernah mengundang sejumlah tokoh NU untuk memberikan pengajian di Pusat Dakwah Muhammadiyah, seperti AGH. Sanusi Baco. Meski langkah ini mengundang kritik, namun menurut Alwi, inilah perwujudan itikad untuk membangun dialog intensif antar Ormas Islam. Kegiatan tersebut dimotori oleh Majelis Tabligh, yang

diketuai oleh Dahlan Lamabawa S.Ag., M.Ag. Majelis ini juga cukup intensif melakukan penguatan kapasitas Mubalig, melalui *Kuliyatul Mubalighin*.

Aktivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan terhadap petani dan nelayan, melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Bentuk pemberdayaan dilakukan dengan mengembangkan pertanian terpadu (*Integrated Farming*) di beberapa daerah. Selain itu, dilakukan pula penguatan Lembaga Penanggulangan Bencana, atau MDMC (Muhammadiyah *Disaster Management Center*). Selama kepemimpinan Alwi, telah dilatih 200 relawan MDMC Sulsel. Selain itu, LPB Sulsel juga melaksanakan Program Kesiapsiagaan Rumah Sakit dan Kesiapan Masyarakat untuk Kedaruratan Bencana (*Hospital Preparedness and Community Readdines for Emergency and Disaster*, disingkat HPCRED).

Alwi Uddin juga dianggap “news maker”, pernyataan-pernyataan Alwi kerap dikutip oleh sebagian besar media massa di Sulsel. Bahkan beberapa kali, pernyataannya menjadi *headline* di sejumlah media massa. Ia juga tanpa *tedeng aling-aling*, berani bersikap kritis terhadap pemerintah, khususnya keberpihakan terhadap pengembangan bidang keagamaan. Selain itu, ia cukup ramah dan selalu menyediakan waktu untuk wartawan. Di periode ini pula, Muhammadiyah Sulsel berhasil menerbitkan majalah yang telah direncanakan selama beberapa periode. Majalah tersebut diberi nama Majalah Khittah, dengan semboyan “Suara Islam Berkemajuan”. Penegasan nama tersebut untuk

meneguhkan komitmen Muhammadiyah Sulsel untuk terus bergerak dalam poros Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang disahkan pada Mukhtamar Muhammadiyah tahun 1971, di Ujung Pandang. Selain itu, sebagai bagian dari upaya berdakwah di dunia maya, turut diluncurkan portal dakwah www.khittah.co sebagai jawaban atas tantangan dakwah di era digital. Pada era kepemimpinan Alwi Uddin di Muhammadiyah Sulsel juga berhasil diterbitkan buku sejarah dan biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulsel. Penerbitan buku sejarah tersebut, merupakan impian yang belum terwujud pada periode-periode sebelumnya. Program-program tersebut dijalankan oleh Majelis Pustaka dan Informasi.

Majelis-majelis lainnya juga menunjukkan progresivitas, misalnya Majelis Pembina Kesehatan Umum, dengan kehadiran apotik dan klinik di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen yang bergiat meningkatkan kapasitas guru Muhammadiyah dan ditugaskan khusus menangani Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Majelis-majelis lainnya juga tak kalah giatnya.



PENUTUP

Kenyataan yang tak dapat diingkari bahwa nasionalisme sebagai titik tolak tegaknya kesadaran nasional di Sulawesi Selatan, pada awalnya diperkenalkan oleh organisasi politik, Syarekat Islam. Tetepi, karena keberadaan Syarekat Islam sangat terbatas, hanya di beberapa tempat tertentu saja dengan jumlah anggota yang sangat sedikit maka pengaruh kesadaran nasional yang ditimbulkannya pun sangatlah terbatas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa pelopor kesadaran nasional di Sulawesi Selatan yang sesungguhnya adalah Persyarikatan Muhammadiyah.

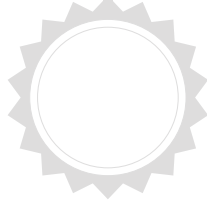
Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdullah, dalam kurun waktu lebih kurang sepuluh tahun sejak didiri-

kannya oleh Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro dan kawan-kawan di Makassar pada tahun 1926, organisasi sosial keagamaan yang berpusat di Yogyakarta itu telah tersebar luas di seluruh *onderafdeeling* Celebes Selatan. Dalam wadah organisasi itulah, para anggota dan simpatisan yang berasal dari Sulawesi Selatan berinteraksi dengan para anggota dan simpatisan yang berasal dari daerah lain, terutama melalui Kongres Muhammadiyah yang diselenggarakan di Makassar pada tahun 1932. Melalui interaksi itu, diruntuhkanlah “tembok-tembok kedaerahan” sedikit demi sedikit yang menjadi dinding pemisah dan penghalang bagi terciptanya kesatuan dan persatuan nasional. Di atas dasar nasionalisme yang dijiwai oleh perasaan senasib sepenanggungan itu, ditanamkanlah kesadaran akan pentingnya umat Islam melepaskan diri dari keterbelakangannya menuju ke kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Kemajuan mustahil diperoleh secara sempurna manakala umat Islam masih terikat dalam belenggu penjajahan Belanda, maka kesadaran akan pentingnya kemerdekaan pun harus ditumbuhkan.

Itulah sebabnya sehingga hampir semua pemimpin dan anggota Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan turut ambil bagian dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan pada sekitar tahun 1945-1949. Atas jasa dan keturutsertaan merekalah itulah yang kemudian mengantarkan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim itu ke alam kemerdekaan. Setelah Kemerdekaan para ketua dan para pemimpin Muhammadiyah lainnya juga tam-

pil ke depan sebagai pelopor dalam mengisi kemerdekaan melalui *amar ma'ruf nahi mungkar* berupa *da'wah bil lisan, da'wah bil qalam, dan da'wah bil hal*. Orang-orang yang pernah memimpin Muhammadiyah Sulsel memiliki latar belakang yang beragam, ada yang pedagang, ulama, politisi, sastrawan, guru, dosen, birokrat. Namun ada sejumlah titik simpul yang sama dari mereka, semuanya merupakan mubalig (dakwah lisan), sebagian besar mereka adalah penulis (dakwah tulisan), dan mereka adalah penebar keteladanan di tengah masyarakat (dakwah perbuatan).

Keteladanan para Ketua Muhammadiyah dari masa ke masa tersebut dapat dijadikan *ibrah* bagi para aktivis Muhammadiyah masa kini, maupun bagi masyarakat luas yang tertarik menapak jejak ketokohan mereka.



Daftar Pustaka

- Abdullah Taufik, 1983, “Pengantar” dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, V-XV, Jakarta: CV. Rajawali.
- , 1987, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Abidin, Andi Zainal, 1999, *Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Alfian, Ibrahim, 1992, “Tentang Metodologi Sejarah” dalam T. Ibrahim Alfian dkk (ed), *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*, 409-419, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Idwar, 2009, *H.M. Yunus Kadir Membangun Muhammadiyah di Tana Toraja*, Makassar: Pustaka Sawerigading.

- Arifin, 1987, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bosra, Mustari, 2008, *Tuan Guru, Anrong Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942*, Makassar: La Galigo Press.
- Bonneff, Marsel, 1983, "Islam di Jawa, Dilihat dari Kudus", dalam Marcel Bonneff (ed), *Citra Masyarakat Indonesia*, 227-247, Jakarta, Sinar Harapan,
- Brugmans, I.J. 1987, "Politik Pengajaran", dalam H. baudet dan I.J. Brumans (ed), *Politik Etis dan Repolusi kemerdekaan*, 176-194, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cense, A. A., 1972, *Beberapa Catatan Mengenai Penulisan Sejarah Makassar-Bugis*, terjemahan KITLV Belanda, Jakarta: Bharata.
- Darmawijaya, 2012, *Muhammadiyah di Sulawesi Selatan 1926-1942*, Tesis, Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- De Jong, Chr. G. F., 1996, *Ilalang Arenna...: Sejarah Zending Belanda di antara Umat Bugis dan Makassar Sulawesi Selatan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Dhofier, Zamakhsyari, 1984, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES.
- Dijk, Cees van, 19983, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Gonggong, Anhar, 1992, *Abdul Qahhar Mudzakkar, dari Patriot hingga Pemberontak*, Jakarta: Grasindo.

- Hadikusumo, Djarnawi, (tt), *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al-Afghani sampai KHA. Dahlan*, Yogyakarta, Persatuan.
- Hamid, Abu, 1983, "Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan," dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, 323-447, Jakarta: Rajawali.
- Hamka, 1974, 1982, *Ayahku*, Jakarta: Wijaya.
- Harum, Rahmatullah, 2006, *Eksistensi Muhammadiyah di Sinjai*, Sinjai: MTs. Muhammadiyah Sinjai.
- Harvey, Barbara Sillars, 1989, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: Grafiti.
- Loyd, Christopher, 1993, *The Structures of History*, Oxford: Blackwell.
- Mattulada, 1983, "Islam di Sulawesi Selatan," dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, 209-321, Jakarta: Rajawali.
- Mattulada dkk, 1977, *Pengaruh Agama dan Sistem Pendidikan Agama (Islam) dalam Rumah Tangga Orang Bugis Makassar di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Fakultas Sastra UNHAS.
- Nakamura, 1982, *Matahari Terbit di Balik Pohon Beringin*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press.
- Noer, Deliar, 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*, Jakarta: LP3ES.
- Noerduyn, J., 1964, *Sejarah Agama di Sulawesi Selatan*, dalam W. B. Sidjabat (ed) *Panggilan Kita*

di Indonesia Dewasa Ini, 86-97, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

-----, 1972, *Islamisasi Makassar*, Jakarta: Bhratara.

Paeni. Muchlis, 1985, *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan*, Kota Makassar 1900-1950, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Patunru, Abd Razak Daeng, 1993, *Sejarah Gowa*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Patunru dkk, 1995, *Sejarah Bone*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

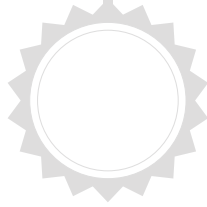
Pawiloy, Sarita, 1981, *Arus Revolusi di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: Dewan Harian Daerah Angkatan 45.

Pelras, Ch., 1983, "Sulawesi Selatan Sebelum Datangnya Islam Berdasarkan Kesaksian Bangsa Asing," dalam Marsel Bonnef dkk (ed), *Citra Masyarakat Indonesia*, 56-82, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Putuhena, M. Shaleh, 2003, "Haji Indonesia: Suatu Kajian Sejarah tentang Perjalanan dan Pengaruhnya pada Pertengahan Pertama Abad XX", Disertasi Doktor, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Rajab Wahab, 1999, *Lintasan dan Perkembangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan*, Makassar: IPPSDM-WIN.

- Steenbrink, Karel A, 1986, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES.
- Suminto, Akib, 1986, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES.
- Syamsiah dan Ernarningsih, 2007, *Djabbar Ashiry: Perintis Pondok Pesantren Darul Arqam*, dalam Muhammad Ruslan dan Waspada Santing (Editor), *Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Dakwah*, Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Sulsel.
- Toge, Abd. Rahim, 1988, *Sesudah Makassar Kemudian Sengkang (Satu Fakta Berdirinya Muhammadiyah Sengkang)*, Makassar: Majelis Pustaka PWM Sulsel.
- , 1989, *Muhammadiyah Organisasi Dakwah Pertama di Soppeng*, Makassar: Majelis Pustaka PWM Sulsel.



Profil Penulis

Mustari Bosra adalah Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar. Memperoleh gelar Doktor Ilmu Sejarah dari Universitas Indonesia. Menulis buku *“Tuan Guru, Anrong Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942”*, pada tahun 2008. Sejak muda telah terlibat sebagai aktivis Muhammadiyah. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel ini, juga mengemban amanah sebagai Sekretaris Badan Pembina Harian (BPH) Akademi-akademi Kesehatan Muhammadiyah Makassar.

Hadisaputra adalah Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PW Muhammadiyah Sulsel. Bersama sejumlah anak-anak muda Muhammadiyah lainnya, ia merintis penerbitan Majalah Khittah, yang didedikasikan sebagai corong Islam Berkemajuan. Magister Antropologi Unhas ini juga sering menuangkan gagasannya di se-

jumlah media cetak lokal di Makassar. Kesehariannya, ia banyak bergelut bersama Ibu-ibu 'Aisyiyah dalam advokasi penyakit Tuberkulosis di Sulawesi Selatan. Dapat dikunjungi di www.hadi-saputra.com, email: al-kemis.institute@gmail.com.

Kasri Riswadi adalah Wakil Sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi PWM Sulsel Periode 2013-2015. Alumni FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar ini bergelut sebagai aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ketua Umum Komisariat IMM FKIP Unismuh Makassar (2011-2012), Ketua Korkom IMM Unismuh (2013-2014), PC IMM Kota Makassar (2013-2014), dan Anggota Lembaga Media dan Komunikasi DPP IMM (2014-2016). Aktivitas lainnya sebagai penulis lepas, Redaktur di Majalah Khittah, dan kontributor di Majalah Kauman. Dapat dihubungi melalui email: kasri.riswadi@gmail.com

Zulfikar Hafid adalah Anggota Majelis Pustaka dan Informasi PW Muhammadiyah Sulsel. Hingga saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Makassar (UNM). Mulai bersentuhan dengan Muhammadiyah, sejak menjadi aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tingkat Komisariat hingga Cabang Makassar. Aktif dalam aktivitas literasi bersama Lembaga Transformasi Intelektual Mahasiswa (EI-Tiem) FBS UNM. Saat ini juga tercatat sebagai redaktur di Majalah Khittah. Email: zulfikarhafid.fikar@gmail.com.